LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN JEMBER

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH

KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Jember menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada DPRD serta masyarakat.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkap secara menyeluruh tentang capaian kinerja APBD serta informasi penting lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Jember akan tetap berupaya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta akan tetap berupaya melakukan peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember merupakan wujud pertanggungjawaban dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan.

Tujuan umum disusunnya laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan, dan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dengan:

- Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggujawaban Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah beserta perubahannya;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD beserta perubahannya;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember serta Peraturan Bupati Jember No. 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2014 ;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember;
25. Peraturan Bupati JemberNomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
26. Peraturan Daerah Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Jember Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Jember Nomor

57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

Memuat informasi tentang Ekonomi Mako, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan Pemerintah Daerah

Memuat informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan..

Memuat informasi tentang rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah diantaranya: rincian dan penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran, rincian dan penjelasan pos-pos laporan perubahan saldo anggaran lebih, rincian dan penjelasan pos-pos neraca, rincian dan penjelasan pos-pos laporan operasional, rincian dan penjelasan pos-pos laporan arus kas, rincian dan penjelasan pos-pos perubahan ekuitas, serta pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya.

BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang penjelasan tambahan atas infonnasi non keuangan serta hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

BAB VII Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dimaknai sebagai proses terjadinya kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riil atau pendapatan domestik riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil dari sektor sektor ekonomi.

Dalam upaya mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal disertai pemerataan hasil dan manfaat pembangunan, maka pemerintah daerah sebagai otoritas pembangunan dituntut untuk menerapkan kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan-kegiatan produktif para pelaku ekonomi, selain itu juga mampu menggunakan pendekatan tematik spasial berbasis data kewilayahan yang menyeluruh melingkupi kebutuhan fisik dan non-fisik serta berorientasi kepada output serta outcome dari setiap program dan kegiatan secara berkelanjutan. Peran pemerintah daerah dijalankan melalui salah satu instrumen kebijakan daerah dalam bentuk APBD, yang dapat dilihat sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun daerah. Salah satu komponen dalam APBD yaitu pengeluaran pemerintah (baik belanja rutin maupun pembangunan dan atau pemeliharaan dan belanja modal), dimana pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pembangunan (belanja modal dan pemeliharaan) merupakan pengeluaran pemerintah untuk pelaksanaan proyek-proyek yang terdiri dari sektor-sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi juga berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan ekonomi makro daerah yang menjadi landasan pengambilan kebijakan daerah mengacu pada beberapa indikator ekonomi yang menjadi target nasional yaitu: 1) Pertumbuhan Ekonomi; 2) Tingkat inflasi; 3) Tingkat kemiskinan; 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 5) Gini rasio; dan 6) Tingkat Pengangguran Terbuka. Melalui proyeksi ekonomi makro nasional dan provinsi dapat menjadi pertimbangan dalam memproyeksikan makro ekonomi daerah pada tahun berkenaan atau bahkan proyeksi ekonomi di masa mendatang.

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Jember dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Kemajuan ekonomi Kabupaten Jember dapat diketahui dengan menyandingkan data pertumbuhan ekonomi dengan data pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Kemajuan perekonomian Kabupaten Jember secara sederhana dapat dilihat melalui pertumbuhan PDRB-nya.

Sebagai wilayah agraris, Kabupaten Jember memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial bagi pengembangan perekonomian wilayah. Sesuai dengan potensi wilayah yang ada, perekonomian Kabupaten Jember masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah, meskipun terlihat adanya pergeseran ke sektor sekunder dan jasa. Pertanian sebagai sektor basis sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai: penyedia bahan pangan, penyedia bahan baku industri, bahan ekspor, pendapatan daerah dan masyarakat, menyerap tenaga kerja maupun sebagai mekanisme jaring pengaman sosial lokal bagi masyarakat setempat. Berbagai potensi sumberdaya ekonomi banyak terdapat di Kabupaten Jember, namun tidak semua potensi yang ada merupakan potensi unggulan yang prospektif serta dapat langsung dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya diperlukan skala prioritas.

Perkembangan makro ekonomi Kabupaten Jember pada tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Indikator pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator tersebut berguna untuk memberikan gambaran umum perubahan kegiatan ekonomi masyarakat suatu daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan PDRB secara sektoral dapat digunakan untuk melihat perubahan dan pergeseran kegiatan ekonomi masyarakat.

Perekonomian Kabupaten Jember berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp95,29 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp59,98 triliun. Ekonomi Kabupaten Jember tahun 2023 meningkat sebesar 4,93 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 12,13 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang tumbuh sebesar 7,08 persen. Dilihat dari sisi produksi, struktur PDRB Kabupaten Jember tahun 2023 didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan sebesar 25,76 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memberikan andil terbesar hingga 70,53 persen.

Grafik. 2.1

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha 2021 – 2023

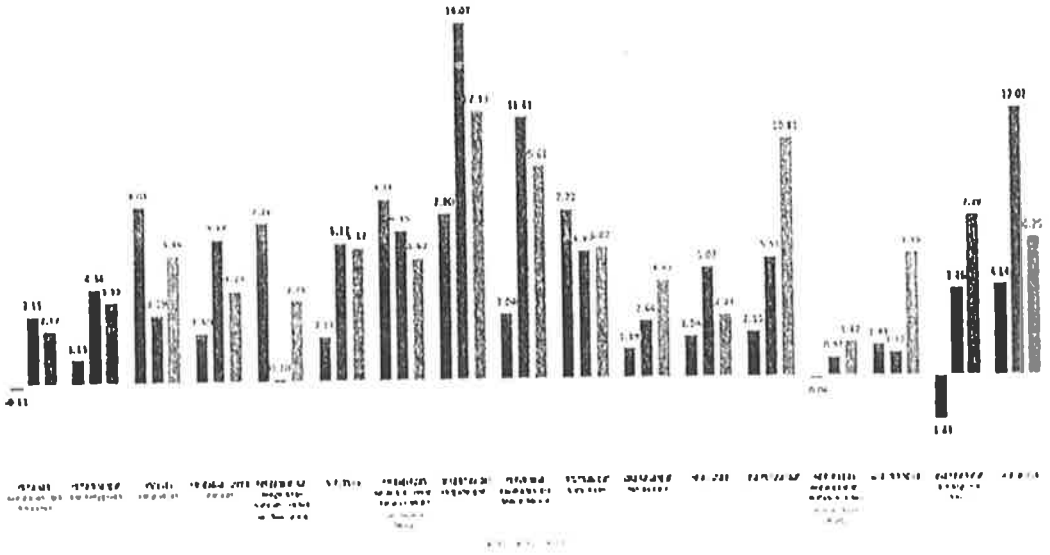

Sumber : BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember 2024; No.08/03/3509/Th. VII, 1 Maret 2024)

Ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,95 persen (y o y). Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur keseluruhannya tumbuh positif. Begitupun yang terjadi di kawasan tapal kuda, tumbuh pada kisaran 4,6 hingga 5 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso sebesar 4,62 persen, Kabupaten Probolinggo sebesar 4,73 persen, Kabupaten Situbondo Sebesar 4,90 persen, Kabupaten Jember sebesar 4,93 persen. selisih tipis diatasnya adalah Kabupaten Lumajang dan Banyuwangi dengan pertumbuhan sebesar 5,00 dan 5,03 persen.

Tabel Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2021 – 2023

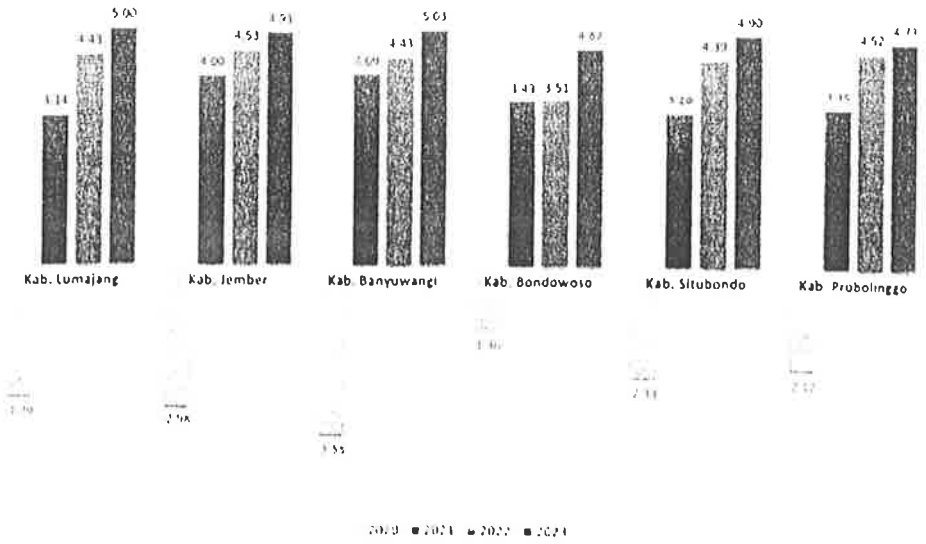

Sumber : BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember 2024; No.08/03/3509/Th. VII, 1 Mare 2024)

2.1.2 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan indikator yang menjelaskan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Tingkat inflasi juga dapat menggambarkan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang diikuti dengan peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. Meskipun demikian, tingkat inflasi yang terlalu tinggi dapat berdampak pada melemahnya kegiatan ekonomi masyarakat sehingga diperlukan upaya untuk menjaga stabilitas tingkat inflasi. Perhitungan tingkat inflasi salah satunya dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan harga dan paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

Pada Bulan Desember 2023 Kabupaten Jember mengalami inflasi mtm sebesar 0,22 persen atau terjadi kenaikan IHK sebesar 118,04 persen pada bulan November 2023 menjadi 118,30 persen pada Desember 2023. Dari delapan kota IHK di Jawa Timur seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep sbesar 0,71 persen dan inflasi terendah terjadi di Kota Kediri sebesar 0,17 persen dan Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi mtm 0,29 persen.

Inflasi tahunan yoy Desember 2023 (Desember 2023 terhadap Desember 2022) terjadi pada delapan kota IHK di Jawa Timur, IHK tertinggi Yoy terjadi di Sumenep sebesar 5,08 persen dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Banyuwangi sebesar 2,15 persen. Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 2,92 persen.

Grafik 2.2

Perbandingan Inflasi 8 Kota IHK Jawa Timur Desember 2023

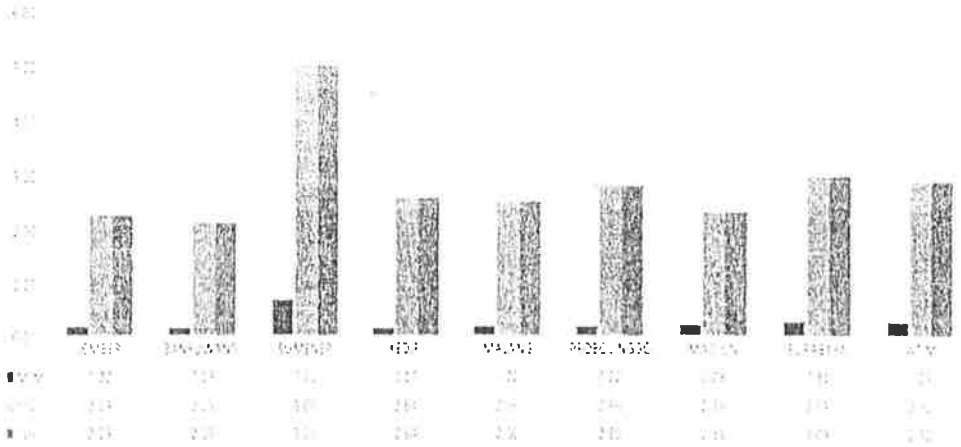

Sumber : BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember No. 01/01/3509/Th. XXII tanggal 2 Januari 2024)

Komoditas yang memberikan andil inflasi tahunan yoy Desember 2023 di Kabupaten Jember adalah cabai merah, bawang putih, cabai rawit, brokoli, buncis, ikan goreng, telur ayam kampung, alpukat, ikan asin dan gula pasir. Sedangkan komoditas yang menyumbangkan andil deflasi tahunan yoy Bulan Desember 2023 adalah bah naga, salak, tomat, wortel, kelapa, ikan ekor kuning, pepaya, ikan gurame, jeruk dan telur puyuh.

Grafik 2.2

Perkembangan Inflasi Tahun Kalender Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2023 (persen)

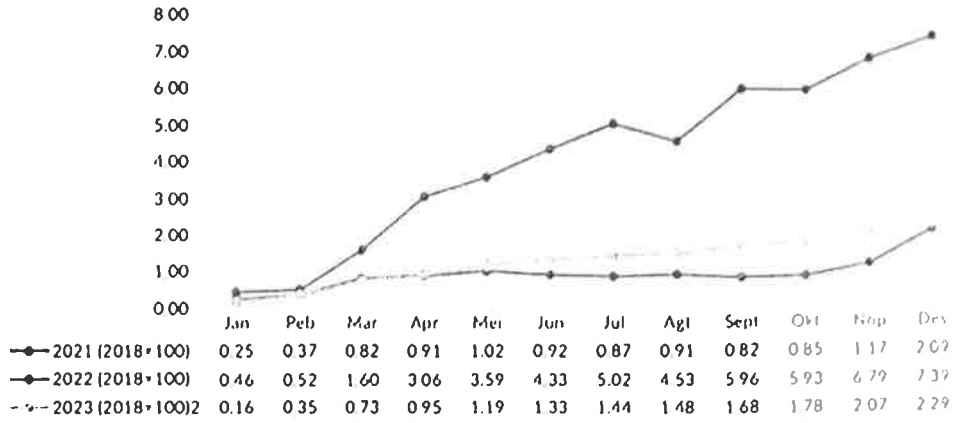

Sumber : BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember No. 01/01/3509/Th. XXII tanggal 2 Januari 2024)

2.1.3 Tingkat kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Jember pada bulan Maret 2023 mencapai 236,46 ribu jiwa. Jumlah ini bertambah sebesar 3,73 ribu jiwa bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 232,73 ribu jiwa.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jember juga mengalami peningkatan dari 9,39 persen pada bulan Maret 2022 menjadi sebesar 9,51 persen pada bulan Maret 2023. Garis Kemiskinan di Kabupaten Jember pada bulan Maret 2023 sebesar Rp441.171,00 perkapita perbulan bertambah sebesar Rp40.210,00 perkapita perbulan atau meningkat sebesar 10,03 persen bila dibandingkan dengan kondisi bulan Maret 2022 yang sebesar Rp400.961,00. Indeks Kedalamam Kemiskinan (P1) Kabupaten Jember Maret 2023 sebesar 1,17 megalami kenaikan sebesar 0,09 poin dibandingkan Maret 2022 yaitu 1,08. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jember Maret 2022 sebesar 0,22 cenderung tidak mengalami perubahan dibandingkan Maret 2022.

Tabel Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Jember Tahun 2010- 2023

Tahun	Garis Kemiskinan/GK (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	202.010,00	311,80	13,27
2011	226.546,00	292,10	12,44
2012	242.440,00	280,00	11,81
2013	260.106,00	278,50	11,68
2014	267.962,00	270,10	11,28
2015	283.510,00	269,54	11,22
2016	299.823,00	265,10	10,97
2017	310.650,00	266,90	11,00
2018	324.174,00	243,42	9,98
2019	339.685,00	226,57	9,25
2020	365.295,00	247,99	10,09
2021	380.397,00	257,09	10,41
2022	400.961,00	232,73	9,39
2023	441.171,00	236,46	9,51

Sumber : BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember No. 25/11/3509/Th. XXI tanggal 3 November 2023)

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator yang mengambarkan kualitas hidup sumber daya masyarakat di suatu daerah. Terdapat tiga dimensi yang digunakan untuk mengukur IPM yaitu: a) umur

panjang dan hidup sehat; b) pendidikan; dan c) standar hidup layak. Selain menjadi indikator kualitas hidup masyarakat. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upayan membangun kualitas manusia, juga dapat menentukan level pembangunan suatu wilayah dan dalam konteks desentralisasi fiscal, data IPM berguna sebagai salah satu penentu alokator dana transfer pusat kepada daerah.

Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healty life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan Harapan lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani Pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Standar Hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran perkapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jember tahun 2023 mencapai 70,42, meningkat 0,62 poin (0,89 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (69,80).Selama 2020–2023, IPM Jember rata-rata meningkat sebesar 0,68 persen per tahun. Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang dan hidup sehat dan standar hidup layak.

Grafik 2.4

Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Jember tahu 2020 - 2023

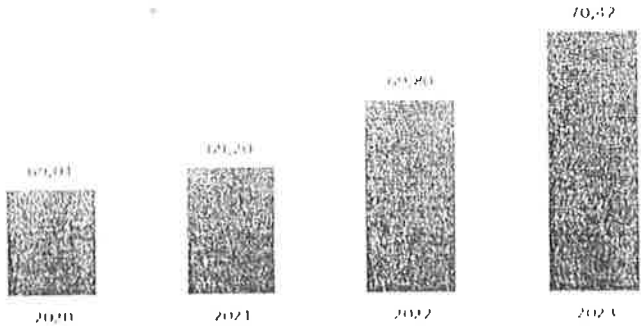

Sumber : BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi statistik Kabupaten Jember No. 03/301/3509/XXII tanggal 15 Januari 2024)

Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup yang layak dan pengetahuan. Indikator yang mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesay 0,37 persen dibanding tahun sebelumnya 0,07 persen. Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tumbuh sebesar 0,31 persen di tahun 2023 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya hanya sebesar 0,15 persen. Sedabgkan Indikator lainnya mengalamai perlambatan pertumbuhan. Indikator Umur Harapan Hidup (UHH) peretumbuhannya melambat 0,35 persen menjadi 0,31 persen. Indikator Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan melambat dari 4,57 persen menjadi 4,44 persen .

Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jember Menurut Dimensi Penyusunnya

Tahun 2020 – 2023

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	72.44	73.53	73.79	74.02
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13.42	13.43	13.44	13.49
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6.48	6.49	6.50	6.52
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Ril per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	9.294	9.410	9.840	10.277
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		69.01	69.20	69.80	70.42

Sumber : BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi statistik Kabupaten Jember Tahun 2023 No. 03/301/3509/XXII tanggal 15 Januari 2024)

2.1.5 Gini rasio

Gini rasio merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan suatu daerah. Nilai gini rasio berkisar antara 0 sampai dengan 1. Gini rasio berguna untuk mengukur kinerja pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat.Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai koefisien <0,4 menunjukkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan rendah, Nilai koefisien 0,4-0,5 menunjukkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan sedang, Nilai koefisien >0,5 menunjukkan distribusi pendapatan tingkat ketimpangan tinggi. Berdasarkan Informasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember bahwa belum terdapat data publikasi resmi perihal informasi indeks gini untuk tahun 2020 -2023 sehingga masih menggunakan perhitungan indeks gini pada tahun 2020 sebagai pedoman pembangunan untuk pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Jember.

Grafik 2.5

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Jember 2020 -2023

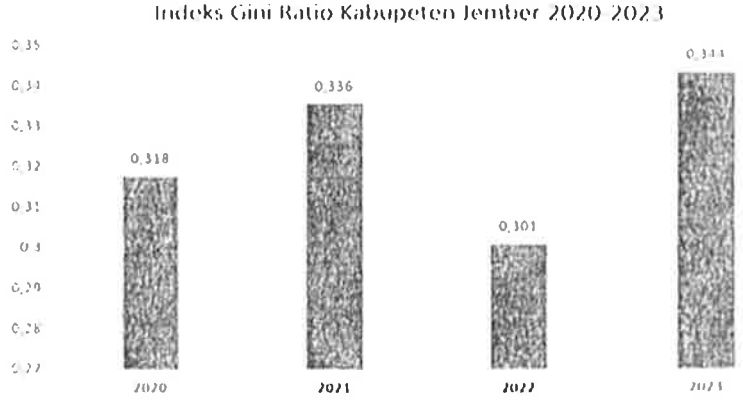

Sumber : https://jatim.bps.go.id/indicator/23/488/1/gini-rasio-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html

Tabel Perkembangan Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2020 - 2023

Nama Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023
Pacitan	0,351	0,337	0,338	0,352
Ponorogo	0,380	0,369	0,336	0,341
Trenggalek	0,379	0,335	0,331	0,336
Tulungagung	0,336	0,327	0,342	0,328
Blitar	0,348	0,353	0,335	0,360
Kediri	0,325	0,330	0,329	0,306

Nama Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023
Malang	0,371	0,367	0,368	0,378
Lumajang	0,297	0,309	0,349	0,391
Jember	0,318	0,336	0,301	0,344
Banyuwangi	0,316	0,373	0,329	0,351
Bondowoso	0,329	0,334	0,365	0,350
Situbondo	0,305	0,323	0,298	0,326
Probolinggo	0,326	0,326	0,275	0,319
Pasuruan	0,346	0,344	0,325	0,367
Sidoarjo	0,340	0,347	0,373	0,359
Mojokerto	0,325	0,294	0,327	0,338
Jombang	0,334	0,332	0,310	0,339
Nganjuk	0,335	0,308	0,301	0,324
Madiun	0,357	0,359	0,354	0,342
Magetan	0,324	0,357	0,352	0,373
Ngawi	0,337	0,309	0,300	0,328
Bojonegoro	0,303	0,340	0,280	0,283
Tuban	0,337	0,345	0,345	0,338
Lamongan	0,296	0,292	0,273	0,295
Gresik	0,299	0,313	0,363	0,330
Bangkalan	0,322	0,303	0,306	0,299
Sampang	0,262	0,268	0,280	0,254
Pamekasan	0,320	0,323	0,305	0,348
Sumenep	0,256	0,294	0,266	0,287
Kota Kediri	0,346	0,374	0,371	0,400
Kota Blitar	0,344	0,370	0,381	0,397
Kota Malang	0,395	0,407	0,421	0,413
Kota Probolinggo	0,311	0,299	0,322	0,347
Kota Pasuruan	0,301	0,350	0,360	0,378
Kota Mojokerto	0,355	0,334	0,381	0,353
Kota Madiun	0,392	0,345	0,398	0,416
Kota Surabaya	0,344	0,351	0,388	0,423
Kota Batu	0,333	0,312	0,308	0,330

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2024

2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka menjelaskan persentase jumlah penduduk yang sedang menganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Pemerintah tiap tahun menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka, sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Melalui regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada penyediaan lapangan kerja, kepastian hukum dalam bekerja dan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja serta lingkungan yang kondusif untuk berwirausaha.

Berdasarkan kondisi umum ketenagakerjaan Agustus 2023 di Kabupaten Jember, terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian yang di antaranya: ketimpangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan, dan juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK.

Meskipun TPAK perempuan cenderung menunjukkan peningkatan, tapi gap TPAK perempuan terhadap TPAK laki-laki masih relatif jauh. TPAK laki-laki di Jember masih 1,5 kali TPAK perempuan dengan selisih TPAK laki-laki terhadap TPAK perempuan sebesar 28,63 persen poin.

Jika dilihat berdasarkan status bekerja, proporsi pekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2022. Jika di cermati lebih mendalam dan di golongkan menjadi 2 yaitu bekerja sebagai berusaha (berusaha sendiri; berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/buruh tidak dibayar; berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar) dan bekerja sebagai penerima upah (buruh/karyawan/pegawai; pekerja bebas), dalam 4 tahun terakhir orang yang bekerja di Kabupaten Jember menunjukan pola yang sama yaitu orang yang bekerja sebagai penerima upah selalu dominan dibandingkan dengan orang yang bekerja yang statusnya sebagai berusaha.

Selain itu, isu lain yang masih terjadi adalah TPT lulusan SMK yang menunjukkan angka tertinggi dibandingkan penduduk usia kerja dengan jenjang pendidikan lainnya. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka mungkin menandakan bahwa keterampilan yang dimiliki lulusan SMK tidak sepenuhnya sesuai dengan permintaan pasar kerja di Jember. Ini bisa disebabkan oleh ketidakselarasan antara lulusan dan kebutuhan pasar kerja di Jember. Dalam menghadapi perubahan cepat dalam dunia kerja, penting untuk menyediakan pelatihan lanjutan dan pembaruan keterampilan bagi lulusan terutama SMK. Ini akan membantu mereka tetap relevan dan kompetitif di pasar kerja. Selain itu pentingnya membangun koneksi atau kerjasama antara sekolah, universitas, industri, dunia usaha, industri lokal, pasar kerja, pemerintah setempat sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan tingkat kesuksesan dan penempatan lulusan terutama SMK di Jember. Pelaksanaan job fair bisa menjadi salah satu sarana platform yang bermanfaat bagi semua pihak, menciptakan pertemuan yang efisien anta antara lulusan sekolah/universitas yang sedang mencari kerja dan perusahaan yang mencari bakat baru.

Grafik

Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Jember Tahun 2023

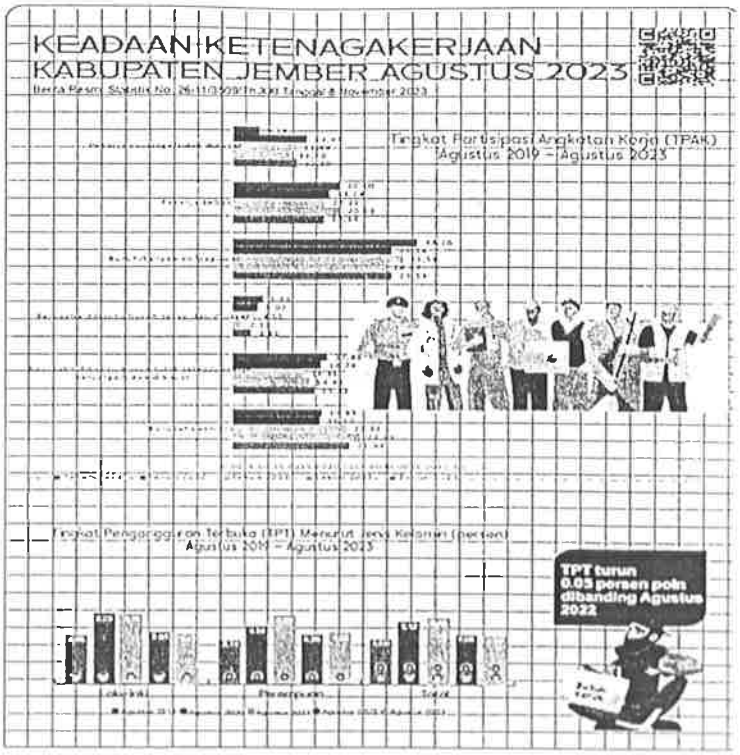

Sumber : BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi statistik Kabupaten Jember Tahun 2023 No. 03/301/3509/XXII tanggal 15 Januari 2024)

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan adalah langkah-langkah atau tindakan-tindakan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 meliputi kebijakan umum pendapatan, kebijakan umum belanja dan kebijakan umum pembiayaan.

Pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Jember pada Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan kebijakan penyusunan APBD berpedoman kepada Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Struktur kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah,

menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang- undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026, tema pembangunan tahun 2023 adalah Peningkatan Pembangunan Ketahanan Sosial dan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat. Tema yang telah dirumuskan tersebut sesuai dengan kondisi saat ini untuk mendukung percepatan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19, dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM, serta prediksi terjadinya ketidakpastian ekonomi global

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan 7 Prioritas Pembangunan yang selaras dengan Tema Pembangunan Kabupaten Jember tahun 2023 sebagai berikut :

1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis pada UMKM dan Pertanian;
2. Mendorong Konektivitas antar Wilayah untuk Pemerataan Pembangunan dan mengurangi Kemiskinan;
3. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
4. Mendorong Pariwisata yang berbasis pada Kearifan Lokal dan Kelestarian Budaya;
5. Memperkuat Layanan Infrastruktur untuk mendorong Perekonomian Daerah;
6. Menjaga Keberlangsungan Lingkungan dan Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah;
7. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal krusial yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional.

Pertama, sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi hubungan perencanaan dan penganggaran serta secara cepat dapat mengukur dan menunjukkan kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah.

Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan.

Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan Daerah dari sektor pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan (RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026). Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil, dan instansi terkait lainnya;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Unit Penghasil Lainnya;
6. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Sebagai pedoman dan acuan serta untuk menciptakan adanya kepastian hukum atas penyelenggaraan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jember.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal Daerah difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan atau transfer pemerintah pusat. Dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Jember secara umum menerapkan kebijakan untuk menjalin hubungan secara intensif dan harmonis baik kepada Pemerintah Pusat maupun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Secara teknis, Pemerintah Kabupaten Jember melakukan koordinasi dan penyampaian Laporan kepada Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh Orang Pribadi, serta menjaring Wajib Pajak baru di wilayah Pemerintah Kabupaten Jember.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta pengembangan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah tahun 2023 lebih difokuskan untuk pembangunan ketahanan sosial dan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Penyusunan anggaran belanja daerah juga berdasarkan atas prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah tahun 2023 disusun disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan pencapaian target sasaran-sasaran Perubahan RPJMD serta pencapaian penyempurnaan target pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka pemerintah daerah akan mengerahkan seluruh alat dan perangkat kebijakan daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jember difokuskan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, yang meliputi :

1. Perencanaan yang tepat
2. Penggunaan anggaran pada kebutuhan yang prioritas;
3. Pelaksanaan anggaran yang transparan, hati-hati dan akuntabel;
4. Pengawasan dan pengendalian anggaran yang efektif;
5. Pelaksanaan dan pelaporan anggaran yang disiplin.

Sedangkan arah kebijakan belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, dalam wujud fasilitasi belanja penanganan kemiskinan dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta layanan sosial dasar lainnya;
2. Menguatkan program–program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
3. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), juga melalui stimulasi pembangunan ekonomi baik di sektor produktif maupun saranan dan prasarana wilayah;
4. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;
5. Fasilitasi belanja tak terduga untuk kegiatan mendesak termasuk untuk penanganan bencana alam;
6. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kebijakan belanja daerah tersebut diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif.

2.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dimaksud antara lain sebagai berikut:

2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2022;

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2022.

b. Pencairan dana cadangan;

Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 73 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

d. Penerimaan pinjaman Daerah;

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 pasal 75 digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Penerimaan piutang Daerah.

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut di atas antara lain adalah untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi)

pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya jika dalam hal APBD diperkirakan Surplus, maka sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk Pengeluaran Pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan yang antara lain terdiri dari :

1. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo

   Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 pasal 77 digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman. Perjanjian pinjaman tersebut baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud

2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

   Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

   Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;

3. Pembentukan Dana Cadangan

   Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan dana cadangan dalam

satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 pasal 81 digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat. Pemberian Pinjaman Daerah tersebut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD yang merupakan bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS sebagaimana diatur dalan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Seiring dengan penyusunan kebijakan anggaran yang dituangkan dalam APBD, ditetapkan juga rencana kinerja yang harus dicapai dalam tahun tertentu. Penentuan target kinerja APBD Tahun Anggaran 2023 yang akan dicapai, berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya atas kesesuaian pencapaian visi, misi, dan sasaran prioritas pembangunan daerah. Perubahan sasaran strategis beserta indikatornya dalam Pemerintah Kabupaten Banyuwangi direncanakan sebagai sasaran dalam perubahan Dokumen Perencanaan Srategis Kabupaten yakni Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan akan terus dijaga, melalui pengalokasian anggaran yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu kolaborasi aktif pelaksanaan program diperlukan sehingga terdapat hasil kegiatan yang saling menunjang dan melengkapi baik internal maupun eksternal perangkat daerah secara efektif sehingga target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai atau jika memungkinkan mampu melampaui dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian target Kinerja APBD digolongkan menjadi :

- Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah;
- Pencapaian Kinerja Belanja Daerah; dan
- Pencapaian Kinerja Pembiayaan daerah.

Kinerja keuangan daerah berguna dalam menilai kemandirian suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi realisasi pendapatan daerah dan mengukur sejauh mana efektifitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerah.

Selanjutnya pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Jember Tahun 2023 dijelaskan dalam anggaran dan realisasi pelaksanaan APBD di bawah ini:

2.3.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tahun TA. 2023 dianggarkan sebesar Rp3.996.941.711.054,00 dapat direalisasikan sebesar Rp3.957.426.651.267,85 atau sebesar 99,01%, mengalami kenaikan sebesar Rp242.267.391.425,61 jika dibandingkan dengan realisasi TA. 2022 yaitu sebesar Rp3.715.160.123.903,32 atau sebesar 6,12%.

Berikut rincian kenaikan dan penurunan realisasi pendapatan Daerah TA. 2023 dari tahun sebelumnya.

Tabel Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 dan 2023

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	(KENAIKAN/PENURUNAN) (Rp)	%
4	**PENDAPATAN**	**3.715.160.123.903,32**	**3.957.426.651.267,85**	**242.266.527.364,53**	**6,12**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH** (PAD)	**640.243.830.361,32**	**764.496.302.893,85**	**124.252.472.532,53**	**16,26**
4.1.01	**Pendapatan** Pajak Daerah	293.578.032.475,00	288.151.785.388,00	(5.426 247.087,00)	(1,88)
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	38.871.533.956,00	27.374.994.636,00	(11.496 539 320,00)	(42,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.829.382.856,25	7.189.012.393,75	359 629 537,50	5,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	300.964.881.074,07	441.780.510.476,10	140.815.629.402,03	31,87
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.046.281.464.109,00**	**3.191.994.244.040,00**	**145.712.779.931,00**	4,56
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**2.761.281.616.430,00**	**2.845.857.792.619,00**	**84.576.177.189,00**	2,97
4.2.01.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan**	**2.435.573.308.430,00**	**2.522.861.210.219,00**	**87.287.901.789,00**	**3,46**
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil (DBH)	217.436.609.930,00	210.923.988.652,00	(6.512.621 278,00)	(3,09)
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.597.514.133.650,00	1.704.938.164.985,00	107.424.031.335,00	6,30
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	60.010.011.721,00	45.036.717.101,00	(14.973.294.620,00)	(33,25)
4 2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	560.612.553.129,00	561.962.339.481,00	1.349.786.352,00	0,24
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - lainnya**	**326.708.307.000,00**	**322.996.582.400,00**	**(2.711.724.600,00)**	**(0,84)**
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10.364.617.000,00	0,00	(10.364.617.000,00)	0.00
4.2.01.05	**Dana Desa**	315.343.690.000,00	322.996.582.400,00	7.652.892.400,00	2,37
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**284.999.848.679,00**	**346.136.461.421,00**	**61.136.602.742,00**	**17,66**

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	(KENAIKAN/PENURUNAN) (Rp)	%
4.2.01.02	Pendapatan Bagi Hasil	273.618.771.679,00	334.510.008.600,00	60.891.236.921,00	18,20
4.2.01.05	Bantuan Keuangan	11.381.077.000,00	11.626.442.821,00	(245.365.821,00)	2,11
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.634.829.433,00	936.104.334,00	(27.698.725.099,00)	(2.958,94)
4.3.01	Pendapatan Hibah	10.930.595.096,00	936.104.334,00	(9.994.490.762,00)	(1.067,67)
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.704.234.337,00	0,00	(17.704.234.337,00)	0,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Jember pada TA. 2023 sebesar Rp764.496.302.893,85. Pendapatan Asli Daerah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp124.252.472.532,53 jika dibandingkan dengan realisasi TA. 2022 yaitu sebesar Rp640.243.830.361,32 atau sebesar 16,25%. yang terdiri dari :

1. Pendapatan Pajak Daerah Rp288.151.785.388,00
2. Hasil Retribusi Daerah Rp 27.374.994.636,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 7.189.012.393,75
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp441.780.510.476,10

Jumlah Rp764.496.302.893,85

Realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2023 sebesar Rp3.191.994.244.040,00 yang terdiri dari dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Jumlah Pendapatan Transfer tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp145.712.779.931,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA. 2022 yaitu sebesar Rp3.046.281.464.109,00 atau sebesar 4,56%. Dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Rp2.522.861.210.219,00

1. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rp 210.923.988.652,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.704.938.164.985,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 45.036.717.101,00
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 561.962.339.481,00

Jumlah Rp2.522.861.210.219,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp322.996.582.400,00

1. Dana Insentif Daerah (DID) Rp 0,00
2. Dana Desa Rp322.996.582.400,00

Jumlah Rp322.996.582.400,00

a. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp346.136.451.421,00

1. Pendapatan Bagi Hasil	Rp334.510.008.600,00
2. Bantuan Keuangan	Rp 11.626.442.821,00
Jumlah	**Rp346.136.451.421,00**

Realisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada TA. 2023 sebesar Rp936.104.334,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp27.698.725.099,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA. 2022 yaitu sebesar Rp28.634.829.433,00 atau sebesar 2.958%. terdiri dari :

1.	Pendapatan Hibah	Rp936.104.334,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 0,00
	Jumlah	**Rp936.104.334,00**

Penurunan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah dikarenakan adanya perubahan regulasi alokasi dana dan BOS di kode rekening DAK non fisik.

2.3.2 Belanja

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban atau semua pengeluaran kas daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berjalann. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja Kabupaten Jember pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp4.118.279.658.762,00 dengan realisasi sebesar Rp3.802.222.061.677,92 atau sebesar 92,33%. Realisasi belanja tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp361.139.540.338,45 atau 9,50% dibandingkan realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp4.163.361.602.016,37

2.3.2.1 Belanja Daerah

Rincian kenaikan dan penurunan Belanja Daerah Kabupaten Jember TA. 2023 dari tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Belanja Dearah Tahun 2022 dan Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	(KENAIKAN/PENURUNAN) (Rp)	%
5	BELANJA DAERAH	4.163.361.602.016,37	3.802.222.061.677,92	(361.139.540.338,45)	(9,50)
5.1	BELANJA OPERASI	2.820.371.422.542,46	3.015.559.884.677,66	195.188.462.135,20	6,47
5.1.01	Belanja Pegawai	1.384.497.512.083,00	1.361.120.333.591,47	(23.377.178.491,53)	(1,72)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.297.772.326.967,46	1.354.258.354.206,19	56.486.027.238,73	4,17
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI	REALISASI	(KENAIKAN/PENURUNAN)	
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	(Rp)	%
5.1.05	Belanja Hibah	93.923.338.592,00	270.995.238.880,00	177.071.900.288,00	65,34
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	44.178.244.900,00	29.185.958.000,00	(14.992.286.900,00)	(51,37)
5.2	**BELANJA MODAL**	**829.309.474.596,91**	**232.163.748.376,26**	**(597.145.726.220,65)**	**(257,21)**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.179.303.905,68	79.716.522.691,50	(30.462.781.214,18)	(38,21)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.408.013.296,63	54.635.641.878,00	(61.772.371.418,63)	(113,06)
5.2.04	Belanja Modal Jalan Jaringan, dan Irigasi	571.264.002.627,99	43.233.220.730,76	(528.030.781.897,23)	(1.221,35)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	31.458.154.766,61	54.351.340.328,00	22.893.185.561,39	42,12
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	227.022.748,00	227.022.748,00	100,00
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**1.483.241.150,00**	**31.854.315.147,00**	**30.371.073.997,00**	**95,34**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.483.241.150,00	31.854.315.147,00	30.371.073.997,00	95,34
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**512.197.463.727,00**	**522.644.113.477,00**	**10.446.649.750,00**	**2,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.065.196.658,00	22.500.000.000,00	434.803.342,00	1,93
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	490.132.267.069,00	500.144.113.477,00	10.011.846.408,00	2,00

Klasifikasi Belanja Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2023 dipergunakan untuk belanja operasi, belanja modal,belanja tak terduga dan belanja transfer, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

   Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3.288.813.950.585,00 dengan realisasi sebesar Rp3.015.559.884.677,66 atau sebesar 91,69%. Belanja operasi dipergunakan untuk mendanai kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Kabupaten Jember Tahun 2023 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal

   Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp260.564.465.920,00 dengan realisasi sebesar Rp232.163.748.376,26 atau 89,01%. Belanja Modal dipergunakan untuk mendanai pengeluaran anggaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja jalan ,Irigasi, dan jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

   Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp45.162.296.180,00 dengan realisasi sebesar Rp31.854.315.147,00 atau sebesar 70,53%. Belanja tidak Terduga dipergunakan untuk

mendanai pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer dianggarkan sebesar sebesar Rp523.738.946.077,00 dengan realisasi sebesar Rp522.644.113.477,00 atau sebesar 99,79%. Belanja Transfer dipergunakan untuk transfer bagi hasil pajak daerah dan transfer bantuan keuangan ke desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan perundang – undangan. Pada tahun 2023 klasifikasi APBD Kabupaten Jember terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, urusan unsur pendukung urusan pemerintahan ,urusaan unsur penunjang urusan pemerintahan, urusan unsur pengawasan urusan pemerintahan, urusan unsur kewilayaan dan urusan pemerintahan umum, Rincian anggaran dan realisasi dari masing – masing urusan tersebut adalah sebagai berikut :

2.3.3 Urusan Wajib

Belanja Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kuahtas kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban daerah dalam mewujudkan peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, Belanja daerah untuk Urusan Wajib dibagi dua, yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

A. Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)

Belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta bidang sosial.

Anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar TA 2023 sebesar Rp2.538.945.688.496,00 dan terealisasi sebesar Rp2.389.812.326.209,92 atau sebesar 94,13%. Realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Sebesar Rp424.259.477.943,32 dibandingkan realisasi TA. 2022 sebesar Rp2.814.071.804.153,24 atau sebesar 117,75%

Rincian belanja urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar Kabupaten Jember tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2022-2023

KODE REKENING	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	REALISASI 2022	TAHUN 2023		
			ANGGARAN	REALISASI	%
1.01.01	Pendidikan Dan Pelatihan	1.167.794.653.503,98	1.323.485.193.187,00	1.272.423.836.626,00	96,14
1.02.01	Kesehatan	739.317.608.584,77	848.982.896.250,00	780.557.488.253,16	91,94
1.03.01	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	732.200.321.258,99	229.599.284.118,00	217.660.165.796,76	94,80
1.04.02	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	102.497.159.177,50	27.481.713.199,00	23.109.344.412,00	84,09
1.05.01	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	31.568.013.938,00	48.417.456.366,00	41.735.142.179,00	86,20
1.06.01	Sosial	40.694.047.690,00	60.979.145.376,00	54.326.348.943,00	89,09
	JUMLAH	**2.814.071.804.153,24**	**2.538.945.688.496,00**	**2.389.812.326.209,92**	**94,13**

B. Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar)

Belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar terdiri dari bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, pertanahan, pangan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah,penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, Persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

Pada tahun 2023 belanja urusan wajib non pelayanan dasar dianggarkan sebesar Rp217.856.730.595,00 dengan realisasi sebesar Rp200.662.255.316,00 atau sebesar 92,11%. Realisasi belanja urusan wajib non pelayanan dasar tahun 2022 dibandingkan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp199.259.740.113,00 atau sebesar 99,30%. Kenaikan realisasi belanja wajib non pelayanan dasar disebabkan program prioritas Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan pelayanan di segala bidang.

Rincian Belanja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang terdiri dari :

KODE REKENING	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	REALISASI 2022	TAHUN 2023		%
			ANGGARAN	REALISASI	
2.07.01	Tenaga Kerja	7.082.064.561,00	15.308.539.115,00	13.359.116.248,00	87,27
2.08.01	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7.688.688.671,00	9.274.180.606,00	8.313.069.477,00	89,64
2.09.02	Pangan	2.286.670.232,00	556.889.300,00	534.340.664,00	95,95
2.10.02	Pertanahan	227.491.725,00	369.096.842,00	238.745.397,00	64,68
2.11.01	Lingkungan Hidup	35.234.649.140,00	37.661.493.997,00	35.642.491.931,00	94,64

KODE REKENING	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	REALISASI 2022	TAHUN 2023		%
			ANGGARAN	REALISASI	
2.12.01	Administrasi Kependudukan Dan Capil	9.215.169.054,00	10.534.397.527,00	9.294.471.653,00	88,23
2.13.01	Pemberdayaa Masyarakat Dan Desa	16.514.547.719,00	15.925.921.582,00	14.974.680.204,00	94,03
2.14.02	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	12.285.781.924,00	21.933.807.591,00	20.293.596.242,00	92,52
2.15.01	Perhubungan	33.188.272.204,00	33.236.289.750,00	31.606.039.690,00	95,09
2.16.01	Komunikasi Dan Informatika	22.004.253.672,00	23.197.238.583,00	22.019.903.158,00	94,92
2.17.01	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	12.509.658.615,00	9.622.065.514,00	7.763.474.858,00	80,68
2.18.01	Penanaman Modal	6.102.236.814,00	7.259.625.185,00	5.824.146.601,00	80,23
2.19.01	Kepemudaan Dan Olaraga	28.503.175.277,00	23.068.303.032,00	22.106.398.159,00	95,83
2.20.02	Statistik	99.564.500,00	271.290.000,00	240.895.530,00	88,80
2.21.02	Persandian	75.000.000,00	152.356.000,00	140.487.000,00	92,21
2.22.02	Kebudayaan	907.611.800,00	2.398.137.000,00	2.380.368.630,00	99,26
2.23.01	Perpustakaan	5.083.026.655,00	6.335.275.146,00	5.209.618.866,00	82,23
2.24.02	Kearsipan	251.877.550,00	751.823.825,00	720.411.008,00	95,82
	JUMLAH	**199.269.740.113,00**	**217.866.730.595,00**	**200.662.255.316,00**	**92,11**

C. Urusan Pilihan

Belanja Urusan Pilihan Pemerintah Kabupaten Jember merupakan Urusan Pilihan yang secara nyata berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kekhasan dan keunggulan daerah. Anggaran Belanja Urusan Pilihan tahun 2023 sebesar Rp139.785.891.578,00 dengan realisasi sebesar Rp124.319.282.033,00 atau sebesar 74,53%. Realisasi belanja urusan pilihan mengalami kenaikan sebesar Rp29.744.968.566,87 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp94.574.313.466,13 atau sebesar 76,07%

Berikut Rincian Belanja Urusan Pilihan Kabupaten Jember tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang terdiri dari :

Tabel Belanja Urusan Pilihan Tahun 2022-2023

KODE REKENING	URUSAN PILIHAN	REALISASI 2022	TAHUN 2023		%
			ANGGARAN	REALISASI	
3.25.01	Kelautan Dan Perikanan	5.916.746.002,00	6.483.016.163,00	5.754.588.016,00	88,76
3.26.01	Pariwisata	9.556.389.134,00	14.932.034.062,00	13.943.877.248,00	93,38
3.27.01	Pertanian	56.274.438.572,13	92.117.967.482,00	79.959.780.618,00	86,80
3.30.01	Perdagangan	20.985.878.662,00	22.503.947.171,00	20.969.324.313,00	93,18
3.31.02	Perindustrian	1.840.861.096,00	3.748.926.700,00	3.691.711.838,00	98,47
	JUMLAH	**94.574.313.466,13**	**139.785.891.578,00**	**124.319.282.033,00**	88,94

D. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

Urusan Pendukung urusan pemerintahan merupakan klasifikasi APBD yang baru diberlakukan pada tahun 2021, yang belanja nya digunakan untuk medukung kegiatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, dimana pada tahun sebelumnya belanja dimaksud masuk dalam klasifikasi urusan penunjang urusan pemerintahan staf dan pengawasan, Anggaran belanja urusan pemerintahan tahun 2023 sebesar Rp230.678.648.025,00 dengan realisasi sebesar Rp200.155.222.899,00 atau sebesar 86,77%. Realisasi belanja urusan pemerintahan tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2023 megalami kenaikan sebesar Rp54.857.260.131,00 atau sebesar 72,59%. Adapaun rincian anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel Belanja Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2022-2023

KODE REKENING	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	REALISASI 2022	TAHUN 2023		%
			ANGGARAN	REALISASI	
4.01.01	Sekretariat Daerah	79.883.151.189,00	136.928.357.559,00	118.867.436.829,00	86,81
4.02.02	Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat	65.414.811.579,00	93.750.290.466,00	81.287.786.070,00	86,71
	JUMLAH	**145.297.962.768,00**	**230.678.648.025,00**	**200.155.222.899,00**	**86,77**

E. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan merupakan urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Anggaran Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan tahun 2023 sebesar Rp749.119.834.759,00 dengan realisasi sebesar Rp671.381.895.227,00 atau sebesar 89,62%. Realisasi belanja urusan penunjang urusan pemerintahan tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp97.797.764.798,00 atau sebesar 114,57%. Khusus untuk urusan penunjang urusan pemerintahan staf dan pengawasan sejak tahun 2021 diklasifikasikan ke dalam urusan pendukung urusan pemerintahan.

Berikut rincian Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 :

Tabel Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2022-2023

KODE REKENING	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	REALISASI 2022	TAHUN 2023		%
			ANGGARAN	REALISASI	
5.01.02	Perencanaan	10.824.653.468,00	14.949.799.656,00	12.185.829.944,00	81,51
5.02.01	Keuangan	585.098.874.408,00	656.010.174.232,00	629.858.746.678,00	96,01
5.03.01	Kepegawaian	167.588.588.778,00	74.456.692.636,00	25.827.607.882,00	34,69
5.04.02	Pendidikan Dan Pelatihan	4.582.932.171,00	1.059.544.135,00	988.799.816,00	93,32

5.05.02	Penelitian Dan Pengembangan	1.084.611.200,00	2.643.624.100,00	2.520.910.907,00	95,36
	JUMLAH	769.179.660.025,00	749.119.834.769,00	671.381.895.227,00	89,62

F. Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Belanja Urusan unsur pengawasan urusan pemerintahan merupakan belanja yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp13.443.767.141,00 dan terealisasi sebesar Rp11.761.141.605,00 atau 87,48%. Jika dibandingkan tahun 2022 meningkat sebesar Rp1.584.185.856,00 atau 86,53%, Belanja untuk mendukung kegiatan pengawasanpada Inspektorat masuk dalam klasifikasi urusan penunjang urusan pemerintahan staf dan pengawasan.

Berikut rincian Belanja Urusan Pengawasan urusan Pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 :

Tabel Belanja Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2022-2023

KODE REKENING	URUSAN UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	REALISASI 2022	TAHUN 2023		%
			ANGGARAN	REALISASI	
6.01.01	Inspektorat Daerah	10.176.955.749,00	13.443.767.141,00	11.761.141.605,00	87,48
	JUMLAH	10.176.955.749,00	13.443.767.141,00	11.761.141.605,00	87,48

G. Urusan Unsur Kewilayahan

Belanja Urusan unsur kewilayahan merupakan belanja yang digunakan untuk medukung kegiatan pada 31 (tiga puluh satu) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan di Kabupaten Jember, Anggaran untuk urusan unsur kewilayaan pada tahun 2023 sebesar Rp154.447.787.080,00 dan terealisasi sebesar Rp131.811.947.100,00 atau sebesar 85,34% jika dibandingkan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp8.922.963.430,00 atau sebsar 93,23%.

Berikut rincian Belanja Urusan Unsur Kewilayahan urusan Pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 :

Tabel Belanja Urusan Kewilayahan Urusan Pemerintahan Tahun 2022-2023

KODE REKENING	URUSAN KEWILAYAHAN URUSAN PEMERINTAHAN	REALISASI 2022	TAHUN 2023		%
			ANGGARAN	REALISASI	
7.01.01	Kecamatan	122.885.283.670,00	154.447.787.080,00	131.811.947.100,00	85,34

	JUMLAH	122.885.283.670,00	154.447.787.080,00	131.811.947.100,00	85,34

H. Urusan Unsur Pemerintahan Umum

Belanja Urusan unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Pemerintahan kabupaten Jember merupakan urusan pemerintah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan umum yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan umum sejak tahun 2022 hanya terdiri dari belanja yang digunakan untuk mendukung kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik. Anggaran untuk urusan unsur Pemerintahan Umum sebesar Rp74.001.311.088,00 dan tercalisir sebesar Rp72.317.991.288,00 atau sebesar 97,73% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp7.915.882.072,00 mengalami peningkatan sebesar Rp64.402.109.216,00 atau sebesar 10,95%

Berikut rincian Belanja Urusan Unsur Pemerintahan Umum urusan Pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 :

Tabel Belanja Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2022-2023

KODE REKENING	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	REALISASI 2022	TAHUN 2023		%
			ANGGARAN	REALISASI	
8.01.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.915.882.072,00	74.001.311.088,00	72.317.991.288,00	97,73
	JUMLAH	7.915.882.072,00	74.001.311.088,00	72.317.991.288,00	97,73

2.3.4 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah. Pencapaian kinerja keuangan terkait dengan pembiayaan daerah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Pembiayaan TA 2022 dan 2023

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	(KENAIKAN/PENURUNAN)	
		Rp	Rp	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	569.539.425.820,96	121.391.890.210,93	(448.147.535.610,03)	(369,17)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	569.519.825.820,96	121.337.947.710,93	(448.181.878.110,03)	(369,37)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	19.600.000,00	53.942.500,00	34.342.500,00	63,67
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	(KENAIKAN/PENURUNAN)	
		Rp	Rp	(Rp)	%
	PEMBIAYAAN NETTO	569.539.425.820,96	121.391.890.210,93	(448.147.535.610,03)	(369,17)

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada TA 2023 sebesar 121.391.890.210,93 atau mengalami penurunan sebesar Rp448.147.535.610,03 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yaitu sebesar Rp569.539.425.820,96 atau sebesar 369,17%. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2022 tidak ada realisasi, pada tahun sebelumnya juga tidak ada realisasi , sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp121.391.890.210,93.

Dari perbandingan pendapatan, belanja dan pembiayaan netto diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan sebesar Rp276.596.479.800,86 yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan pada tahun berikutnya. Perhitungan SiLPA tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp3.957.426.651.267,85
Belanja	Rp3.802.222.061.677,92
Pembiayaan Netto	Rp 121.391.890.210,93
SiLPA Tahun 2023	**Rp 276.596.479.800,86**

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mendukung program pemerintah daerah yang telah direncanakan dan sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), perlu adanya perencanaa penganggaran yang menggambarkan pendapatan dan belanja dalam periode tahunan. Perencanaan penganggaran dimaksud dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan target yang akan dicapai.

Pelaksanaan APBD dan pencapaian indikator target kinerja dimaksud membutuhkan komitmen seluruh perangkat daerah serta perlu adanya sinkronissi, komunikasi dan koordinasi yang efektif antar perangkat daerah.

Dalam pelaksanaan APBD dimungkinkan adanya perubahan, baik pada asumsi pendapatan ataupun belanja daerah akibat adanya penyesuaian rencana keuangan dan perkembangan yang terjadi.

Target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jember sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Jember Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Jember Nomor 45 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 beserta perubahannya.

3.1.1 Target Kinerja Pendapatan dan Perubahannya

Sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Jember sebagai sumber dana pendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Berdasarkan klasifikasinya, pendapatan dikelompokkan atas:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terinci ke dalam 4 (empat) sub pos anggaran pendapatan dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- Pendapatan Transfer, yang terinci ke dalam sub pos anggaran pendapatan: Pendapatan Transfer pemerintah Pusat,Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terinci ke dalam sub pos anggaran pendapatan: Pendapatan Hibah, Lin-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah target kinerja pendapatan beserta perubahannya pada Tahun Anggaran 2022:

Tabel 3. 1 Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Kabupaten Jember TA. 2023

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				(Rp)	%
4	PENDAPATAN	3.923.045.237.662,00	3.996.941.711.054,00	73.896.473.392,00	1,85
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	851.853.426.102,00	845.987.143.485,00	(5.866.282.617,00)	(0,69)
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	346.314.000.000,00	322.450.000.000,00	(23.864.000.000,00)	(7,40)
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	50.098.719.343,00	30.283.548.920,00	(19.815.170.423,00)	(65,43)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.102.248.169,00	7.189.012.400,00	1.086.764.231,00	15,12
4 1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	449.338.458.590,00	486.064.582.165,00	36.726.123.575,00	7 56
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.071.191.811.560,00	3.149.862.264.569,00	(78.670.453.009,00)	(2,50)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.786.893.734.000,00	2.828.602.388.348,00	(41.708.654.348,00)	(1,47)
4.2.01.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan	2.471.550.044.000,00	2.504.510.973.348,00	(32.960.929.348,00)	(1,32)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	180.125.901.000,00	198.680.665.988,00	(18.554.764 988,00)	(9,34)
4.2 01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.607.489.075.000,00	1.687.191.605.000,00	(79.702.530.000,00)	(4,72)
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56.559.863.000,00	49.843.643.000,00	6.716.220.000,00	13,47
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	627.375.205.000,00	568.795.059.360,00	58.580.145.640,00	10,30
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - lainnya	315.343.690.000,00	324.091.415.000,00	(8.747.725.000,00)	(2,70)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0'00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	315.343.690.000,00	324.091.415.000,00	(8.747.725.000,00)	(2,70)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	284.298.077.560,00	321.269.876.221,00	(36.961.798.661,00)	(11,61)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	274.259.000.560,00	310.178.333.400,00	(35.919.332.840,00)	(11,58)
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10.039.077.000,00	11.081.542.821,00	(1.042.465.821,00)	(9,41)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	1.092.303.000,00	(1.092.303.000,00)	(100,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	1.092.303.000,00	(1.092.303.000,00)	(100,00)
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Jember TA 2023 sebelum perubahan sebesar Rp3.923.045.237.662,00 dan setelah perubahan Rp3.996.941.711.054,00 mengalami kenaikan sebesar Rp73.896.473.392,00 atau sebesar 1,085%. Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebelum

perubahan sebesar Rp851.853.426.102,00 dan setelah perubahan sebesar Rp845.987.143.485,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.866.282.617,00.

Anggaran Pendapatan Transfer sebelum perubahan sebesar Rp3.071.191.811.560,00 dan setelah perubahan sebesar Rp3.149.862.264.569,00 mengalami kenaikan sebesar Rp78.670.453.009,00 atau sebesar 2,50%. Kenaikan pendapatan transfer berasal dari penambahan pagu definitif Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan surat Gubernur Jawa Timur No.140/14445/112.2/2022 tanggal 1 november 2022 tentang penyampaian pagu definitif belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten pada P-ABPD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023 yang merupakan bantuan keuangan untuk seluruh aparatur Pemerintah Desa sebagai pembahas. Selanjutnya untuk Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setalah dan sebelum perubahan sebesar Rp1.092.303.000,00.

3.1.2 Target Kinerja Belanja dan Perubahannya

Anggaran Belanja merupakan bagian tak terpisahkan dari bagian pendapatan maupun pembiayaan dalam sistem APBD berbasis kinerja, yang meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Daerah pada hakikatnya dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja Daerah mengacu pada analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturanperundang–undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Kabupaten Jember tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan

anggaran ke dalam program/kegiatan. Berikut adalah target kinerja belanja beserta perubahannnya pada TA 2023:

Dari total Belanja Daerah Kabupaten Jember dalam Perubahan APBD tahun 2023 sebesar Rp4.118.279.658.762,00 mengalami penurunan sebesar Rp104.235.088.985,00 atau sebesar 2,53% jika dibandingkan dengan belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp4.222.514.747.747,00 Rincian anggaran belanja Daerah Kabupaten Jember sebelum dan sesudah perubahan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Kabupaten Jember TA. 2023

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				(Rp)	%
5	**BELANJA DAERAH**	**4.222.514.747.747,00**	**4.118.279.658.762,00**	**(104.235.088.985,00)**	(2,53)
5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.154.064.839.270,00**	**3.288.813.950.585,00**	**134.749.111.315,00**	4,10
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**1.480.923.576.811,00**	**1.506.793.438.014,00**	25.869.861.203,00	1.72
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.533.081.691.421,00**	1.472.091.271.603,00	(60.990.419 818,00)	(4.14)
5.1.04	**Belanja Subsidi**	**0,00**	0,00	0,00	0.00
5.1.05	**Belanja Hibah**	106.708.699.038,00	277.187.318.968,00	170.478.619.930,00	61,50
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	33.350.872.000,00	32.741.922.000,00	(608.950.000,00)	(1.86)
5.2	**BELANJA MODAL**	**500.949.147.978,00**	**260.564.466.920,00**	**(240.384.682.058,00)**	**(92,26)**
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**	3.402.694.100,00	0,00	(3 402.694.100,00)	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.985.594.126,00	99.421 865 814,00	(30.563.728.312,00)	(30,74)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.848.608.620,00	60.165.714.406,00	(45.682.894.214,00)	(75,93)
5.2.04	Belanja Modal Jalan Jaringan, dan Irigasi	176.469.330.489,00	45.736.033.942,00	(130.733 296 547,00)	(285,84)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	84.948.657.143,00	54.734.987.026,00	(30.213.670 117,00)	(55,20)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	294.263.500,00	505.864.732,00	211.601.232,00	41,83
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**54.393.322.343,00**	**45.162.296.180,00**	**(9.231.026.163,00)**	(20,44)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	54.393.322.343,00	45.162.296.180,00	(923.126163,00)	(20.44)
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**513.107.438.156,00**	**523.738.946.077,00**	**(10.631.507.921,00)**	2,03
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	0,00	0.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	490.607.438.156,00	501.238.946.077,00	10631507921,00	2 12

3.1.3 Target Kinerja Pembiayaan dan Perubahannya

Anggaran Pembiayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD dan sesuai dengan pedoman umum penyusunan serta pelaksanaan APBD, yang secara garis besar dibagi menjadi:

- Penerimaan Pembiayaan
- Pengeluaran Pembiayaan

Dari kedua pos tersebut kondisi umum pembiayaan dalam Perubahan APBD TA 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Anggaran Pembiayaan Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Kabupaten Jember TA. 2023

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	299.469.510.085,00	121.337.947.708,00	(178.131.562.377,00)	(59,48)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	299.469.510.085,00	121.337.947.708,00	(178.131.562.377,00)	(59,48)
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	(0,00)	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		299.469.510.085,00	121.337.947.708,00	(178.131.562.377,00)	(59,48)

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebelum perubahan APBD TA 2023 sebesar Rp299.469.510.085,00 dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp121.337.947.708,00 mengalami penurunan sebesar Rp178.131.562.377,00 ada sebesar 59,48%.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dianggarkan sebesar Rp299.469.510.085,00 sedangkan SiLPA tahun 2023 setelah perubahan adalah sebesar Rp121.337.947.708,00 sebagian besar merupakan anggaran yang harus dijadwalkan kembali untuk program dan kegiatan prioritas yang mendukung visi dan misi Kepada Daerah. SiLPA yang tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 yang telah diaudit Badan

Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) dan ditetapkan dalam Perda Laporan Pertanggungjawaban No 03 tahun 2023 tanggal 31 Agustus tahun anggaran 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.

3.1.4 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sehubungan dengan berbagai kebijakan keuangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jember dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.1.5 Target dan Realisasi Pendapatan

Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Daerah pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp3.996.941.711.054,00 dapat terealisir sebesar Rp3.957.427.515.328,93 atau sebesa 99,01% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA LEBIH/(KURANG)
		Rp	Rp		
4	**PENDAPATAN**	3.996.941.711.054,00	3.957.426.651.267,85	99,01	39.515.059 786,15
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	845.987.143.485,00	764.496 302.893,85	90,37	81.490 840.591,15
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	322.450.000.000,00	288.151.785.388,00	89,36	34.298 214.612,00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	30.283.548.920,00	27.374.994.636,00	90,40	2.908.554.284,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.189.012.400,00	7.189.012.393,75	100,00	6,25
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	486.064.582.165,00	441.780.510.476,10	90,89	44.284.071.688,90
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	3.149.862.264.569,00	3.191.994.244.040,00	101,34	(42.131.979.471,00)
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	2.828.602.388.348,00	2.845.857.792.619,00	100,61	(17.255.404.271,00)
4.2.01.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan**	2.504.510.973.348,00	2.522.861.210.219,00	100,73	(18.350.236.871,00)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	198.680.665.988,00	210.923.988.652,00	106,16	(12.243.322.664,00)
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.687.191.605.000,00	1.704.938.164.985,00	101,05	(17.746.559.985,00)
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	49.843.643.000,00	45.036.717.101,00	90,36	4.806.925.899,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	568.795.059.360,00	561.962.339.481,00	98,80	6.832 719 879,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA LEBIH/(KURANG)
		Rp	Rp		
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - lainnya**	324.091.415.000,00	322.996.582.400,00	99,66	1.094.832.600,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	324.091.415.000,00	322.996.582.400,00	99,66	1.094.832.600,00
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	321.259.876.221,00	346.136.451.421,00	107,74	(24.876.575.200,00)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	310.178.333.400,00	334.510.008.600,00	107,84	(24.331.675.200,00)
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	11.081.542.821,00	11.626.442.821,00	104,92	(544.900.000,00)
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	1.092.303.000,00	936.104.334,00	85,70	156 198.666,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.092.303.000,00	936.104.334,00	85,70	156 198.666,00
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.5.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember dari Tahun 2019 hingga 2023 mengalami kenaikan yang fluktuatif. Pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp124.253.336.593,61 dari tahun 2022 atau 3,03%. Rincian perolehan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 6 Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 s.d. 2023

TAHUN	REALISASI (Rp)	PENINGKATAN/ (PENURUNAN) (Rp)
2019	667.598.426.909,96	(121.596.283.324,41)
2020	593.175.066.985,65	(74 423.359.924,31)
2021	659.649.404.423,24	66.474.337.437,59
2022	640.243.830.361,32	19 405 574 061,92
2023	764.496.302.893,85	(124 252 472 532,53)

Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp764.496.302.893,85 atau sebesar 90,37% dari target Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp845.987.143.485,00. Realisasi pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar Rp124.252.472.532,53 atau sebesar 16,25%.

Tabel 3. 6 Rincian Realisasi dan Target PAD Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	322.450.000.000,00	288.151.785.388,00	89,36
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	30.283.548.920,00	27.374.994.636,00	90,40
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.189.012.400,00	7.189.012.393,75	100,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	486.064.582.165,00	441.780.510.476,10	90,89
	JUMLAH	**845.987.143.485,00**	**764.496.302.893,85**	**90,37**

3.1.5.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2023 memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp3.191.994.244.040,00 atau 101,34% dari target Anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp3.149.862.264.569,00. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana perimbangan yang terealisasi sebesar Rp2.522.861.210.219,00 dari target anggaran sebesar Rp2.504.510.973.348,00 atau 100,73%, pendapatan Transfer Pemerintah pusat-lainnya yang terealisasi sebesar Rp322.996.582.400,00 dari target anggaran sebesar Rp324.091.415.000,00 atau 99,66 %, dan pendapatan transfer antar Daerah yang terealisasi sebesar Rp346.136.451.421,00 dari target anggaran sebesar Rp321.259.876.221,00 atau 107,84%. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4.1	**PENDAPATAN TRANSFER**			
4.2.01.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan**	**2.504.510.973.348,00**	**2.522.861.210.219,00**	**100,73**
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	198.680.665.988,00	210.923.988.652,00	106,16
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.687.191.605.000,00	1.704.938.164.985,00	101,05
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	49.843.643.000,00	45.036.717.101,00	90,36
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	568.795.059.360,00	561.962.339.481,00	98,80
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - lainnya**	**324.091.415.000,00**	**322.996.582.400,00**	**99,66**
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	324.091.415.000,00	322.996.582.400,00	99,66
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**321.259.876.221,00**	**346.136.451.421,00**	**107,74**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	310.178.333.400,00	334.510.008.600,00	107,84
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	11.081.542.821,00	11.626.442.821,00	104,92
	JUMLAH	**3.149.862.264.569,00**	**3.191.994.244.040,00**	**101,34**

3.1.5.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2023 memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp936.104.334,00 atau sebesar 85,70% dari target Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp1.092.303.000,00. Realisasi Lain-lain pendapatan yang Sah di tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar Rp27.698.725.099,00 atau sebesar 2,95%.

Tabel 3. 8 Rincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.092.303.000,00	936.104.334,00	85,70
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**1.092.303.000,00**	**936.104.334,00**	**85,70**

Perbandingan antara Anggaran dan realisasi pendapatan setiap OPD Kabupaten Jember untuk tahun anggaran 2023 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Per OPD Tahun Anggaran 2023

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	47.340.000	32.140.000,00	67,89
2	Dinas Kesehatan	449.064.000	344.643.500,00	76,75
3	Puskesmas Koncong	1.924.674.541	1.784.587.817,18	92,72
4	Puskesmas Cakru	1.065.906.216	1.116.547.603,21	104,75
5	Puskesmas Gumukmas	2.002.050.925	1.859.208.328,48	92,87
6	Puskesmas Tembokrejo	1.034.275.237	1.075.342.354,10	103,97
7	Puskesmas Puger	2.034.244.716	2.168.195.938,56	106,58
8	Puskesmas Kasiyan	1.544.488.159	1.269.381.341,48	82,19
9	Puskesmas Wuluhan	2.641.360.989	2.817.231.676,03	106,66
10	Puskesmas Lojejer	1.402.233.364	1.428.501.123,64	101,87
11	Puskesmas Ambulu	2.783.762.226	2.744.589.273,48	98,59
12	Puskesmas Sabrang	1.069.672.755	1.147.294.269,80	107,26
13	Puskesmas Andongsari	720.042.261	771.564.894,89	107,16
14	Puskesmas Tempurejo	2.518.341.132	2.592.876.015,25	102,96
15	Puskesmas Curahnongko	1.392.522.036	1.388.886.177,42	99,74
16	Puskesmas Silo I	1.776.773.043	2.036.254.852,07	114,60
17	Puskesmas Silo II	2.340.437.676	2.358.275.542,46	100,76
18	Puskesmas Mayang	2.780.120.817	2.857.435.036,67	102,78
19	Puskesmas Mumbulsari	3.273.191.237	3.237.071.168,92	98,90
20	Puskesmas Jenggawah	2.242.578.235	2.346.414.582,59	104,63
21	Puskesmas Kemuningsari	1.304.687.304	1.207.668.775,13	92,56
22	Puskesmas Ajung	3.093.741.328	3.438.560.208,39	111,15
23	Puskesmas Karangduren	1.143.446.280	1.279.952.962,41	111,94

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
24	Puskesmas Rambipuji	1.981.810.758	2.010.796.963,44	101,46
25	Puskesmas Balung	1.799.900.440	1.654.170.454,53	91,90
26	Puskesmas Nogosari	612.014.391	919.583.367,13	150,26
27	Puskesmas Umbulsari	2.043.750.896	2.064.323.728,72	101,01
28	Puskesmas Paleran	1.263.511.007	1.277.755.246,26	101,13
29	Puskesmas Semboro	1.613.601.665	1.758.096.907,95	108,95
30	Puskesmas Jombang	2.011.770.978	1.578.473.031,56	78,46
31	Puskesmas Sumberbaru	3.337.948.379	3.120.478.115,72	93,48
32	Puskesmas Rowotengah	1.525.303.455	1.605.724.169,12	105,27
33	Puskesmas Tanggul	2.946.701.332	2.728.302.279,68	92,59
34	Puskesmas Klatakan	1.172.114.566	1.222.330.950,15	104,28
35	Puskesmas Bangsalsari	3.405.299.355	3.479.404.662,95	102,18
36	Puskesmas Sukorejo	1.326.209.730	1.353.640.768,89	102,07
37	Puskesmas Panti	3.040.036.818	2.764.986.968,15	90,95
38	Puskesmas Sukorambi	1.937.648.511	2.003.094.490,14	103,38
39	Puskesmas Arjasa	2.179.136.148	2.272.181.293,99	104,27
40	Puskesmas Pakusari	1.990.158.491	1.749.575.911,97	87,91
41	Puskesmas Kalisat	4.123.163.377	3.738.202.323,69	90,66
42	Puskesmas Ledokombo	3.770.402.483	3.857.314.053,97	102,31
43	Puskesmas Sumberjambe	3.441.538.231	3.561.785.036,60	103,49
44	Puskesmas Sukowono	3.879.603.205	4.038.163.423,16	104,09
45	Puskesmas Jelbuk	1.609.243.504	1.834.170.775,09	113,98
46	Puskesmas Kaliwates	1.755.691.988	1.840.269.441,19	104,82
47	Puskesmas Mangli	1.099.276.105	1.195.014.285,60	108,71
48	Puskesmas Jemberkidul	882.481.509	856.743.218,78	97,08
49	Puskesmas Sumbersari	2.441.506.166	2.479.344.600,45	101,55
50	Puskesmas Gladakpakem	806.880.564	856.407.146,45	106,14
51	Puskesmas Patrang	2.026.947.518	1.837.283.413,08	90,64
52	Puskesmas Banjarsongon	1.402.670.118	1.393.736.145,67	99,36
53	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung - Blud	66.242.400.000	68.970.449.162,86	104,12
54	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi - Blud	205.500.000.000	215.103.491.419,42	104,67
55	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat - Blud	38.392.570.000	31.605.877.209,51	82,32
56	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	345.000.000	915.191.175,00	265,27
57	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	16.000.000	23.360.000,00	146,00
58	Satuan Polisi Pamong Praja	2.808.000	3.045.000,00	108,44
59	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	237.500.000	258.690.000,00	108,92
60	Dinas Lingkungan Hidup	110.000.000	316.495.000,00	287,72
61	Dinas Perhubungan	14.037.320.160	12.614.048.511,00	89,86
62	Dinas Komunikasi Dan Informatika	540.000.000	1.509.192.555,00	279,48

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
63	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.240.000.000	1.139.051.683,00	35,16
64	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	180.000.000	322.940.000,00	179,41
65	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.306.362.000	2.533.035.003,00	76,61
66	Dinas Perikanan	322.500.000	216.060.000,00	67,00
67	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	7.706.562.760	7.373.001.415,00	95,67
68	Sekretariat Daerah	125.000.000	182.100.000,00	145,68
69	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd	3.196.073.619.969	3.209.856.241.129,82	100,43
70	Badan Pendapatan Daerah	358.552.792.000	302.130.405.388,00	84,26
	JUMLAH	**3.996.941.711.054,00**	**3.957.426.651.267,86**	**99,01**

3.1.5.4 Target Realisasi Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Jember Menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp4.118.279.658.762,00 di tahun 2023 dan terealisasi sebesar Rp3.802.222.061.677,92 atau sebesar 92,33%. Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(KENAIKAN/PENURUNAN)	
		TAHUN 2023	TAHUN 2023	(Rp)	%
5	**BELANJA DAERAH**	**4.118.279.658.762,00**	**3.802.222.061.677,92**	316.057.597.084,08	92,33
5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.288.813.960.686,00**	**3.015.559.884.677,66**	273.254.065.907,34	91,69
5.1.01	Belanja Pegawai	1.506.793.438.014,00	1.361.120.333.591,47	145 673 104.422,53	90,33
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.472.091.271.603,00	1.354.258.354.206,19	117.832.917.396,81	92,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	277.187.318.968,00	270.995.238.880,00	6.192.080.088,00	97,77
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	32.741.922.000,00	29.185.958.000,00	3.555.964.000,00	89,14
5.2	**BELANJA MODAL**	**260.564.466.920,00**	**232.163.748.376,26**	**28.400.717.543,74**	**89,10**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.421.865.814,00	79.716.522.691,50	19.705.343.122,50	80,18
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.165.714.406,00	54.635.641.878,00	5.530 072.528,00	90,81
5.2.04	Belanja Modal Jalan Jaringan, dan Irigasi	45.736.033.942,00	43.233.220.730,76	2.502.813.211,24	94,53
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	54.734.987.026,00	54.351.340.328,00	383.646.698,00	99,30
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	505.864.732,00	227.022.748,00	278.841.984,00	44,88
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**46.162.296.180,00**	**31.854.316.147,00**	**13.307.981.033,00**	**70,63**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(KENAIKAN/PENURUNAN)	
		TAHUN 2023	TAHUN 2023	(Rp)	%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	45.162.296.180,00	31.854.315.147,00	13.307.981.033,00	70,53
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**523.738.946.077,00**	**522.644.113.477,00**	**1.094.832.600,00**	**99,79**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	0,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	501.238.946.077,00	500.144.113.477,00	1.094.832.600,00	99,78

3.1.5.4.1 Belanja Operasi

Pemerintahan Kabupaten Jember mengganggarkan belanja operasi tahun 2023 sebesar Rp3.288.813.950.585,00 dan terealisasi sebesar Rp3.015.559.884.677,66 atau sebesar 91,69% dari total belanja daerah. Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Rincian Target dan Realisasi Belanja Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.506.793.438.014,00	1.361.120.333.591,47	90,33
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.472.091.271.603,00	1.354.258.354.206,19	92,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	277.187.318.968,00	270.995.238.880,00	97,77
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	32.741.922.000,00	29.185.958.000,00	89,14
	JUMLAH	**3.288.813.950.585,00**	**3.015.559.884.677,66**	**91,69**

Dari total belanja Operasi Kabupaten Jember, Belanja Pegawai di tahun 2023 memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp1.361.120.333.591,47 atau sebesar 90,33%. Belanja Barang dan Jasa memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp1.354.258.354.206,19 atau sebesar 92,00%. Belanja Hibah memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp270.995.238.880,00 atau 97,77% dan Belanja Bantuan Sosial memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp29.185.958.000,00 atau 91,69%.

3.1.5.4.2 Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Jember menganggarkan Belanja Modal di tahun 2023 sebesar Rp260.564.465.920,00 dan terealisasi sebesar Rp232.163.748.376,26 atau 89,10%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Rincian Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.421.865.814,00	79.716.522.691,50	80,18

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.165.714.406,00	54.635.641.878,00	90,81
5.2.04	Belanja Modal Jalan Jaringan, dan Irigasi	45.736.033.942,00	43.233.220.730,76	94,53
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	54.734.987.026,00	54.351.340.328,00	99,30
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	505.864.732,00	227.022.748,00	44,88
	JUMLAH	**260.564.465.920,00**	**232.163.748.376,26**	**89,10**

Dari total belanja Modal Kabupaten Jember tahun 2023, Belanja Modal Tanah tidak memberikan kontribusi realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp79.716.522.691,50 atau sebesar 80,18%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan memberikan kontribusi sebesar Rp54.635.641.878,00 atau sebesar 90,81% sedangkan Belanja Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp43.233.220.730,76 atau sebesar 94,53 % dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp54.351.340.328,00 atau sebesar 99,30%. Dan belanja modal Aset Lainnya memberikan kontribsi sebesar Rp227.022.748,00 atau sebesar 44,88%

3.1.5.4.3 Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Jember menganggarkan Belanja Tidak Terduga tahun 2023 sebesar Rp45.162.296.180,00 dan terealisasi sebesar Rp31.854.315.147,00 atau sebesar 70,53 %. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tidak Terduga tahun 2023 sebagai berikut

Tabel 3. 13 Rincian Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5.3	BELANJA TAK TERDUGA			
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	45.162.296.180,00	31.854.315.147,00	70,53
	JUMLAH	**45.162.296.180,00**	**31.854.315.147,00**	**70,53**

3.1.5.4.4 Belanja Transfer

Pemerintah Kabupaten Jember menganggarkan Belanja Transfer tahun 2023 sebesar Rp523.738.946.077,00 dan terealisasi sebesar Rp522.644.113.477,00 atau sebesar 99,79%. Rincian anggaran dan realisasi belanja Transfer tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Rincian Target dan Realisasi Transfer Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	501.238.946.077,00	500.144.113.477,00	99,78
	JUMLAH	523.738.946.077,00	522.644.113.477,00	99,79

Dari total Belanja Transfer Kabupaten Jember tahun 2023, Belanja Bagi Hasil memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp22.500.000.000,00 atau sebesar 100%, Belanja Bantuan Keuangan memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp500.144.113.477,00 atau sebesar 99,79%. Anggaran dan realisasi belanja setiap OPD Kabupaten Jember untuk tahun anggaran 2023 dijelaskan dibawah ini :

Tabel 3. 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Per OPD Tahun Anggaran 2023

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	BELANJA OPERASI & MODAL	**4.118.279.658.762,00**	**3.802.222.061.677,92**	**92,33**
1	Dinas Pendidikan	1.323.485.193.187	1.272.423.836 626,00	96,14
2	Dinas Kesehatan	380.375.650.501	363.658.765.570,00	95,61
3	Puskesmas Kencong	2.061.933.943	1 754 271 367,00	85,08
4	**Puskesmas Cakru**	1.082.780.950	1.005.186.321,00	92,83
5	**Puskesmas Gumukmas**	2.101.432.752	1.446.837.973,00	68,85
6	Puskesmas Tembokrejo	1.038.361.639	910.040.170,00	87,64
7	Puskesmas Puger	2.131.137.884	1.841.330.574,00	86,40
8	Puskesmas Kasiyan	1.592.876.817	1.104.036.340,00	69,31
9	Puskesmas Wuluhan	2 932.545 229	2.496.905.172,00	85,14
10	Puskesmas Lojejer	1.477.727.677	1.321.725.033,00	89,44
11	Puskesmas Ambulu	3.245.393.197	2.619.744.328,00	80,72
12	Puskesmas Sabrang	1.122.557.923	996.549.980,00	88,77
13	Puskesmas Andongsari	721.247.299	693.408.173,00	96,14
14	Puskesmas Tempurejo	2.616.580.314	2.501.467.545,00	95,60
15	Puskesmas Curahnongko	1.452.083.859	1.327.559.088,00	91,42
16	Puskesmas Silo I	1.834.631.656	1.642.830.059,00	89,55
17	Puskesmas Silo Ii	3.468.249.976	2.113.345.936,00	60,93
18	**Puskesmas Mayang**	3.696.788.199	2.611.346.439,00	70,64
19	Puskesmas Mumbulsari	6.974.197.534	3.036 216.143,00	43,53
20	Puskesmas Jenggawah	2.462.342.543	2.135.222 244,00	86,72
21	Puskesmas Kemuningsari	1.381.175.174	1 096.898.309,00	79,42
22	Puskesmas Ajung	3.477.035.355	2.975.330.353,00	85,57
23	**Puskesmas Karangduren**	1.149.985.451	1.121.112.841,00	97,49
24	Puskesmas Rambipuji	2.158.242.157	1.738.006 058,00	80,53
25	**Puskesmas Balung**	1.974.330.833	1.550.722.682,00	78,54

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	BELANJA OPERASI & MODAL	4.118.279.658.762,00	3.802.222.061.677,92	92,33
26	Puskesmas Nogosari	632.733.203	612.104.374,00	96,74
27	Puskesmas Umbulsari	2.053.677.083	1.939.266.931,00	94,43
28	Puskesmas Paleran	1.289.048.766	1.172.409.290,00	90,95
29	Puskesmas Semboro	1.962.325.121	1.607.494.879,00	81,92
30	Puskesmas Jombang	2.195.799.140	1.565.338.924,00	71,29
31	Puskesmas Sumberbaru	4.009.812.874	3.100.222.678,00	77,32
32	Puskesmas Rowotengah	2.531.783.108	1.294.386.813,00	51,13
33	Puskesmas Tanggul	3.846.468.104	2.530.929.437,00	65,80
34	Puskesmas Klatakan	1.452.358.534	1.169.992.410,00	80,56
35	Puskesmas Bangsalsari	4.242.637.107	3.099.116.721,00	73,05
36	Puskesmas Sukorejo	1.438.820.000	1.314.363.987,00	91,35
37	Puskesmas Panti	3.385.090.592	2.327.097.598,00	68,75
38	Puskesmas Sukorambi	2.091.718.517	1.769.851.996,00	84,61
39	Puskesmas Arjasa	2.401.935.147	2.155.391.189,00	89,74
40	Puskesmas Pakusari	2.203.803.704	1.590.588.794,00	72,17
41	Puskesmas Kalisat	7.060.065.636	3.575.624.137,00	50,65
42	Puskesmas Ledokombo	5.321.287.191	3.765.944.658,00	70,77
43	Puskesmas Sumberjambe	4.270.121.207	3.440.128.992,00	80,56
44	Puskesmas Sukowono	4.364.070.767	3.454.933.956,00	79,17
45	Puskesmas Jelbuk	1.700.459.806	1.608.810.883,00	94,61
46	Puskesmas Kaliwates	1.846.867.745	1.733.797.751,00	93,88
47	Puskesmas Mangli	1.131.928.095	1.045.700.964,79	92,38
48	Puskesmas Jemberkidul	903.667.877	824.866.915,00	91,28
49	Puskesmas Sumbersari	2.446.172.435	2.238.956.225,00	91,53
50	Puskesmas Gladakpakem	820.775.438	731.502.705,00	89,12
51	Puskesmas Patrang	3.103.432.089	1.806.864.905,00	58,22
52	Puskesmas Banjarsengon	1.429.591.730	1.153.828.343,00	80,71
53	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung - Blud	74.026.239.572	71.139.841.738,37	96,10
54	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi - Blud	229.616.568.353	219.193.972.148,00	95,46
55	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat - Blud	42.674.348.447	33.895.299.213,00	79,43
56	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	95.469.200.557	89.362.801.745,76	93,60
57	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	161.980.893.602	151.645.453.860,00	93,62
58	Satuan Polisi Pamong Praja	28.721.588.152	26.486.465.234,00	92,22
59	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.695.868.214	15.248.676.945,00	77,42
60	Dinas Sosial	60.979.145.376	54.326.348.943,00	89,09
61	Dinas Tenaga Kerja	15.308.539.115	13.359.116.248,00	87,27

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	BELANJA OPERASI & MODAL	4.118.279.658.762,00	3.802.222.061.677,92	92,33
62	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	31.207.988.197	28.606.665.719,00	91,66
63	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	14.064.874.059	13.064.916.149,00	92,89
64	Dinas Lingkungan Hidup	37.661.493.997	35.642.491.931,00	94,64
65	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.534.397.527	9.294.471.653,00	88,23
66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	15.925.921.582	14.974.680.204,00	94,03
67	Dinas Perhubungan	33.236.289.750	31.606.039.690,00	95,09
68	Dinas Komunikasi Dan Informatika	23.620.884.583	22.401.285.688,00	94,84
69	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	9.622.065.514	7.763.474.858,00	80,68
70	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.259.625.185	5.824.146.601,00	80,23
71	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	23.068.303.032	22.106.398.159,00	95,83
72	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	17.330.171.062	16.324.245.878,00	94,20
73	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	7.087.098.971	5.930.029.874,00	83,67
74	Dinas Perikanan	6.483.016.163	5.754.588.016,00	88,76
75	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	78.609.982.723	67.429.205.133,00	85,78
76	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	22.350.351.771	21.219.780.332,00	94,94
77	Sekretariat Daerah	140.830.879.659	122.308.692.648,00	86,85
78	Sekretariat Dowan Perwakilan Rakyat Daerah	93.750.290.466	81.287.786.070,00	86,71
79	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	17.593.423.756	14.706.740.851,00	83,59
80	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd	610.842.854.593	588.857.572.037,00	96,40
81	Badan Pendapatan Daerah	45.167.319.639	41.001.174.641,00	90,78
82	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	75.516.236.771	26.816.407.698,00	35,51
83	Inspektorat	13.443.767.141	11.761.141.605,00	87,48
84	Kecamatan Ajung	3.534.122.249	3.085.905.896,00	87,32
85	Kecamatan Kalisat	4.518.350.911	3.707.174.459,00	82,05
86	Kecamatan Kaliwates	15.493.912.885	12.096.270.003,00	78,07
87	Kecamatan Kencong	3.739.669.394	3.114.077.597,00	83,27
88	Kecamatan Ledokombo	3.651.502.088	3.263.675.877,00	89,38
89	Kecamatan Mayang	3.558.872.538	3.002.619.063,00	84,37
90	Kecamatan Mumbulsari	3.515.592.813	3.070.036.284,00	87,33
91	Kecamatan Pakusari	3.192.371.716	2.857.891.217,00	89,52
92	Kecamatan Patrang	15.170.568.935	12.564.365.145,00	82,82

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	BELANJA OPERASI & MODAL	4.118.279.658.762,00	3.802.222.061.677,92	92,33
93	Kecamatan Puger	4.060.244.146	3.648.593.974,00	89,86
94	Kecamatan Ambulu	4.042.925.439	3.572.269.984,00	88,36
95	Kecamatan Rambipuji	3.854.768.097	3.667.310.516,00	95,14
96	Kecamatan Semboro	4.018.151.970	3.346.878.710,00	83,29
97	Kecamatan Silo	4.211.078.191	3.756.696.612,00	89,21
98	Kecamatan Sukorambi	3.083.797.805	3.007.344.172,00	97,52
99	Kecamatan Sukowono	4.001.295.941	3.525.501.107,00	88,11
100	Kecamatan Sumberbaru	4.349.885.004	3.364.542.893,00	77,35
101	Kecamatan Sumberjambe	3.639.168.117	3.058.606.133,00	84,05
102	Kecamatan Sumbersari	15.625.777.047	12.715.415.740,00	81,37
103	Kecamatan Tanggul	4.657.120.684	4.014.889.779,00	86,21
104	Kecamatan Tempurejo	3.400.173.407	2.937.857.050,00	86,40
105	Kecamatan Arjasa	3.585.414.963	3.064.347.153,00	85,47
106	Kecamatan Umbulsari	4.231.208.525	3.437.517.304,00	81,24
107	Kecamatan Wuluhan	3.972.489.210	3.566.313.929,00	89,78
108	Kecamatan Panti	4.599.282.468	3.728.554.838,00	81,07
109	Kecamatan Balung	3.898.085.541	3.675.452.192,00	94,29
110	Kecamatan Bangsalsari	4.121.189.047	3.881.767.126,00	94,19
111	Kecamatan Gumukmas	3.973.567.698	3.628.278.209,00	91,31
112	Kecamatan Jelbuk	3.480.574.189	2.991.066.481,00	85,94
113	Kecamatan Jenggawah	3.839.171.035	3.221.638.966,00	83,91
114	Kecamatan Jombang	3.427.455.027	3.239.088.691,00	94,50
115	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	74.001.311.088	72.317.991.288,00	97,73
	JUMLAH	4.118.279.658.762,00	3.802.222.061.677,92	92,33

3.1.5.5 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah. Pencapaian kinerja keuangan terkait dengan pembiayaan daerah sebagai berikut :

Tabel 3. 16 Rincian Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121.337.947.708,00	121.391.890.210,93	100,04

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	121.337.947.707,00	121.337.947.710,93	100,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	53.942.500,00	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**121.337.947.707,00**	**121.391.890.210,93**	**100,04**

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur yang dapat dicapai setiap pos pendapatan dan belanja daerah. Namun dalam pengelolaan dan pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2023 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

a. Perencanaan yang belum optimal sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien;
b. Pada pelaksanaan anggaran pendapatan terdapat kendala yang mempengaruhi relisasi pendapatan belum optimal, antara lain Peraturan Daerah sebagai dasar penetapan tarif masih dalam proses, sistem aplikasi dalam proses perbaikan serta gagal kontrak hasil pemanfaatan barang milik daerah;
c. Pelaksanaan anggaran belanja khususnya pada belanja gaji dan tunjangan PPPK terdapat selisih yang signifikan terkait jumlah PPPK formasi tahun 2023 yang dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 yaitu sebanyak 2.869 orang dengan jumlah formasi pengadaan PPPK yang telah terbayar sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 781 orang yang mengakibatkan realisasi belum maksimal.

Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif yang perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang antara lain:

1) Optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta sosialisasi teknis secara berkala serta melaksanakan tender ulang terkait hasil pemanfaatan barang milik daerah;
2) Menerapkan program prioritas dalam pengalokasian anggaran dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah, serta melakukan antisipasi perubahan-perubahan kondisional yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan

3) Menerapkan evaluasi berkala terhadap capaian program dan kegiatan sesuai dengan tenggat waktu yang telah direncanakan;
4) Optimalisasi perencanaan dan penganggaran berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya maupun perubahan-perubahan kondisional pada tahun berjalan, sehingga penyerapan anggaran dapat lebih efektif dan efisien.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah tahun 2023 menggunakan kebijakan akuntansi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Atas dasar peraturan tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Jember, dalam Tahun 2014 telah menyusun Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember Berbasis Akrual beserta perubahannya dan Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember.

Perubahan regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah serta perubahan sistem aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah baik perencanaan dan penganggaran membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian termasuk kebijakan akuntansi pemerintah daerah serta sistem akuntansinya. Pemerintah Kabupaten Jember telah menyusun draft kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi sesuai regulasi yang baru namun mengingat dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan serta akuntansi dan pelaporan aplikasi SIPD pada tahun 2023 baru dalam tahap adaptasi, maka proses bisnis masih banyak ditemukan kendala.

4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Jember.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dimaksud terdiri dari 115 OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember pada Tahun 2023 dalam tabel.

Tabel Daftar Entitas Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

NO	NAMA OPD	NO	NAMA OPD
1	Dinas Pendidikan	58	Kecamatan Kencong
2	Dinas Kesehatan	59	Kecamatan Gumukmas
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Sumber Daya Air	60	Kecamatan Umbulsari
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Cipta Karya	61	Kecamatan Puger

NO	NAMA OPD	NO	NAMA OPD
5	Satuan Polisi Pamong Praja	62	Kecamatan Jombang
6	Dinas Sosial	63	Kecamatan Balung
7	Dinas Tenaga Kerja	64	Kecamatan Wuluhan
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Bencana	65	Kecamatan Ambulu
9	Dinas Lingkungan Hidup	66	Puskesmas Kencong
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	67	Puskesmas Cakru
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	68	Puskesmas Gumukmas
12	Dinas Perhubungan	69	Puskesmas Tembokrejo
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	70	Puskesmas Puger
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	71	Puskesmas Kasiyan
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72	Puskesmas Wuluhan
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	73	Puskesmas Lojejer
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	74	Puskesmas Ambulu
18	Dinas Perikanan	75	Puskesmas Sabrang
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	76	Puskesmas Andongsari
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	77	Puskesmas Tempurejo
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	78	Puskesmas Curahnongko
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	79	Puskesmas Silo I
23	Sekretariat Daerah	80	Puskesmas Silo II
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	81	Puskesmas Mayang
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82	Puskesmas Mumbulsari
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	83	Puskesmas Jenggawah
27	Inspektorat	84	Puskesmas Kemuningsari
28	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	85	Puskesmas Ajung
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	86	Puskesmas Rambipuji
30	Badan Pendapatan Daerah	87	Puskesmas Nogosari
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	88	Puskesmas Balung
32	RSD dr. Soebandi	89	Puskesmas Karangduren
33	RSD Balung	90	Puskesmas Umbulsari
34	RSD Kalisat	91	Puskesmas Paleran
35	Kecamatan Kaliwates	92	Puskesmas Semboro
36	Kecamatan Patrang	93	Puskesmas Jombang
37	Kecamatan Sumbersari	94	Puskesmas Sumberbaru
38	Kecamatan Arjasa	95	Puskesmas Rowotengah
39	Kecamatan Jelbuk	96	Puskesmas Tanggul
40	Kecamatan Pakusari	97	Puskesmas Klatakan

NO	NAMA OPD	NO	NAMA OPD
41	Kecamatan Sukowono	98	Puskesmas Bangsalsari
42	Kecamatan Kalisat	99	Puskesmas Sukorejo
43	Kecamatan Ledokombo	100	Puskesmas Panti
44	Kecamatan Sumberjambe	101	Puskesmas Sukorambi
45	Kecamatan Mayang	102	Puskesmas Arjasa
46	Kecamatan Silo	103	Puskesmas Pakusari
47	Kecamatan Mumbulsari	104	Puskesmas Kalisat
48	Kecamatan Tempurejo	105	Puskesmas Ledokombo
49	Kecamatan Rambipuji	106	Puskesmas Sumberjambe
50	Kecamatan Jenggawah	107	Puskesmas Sukowono
51	Kecamatan Panti	108	Puskesmas Jelbuk
52	Kecamatan Sukorambi	109	Puskesmas Kaliwates
53	Kecamatan Ajung	110	Puskesmas Mangli
54	Kecamatan Tanggul	111	Puskesmas Jember Kidul
55	Kecamatan Semboro	112	Puskesmas Sumbersari
56	Kecamatan Sumberbaru	113	Puskesmas Gladak Pakem
57	Kecamatan Bangsalsari	114	Puskesmas Patrang
		115	Puskesmas Banjarsengon

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Di Kabupaten Jember bertindak sebagai entitas pelaporan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Selain BPKAD, terdapat 53 (lima puluh tiga) unit kerja sebagai entitas pelaporan yaitu Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas, karena berstatus sebagai PPK BLUD. PPK BLUD sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan 7 (tujuh) jenis laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian 5 (lima) jenis laporan keuangan, yaitu LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK digabungkan dengan laporan entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, yaitu pada PPKD. Hal ini didasarkan pada ketentuan paragraf 116 sampai dengan 122, PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLUD.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah basis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Jember menyajikan saldo Akun-Akun. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam Cal.K dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jember adalah:

- Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis;
- Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut;
- Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi atau sejumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang;
- Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah;
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember

4.2.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah; Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Kabupaten Jember atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Atas penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.2.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar Kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan atau pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan- LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pengukuran Pendapatan-LO yang

menggunakan *Self Assesment* dicatat sebesar nilai yang dicantumkan dalam Surat Ketetapan. Pendapatan-LO yang dipungut melalui sistem *Official Assesment* dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Ketetapan atau dokumen yang dipersamakan. Pendapatan-LO non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.2.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah untuk seluruh transaksi melalui mekanisme belanja LS di SKPD dan PPKD setelah diterbitkan SP2D untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD maupun PPKD.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran atau melalui mekanisme belanja UP/GU/TU pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD yang selanjutnya disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah ataupun belanja yang pembayarannya tidak melalui kas umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Contohnya adalah belanja BLUD, BOS, ataupun JKN belanja diakui berdasarkan dan sesuai dengan tanggal Surat Pengesahan Belanja (SP2B).

Belanja disajikan dalam LRA dikelompokan atas belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

4.2.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban-LO diakui pada saat timbulnya kewajiban dan atau terjadinya konsumsi aset dan atau pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diakui pada saat :

1) Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya adalah tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
2) Terjadinya konsumsi aset, adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

4.2.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan dijabarkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam perda tentang pembentukan dana cadangan dengan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

4.2.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah;Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas meliputi investasi yang mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab

Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Badan Layanan Umum (BLUD), Dana Kapitasi FTKP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan Dana BOS. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik, tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah memiliki saldo uang elektronik ataupun dalam bentuk lain yang dapat dipersamakan sebagai kas yang dapat digunakan untuk pembayaran pada satu atau beberapa produk/jasa, sepanjang masih memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, maka aset dimaksud dapat juga dikategorikan sebagai setara kas.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Dana Kapitasi FKTP dan Dana BOS. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Transaksi atas rekening kas dan setara kas diakui pada saat terjadinya transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yaitu berupa:

a. Penerimaan uang tunai, cek, atau giro bilyet;
b. Penerbitan SP2D/SP2B;
c. Diterimanya nota debet/nota kredit dari bank atas mutasi yang terjadi pada rekening bank;
d. Pembayaran/penyetoran;
e. berupa uang tunai, cek, giro bilyet;
f. Pencairan dan penempatan deposito.

4.2.7 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pengukuran investasi berbeda-beda menurut jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga investasi, komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya. Sementara investasi dalam bentuk non saham, misalnya deposito berjangka waktu enam bulan, dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Investasi Jangka Panjang.

1) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

2) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

a. Investasi jenis ini yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar biaya perolehannya.

b. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c. Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Metode penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

a) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi, namun tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah (tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham) akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

1) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

2) Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah bersifat nonpermanen-dana bergulir. Pada saat perolehan, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) sebagaimana diterapkan dalam menghitung NRV piutang. Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika SKPD pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih, dan dana bergulir yang dapat ditagih.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a. kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
b. kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
c. kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
d. kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Perolehan investasi jangka penjang dicatat saat BUD melakukan pencairan SP2D-LS sebagai dasar pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. Fungsi akuntansi PPKD mencatat

penambahan pada akun investasi jangka panjang dan pengurangan saldo kas di kas daerah pada neraca serta mencatat pengeluaran pembiayaan pada laporan realisasi anggaran.

4.2.8 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;Pengakuan piutang dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi;
- Piutang terdiri atas piutang pajak,piutang retribusi,piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan dan piutang lain-lain;
- Penyajian piutang berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang, yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan
- Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember;
- Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut jenis/obyek piutang, umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut.

Tabel Penggolongan Kualitas Piutang

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	>2 s.d 3	>3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	Lancar	K L	R	R	Macet
2	Piutang Retribusi	Lancar	K L	R	Macet	Macet
3	Bagian Laba BUMN/D	Lancar	K L	R	Macet	Macet
4	Biaya Dibayar di Muka	Lancar	K L	R	Macet	Macet
5	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	K L	R	Macet	Macet
6	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	K L	R	Macet	Macet
7	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
8	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	Lancar	K L	R	Macet	Macet
9	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	Lancar	K L	R	Macet	Macet
10	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
11	Piutang Lain-Lain	Lancar	K L	R	Macet	Macet

- Penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sebesar:
  - Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus);
  - Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- Pemberhentian Pengakuan Piutang dilakukan karena sebab sebagai berikut :
  1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/Lunas.
  2) Pemberhentian pengakuan piutang karena adanya penghapusan.

     Sesuai dengan Peraturan, penghapusan piutang dikenal dengan dua cara yaitu : Penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih, sementara penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

     Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.
  3) Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan.

     Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan, maka penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.
  4) Penerimaan kembali piutang yang telah dihapustagihkan

     Suatu piutang yang telah dihapustagihkan dan ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapustagihkan tersebut baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Penyajian piutang pendapatan adalah sebagai berikut :

a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan; atau
b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

4.2.9 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

Persediaan, merupakan aset yang berupa:

- Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah. Contoh barang habis pakai (alat tulis kantor), barang tak habis pakai (komponen peralatan) dan sebagainya;
- Bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, contoh bahan baku pembuatan alat pertanian dan sebagainya;
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual. Contoh: alat-alat pertanian setengah jadi;
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh: hewan, bibit tanaman dan sebagainya; Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

Persediaan diakui pada saat:

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau niaya yang dapat diukur dengan andal;
- diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah;
- Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar;

Khusus untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan di Rumah Sakit Daerah dan Dinas Kesehatan, pencatatan dengan

metode perpetual, yaitu dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update;

Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga pokok produksi apabila dengan memproduksi sendiri;
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

4.2.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya, sebagai berikut:

a. Tanah

   Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

   Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

   Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

   Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

   Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau

diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat;
- Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- Nilai rupiah pembelian barang atau pengeluaran untuk pembelian barang baru tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut dicatat sebagai beban dan diadministrasikan secara ekstrakomtabel. Penatausahaan atas aset-aset tersebut diperlakukan seperti persediaan/aset lainnya dengan justifikasi non asset. Untuk aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehan dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Komponen biaya aset tetap merupakan biaya perolehan suatu aset tetap yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat distribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap

aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi sesuai yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan/rehab, atau restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sesuai kebijakan akuntansi. Untuk jenis aset tetap yang biaya-biaya pemeliharaannya tidak dikapitalisasi dengan pertimbangan tidak menambah masa manfaat dan tidak menambah produktivitas serta biaya pemeliharaan masih dibawah nilai kapitalisasi maka pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.

Biaya yang dapat kapitalisasi secara langsung untuk aset konstruksi dan bangunan adalah:

a. Biaya Konstruksi Fisik

   Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual atau jenis konstruksi tertentu yang dilaksanakan secara swakelola.

b. Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi

   Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.

c. Biaya Pengawasan Konstruksi

   Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus *(straight line method)*. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel Perkiraan Masa Manfaat Aset Tetap

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT
1	3	2	1		ALAT BESAR	
1	3	2	1	1	Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat Besar Apung	10
1	3	2	1	3	Alat Bantu	7
1	3	2	2		ALAT ANGKUTAN	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT
1	3	2	2	3	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	3		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		ALAT PERTANIAN	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan	4
1	3	2	5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	3	2	7		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		ALAT LABORATORIUM	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga Praktek Sekolah	5
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Destructive Testing Laboratory	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	15
1	3	2	9		ALAT PERSENJATAAN	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	4
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	4
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10		KOMPUTER	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		ALAT EKSPLORASI	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	15
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	15
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	10

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1	3	2	13	1	Sumur	10
1	3	2	13	2	Produksi	10
1	3	2	13	3	Pengolahan Dan Pemurnian	10
1	3	2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	4
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	4
1	3	2	15	3	Alat Sar	4
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	4
1	3	2	16		ALAT PERAGA	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
1	3	2	17		PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1	3	2	18		RAMBU - RAMBU	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	4
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	4
1	3	2	19		PERALATAN OLAH RAGA	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	4
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	1		BANGUNAN GEDUNG	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	2		MONUMEN	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	3		BANGUNAN MENARA	
1	3	3	3	1	Bangunan Menara Perambuan	20
1	3	3	4		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
1	3	3	4	1	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	3	4	1		JALAN DAN JEMBATAN	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		BANGUNAN AIR	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		INSTALASI	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	10
1	3	4	4		JARINGAN	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30
1	3	5			ASET TETAP LAINNYA	
1	3	5	2		BARANG BERCORAK/KESENIAN/KEBUDAYAAN/ OLAHRAGA	
1	3	5	2	1	Alat Musik	
					Alat Musik Modern/Band	4

1. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik asset tersebut;
2. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;
3. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
4. Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset, dengan nilai perolehannya, diikuti akumulasi penyusutan, sehingga diketahui nilai buku aset tetap;
5. Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
6. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh Tengah Tahun

   Aset tetap dapat diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun, awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Perhitungan penyusutan aset tetap adalah pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh pada 31 Desember tahun anggaran berjalan.

7. Penyusutan atas Aset secara Berkelompok

Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya tahun perolehan yang sama, masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.

8. Penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
9. Apabila terdapat rehab/ penambahan kapitalisasi atas aset yang nilai perolehan aset induknya tidak diketahui atau bernilai Rp0,00 maka penambahan masa manfaat atas aset tersebut diakui sebesar 100 persen.

4.2.11 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan;Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran;Suatu aset berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
- Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
- Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Pencatatan atas penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:

a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.

b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.

c. Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dan diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (Konstruksi Dalam Pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeur*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeur dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.

f. Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- Secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersama biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut;dan
- Biaya lain bersangkutan;

4.2.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancer.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah dan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan. Pembentukan dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari RKUD ke rekening dana cadangan melalui proses pencairan SP2D-LS sebesar nilai nominal. Pembentukan dana cadangan diperlakukan sebagai mutasi tambah atas saldo dana

cadangan yang ada pada neraca. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan, misalnya berupa jasa giro atau bunga, diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan dana cadangan tersebut dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA sebesar nilai nominal.

4.2.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut.

Tabel Klasifikasi Aset Lainnya

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	*Goodwill*
	Lisensi dan *Fronchise*
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran khusus sebagai berikut :

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/Bupati/Wakil Bupati/Pihak lain. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah atau Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Sewa
2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
3) Bangun Guna Serah -- BGS (*Build, Operate, Transfer - BOT*)
4) Bangun Serah Guna -- BSG (*Build, Transfer, Operate -- BTO*)

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Paten, Hak Cipta, Merek Dagang dan Franchise
2) Software
3) Lisensi
4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
5) Aset Tak Berwujud Lainnya

d. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Pengakuan aset tidak berwujud dilakukan, jika:

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk

digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut;

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Perhitungan amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus sesuai masa manfaat aset tak berwujud atau sesuai masa aktif aset tak berwujud berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang mendasarinya. Apabila masa manfaat aset tetap tak berwujud sulit diestimasi, perhitungan masa manfaat amortisasi ditetapkan selama 5 tahun.

c. Aset Lain-Lain

Aset yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah atau tidak lagi memenuhi syarat diakui sebagai aset, maka direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4.2.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya dapat dibedakan menjadi :

a. Kewajiban Jangka Pendek, yang terdiri dari:
   1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
   2) Utang Bunga
   3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
   4) Pendapatan Diterima dimuka
   5) Utang Belanja
   6) Utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

   Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
   1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan

2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang, didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek sebagai berikut:

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode pelaporan.
2) Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya dinilai sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
4) Pendapatan Diterima Dimuka dinilai sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal pelaporan. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
5) Utang Belanja terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa akan tetapi belum dilakukan pembayaran atas perolehan barang atau jasa tersebut. Apabila rekanan menyediakan barang/jasa sesuai kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
6) Utang Jangka Pendek Lainnya diukur dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, antara lain: biaya yang masih harus dibayar per tanggal laporan, penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain. Terkait dengan utang transfer, diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non

Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah. Sedangkan pengakuan setiap jenis kewajiban.

Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- Bunga pinjaman yang terutang ada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo perjanjian restrukturisasi utang, jumlah tunggakan pinjaman.

4.2.15 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Akun ini terdiri dari :

a. Ekuitas

   Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban permerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, Aset Tetap, dan lain- lain.

b. Ekuitas SAL

   Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA.

c. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

Pengungkapan ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang- kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan
- Informasi penting lainnya.

4.2.16 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kesalahan tidak berulang

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yaitu yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan belum diterbitkan serta yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

a) Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, namun laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b) Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Terdapat beberapa koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan laporan keuangan sudah diterbitkan, antara lain:

(1) Koreksi kesalahan belanja

(a) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang menambah

posisi kas, maka dilakukan koreksi dengan menambah saldo kas dan akun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(b) Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan koreksi dengan mengurangi saldo kas dan akun saldo anggaran lebih.

(2) Koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas, baik yang menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

(3) Koreksi kesalahan beban

(a) Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas serta tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO.

(b) Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

(4) Koreksi kesalahan pendapatan-LRA

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.

(5) Koreksi kesalahan pendapatan-LO

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

(6) Koreksi kesalahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiyaaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.

(7) Koreksi kesalahan kewajiban

Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

3) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah

laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

b. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.2.17 Kebijakan Akuntansi terkait Penerimaan dan Penggunaan Dana yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

Dalam pelaksanaannya tidak semua pendapatan dan pengeluaran melalui mekanisme Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Terdapat beberapa jenis penerimaan dan pengeluaran yang dapat diterima dan dikeluarkan secara langsung oleh entitas akuntansi maupun entitas yang berpola BLUD. Hal ini selaras dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dalam IPSAP 02 dijelaskan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) termasuk dalam pengertian tersebut adalah pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diakui sebagai pendapatan daerah dan juga belanja daerah.

Di Kabupaten Jember terdapat beberapa pos Laporan keuangan yang terdampak dari penerapan IPSAP 02 serta berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tersebut diantaranya :

(1) Pengakuan penerimaan dan pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah yang pendapatannya diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

(2) Pengakuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang pendapatannya diakui sebagai Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);

(3) Pengakuan penerimaan dan pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah negeri yang pendapatannya diakui sebagai Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;

(4) Pengakuan penerimaan dan pengeluaran dana peran serta masyarakat oleh entitas sekolah negeri yang pendapatannya diakui sebagai Lain-lain pendapatan daerah yang sah-Pendapatan Hibah;

(5) Pengakuan penerimaan dan pengeluaran dana blockgrant dari Pemerintah Pusat untuk sekolah negeri yang pendapatannya diakui sebagai Lain-lain pendapatan daerah yang sah-Pendapatan Hibah;

Pengakuan penerimaan dan pengeluaran dana sumbangan dari masyarakat yang dikelola oleh sub entitas akuntansi yang pendapatannya diakui sebagai Lain-lain pendapatan daerah yang sah-Pendapatan Hibah. Contoh: dana sumbangan dari masyarakat yang dikelola oleh Satuan Tugas Penanganan Bencana.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan dalam pengelolaan instansi pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Pada penjelasan tentang LRA berikut ini, memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam proses penganggaran penatausahaan dan pelaporan sudah menggunakan SIPD yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Kemendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan sudah dilakukan proses migrasi ke Aplikasi SIPD.

5.1.1 PENDAPATAN

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
3.996.941.711.054,00	3.957.426.651.267,85	3.715.160.123.903,32

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2023, Anggaran pendapatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp3.996.941.711.054,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp3.957.426.651.267,85 atau sebesar 99,01%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, realisasi pendapatan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp242.266.527.364,53 atau sebesar 6,52%.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan pada tahun 2023 dan 2022 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1.	Pendapatan asli Daerah	845.987.143.485,00	764.496.302.893,85	90,37	640.243.830.361,32

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
2	Pendapatan Transfer	3.149.862.264.569,00	3.191.994.244.040,00	101,34	3.046.281.464.109,00
3	Lain-lain Pendapatan- yang Sah	1.092.303.000,00	936.104.334,00	85,70	28.634.829.433,00
	TOTAL	3.996.941.711.054,00	3.957.426.651.267,85	99,01	3.715.160.123.903,32

Berdasarkan Tabel diatas, bahwa Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp145.712.779.931,00 atau sebasar 4,78%. Jika dibanding capaian realisasi Tahun 2022 yakni dari Rp3.046.281.464.109,00 menjadi Rp3.191.994.244.040,00, kenaikan dikarenakan pada Tahun 2023, Kabupaten Jember mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID).

Komposisi pendapatan daerah Tahun 2023 pada masing-masing jenis pendapatan terhadap jumlah pendapatan secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut :

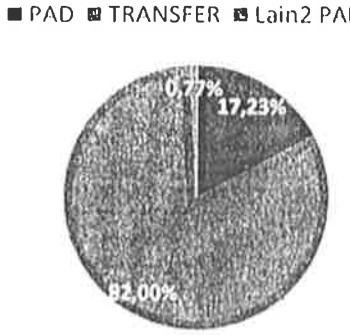

- PAD : 17,23%
- TRANSFER : 82,00%
- Lain-lain PAD : 0,77%

Berdasarkan Komposisi Pendapatan diatas dapat diketahui bahwa porsi terbesar pada Pendapatan Transfer, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember memiliki ketergantungan terhadap pendanaan Pemerintah Pusat.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp764.496.302.893,85 atau 90,37% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp845.987.143.485,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp124.252.472.532,53 atau sebesar 19,41% jika dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp640.243.830.361,32. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatur dalam Peraturan daerah dan peraturan Bupati yang mendasari penetapan pendapatan pajak dan retribusi adalah :

1. Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
2. Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
4. Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu.

Perubahan Peraturan daerah dan peraturan Bupati yang mendasari penetapan pendapatan pajak dan retribusi adalah :

1. Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
2. Perda No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
3. Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan asli daerah tahun 2023 :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Pajak Daerah	322.450.000.000,00	288.151.785.388,00	89,36	293.578.032.475,00
2	Retribusi Daerah	30.283.548.920,00	27.374.994.636,00	90,40	38.871.533.956,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.189.012.400,00	7.189.012 393,75	100,00	6 829 382 856,25
4.	Lain-lain PAD yang Sah	486.064.582.165,00	441.780.510.476,10	90,89	300 964 881 074,07
	TOTAL	**845.987.143.485,00**	**764.496,302.893,85**	**90,37**	**640.243.830.361,32**

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Persentase	Realisasi 2022 (Audited)
322.450.000.000,00	288.151.785.388,00	89,36	293.578.032.475,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp288.151.785.388,00 atau 89,36% dari Anggaran sebesar Rp322.450.000.000,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023, mengalami penurunan sebesar Rp5.426.247.087,00 atau 1,85% dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp293.578.032.475,00.

Pajak Daerah diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah yang dikelola oleh Bapenda terdiri atas :

1. **Pajak Hotel**

Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel. Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Sistem pemungutannya menggunakan self assessment dimana system pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

2. Pajak Restoran

Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10%. Sistem pemungutannya menggunakan self assessment dimana system pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

3. Pajak Hiburan

Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Tarif Pajak Hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:

Tontonan Film sebesar 10%;

- ✓ Pagelaran kesenian, music, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, bina raga sebesar 10%;
- ✓ Kesenian rakyat sebesar 5%;
- ✓ Pameran sebesar 10%;
- ✓ Diskotik, karaoke, dan klub malam sebesar 25%;
- ✓ Sirkus, acrobat, dan sulap sebesar 10%;
- ✓ Permainan Billyard, golf, bowling sebesar 10%;
- ✓ Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya sebesar 10%;
- ✓ Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran sebesar 10%;
- ✓ Pertandingan olah raga dan hiburan yang sifatnya insidentil sebesar 10%.

Sistem pemungutannya menggunakan *self assessment* dimana sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

4. Pajak Reklame

Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara reklame. Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah NSR (Nilai Sewa Reklame).

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% dimana :

- ✓ Untuk materi reklame rokok, besarnya NSR ditambah 25%;
- ✓ Setiap penambahan ketinggian reklame sampai dengan 15m pertama, besarnya NSR ditambah 20%.

Sistem pemungutannya menggunakan Official Assessment dimana sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak.

5. Pajak Penerangan Jalan.

Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subyek pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut

- ✓ Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan untuk industri;
- ✓ pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 10%;
- ✓ Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%;
- ✓ Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5%.

Sistem pemungutannya menggunakan self assessment dimana sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

6. Pajak Parkir

Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% untuk tarif pajak parkir yang cuma-cuma sebesar 10%.

Sistem pemungutannya menggunakan self assessment dimana system pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

7. Pajak Air Tanah

Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subyek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%. Sistem pemungutannya menggunakan self assessment dimana sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

8. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di kelola Bapenda oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.Subyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan batuan. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	TARIF	
1.	Asbes	3%	(Tiga Persen)
2.	Batu Tulis	2%	(Dua Persen)
3.	Batu Setengah Permata	10%	(Sepuluh Persen)
4.	Batu Kapur	5%	(Lima Persen)
5.	Batu Apung	5%	(Lima Persen)
6.	Batu Permata	10%	(Sepuluh Persen)
7.	Bentonit	4%	(Empat Persen)
8.	Dolomit	2%	(Dua Persen)
9.	Feldspar	5%	(Lima Persen)
10.	Garam Batu (Halite)	7%	(Tujuh Persen)
11.	Grafit	7%	(Tujuh Persen)
12.	Granit/Andesit		
	-Batu Pondasi	4%	(Empat Persen)
	-Batu Piring	4%	(Empat Persen)
13.	Gips	5%	(Lima Persen)
14.	Kalsit	2%	(Dua Persen)

NO.	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	TARIF	
15.	Kaolin	5%	(Lima Persen)
16.	Leusit	5%	(Lima Persen)
17.	Magnesit	5%	(Lima Persen)
18.	Mika	2%	(Dua Persen)
19.	Marmer	2%	(Dua Persen)
20.	Nitrat	4%	(Empat Persen)
21.	Opsiden	7%	(Tujuh Persen)
22.	Oker	6%	(Enam Persen)
23.	Pasir	4%	(Empat Persen)
24.	Kerikil	2%	(Dua Persen)
25.	Pasir Kuarsa	4%	(Empat Persen)
26.	Perlit	7%	(Tujuh Persen)
27.	Phospat	5%	(Lima Persen)
28.	Talk	2%	(Dua Persen)
29.	Tanah Serap (Fullers Earth)	4%	(Empat Persen)
30.	Tanah Diatome	3%	(Tiga Persen)
31.	Tanah Liat	4%	(Empat Persen)
32.	Tawas (alun)	4%	(Empat Persen)
33.	Tras	5%	(Lima Persen)
34.	Yarosif	5%	(Lima Persen)
35.	Zeolit	4%	(Empat Persen)
36.	Phiropilit	4%	(Empat Persen)
37.	Onyx	5%	(Lima Persen)
38.	Kayu Korsik	4%	(Empat Persen)
39.	Napal/Podol	2%	(Dua Persen)

Sistem pemungutannya menggunakan self assessment dimana sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP

(Nilai Jual Obyek pajak). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,110% per tahun, untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,205% per tahun. Batas minimal pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Sistem pemungutannya menggunakan Official Assessment dimana sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak.

10. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Obyek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Subyek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan adalah NPOP (Nilai Perolehan Obyek Pajak). Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (Lima persen). Sistem pemungutannya menggunakan self assessment dimana sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	7.000.000.000,00	6.792.254.303,00	97,03	6.137.395.767,00
2	Pajak Restoran	26.200.000.000,00	29.832.324.497,00	113,86	22.642.248.140,00
3	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	3.271.913.540,00	81,80	2.658.405.766,00
4	Pajak Reklame	7.000.000.000,00	5.498.514.081,00	78,55	5.849.273.525,00
5	Pajak Penerangan Jalan	95.000.000.000,00	97.719.447.053,00	102,86	90.950.363.153,00
6	Pajak Parkir	2.500.000.000,00	2.134.794.328,00	85,39	1.483.768.602,00
7	Pajak Air Tanah	750.000.000,00	805.667.522,00	107,42	667.584.015,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.000.000.000,00	9.017.713.199,00	45,09	5.013.510.575,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	80.000.000.000,00	57.750.331.276,00	72,19	56.618.901.796,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	80.000.000.000,00	75.328.825.589,00	94,16	101.556.581.136,00
	TOTAL	**322.450.000.000,00**	**288.151.785.388,00**	**89,36**	**293.578.032.475,00**

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Persentase	Realisasi 2022 (Audited)
30.283.548.920,00	27.374.994.636,00	90,40	38.871.533.956,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp27.374.994.636,00 atau 90,40% dari anggaran adalah sebesar Rp30.283.548.920,00. Realisasi Restribusi Daerah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp11.496.539.320,00 atau 29,58% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp38.871.533.956,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	22.343.674.960,00	21.726.476.775,00	97,24	33.789.274.417,00
2	Retribusi Jasa Usaha	4.398.425.960,00	3.797.631.048,00	86,34	3.032.633.425,00
3	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	3.541.448.000,00	1.850.886.813,00	52,26	2.049.626.114,00
	TOTAL	30.283.548.920,00	27.374.994.636,00	90,40	38.871.533.956,00

1. **Retribusi Jasa Umum**

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

✓ **Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan. Obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Jasa Umum Tarif Retribusi Jasa Umum terdapat pada Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi dan terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020.

✓ **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Obyek Retibusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan /kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten; Subyek Retribusi Persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan ; Wajib Retibusi Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan

persampahan kebersihan; Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terdapat pada Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020.

✓ **Retribusi Pengangkutan Sampah dari sumbernya/lokasi pembuangan**

Retribusi Pengangkutan Sampah dari sumbernya/lokasi pembuangan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Obyek Retribusi Pengangkutan Sampah dari sumbernya/lokasi pembuangan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten; Subyek Retribusi Pengangkutan Sampah dari sumbernya/lokasi pembuangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/ kebersihan; Wajib Retibusi Pengangkutan Sampah dari sumbernya/lokasi pembuangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi; Tarif Retribusi Pengangkutan Sampah dari sumbernya/lokasi pembuangan terdapat pada Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020.

✓ **Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman**

Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman yang dikelola oleh DinasPerumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Obyek Retibusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; Subyek Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman dan Pengabuan mayat adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat yang disediakan oleh pemerintah kabupaten; Wajib Retibusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman dan Pengabuan mayat adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi; Tarif Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman dan Pengabuan mayat terdapat pada Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020.

✓ **Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum**

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum secara berlangganan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum secara berlangganan adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten. Subyek Retribusi Pelayanan parkir ditepi jalan umum secara berlangganan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Wajib Retibusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum secara

berlangganan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tarif Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum secara berlangganan terdapat pada Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020.

✓ **Retribusi Pelayanan Pasar**

Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Obyek Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang. Subyek pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Wajib Retibusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tarif Retribusi Pelayanan Pasar terdapat pada Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020.

✓ **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraaan bermotor wajib uji. Subyek Retibusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Wajib Retibusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor terdapat pada Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020.

✓ **Retribusi Pemeriksaan Alat Kebakaran**

Retribusi Pemeriksaan Alat Kebakaran yang dikelola oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Obyek retribusi Pemeriksaan Alat Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Wajib Retribusi

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran terdapat pada Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020.

Anggaran pendapatan retribusi jasa umum pada tahun 2023 adalah sebesar Rp22.343.674.960,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp21.726.476.775,00 atau sebesar 97,24%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, realisasi pendapatan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp12.062.797.642,00 atau sebesar 35,70%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	449.064.000,00	344.493.500,00	76,71	12.620.764.125,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	242.632.640,00	407.953.000,00	168,14	340.773.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	8.000.000,00	7.460.000,00	93,25	8.430.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12.372.582.600,00	10.611.905.010,00	85,77	10.500.565.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	6.724.986.120,00	6.529.600.415,00	97,09	6.080.059.876,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.516.017.600,00	1.952.703.295,00	128,80	1.711.485.000,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2.808.000,00	3.045.000,00	108,44	2.360.000,00
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	477.584.000,00	349.474.000,00	73,18	322.166.000,00
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000,00	10.650.000,00	106,50	5.010.000,00
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	540.000.000,00	1.509.192.555,00	279,48	2.197.661.416,00
TOTAL		22.343.674.960,00	21.726.476.775,00	97,24	33.789.274.417,00

2. Retribusi Jasa Usaha

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas :

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten antara lain meliputi :

- Pemakaian Tanah Pengairan yang dikelola oleh DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- Pemakaian Tanah Ruang Milik Jalan yang dikelola oleh DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- Pemakaian Bangunan/Gedung Balai Serba Guna yang dikelola oleh Bag. Umum Setkab;
- Pemakaian Tanah Eks Bengkok yang dikelola oleh BPKA.

- Sewa Rumah Dinas Karyawan Pemda yang dikelola oleh BPKA.
- Sewa Rumah Dinas Kepala Puskesmas/Tenaga Medis yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.
- Sewa Rumah Dinas Camat, Dishutbun dan Diperta yang dikelola oleh Bapenda.
- Sewa Rumah Dinas Guru yang dikelola oleh Dinas Pendidikan.
- Sewa GOR, Lap Tenis PKPSO dan Stadion Se-Kab. Jember yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

Subyek Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai Kekayaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten. Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdapat pada Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020.

2) Retribusi Kios Bandara.

Retribusi Kios Bandara yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Obyek Retribusi Kios Bandara adalah penyediaan fasilitas kios yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.Subyek Retribusi Kios Bandara adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai fasilitas di kios yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten. Wajib Retribusi Kios Bandara adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Kios Bandara terdapat pada Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020.

3) Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan yang dikelola oleh Disperindag. Obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten. Subyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai fasilitas di pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten. Wajib Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan terdapat pada Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang

Retribusi Jasa Usaha dan terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020.

4) Retribusi Terminal

Retribusi Terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum. Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas yang disediakan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten. Wajib Retribusi Terminal adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Terminal terdapat pada Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020.

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Disperindag. Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parker yang disediakan, dimilik, dan/atau dikelola oleh pemerintah kabupaten. Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/ diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten. Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Tempat Khusu Parkir terdapat pada Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020.

6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Bagian Umum Setkab Obyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah kabupaten. Subyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimilik, dan/atau dikelola oleh pemerintah kabupaten. Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa terdapat pada Perda Nomor 5 Tahun 2011

Tentang Retribusi Jasa Usaha dan terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020.

7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang disediakan, dimilik dan/atau dikelola oleh pemerintah, pemerintah propinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga dari pemerintah kabupaten. Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga terdapat pada Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020.

8) Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus

Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya, dan Disperindag. Obyek Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Subyek Retribusi Penyediaan dan penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Wajib Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus terdapat pada Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020.

9) Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah Kabupaten Subyek Retribusi Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah kabupaten. Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah

orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan. Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdapat pada Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020.

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada tahun 2023 adalah sebesar Rp4.398.425.960,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp3.797.631.048,00 atau sebesar 86,34%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, realisasi pendapatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp764.997.623,00 atau sebesar 25,23%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	125.872.800,00	81.396.045,00	64,67	481.477.425,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	2.600.000,00	-	8.500.000,00
3	Retribusi Terminal	43.887.960,00	40.252.000,00	91,72	39.930.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	527.083.200,00	515.484.501,00	97,80	465.568.000,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.109.160.000,00	653.668.001,00	58,93	498.341.000,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	157.500.000,00	168.690.000,00	107,10	168.350.000,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.174.922.000,00	2.065.540.501,00	94,97	1.104.747.000,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	260.000.000,00	270.000.000,00	103,85	265.720.000,00
	TOTAL	4.398.425.960,00	3.797.631.048,00	86,34	3.032.633.425,00

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya. Obyek Retribusi IMB adalah pemberian izin pendirian suatu bangunan. Subyek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Kabupaten. Wajib Reribusi IMB adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi IMB terdapat pada Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan tertentu dan terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2020.

2) **Retribusi Izin Gangguan**

Retribusi Izin Gangguan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan kesehatan kerja. Subyek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari pemerintah kabupaten. Wajib Reribusi Izin Gangguan adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Izin Gangguan terdapat pada Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan tertentu dan terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2020.

3) **Retribusi Izin Trayek**

Retribusi Izin Trayek yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan insidentil pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah kabupaten. Subyek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dari pemerintah kabupaten. Wajib Reribusi Izin Trayek adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Izin Trayek terdapat pada Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan tertentu dan terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2020.

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu pada tahun 2023 adalah sebesar Rp3.541.448.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.850.886.813,00 atau sebesar 52,26%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, realisasi pendapatan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp198.739.301,00 atau sebesar 9,70%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu 2023 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.240.000.000,00	1.139.051.683,00	35,16	1.687.314.314,00
2.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	11.448.000,00	1.900.000,00	16,60	4.135.000,00
3.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	20.000.000,00	36.060.000,00	180,30	39.855.000,00
4.	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	270.000.000,00	673.875.130,00	249,58	318.321.800,00
TOTAL		**3.541.448.000,00**	**1.850.886.813,00**	**52,26**	**2.049.626.114,00**

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Persentase	Realisasi 2022 (Audited)
7.189.012.400,00	7.189.012.393,75	100,00	6.829.382.856,25

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp7.189.012.393,75 atau 100% dari anggaran sebesar Rp7.189.012.400,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 359.629.537,50 atau 5,27% dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp6.829.382.856,25.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jember. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 2023 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.939.012.400,00	5.939.012.393,75	100,00	5.829.382.856,25
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
	TOTAL	7.189.012.400,00	7.189.012.393,75	100,00	6.829.382.856,25

1. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2023 adalah sebesar Rp7.189.012.393,75 dengan rincian sebagai berikut :
   - Bagian Laba atas Penyertaan modal pada BUMD-PDAM sebesar Rp1.250.000.000,00
   - Bagian Laba atas Penyertaan modal pada BUMD-Dividen Bank Jatim sebesar Rp5.939.012.393,75 Sesuai surat Direktur PT. Bank Jatim Nomor 062/220/DIR/OPR/SRT tanggal 10 Mei 2023, bagian laba bersih tersebut telah dibagikan 100% dalam bentuk *cash* dividen dengan dividen *yield* sebesar 21,23%, sehingga bagian dividen Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp5.939.012.393,75.
   - Atas penerimaan deviden tersebut telah disetorkan oleh Bank Jatim kedalam rekening kas daerah Pemerintah Daerah Jember pada tanggal 12 Mei 2023.
2. Penerimaan setoran bagian laba dari BUMD-PDAM belum diatur dalam Peraturan Daerah namun sudah tercantum dalam Bisnis Plan dan RKAP PDAM Jember.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Persentase	Realisasi 2022 (Audited)
486.064.582.165,00	441.780.510.476,10	90,89	300.964.881.074,07

Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 sebesar Rp441.780.510.476,10 atau 90,89% dari anggaran sebesar Rp486.064.582.165,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp140.815.629.402,03 atau 46,79% jika dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp300.964.881.074,07. Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah TA 2023 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	154.140.227,00	308,28	8.032.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	36.189.500.000,00	14.255.772.578,00	39,39	1.256.718.425,00
3	Jasa Giro	11.500.000.000,00	3.526.497.640,69	30,67	2.660.472.519,84
4	Pendapatan Bunga	13.000.000.000,00	1.638.520.547,87	12,60	6.882.543.681,24
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	75.240.000,00	421.376.932,00	560,04	702.678,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.500.000.000,00	1.309.590.256,73	52,38	3.654.664.579,00
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	360.844.300,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	11.100.000.000,00	2.817.601.385,78	25,38	3.977.556.608,00
9	Pendapatan BLUD	411.649.842.165,00	417.657.010.908,03	101,46	282.163.346.282,99
	TOTAL	486.064.582.165,00	441.780.510.476,10	90,89	300.964.881.074,07

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp154.140.227,00 dengan rincian :
   - Hasil Penjualan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium
   - Alat Laboratorium Fisika Rp 74.863.727,00
   - Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika Rp 50.151.500,00
   - Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain Rp 29.125.000,00

   Jumlah **Rp154.140.227,00**

   (rincian pada lampiran 1)

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp14.255.772.578,00 dengan rincian :

1)	Hasil Sewa BMD sebesar	Rp 1.544.852.578,00
2)	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar	Rp12.710.920.000,00
	Jumlah	**Rp14.255.772.578,00**

(rincian pada lampiran 2)

3. Jasa Giro sebesar Rp3.526.497.640,69 terdiri atas :

•	Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar	Rp2.246.801.880,29
•	Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar	Rp 308.472.086,40
•	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP sebesar	Rp 971.223.674,00
	Jumlah	**Rp3.526.497.640,69**

4. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp1.638.520.547,87 terdiri atas :
   - Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp1.638.520.547,87
5. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp421.376.932,00 terdiri atas :
   - Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp421.376.932,00
6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp1.309.590.256,73 terdiri atas :
   - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp1.309.590.256,73, merupakan Denda Keterlambatan dari OPD lain. *(rincian pada lampiran 3)*
7. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp2.817.601.385,78 terdiri atas :

1)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp	905.280.378,78
2)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	Rp	5.850.000,00
3)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	0,00
4)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp	9.683.103,00
5)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp	105.751.000,00
6)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	Rp	536.442.752,00
7)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	Rp	667.028.100,00

8)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	Rp	66.500.000,00
9)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	Rp	15.000.000,00
10)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	Rp	11.724.452,00
11)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	56.000,00
12)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	Rp	494.285.600,00
	Jumlah	Rp	2.817.601.385,78

8. Pendapatan BLUD sebesar Rp417.657.010.908,03 terdiri atas :

• Pendapatan 50 Puskesmas sebesar	Rp 101.977.193.116,24
• Pendapatan RSD Balung sebesar	Rp 68.970.449.162,86
• Pendapatan RSD Dr. Soebandi sebesar	Rp 215.103.491.419,42
• Pendapatan RSD Kalisat sebesar	Rp 31.605.877.209,51
Jumlah	**Rp 417.657.010.908,03**

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp3.149.862.264.569,00 dan realisasinya sebesar Rp3.191.994.244.040,00 atau 101,34%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, realisasi pendapatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp145.712.779.931,00 atau 4,78%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan transfer tahun 2023 sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.504.510.973.348,00	2.522.861.210.219,00	100,73	2.435.573.308.430,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	324.091.415.000,00	322.996.582.400,00	99,66	325.708.307.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	321.259.876.221,00	346.136.451.421,00	107,74	284.999.848.679,00
TOTAL		3.149.862.264.569,00	3.191.994.244.040,00	101,34	3.046.281.464.109,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan tahun 2023 sebesar Rp2.504.510.973.348,00 dan terealisasi sebesar Rp2.522.861.210.219,00 atau sebesar 100,73% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, realisasi pendapatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp87.287.901.789,00 atau 3,58%. Rincian transfer pemerintah pusat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	198.680.665.988,00	210.923.988.652,00	106,16	217.436.609.930,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.687.191.605.000,00	1.704.938.164.985,00	101,05	1.597.514.133.650,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	49.843.643.000,00	45.036.717.101,00	90,36	60.010.011.721,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	568.795.059.360,00	561.962.339.481,00	98,80	560.612.553.129,00
TOTAL		**2.504.510.973.348,00**	**2.522.861.210.219,00**	**100,73**	**2.436.573.308.430,00**

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Anggaran Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebesar Rp198.680.665.988,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp210.923.988.652,00 atau sebesar 106,16%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, realisasi pendapatan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6.512.621.278,00 atau 3,00%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	13.044.290.000,00	13.044.290.000,00	100,00	21.204.471.070,00
2	DBH PPh Pasal 21	24.254.428.000,00	36.497.750.664,00	150,48	25.346.289.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	3.043.988.000,00	3.043.988.000,00	100,00	4.424.177.549,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	118.869.160.988,00	118.869.160.988,00	100,00	82.837.644.125,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	27.812.985.000,00	27.812.985.000,00	100,00	72.173.038.707,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.083.438.000,00	2.083.438.000,00	100,00	4.175.690.966,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	57.008.000,00	57.008.000,00	100,00	46.240.672,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	5.102.000,00	5.102.000,00	100,00	2.006.446.787,00
9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	5.914.870.000,00	5.914.870.000,00	100,00	1.414.974.859,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.559.521.000,00	1.559.521.000,00	100,00	1.849.325.195,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.035.875.000,00	2.035.875.000,00	100,00	1.958.311.000,00
	TOTAL	**198.680.665.988,00**	**210.923.988.652,00**	**106,16**	**217.436.609.930,00**

5.1.1.2.1.3 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran 2023	Realisasi 2023	Persentase	Realisasi 2022

(Audited)	(Audited)		(Audited)
1.687.191.605.000,00	1.704.938.164.985,00	101,05	1.597.514.133.650,00

Anggaran pendapatan dana transfer umum - dana alokasi umum (DAU) adalah sebesar Rp1.687.191.605.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.704.938.164.985,00 atau sebesar 101,05%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, realisasi pendapatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp107.424.031.335,00 atau 6,72%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	DAU	1.687.191.605.000,00	1.639.549.754.985,00	97,18	1.597.514.133.650,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	4.400.000.000,00	~	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	60.988.410.000,00	~	0,00
	TOTAL	**1.687.191.605.000,00**	**1.704.938.164.985,00**	**101,05**	**1.597.514.133.650,00**

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Persentase	Realisasi 2022 (Audited)
49.843.643.000,00	45.036.717.101,00	90,36	60.010.011.721,00

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebesar Rp49.843.643.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp45.036.717.101,00 atau mencapai 90,36%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, realisasi pendapatan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp14.973.294.620,00 atau 24,95%. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus (DAK) Fisik adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**49.843.643.000,00**	**45.036.717.101,00**	**90,36**	**60.010.011.721,00**
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	322.867.000,00	303.164.500,00	93,90	4.494.389.000,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	15.823.029.000,00	14.366.655.100,00	90,80	15.784.912.850,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	21.613.265.000,00	19.007.481.151,00	87,94	7.996.854.290,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	3.863.728.228,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	317.686.500,00

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.914.839.000,00	815.159.750,00	42,57	1.026.800.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00
	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	4.772.633.200,00
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.477.760.250,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	2.152.472.000,00	2.152.472.000,00	100,00	4.178.419.092,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.877.837.000,00	3.877.836.000,00	100,00	3.299.081.550,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.699.248.950,00
	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.912.568.225,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	148.537.173,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	474.823.600,00	-	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	3.704.423.000,00	3.647.625.000,00	98,47	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	434.911.000,00	391.500.000,00	90,02	973.171.664,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.977.220.749,00
	TOTAL	49.843.643.000,00	45.036.717.101,00	90,36	60.010.011.721,00

5.1.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Persentase	Realisasi 2022 (Audited)
568.795.059.360,00	561.962.339.481,00	98,80	560.612.553.129,00

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp568.795.059.360,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp561.962.339.481,00 atau mencapai 98,80%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, realisasi pendapatan pada

tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.349.786.352,00 atau 0,24%. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	568.795.059.360,00	561.962.339.481,00	98,80	560.612.553.129,00
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	240.039.341.207,00	240.115.204.579,00	100,03	242.207.577.565,00
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	8.765.000.000,00	8.765.000.000,00	100,00	4.440.000.000,00
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	226.458.446.000,00	225.305.159.651,00	99,49	222.338.400.290,00
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	10.356.500.000,00	5.387.805.048,00	52,02	5.871.067.790,00
	DAK Non Fisik-BOP PAUD	42.706.560.000,00	42.646.992.000,00	99,86	43.297.226.000,00
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.397.940.000,00	2.389.190.650,00	99,64	1.886.600.000,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	20.419.592.600,00	20.050.335.000,00	98,19	26.759.747.911,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	349.027.000,00	0,00	-	0,00
	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	668.241.000,00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	0,00	0,00	0,00	705.723.000,00
	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	275.624.569,00	275.624.569,00	100,00	197.683.000,00
	DAK Non Fisik-BOKB-KB	15.410.142.924,00	15.410.142.924,00	100,00	11.930.536.573,00
	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	266.551.000,00	266.551.000,00	100,00	0,00
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.026.781.100,00	1.026.781.100,00	100,00	309.750.000,00
	DAK Non Fisik-PK2UMK	323.552.960,00	323.552.960,00	100,00	0,00
	TOTAL	568.795.059.360,00	561.962.339.481,00	98,80	560.612.553.129,00

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Persentase	Realisasi 2022 (Audited)
324.091.415.000,00	322.996.582.400,00	99,66	325.708.307.000,00

Anggaran Anggaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2023 adalah sebesar Rp324.091.415.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2023 adalah sebesar Rp322.996.582.400,00 atau sebesar 99,66%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2022, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.711.724.600,00 atau 0,83%. Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	10.364.617.000,00
2	Dana Desa	324.091.415.000,00	322.996.582.400,00	99,66	315.343.690.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
	TOTAL	324.091.415.000,00	322.996.582.400,00	99,66	325.708.307.000,00

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp346.136.451.421,00 atau sebesar 107,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp321.259.876.221,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah tahun 2022, realisasi pendapatan transfer antar daerah tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp61.136.602.742,00 atau 21,45%. Rincian Transfer Pemerintah Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	310.178.333.400,00	334.510.008.600,00	107,84	273.618.771.679,00
2	Bantuan Keuangan	11.081.542.821,00	11.626.442.821,00	104,92	11.381.077.000,00
	TOTAL	**321.259.876.221,00**	**346.136.451.421,00**	**107,74**	**284.999.848.679,00**

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Persentase	Realisasi 2022 (Audited)
310.178.333.400,00	334.510.008.600,00	107,84	273.618.771.679,00

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp310.178.333.400,00 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi tahun 2023 sebesar Rp334.510.008.600,00 atau sebesar, 107,84% dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, realisasi pendapatan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp60.891.236.921,00 atau 22,25%. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	70.526.806.200,00	72.760.694.500,00	103,17	66.730.807.620,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	35.957.036.000,00	41.806.470.900,00	116,27	36.793.912.620,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	78.508.466.100,00	103.393.126.800,00	131,70	71.389.683.780,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	557.840.700,00	665.371.600,00	119,28	435.201.840,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	124.628.184.400,00	115.884.344.800,00	92,98	98.269.165.819,00
	TOTAL	**310.178.333.400,00**	**334.510.008.600,00**	**107,84**	**273.618.771.679,00**

5.1.1.2.3.3 Bantuan Keuangan

Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Persentase	Realisasi 2022 (Audited)
11.081.542.821,00	11.626.442.821,00	104,92	11.381.077.000,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur, pada APBD TA 2023 dianggarkan sebesar Rp11.081.542.821,00 dan terealisasi sebesar Rp11.626.442.821,00 atau 104,92%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp245.365.821,00 atau 2,16%. Alokasi Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi tersebut berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 16 Januari 2023 Nomor 412.2/304/112.3/2023 Perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur TA 2023. Dalam rangka pelaksanaan Program Pemberdayaan BUMDesa, Pemberdayaan Desa Mandiri (Desa Berdaya), dan Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023. Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	BPPDGS	7.402.800.000,00	7.402.800.000,00
2	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD	298.800.000,00	597.600.000,00
3	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS	150.000.000,00	176.000.000,00
4	Pemenuhan Honorarium Perawat Ponkesdes	1.100.500.000,00	1.320.600.000,00
5	Pemenuhan Honorarium Dokter Puskesmas	180.000.000,00	180.000.000,00
6	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	119.564.500,00	119.564.500,00
7	Bantuan Transport Kunjungan Konseling Kesehatan	71.000.000,00	71.000.000,00
8	Pendampingan Kegiatan Kunjungan Konseling Kesehatan	13.894.700,00	13.894.700,00
9	Pendampingan Penyelenggaraan Pesantren Sehat	35.383.621	35.383.621,00
10	TMMD/ Bapemas	1.645.600.000,00	1.645.600.000,00
11	Jatim Puspa/ Bapemas	64.000.000,00	64.000.000,00
12	Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	0,00	0,00
	TOTAL	11.081.642.821,00	11.626.442.821,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2023 adalah Rp1.092.303.000,00 dan realisasinya sebesar Rp936.104.334,00 atau 85,70%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, realisasi pendapatan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp27.698.725.099,00 atau 96,73%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah tahun 2023 :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)

1	Pendapatan Hibah	1.092.303.000,00	936.104.334,00	85,70	10.930.595.096,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	17.704.234.337,00
	TOTAL	1.092.303.000,00	936.104.334,00	85,70	28.634.829.433,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Persentase	Realisasi 2022 (Audited)
1.092.303.000,00	936.104.334,00	85,70	10.930.595.096,00

Anggaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tahun 2023 adalah Rp1.092.303.000,00 dan realisasinya sebesar Rp936.104.334,00 atau 85,70%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah tahun 2022, realisasi Pendapatan Hibah pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.994.490.762,00 atau 91,44%. Adapun Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat terdiri dari :

- Hibah IPDMIP, Tahap XI TA 2023 Rp 436.104.334,00
- Hibah Pembayaran Tagihan Hibah Air Minum (Rupiah Murni)/Nationwide Hibah Program TA 2023 Rp 500.000.000,00

Jumlah **Rp 936.104.334,00**

✓ Pendapatan Hibah dari Pemerintah Propinsi merupakan hibah *Integrated Participatary Development and Management Of Irrigation Program (IPDMIP)* atau Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipasi Terpadu sebesar Rp436.104.334,00

✓ Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Jember Nomor : PDH-57/MK.7/DTK.03/AMD/2023 tanggal 16 Juni 2023 berupa Hibah Air Minum Pedesaan dimana Pemerintah Pusat Menghibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Jember dana sebesar Rp500.000.000,00.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Persentase	Realisasi 2022 (Audited)
0,00	0,00	0,00	17.704.234.337,00

Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan tahun 2023 adalah Rp0,00 dan realisasinya sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan tahun 2023,

mengalami penurunan sebesar Rp17.704.234.337, atau 100%. Penurunan dikarenakan pada tahun 2023 sebanyak 50 Puskesmas proses peralihan dari pengelolaan Dana Kapitasi JKN menjadi BLUD sehingga Dana Kapitasi dalam JKN tidak disalurkan pada FKTP.

5.1.2 BELANJA DAN TRANSFER

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
4.118.279.658.762,00	3.802.222.061.677,92	4.163.361.602.016,37

Realisasi Belanja dan Transfer TA. 2023 sebesar Rp3.802.222.061.677,92 atau sebesar 92,33% dari anggaran belanja dan transfer sebesar Rp4.118.279.658.762,00 dan terdapat penuunan sebesar Rp361.139.540.338,45 atau sebesar 8,67% dari realisasi tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	**BELANJA OPERASI**	**3.288.813.950.585,00**	**3.015.559.884.677,66**	**91,69**	**2.820.371.422.542,46**
	Belanja Pegawai	1.506.793.438.014,00	1.361.120.333.591,47	90,33	1.384.497.512.083,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.472.091.271.603,00	1.354.258.354.206,19	92,00	1.297.772.326.967,46
	Belanja Hibah	277.187.318.968,00	270.995.238.880,00	97,77	93.923.338.592,00
	Belanja Bantuan Sosial	32.741.922.000,00	29.185.958.000,00	89,14	44.178.244.900,00
2	**BELANJA MODAL**	**260.564.465.920,00**	**232.163.748.376,26**	**89,10**	**829.309.474.696,91**
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.421.865.814,00	79.716.522.691,50	80,18	110.179.303.905,68
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.165.714.406,00	54.635.641.878,00	90,81	116.408.013.296,63
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.736.033.942,00	43.233.220.730,76	94,53	571.264.002.627,99
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	54.734.987.026,00	54.351.340.328,00	99,30	31.458.154.766,61
	Belanja Modal Aset Lainnya	505.864.732,00	227.022.748,00	44,88	0,00
3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**45.162.296.180,00**	**31.854.315.147,00**	**70,53**	**1.483.241.150,00**
	Belanja Tak Terduga	45.162.296.180,00	31.854.315.147,00	70,53	1.483.241.150,00
4	**BELANJA TRANSFER**	**523.738.946.077,00**	**522.644.113.477,00**	**99,79**	**512.197.463.727,00**
	Belanja Bagi Hasil	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	100,00	22.065.196.658,00
	Belanja Bantuan Keuangan	501.238.946.077,00	500.144.113.477,00	99,78	490.132.267.069,00
	TOTAL	**4.118.279.658.762,00**	**3.802.222.061.677,92**	**92,33**	**4.163.361.602.016,37**

5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran Belanja Operasi TA. 2023 adalah sebesar Rp3.288.813.950.585,00 dan realisasinya sebesar Rp3.015.559.884.677,66 atau 91,69%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022, realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar

Rp195.188.462.135,20 atau sebesar 6,92%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening belanja operasi tahun 2023:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Persentase	Realisasi 2022 (Audited)
1.506.793.438.014,00	1.361.120.333.591,47	90,33	1.384.497.512.083,00

Anggaran Belanja Pegawai tahun 2023 adalah sebesar Rp1.506.793.438.014,00 dan Realisasi belanja pegawai TA 2023 sebesar Rp1.361.120.333.591,47 atau sebesar 90,33% dari anggaran belanja sebesar Rp1.506.793.438.014,00 dan terdapat penurunan sebesar Rp23.377.178.491,53 atau sebesar 1,69% dari realisasi tahun lalu dengan rincian sebagai berikut

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai (APBD)	1.392.021.791.483,00	1.258.143.456.778,00	90,38	1.325.174.151.222,00
2	Belanja Pegawai (BLUD)	114.771.646.531,00	102.976.876.813,47	89,72	59.323.360.861,00
	TOTAL	**1.606.793.438.014,00**	**1.361.120.333.591,47**	**90,33**	**1.384.497.512.083,00**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai (APBD)

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	698.890.720.114,00	639.765.067.357,00	91,54	652.905.761.558,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	69.584.593.468,00	59.545.717.321,00	85,57	60.046.533.375,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.898.170.823,00	8.200.040.746,00	82,84	8.065.018.250,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	36.387.463.913,00	34.016.584.605,00	93,48	35.989.943.600,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	19.732.864.526,00	15.963.415.153,00	80,90	14.855.486.487,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	43.107.351.131,00	37.308.437.512,00	86,55	36.979.842.979,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.989.008.885,00	2.482.705.611,00	83,06	856.748.722,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.005.972,00	8.774.262,00	54,82	9.132.944,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	41.404.974.835,00	36.308.838.900,00	87,69	41.228.166.566,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.753.201.870,00	1.497.279.082,00	85,40	1.333.941.293,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.658.677.140,00	3.945.433.911,00	84,69	4.001.367.109,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	163.515.683.480,00	140.048.099.565,00	85,65	139.624.388.402,00
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0,00	0,00	0,00	23.940.000,00
14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	10.894.083.456,00	10.416.601.006,00	95,62	10.357.621.477,00
15	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	14.048.250,00

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
16	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	206.528.457.749,00	196.774.677.215,00	95,28	227.518.612.351,00
17	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.900.000.000,00	1.109.500.000,00	58,39	1.530.000.000,00
18	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	413.935.352,00	386.985.352,00	93,49	33.390.555.588,00
19	Belanja Honorarium	13.668.267.800,00	12.693.363.000,00	92,87	14.416.155.100,00
20	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	21.000.000.000,00	18.374.501.000,00	87,50	6.878.396.100,00
21	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	11.280.250.000,00	6.906.000.000,00	61,22	1.950.000.000,00
22	Belanja Uang Representasi DPRD	1.254.400.000,00	1.106.385.000,00	88,20	1.111.110.000,00
23	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	221.201.960,00	131.680.500,00	59,53	134.452.500,00
24	Belanja Tunjangan Beras DPRD	245.998.256,00	143.970.960,00	58,53	146.071.140,00
25	Belanja Uang Paket DPRD	139.426.000,00	94.720.500,00	67,94	95.193.000,00
26	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.671.677.000,00	1.604.258.250,00	95,97	1.611.109.500,00
27	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	198.544.800,00	135.898.350,00	68,45	149.996.700,00
28	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	89.599.000,00	14.768.250,00	16,48	25.669.350,00
29	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.746.500.000,00	99,17	8.790.600.000,00
30	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	1.457.505.000,00	66,10	2.190.300.000,00
31	Belanja Pembobanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	5.621.737,00	787.090,00	14,00	270.384,00
32	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.917.840.276,00	10.736.626.278,00	98,34	10.789.432.968,00
33	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.796.000.000,00	5.743.500.000,00	99,09	5.775.000.000,00
34	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	157.500.000,00	12.600.000,00	8,00	4.725.000,00
35	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	66.500.000,00	54.600.000,00	82,11	54.600.000,00
36	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.500.000,00	7.056.000,00	67,20	7.644.000,00
37	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.000.000,00	98.280.000,00	93,60	98.280.000,00
38	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.853.500,00	7.097.160,00	65,39	6.952.320,00
39	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.081.248,00	644.522,00	59,61	869.481,00
40	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.252,00	420,00	8,00	960,00
41	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.580.000,00	5.486.880,00	98,33	5.503.680,00
42	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	120.000,00	112.320,00	93,60	112.320,00
43	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	360.000,00	336.960,00	93,60	336.960,00

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
44	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	957.151.940,00	956.151.940,00	99,90	918.583.408,00
45	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	7.539.900,00
46	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	314.496.000,00	80,00	314.496.000,00
47	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.125.000.000,00	1.017.972.800,00	90,49	959.641.500,00
	TOTAL	**1.392.021.791.483,00**	**1.258.143.456.778,00**	**90,38**	**1.325.174.151.222,00**
48	Belanja Pegawai BLUD	114.771.646.531,00	102.976.876.813,47	89,72	59.323.360.861,00
	TOTAL	**114.771.646.531,00**	**102.976.876.813,47**	**89,72**	**59.323.360.861,00**
		1.506.793.438.014,00	**1.361.120.333.591,47**	**90,33**	**1.384.497.512.083,00**

Realisasi belanja pegawai (BLUD) TA 2023 sebesar Rp102.976.876.813,47 dengan rincian sebagai berikut :

JENIS BELANJA	REALISASI 2023 (Rp)	RSD. BALUNG	RSD. dr. SOEBANDI	RSD KALISAT	60 PUSKESMAS
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.368.551.494,00	0,00	1.214.106.632,00	154.444.862,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	267.313.007,00	238.578.806,00	25.887.956,00	2.846.245,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.299.809.914,00	0,00	0,00	0,00	2.299.809.914,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	95.436.303.398,47	9.066.093.025,06	47.091.943.054,00	4.671.043.937,00	34.607.223.382,41
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.520.449.000,00	456.580.000,00	202.410.000,00	161.040.000,00	1.700.419.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.049.650.000,00	20.400.000,00	472.930.000,00	17.960.000,00	538.360.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	34.800.000,00	27.600.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
JUMLAH	**102.976.876.813,47**	**9.809.251.831,06**	**49.007.277.642,00**	**5.014.536.044,00**	**39.145.812.296,41**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Persentase	Realisasi 2022 (Audited)
1.472.091.271.603,00	1.354.258.354.206,19	92,00	1.297.772.326.967,46

Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 adalah sebesar Rp1.472.091.271.603,00 dan realisasi belanja barang dan jasa TA 2023 sebesar Rp1.354.258.354.206,19 atau sebesar 92,00% dari anggaran belanja sebesar Rp1.472.091.271.603,00, Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022, realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp56.486.027.238,73 atau 4,35%.

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa yang melalui (APBD) sebesar Rp918.374.635.610,00, belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp142.183.695.371,00 sedangkan belanja barang dan jasa BLUD pada 3 RSD dan 50 Puskesmas sebesar Rp293.700.023.225,19 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa (APBD)	1.013.085.802.906,00	918.374.635.610,00	90,65	851.482.429.785,00
2	Belanja Barang dan Jasa (BOS)	142.206.249.274,00	142.183.695.371,00	99,98	221.688.428.365,37
3	Belanja Barang dan Jasa (BLUD)	316.799.219.423,00	293.700.023.225,19	92,71	224.601.468.817,09
	TOTAL	1.472.091.271.603,00	1.354.258.354.206,19	92,00	1.297.772.326.967,46

Realisasi Belanja Barang dan Jasa (APBD) sebesar Rp918.374.635.610,00 sudah termasuk di dalamnya belanja barang dan jasa dari dana BLUD pada 3 RSD dan 50 Puskesmas sebesar Rp293.700.023.225,19 serta belanja barang dan jasa dana BOS sebesar Rp142.183.695.371,00.

Belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp142.183.695.371,00 yang seharusnya Rp142.123.513.151,00, terdapat Belanja Modal BOS sebesar Rp60.182.220,00. Dikarenakan Penggaran di SIPD masuk di Belanja barang dan jasa. Realisasi anggaran belanja dan jasa BLUD dan BOS pada Laporan Realisasi Anggaran Akrual sudah dimasukkan kedalam Belanja barang dan jasa sesuai pengklasifikasiannya dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Barang dan Jasa (APBD)

Realisasi belanja barang dan jasa TA. 2023 sebesar Rp918.374.635.610,00 atau sebesar 90,65% dari anggaran belanja sebesar Rp1.013.085.802.906,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Belanja Persediaan	157.724.169.701,00	138.196.133.528,00	87,62	105.147.252.589,00
2	Belanja Barang Pakai Habis Non Persediaan (APBD)	47.125.106.250,00	40.503.724.787,00	85,95	32.673.675.493,00
3	Belanja Jasa	638.504.809.459,00	591.166.416.309,00	92,59	553.117.928.249,00
4	Belanja Pemeliharaan	24.074.916.203,00	21.014.561.264,00	87,29	37.651.699.270,00
5	Belanja Perjalanan Dinas	77.658.163.523,00	65.583.299.348,00	84,45	64.678.161.454,00
6	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Keliga/Pihak Lain/Masyarakat	67.998.637.770,00	61.910.500.374,00	91,05	58.213.712.730,00
	TOTAL	1.013.085.802.906,00	918.374.635.610,00	90,65	851.482.429.785,00

a. Belanja Persediaan

Anggaran Belanja Persediaan (APBD) TA. 2023 sebesar Rp157.724.169.701,00 dan terealisasi Rp138.196.133.528,00 atau 87,62%, dengan rincian sebagai beikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	12.818.938.724,00	12.331.203.701,00	96,20	4.402.164.034,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	7.223.912.540,00	5.517.673.925,00	76,38	8.164.745.376,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18.017.883.759,00	16.099.958.205,00	89,36	17.711.965.842,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.309.076.000,00	1.307.805.900,00	99,90	435.834.900,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	330.574.800,00	317.692.825,00	96,10	153.999.240,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	31.524.800,00	30.761.925,00	97,58	29.528.500,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	83.290.547,00	40.703.300,00	48,87	162.055.400,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.723.693.171,00	7 323.494.019,00	94,82	6.180.037.727,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.306.848.472,00	3 345.184.607,00	77,67	2.874.719.294,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	142.080.000,00	141.449.000,00	99,56	223 240 000,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	465.568.820,00	399.990.482,00	85,91	2 932 189,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	9.928 400,00	9 608 700,00	96,78	246 360,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	695 265.100,00	680 015 700,00	97,81	0,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	60.037.030,00	57 683.500,00	96,08	0,00
15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	376.406.724,00	365.834 747,00	97,19	352 894 577,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.211.977.820,00	2.565.283.974,00	79,87	3 596 180 506,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.393.454.132,00	3.038.495.409,00	89,54	2 638 034 118,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	12.473 829.583,00	10.131 142.290,00	81,22	10 643 621 676,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	724 469 655,00	606.421 205,00	83,71	584 349 800,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	9 440 250,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.617 557 346,00	3 866.966 770,00	83,74	3 040 913 399,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3 158 893.531,00	2.807 454 721,00	88,87	1 216 658 946,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2 957.101 258,00	2.611 014 355,00	88,30	1.727 831 196,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.844.876.476,00	4.661.828.611,00	96,22	1 424.102 492,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	685.546.136,00	654.580.916,00	95,48	1.256.945.628,00

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
	Perlengkapan Pendukung Olahraga				
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	3.050.556.940,00	2.829.119.509,00	92,74	1.684.051.989,00
27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.535.333.864,00	1.268.570.226,00	82,63	1.411.525.218,00
28	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.815.485.031,00	3.675.335.233,00	96,33	1.693.753.168,00
29	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	563.976.200,00	560.790.100,00	99,44	74.210.000,00
30	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	47.159.267.000,00	40.261.672.776,00	85,37	23.689.794.673,00
31	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	45.000.000,00	39.500.000,00	87,78	212.685.149,00
32	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.961.855.496,00	2.578.003.612,00	87,04	4.126.511.151,00
33	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	354.250.000,00	353.350.000,00	99,75	457.085.500,00
34	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	417.971.000,00	408.895.754,00	97,83	1.100.000,00
35	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	16.875.000,00	13.255.000,00	78,55	2.890.000,00
36	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	145.000.000,00	133.773.000,00	92,26	0,00
37	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	336.462.500,00	245.245.000,00	72,89	194.025.500,00
38	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	74.000.000,00	40.950.000,00	55,34	26.020.000,00
39	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	589.287.500,00	474.065.100,00	80,45	523.205.025,00
40	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.446.743.166,00	2.243.379.430,00	91,69	1.130.865.806,00
41	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	40.050.000,00	12.295.000,00	30,70	161.470.000,00
42	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	44.240.000,00	30.660.000,00	69,30	10.800.000,00
43	Belanja Pakaian Siaga	48.000.000,00	33.600.000,00	70,00	0,00
44	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	148.900.000,00
45	Belanja Pakaian KORPRI	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
46	Belanja Pakaian Adat Daerah	488.630.500,00	338.727.992,00	69,32	178.570.000,00
47	Belanja Pakaian Batik Tradisional	497.820.000,00	448.753.000,00	90,14	453.756.173,00
48	Belanja Pakaian Olahraga	3.023.230.680,00	2.940.852.009,00	97,28	1.986.391.787,00
49	Belanja Pakaian Paskibraka	149.900.000,00	137.450.000,00	91,69	0,00
50	Belanja Pakaian Jas/Safari	36.500.000,00	12.400.000,00	33,97	72.700.000,00
51	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	200.000.000,00	191.242.000,00	95,62	74.500.000,00
	TOTAL	157.724.169.701,00	138.196.133.528,00	87,62	105.147.252.589,00

b. Belanja Barang Pakai Habis Non Persediaan

Anggaran Belanja Barang Pakai Habis Non Persediaan (APBD) TA. 2023 sebesar Rp47.125.106.250,00 dan terealisasi Rp40.503.724.787,00 atau 85,95%, dengan rincian sebagai beikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.575.875.710,00	29.038.142.674,00	83,98	20.503.023.039,00
2	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.831.283.140,00	3.396.502.785,00	88,65	2.774.128.113,00
3	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	247.068.000,00	239.369.450,00	96,88	1.870.384.500,00
4	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	1.030.285.000,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.470.879.400,00	7.829.709.878,00	92,43	6.495.854.841,00
	TOTAL	**47.125.106.250,00**	**40.503.724.787,00**	**85,95**	**32.673.675.493,00**

c. Belanja Jasa

Anggaran Belanja Jasa (APBD) TA. 2023 sebesar Rp638.504.809.459,00 dan terealisasi Rp591.166.416.309,00 atau 92,59% dengan rincian sebagai beikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.122.967.500,00	15.348.725.000,00	80,26	5.000.296.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.536.080.000,00	3.127.445.300,00	68,95	5.233.930.000,00
3	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	34.321.296.000,00	27.803.095.199,00	81,01	400.000,00
4	Honorarium Rohaniwan	10.400.000,00	7.200.000,00	69,23	11.200.000,00
5	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	67.600.000,00	38.200.000,00	56,51	75.842.500,00
6	Honorarium Penyelenggara Ujian	471.250.000,00	467.300.000,00	99,16	18.000.000,00
7	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	0,00	0,00	0,00	96.500.000,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	12.645.400.000,00	9.632.700.000,00	76,18	49.850.000,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	692.400.000,00	568.300.000,00	82,08	540.800.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	37.049.000.000,00	36.010.845.565,00	97,20	82.064.000.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	31.737.008.657,00	29.831.845.828,00	94,00	46.714.090.518,00
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	0,00	0,00	774.521.195,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.043.028.900,00	1.681.434.143,00	82,30	79.000.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	11.571.300.000,00	11.539.675.000,00	99,73	10.941.696.800,00
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	95.700.000,00	56.468.000,00	59,01	0,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	9.393.500.000,00	9.255.250.000,00	98,53	9.128.735.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	279.550.000,00	240.000.000,00	85,85	225.500.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	77.061.450.000,00	74.770.656.700,00	97,03	23.397.132.800,00
20	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.261.950.000,00	1.202.650.000,00	95,30	1.146.600.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	43.179.800.000,00	41.695.552.664,00	96,56	49.631.730.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.410.600.000,00	5.806.097.602,00	90,57	6.499.840.090,00
23	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13.339.075.000,00	13.032.659.600,00	97,70	12.055.744.350,00
24	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.961.312.500,00	2.645.312.500,00	89,33	1.530.589.500,00
25	Belanja Jasa Tenaga Caraka	615.500.000,00	442.600.000,00	71,91	411.500.000,00
26	Belanja Jasa Tenaga Supir	359.400.000,00	331.400.000,00	92,21	6.553.700.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	0,00	0,00	0,00	269.250.000,00
28	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	302.200.000,00	118.688.879,00	39,27	0,00
29	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	27.000.000,00	17.250.000,00	63,89	60.300.000,00
30	Belanja Jasa Tata Rias	24.900.000,00	24.750.000,00	99,40	0,00
31	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.360.000.000,00	1.352.648.850,00	99,46	1.418.260.000,00
32	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	147.500.000,00	84.297.062,00	57,15	0,00
33	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
34	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	285.000.000,00	182.881.630,00	64,17	98.651.250,00
35	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.746.010.000,00	1.659.865.000,00	95,07	1.512.895.600,00
36	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	45.480.481.650,00	42.568.376.150,00	93,60	30.099.523.536,00
37	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	75.840.000,00	75.226.496,00	99,19	49.930.450,00
38	Belanja Jasa Kalibrasi	143.275.000,00	120.785.000,00	84,30	55.073.000,00
39	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	26.109.235,00
40	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	2.002.418.800,00	667.836.780,00	33,35	349.859.660,00

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
41	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.057.928.000,00	1.008.964.400,00	95,37	1.670.393.000,00
42	Belanja Tagihan Telepon	5.814.000.000,00	5.615.426.530,00	96,58	5.525.288.472,00
43	Belanja Tagihan Air	960.954.588,00	670.103.815,00	69,73	380.192.876,00
44	Belanja Tagihan Listrik	50.908.831.047,00	49.757.445.776,00	97,74	52.541.090.914,00
45	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	108.472.000,00	79.285.000,00	73,09	130.710.800,00
46	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.459.590.000,00	6.721.335.932,00	90,10	5.810.218.395,00
47	Belanja Paket/Pengiriman	228.707.500,00	176.419.586,00	77,14	73.790.355,00
48	Belanja Penambahan Daya	96.750.000,00	44.775.750,00	46,28	279.113.871,00
49	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.755.527.000,00	940.560.040,00	53,58	580.604.469,00
50	Belanja Lembur	12.471.284.114,00	9.935.470.910,00	79,67	14.092.968.404,00
51	Belanja Medical Check Up	175.000.000,00	153.600.000,00	87,77	95.200.000,00
52	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.654.258.320,00	3.488.530.450,00	95,46	647.935.339,00
53	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	57.873.340.000,00	57.825.110.000,00	99,92	57.556.520.000,00
54	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	7.587.160.000,00	7.587.160.000,00	100,00	6.662.269.600,00
55	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.413.018.778,00	7.631.114.396,00	81,07	56.938.772.379,00
56	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.592.281.970,00	5.992.253.271,00	78,93	7.644.463.299,00
57	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.436.000.380,00	1.127.177.764,00	78,49	190.756.415,00
58	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	56.822.577.910,00	56.772.893.520,00	99,91	0,00
59	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	0,00	342.851.305,00
60	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	100.000.000,00	69.801.100,00	69,80	302.400.000,00
61	Belanja Sewa Tanah untuk Jalan	0,00	0,00	0,00	78.000.000,00
62	Belanja Sewa Electric Generating Set	2.114.400,00	2.000.000,00	94,59	0,00
63	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	1.468.232.660,00	1.130.436.800,00	76,99	0,00
64	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	117.619.000,00
65	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.184.463.966,00	3.355.027.666,00	80,18	2.772.209.203,00
66	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	46.973.200,00	44.655.000,00	95,06	119.100.000,00
67	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	51.255.000,00	49.027.500,00	95,65	9.800.000,00
68	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	112.188.600,00	104.141.324,00	92,83	31.720.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
69	Belanja Sewa Perkakas Khusus (Special Tools)	223.680.000,00	156.783.000,00	70,09	19.125.000,00
70	Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00
71	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.003.263.500,00	5.103.443.250,00	72,87	2.756.218.776,00
72	Belanja Sewa Mebel	66.021.440,00	54.189.510,00	82,08	0,00
73	Belanja Sewa Alat Pendingin	14.250.000,00	11.657.000,00	81,80	24.240.000,00
74	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	579.722.050,00	468.834.066,00	80,87	157.337.690,00
75	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	125.270.000,00	107.950.000,00	86,17	0,00
76	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	305.000.000,00	304.250.000,00	99,75	305.848.000,00
77	Belanja Sewa Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	119.966.000,00
78	Belanja Sewa Komputer Jaringan	203.000.000,00	200.200.000,00	98,62	594.000.000,00
79	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
80	Belanja Sewa Bangunan Gudang	65.000.000,00	45.600.000,00	70,15	6.000.000,00
81	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	373.337.375,00	270.797.375,00	72,53	326.236.069,00
82	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.125.000.000,00	1.023.560.560,00	90,98	0,00
83	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.400.000,00	4.165.000,00	77,13	0,00
84	Belanja Sewa Hotel	1.991.520.000,00	1.789.260.535,00	89,84	2.321.632.379,00
85	Belanja Sewa Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	73.450.000,00
86	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	5.000.000,00	4.990.000,00	99,80	0,00
87	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	1.403.744.324,00	1.042.869.720,00	74,29	0,00
88	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	208.220.000,00	188.234.000,00	90,40	98.174.000,00
89	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	49.988.000,00
90	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	8.391.561.950,00	7.218.031.474,00	86,02	5.363.285.122,00
91	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	506.116.800,00	493.489.965,00	97,51	0,00
92	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	589.464.800,00	410.004.400,00	69,56	267.924.800,00
93	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa	300.000.000,00	297.965.000,00	99,32	3.253.772.200,00

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
	untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi				
94	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	0,00	0,00	0,00	8.359.000,00
95	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	505.253.944,00	361.533.182,00	71,55	53.717.000,00
96	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	5.197.342.254,00	4.335.552.288,00	83,42	2.937.594.178,00
97	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	494.141.750,00	456.602.800,00	92,40	8.020.403.201,00
98	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	563.054.000,00	528.773.100,00	93,91	453.280.200,00
99	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	353.970.000,00	334.687.200,00	94,55	256.500.000,00
100	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	116.000.000,00	91.685.000,00	79,04	64.635.300,00
101	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	385.000.000,00	284.803.900,00	73,98	54.978.300,00
102	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	99.774.015,00
103	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
104	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	290.000.000,00	289.923.788,00	99,97	757.624.400,00
105	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	0,00	0,00	0,00	99.789.000,00
106	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	0,00	0,00	0,00	747.205.000,00
107	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	550.000.000,00	495.986.400,00	90,18	855.620.404,00
108	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.450.000.000,00	3.256.717.000,00	94,40	1.417.117.250,00
109	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	2.105.000.000,00	1.660.013.387,00	78,86	2.226.454.350,00
110	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	642.000.000,00	550.838.500,00	85,80	877.179.800,00
111	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.197.000.000,00	1.032.130.000,00	86,23	4.239.133.300,00
112	Belanja Sosialisasi	505.000.000,00	457.861.500,00	90,67	165.214.000,00
113	Belanja Bimbingan Teknis	4.443.936.564,00	3.235.571.919,00	72,81	2.087.439.250,00

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
114	Belanja Diklat Kepemimpinan	394.000.000,00	392.002.000,00	99,49	0,00
115	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	18.637.500,00	18.637.500,00	100,00	6.412.590,00
116	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	70.512.500,00	70.512.500,00	100,00	24.047.950,00
117	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	10.800.000,00	7.550.000,00	69,91	2.100.000,00
118	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	19.338.179,00	13.650.679,00	70,59	6.452.175,00
119	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	262.012.500,00	262.012.500,00	100,00	107.550.000,00
120	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	6.688.750,00	3.845.000,00	57,48	1.737.500,00
121	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.038.125,00	2.038.125,00	100,00	630.000,00
122	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	47.262.000,00	16.250.000,00	34,38	0,00
123	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	123.500.000,00	123.500.000,00	100,00	51.870.000,00
124	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	226.150.000,00	161.150.000,00	71,26	102.787.500,00
125	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	277.484.254,00
126	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00	1.988.400,00
127	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	463.971.852,00	463.971.848,00	100,00	309.314.566,00
128	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	100.873.200,00
129	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	75.800.880,00	75.800.880,00	100,00	56.850.660,00
130	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas	0,00	0,00	0,00	7.040.400,00

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
	Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus				
131	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	240.000,00
132	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	722.982,00	722.980,00	100,00	361.490,00
133	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	5.532.000,00
134	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	300.000.000,00	295.082.000,00	98,36	0,00
	TOTAL	**638.504.809.459,00**	**591.166.416.309,00**	**92,59**	**553.117.928.249,00**

d. Belanja Pemeliharaan

Anggaran belanja pemeliharaan (APBD) TA. 2023 adalah sebesar Rp24.074.916.203,00 dan realisasinya sebesar Rp21.014.561.264,00 atau 87,29% dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	0,00	0,00	0,00	197.837.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	0,00	0,00	0,00	945.878.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	141.000.000,00	114.165.961,00	80,97	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	14.000.000,00	13.187.000,00	94,19	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	0,00	0,00	0,00	10.643.300,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	878.948.274,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	196.670.510,00	176.017.370,00	89,50	93.004.111,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	0,00	0,00	0,00	6.986.291,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	125.070.000,00	122.293.741,00	97,78	0,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	212.506.800,00	147.435.750,00	69,38	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	735.000.000,00	494.989.299,00	67,35	2.237.783.058,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	2.543.964.400,00	1.985.879.884,00	78,06	1.886.943.809,00

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
	Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				
13	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	496.214.250,00	461.004.442,00	92,90	210.111.238,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	553.282.250,00	380.658.615,00	68,80	398.818.589,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.807.360,00	2.824.458,00	58,75	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	100.800.000,00	96.000.000,00	95,24	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.760.000,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	20.000.000,00	17.905.895,00	89,53	0,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	50.000.000,00	48.750.000,00	97,50	0,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	106.539.600,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	45.379.800,00	21.160.135,00	46,63	0,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	39.249.600,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	894.400.000,00	807.734.280,00	90,31	394.540.282,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	443.820.179,00	395.060.226,00	89,01	358.589.450,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	998.349.300,00	921.540.019,00	92,31	313.226.897,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	250.021.300,00	189.203.624,00	75,68	379.827.545,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	9.150.000,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	21.517.000,00
29	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	923.500,00	923.000,00	99,95	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
30	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	5.934.500,00	3.403.000,00	57,34	0,00
31	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	28.000.000,00	26.235.210,00	93,70	0,00
32	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00
33	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	256.993.000,00	254.876.000,00	99,18	66.226.000,00
34	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	869.855.200,00	781.241.544,00	89,81	805.392.476,00
35	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	787.500.000,00	584.638.274,00	74,24	553.487.292,00
36	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	107.437.375,00
37	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	200.000.000,00	197.500.000,00	98,75	0,00
38	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	205.000.000,00	185.770.476,00	90,62	64.322.000,00
39	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	0,00	0,00	0,00	494.733.150,00
40	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	11.549.170.435,00	10.574.324.705,00	91,56	15.454.500.573,00
41	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	97.911.180,00
42	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00
43	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	189.001.540,00	187.000.000,00	98,94	393.260.000,00
44	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	55.420.000,00	54.925.400,00	99,11	10.255.409.043,00
45	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	65.889.540,00	64.391.100,00	97,73	0,00
46	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat	21.893.459,00	20.954.580,00	95,71	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
	Tinggal-Rumah Negara Golongan I				
47	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	90.779.850,00	89.306.839,00	98,38	0,00
48	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	157.230.300,00	156.858.400,00	99,76	0,00
49	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	89.532.675,00	6.132.375,00	6,85	0,00
50	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	900.000.000,00	691.351.259,00	76,82	121.709.000,00
51	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	0,00	0,00	0,00	199.300.000,00
52	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	200.000.000,00	192.988.000,00	96,49	0,00
53	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	0,00	0,00	0,00	173.000.000,00
54	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	137.000.000,00	122.526.548,00	89,44	133.632.724,00
55	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	90.000.000,00	75.307.855,00	83,68	136.034.503,00
56	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	349.506.055,00	348.096.000,00	99,60	0,00
	TOTAL	**24.074.916.203,00**	**21.014.561.264,00**	**87,29**	**37.651.699.270,00**

c. Belanja Perjalanan Dinas

Anggaran belanja perjalanan dinas (APBD) TA. 2023 sebesar Rp77.658.163.523,00 dan realisasinya sebesar Rp65.583.299.348,00, atau 84,45%. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.150.939.729,00	37.973.502.246,00	90,09	32.018.407.586,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	1.424.342.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.780.653.342,00	25.430.472.914,00	77,58	28.732.861.231,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.906.360.000,00	1.652.720.000,00	86,70	378.519.459,00

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
30	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	5.934.500,00	3.403.000,00	57,34	0,00
31	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	28.000.000,00	26.235.210,00	93,70	0,00
32	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00
33	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	256.993.000,00	254.876.000,00	99,18	66 226 000,00
34	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	869.855.200,00	781 241 544,00	89,81	805 392 476,00
35	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	787 500 000,00	584 638 274,00	74,24	553 487 292,00
36	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	107 437 375,00
37	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	200 000 000,00	197 500 000,00	98,75	0,00
38	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	205.000 000,00	185 770 476,00	90,62	64 322 000,00
39	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	0,00	0,00	0,00	494 733 150,00
40	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	11 549 170 435,00	10 574 324 705,00	91,56	15 454 500 573,00
41	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	97 911 180,00
42	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00
43	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	189.001.540,00	187 000 000,00	98,94	393 260 000,00
44	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	55 420 000,00	54 925 400,00	99,11	10 255 409 043,00
45	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	65.889.540,00	64.391.100,00	97,73	0,00
46	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat	21.893.459,00	20 954.580,00	95,71	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	709.987.452,00	526.604.188,00	74,17	2.124.031.178,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	110.223.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	77.658.163.523,00	65.583.299.348,00	84,45	64.678.161.454,00

f. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat (APBD) TA. 2023 sebesar Rp67.998.637.770,00 dan realisasinya sebesar Rp61.910.500.374,00, atau 91,05%. Dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	63.442.570.000,00	57.634.120.000,00	90,84	53.960.005.075,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.556.067.770,00	4.276.380.374,00	93,86	4.253.707.655,00
	TOTAL	67.998.637.770,00	61.910.500.374,00	91,06	58.213.712.730,00

2. Belanja Barang dan Jasa (BOS)

Realisasi belanja barang dan jasa (BOS) TA. 2023 sebesar Rp142.183.695.371,00 seharusnya Rp142.123.513.151,00, didalamnya terdapat Belanja Modal BOS BOP PAUD sebesar Rp60.182.220,00 yang dimasukkan ke dalam jenis belanjanya. Dikarenakan Penggaran di SIPD masuk di Belanja barang dan jasa. dengan rincian sebagai berikut :

JENIS BARANG	REALISASI 2023
Belanja Persediaan	76.623.677.694,00
Belanja Pakai Habis Non Persediaan	4.408.791.938,00
Belanja Jasa	57.692.430.603,00
Belanja Pemeliharaan	762.041.855,00
Belanja Perjalanan Dinas	2.636.571.061,00
TOTAL	142.123.513.151,00

Realisasi Belanja Persediaan (BOS) TA. 2023 sebesar Rp76.623.677.694,00, dengan rincian sebagai berikut :

JENIS BARANG	REALISASI 2023
Belanja Bahan Habis Pakai	47.687.176.491,00
Belanja Bahan Material	15.936.891.247,00
Belanja Cetak & Penggandaan	12.844.023.766,00
Belanja Pakaian Dinas	155.586.190,00
TOTAL	76.623.677.694,00

Realisasi Belanja Pakai Habis Non Persediaan (BOS) TA. 2023 sebesar Rp4.408.791.938,00, dengan rincian sebagai beikut:

JENIS BARANG	REALISASI 2023
Belanja Mamin	4.408.791.938,00
TOTAL	4.408.791.938,00

Realisasi Belanja Jasa (BOS) TA. 2023 sebesar Rp57.692.430.603,00, dengan rincian sebagai beikut:

JENIS BARANG	REALISASI 2023
Belanja Jasa Kantor	56.170.624.547,00
Belanja Sewa	1.064.470.356,00
Belanja Kursus	457.335.700,00
TOTAL	57.692.430.603,00

Realisasi belanja pemeliharaan (BOS) TA. 2023 adalah sebesar Rp762.041.855,00, dengan rincian sebagai berikut :

JENIS BARANG	REALISASI 2023
Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung	279.591.200,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin	482.450.655,00
TOTAL	762.041.855,00

Realisasi belanja perjalanan dinas (BOS) TA. 2023 sebesar Rp2.636.571.061,00, dengan rincian sebagai berikut:

JENIS BARANG	REALISASI 2023
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.545.486.061,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.085.000,00
TOTAL	2.636.571.061,00

3. Belanja Barang dan Jasa (BLUD)

Realisasi belanja barang dan jasa (BLUD) TA 2023 sebesar Rp293.700.023.225,19 dengan rincian sebagai berikut :

JENIS BELANJA	REALISASI 2023 (Rp)	RSD. BALUNG	RSD. dr. SOEBANDI	RSD KALISAT	50 PUSKESMAS
Belanja Persediaan	121.872.942.313,89	25.931.560.413,37	73.738.914.640,73	11.756.438.371,00	10.446.028.888,79

JENIS BELANJA	REALISASI 2023 (Rp)	RSD. BALUNG	RSD. dr. SOEBANDI	RSD KALISAT	50 PUSKESMAS
Belanja Barang Pakai Habis Non Persediaan	14.228.571.616,00	1.521.212.511,00	8.618.428.116,00	1.051.904.665,00	3.037.026.324,00
Belanja Jasa	130.045.658.452,53	28.014.317.206,94	57.194.593.231,00	13.908.155.136,00	30.928.592.878,59
Belanja Pemeliharaan	14.955.500.176,89	2.481.773.743,00	8.712.015.398,89	532.910.780,00	3.228.800.255,00
Belanja Perjalanan Dinas	987.977.490,00	274.411.215,00	360.828.913,00	131.793.799,00	220.943.563,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	11.609.373.175,88	625.636.005,00	10.692.532.970,88	193.572.200,00	97.632.000,00
JUMLAH	**293.700.023.225,19**	**58.848.911.094,31**	**159.317.313.270,50**	**27.574.774.951,00**	**47.959.023.909,38**

Realisasi Belanja Persediaan (BLUD) TA. 2023 sebesar Rp121.872.942.313,89, dengan rincian sebagai berikut:

JENIS BELANJA	REALISASI 2023 (Rp)	RSD. BALUNG (Rp)	RSD. dr. SOEBANDI (Rp)	RSD KALISAT (Rp)	50 PUSKESMAS (Rp)
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	89.281.929,00	35.507.979,00	53.773.950,00	0,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	15.024.929.465,85	0,00	14.872.894.328,85	0,00	152.035.137,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.902.504.255,00	136.682.399,00	458.250.198,00	93.361.750,00	2.214.209.908,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	88.723.906,00	6.756.000,00	0,00	0,00	81.967.906,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	326.368.575,00	79.512.125,00	0,00	114.075.000,00	132.781.450,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	34.303.485.246,98	36.464.610,00	28.639.906.286,98	5.471.434.251,00	155.680.099,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	291.751.501,00	0,00	0,00	0,00	291.751.501,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	952.142.992,00	253.944.133,00	0,00	0,00	698.198.859,00
Belanja Suku Cadang-suku cadang Alat laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.540.446.832,00	98.147.050,00	720.869.499,00	166.568.709,00	554.861.574,00

JENIS BELANJA	REALISASI 2023 (Rp)	RSD. BALUNG (Rp)	RSD. dr. SOEBANDI (Rp)	RSD KALISAT (Rp)	50 PUSKESMAS (Rp)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	511.459.168,00	281.757.500,00	0,00	0,00	229.701.668,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.283.665.802,00	787.697.575,00	1.716.534.399,00	297.062.875,00	1.482.370.953,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	109.608.000,00	7.650.000,00	18.000.000,00	4.000.000,00	79.958.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	910.978.578,00	158.612.000,00	422.792.828,00	0,00	329.573.750,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	922.632.062,00	509.054.370,00	0,00	10.482.062,00	403.095.630,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	684.308.556,00	119.878.159,00	462.822.270,00	21.935.650,00	79.672.477,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	180.728.312,00	0,00	0,00	45.084.937,00	135.643.375,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	6.061.710,00	0,00	6.061.710,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	180.675.893,00	42.188.462,00	78.606.931,00	59.880.500,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.506.136.996,83	911.911.411,00	1.324.870.164,83	179.007.638,00	90.347.783,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	41.247.926.522,98	9.509.597.166,12	24.390.511.984,07	5.155.399.699,00	2.192.417.673,79
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	12.629.700.220,40	11.610.354.735,40	0,00	0,00	1.019.345.485,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	8.313.125,00	8.313.125,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.209.591.613,85	1.209.591.613,85	0,00	0,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	352.270.127,00	0,00	271.710.127,00	80.560.000,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	176.631.838,00	9.830.000,00	79.357.538,00	57.585.300,00	29.859.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	36.624.366,00	0,00	36.624.366,00	0,00	0,00

JENIS BELANJA	REALISASI 2023 (Rp)	RSD. BALUNG (Rp)	RSD. dr. SOEBANDI (Rp)	RSD KALISAT (Rp)	50 PUSKESMAS (Rp)
Belanja Pakaian Batik Tradisional	226.166.660,00	118.110.000,00	15.500.000,00	0,00	92.556.660,00
Belanja Pakaian Olahraga	169.828.060,00	0,00	169.828.060,00	0,00	0,00
TOTAL	121.872.942.313,89	25.931.560.413,37	73.738.914.640,73	11.756.438.371,00	10.446.028.888,79

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Non Persediaan (BLUD) TA. 2023 sebesar Rp14.228.571.616,00, dengan rincian sebagai beikut:

JENIS BELANJA	REALISAI 2023 (Rp)	RSD. BALUNG (Rp)	RSD. dr. SOEBANDI (Rp)	RSD KALISAT (Rp)	50 PUSKESMAS (Rp)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.848.712.601,00	384.563.650,00	563.206.678,00	33.478.373,00	867 463 900.00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	180.064.578,00	21.642.461,00	4.425.000,00	15.717.117,00	138 280 000.00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	11.643.140.013,00	1.115.006.400,00	8.050.796.438,00	976.684.175,00	1 500 653 000.00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	556.654.424,00	0,00	0,00	26.025.000,00	530 629.424.00
TOTAL	14.228.571.616,00	1.521.212.511,00	8.618.428.116,00	1.051.904.665,00	3.037.026.324,00

Realisasi Belanja Jasa (BLUD) TA. 2023 sebesar Rp130.045.658.452,53, dengan rincian sebagai beikut:

JENIS BELANJA	REALISAI 2023 (Rp)	RSD. BALUNG (Rp)	RSD. dr. SOEBANDI (Rp)	RSD KALISAT (Rp)	50 PUSKESMAS (Rp)
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.109.302.394,00	81.350.000,00	1.363.740.203,00	0.00	664 212 191 00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	100.100.000,00	0,00	0,00	67.700.000,00	32 400 000.00
Honorarium Rohaniwan	196.090.000,00	0,00	118.090.000,00	0,00	78 000 000.00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0.00

JENIS BELANJA	REALISAI 2023 (Rp)	RSD. BALUNG (Rp)	RSD. dr. SOEBANDI (Rp)	RSD KALISAT (Rp)	50 PUSKESMAS (Rp)
Teknologi Informasi dan Pengelola Website					
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	43.558.298.563,47	5.509.530.500,00	12.304.186.297,00	3.744.012.000,00	22.000.569.766,47
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	41.902.000,00	0,00	0,00	0,00	41.902.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	305.886.000,00	47.966.000,00	257.920.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	12.072.449,00	0,00	12.072.449,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.471.703.919,00	2.368.737.000,00	2.334.623.624,00	1.387.764.000,00	380.579.295,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	46.312.500,00	46.312.500,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	236.777.417,00	52.408.163,00	0,00	157.445.254,00	26 924 000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.240.680.844,00	1.030.524.550,00	0,00	1.043.106.082,00	167 050 212,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.630.371.692,00	699.531.061,00	899.940.631,00	0,00	30 900 000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	112.148.586,00	0,00	112 148.586,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	92.129.916,00	0,00	88.202 416,00	0,00	3 927 500,00
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	108.556.250,00	0,00	58 587 500,00	49 968 750,00	0,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.210.528,00	0,00	4 210 528,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	196.723.798,00	0,00	196.723.798,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon,air dan Listrik	52.708.405,00	0,00	0,00	0,00	52.708 405,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	765.000,00	104.000,00	0,00	0,00	661 000,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	423 579 280,00	0,00	423.579 280,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	291.325.175,00	0,00	0,00	291.325.175,00	0,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	13.202.900,00	6.600.000,00	0,00	6 602 900,00	0,00
Belanja Jasa Kalibrasi	416.865.326,00	227.528.700,00	0,00	75 589 195,00	113 747 431,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.718.074.763,00	489.678.958,00	410.323 200,00	291 107 250,00	526 965 355,00

JENIS BELANJA	REALISAI 2023 (Rp)	RSD. BALUNG (Rp)	RSD. dr. SOEBANDI (Rp)	RSD KALISAT (Rp)	50 PUSKESMAS (Rp)
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	231.313.270,00	57.780.000,00	144.965.000,00	28.568.270,00	0,00
Belanja Tagihan Telepon	169.388.979,00	4.526.249,00	97.743.560,00	19.432.297,00	47.686.873,00
Belanja Tagihan Air	69.051.648,00	362.664,00	5.186.786,00	3.250.000,00	60.252.198,00
Belanja Tagihan Listrik	7.551.070.750,89	1.544.850.584,00	3.601.019.530,00	386.043.264,00	2.019.157.372,89
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.790.627,00	6.330.000,00	860.000,00	3.850.000,00	7.750.627,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	846.218.338,00	78.380.193,00	254.141.264,00	195.409.771,00	318.287.110,00
Belanja Paket/Pengiriman	6.859.770,00	622.000,00	6.237.770,00	0,00	0,00
Belanja Penambahan Daya	62.243.630,00	0,00	0,00	0,00	62 243 630,00
Belanja Registrasi/Keanggotaan	14.022.300,00	0,00	14.022.300,00	0,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	155.707.500,00	100.933.000,00	16.071.900,00	3 874.500,00	34.828.100,00
Belanja Lembur	55.504.000,00	38.224.000,00	0,00	17 280 000,00	0,00
Belanja Medical Check Up	3.759.000,00	1.634.000,00	900.000,00	0,00	1.225.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	37.938.867.077,23	0,00	29.717.314.081,00	5.166.147.011,00	3.055.405.985,23
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.447.363.687,00	613.692.436,00	3.262.777.299,00	375.979.543,00	194.914.409,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	950.416.598,00	518.995.056,00	0,00	329.164.467,00	102.257.075,00
Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	50.750.000,00	32.750.000,00	14.350.000,00	0,00	3 650 000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	52.423.153,00	0,00	52.423.153,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Alat Kedokteran Mata	234.000.000,00	0,00	0,00	234 000 000,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	76.767.000,00	76.767.000,00	0,00	0,00	0,00

JENIS BELANJA	REALISAI 2023 (Rp)	RSD. BALUNG (Rp)	RSD. dr. SOEBANDI (Rp)	RSD KALISAT (Rp)	50 PUSKESMAS (Rp)
Belanja Sewa Hotel	51.431.108,00	8.126.000,00	1.467.000,00	1.560.000,00	40.278.108,00
Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	8.539.307,00	0,00	0,00	8.539.307,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	86.010.000,00	86.010.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	11.345.076,00	0,00	11.345.076,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	3.274.500,00	0,00	0,00	0,00	3.274.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	298.166.202,00	0,00	298.166.202,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080 000,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	82.538.500,00	0,00	82.538.500,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	124.464.569,00	124.464.569,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	98.530.800,00	98.530.800,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	73.700.000,00	0,00	73.700.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	114.000.000,00	0,00	114.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	45.498.750,00	0,00	45.498.750,00	0,00	0,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	790.688.848,00	286.080.000,00	483.053.348,00	8.322.500,00	13 233 000,00
Belanja Sosialisasi	41.244.300,00	0,00	36.254.300,00	0,00	4.990.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	297.122.500,00	40.750.000,00	246.958.900,00	9.413.600,00	0,00

JENIS BELANJA	REALISAI 2023 (Rp)	RSD. BALUNG (Rp)	RSD. dr. SOEBANDI (Rp)	RSD KALISAT (Rp)	50 PUSKESMAS (Rp)
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	14.544.768.958,94	13.707.237.223,94	0,00	0,00	837.531.735,00
TOTAL	130.045.658.452,53	28.014.317.206,94	57.194.593.231,00	13.908.155.136,00	30.928.592.878,59

Realisasi belanja pemeliharaan (BLUD) TA. 2023 adalah sebesar Rp14.955.500.176,89, dengan rincian sebagai berikut :

JENIS BELANJA	REALISAI 2023 (Rp)	RSD. BALUNG (Rp)	RSD. dr. SOEBANDI (Rp)	RSD KALISAT (Rp)	50 PUSKESMAS (Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	100.691.460,00	72.854.850,00	0,00	0,00	27.836 610,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.236.615.350,00	118.507 692,00	37 885 331,00	38 817 814,00	1 041 404 513,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.167.215.710,00	58.950.000,00	2.008 810 957,00	0,00	99 454 753,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	28.850.000,00	26.075 000,00	0,00	0,00	2 775.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	178.014.131,00	87.265.220,00	0,00	0,00	90.748.911,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	258.140.772,00	199.555.000,00	0,00	52.952.522,00	5.633.250,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	6.360.300,00	0,00	0,00	6.360.300,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat	6.317.844,00	0,00	0,00	6 317 844,00	0,00

JENIS BELANJA	REALISAI 2023 (Rp)	RSD. BALUNG (Rp)	RSD. dr. SOEBANDI (Rp)	RSD KALISAT (Rp)	50 PUSKESMAS (Rp)
Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone					
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	4.775.330.475,99	423.596.819,00	4.195.071.255,99	61.890.000,00	94.772.401,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	981.000,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	77.311.300,00	69.530.000,00	7.781.300,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	215.574.914,00	59.520.000,00	0,00	19.108.650,00	136.946.264,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	161.116.639,00	48.200.000,00	0,00	0,00	112 916 639,00
Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	29.166.138,00	29.166 138,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.421.157.692,00	0,00	0,00	16.520.200,00	1.404.637.492,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	3.885.023.206,90	974.550.632,00	2.411.938.452,90	330.943.450,00	167.590.672,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	259.126.842,00	259 126.842,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	53.285.550,00	46.625.550,00	0,00	0,00	6 660 000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	23.645.250,00	0,00	0,00	0,00	23 645 250,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-jaringan telepon jararingan telepon lainya	12.797.500,00	0,00	0,00	0,00	12.797 500,00

JENIS BELANJA	REALISAI 2023 (Rp)	RSD. BALUNG (Rp)	RSD. dr. SOEBANDI (Rp)	RSD KALISAT (Rp)	50 PUSKESMAS (Rp)
Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	50.528.102,00	0,00	50.528.102,00	0,00	0,00
TOTAL	14.955.500.176,89	2.481.773.743,00	8.712.015.398,89	532.910.780,00	3.228.800.255,00

Realisasi belanja perjalanan dinas (BLUD) TA. 2023 sebesar Rp987.977.490,00, Dengan rincian sebagai berikut:

JENIS BELANJA	REALISAI 2023 (Rp)	RSD. BALUNG (Rp)	RSD. dr. SOEBANDI (Rp)	RSD KALISAT (Rp)	50 PUSKESMAS (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	292.393.512,00	0,00	149.208.913,00	104 833 799,00	38.350 800,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	188.573.573,00	58 724.573,00	19.620.000,00	26.960 000,00	83.269 000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	507.010.405,00	215.686.642,00	192.000.000,00	0,00	99.323.763,00
JUMLAH	987.977.490,00	274.411.215,00	360.828.913,00	131.793.799,00	220.943.563,00

Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (BLUD) TA. 2023 sebesar Rp11.609.373.175,88. Dengan rincian sebagai berikut:

JENIS BELANJA	REALISAI 2023 (Rp)	RSD. BALUNG (Rp)	RSD. dr. SOEBANDI (Rp)	RSD KALISAT (Rp)	50 PUSKESMAS (Rp)
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	26.578.947,00	0,00	26 578 947,00	0 00	0 00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	11.582.794.228,88	625 636.005,00	10 665 954 023,88	193 572 200,00	97 632 000,00
JUMLAH	11.609.373.175,88	625.636.005,00	10.692.532.970,88	193.572.200,00	97.632.000,00

Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (BLUD) TA. 2023 sebesar Rp11.609.373.175,88. Dengan rincian sebagai berikut:

- RSD Balung sebesar Rp 625.636.005,00
- RSD Dr. Soebandi sebesar Rp10.692.532.970,88
- RSD Kalisat sebesar Rp 193.572.200,00
- 50 Puskesmas sebesar Rp 97.632.000,00

Jumlah **Rp11.609.373.175,88**

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Tidak terdapat realisasi belanja bunga periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023.

5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Tidak terdapat realisasi belanja subsidi periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023.

5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Persentase	Realisasi 2022 (Audited)
277.187.318.968,00	270.995.238.880,00	97,77	93.923.338.592,00

Anggaran Belanja Hibah TA. 2023 adalah sebesar Rp277.187.318.968,00 dan Realisasi belanja hibah TA 2023 sebesar Rp270.995.238.880,00 atau sebesar 97,77% . Jika dibandingkan dengan Belanja Hibah tahun 2022, realisasi Belanja Hibah pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp177.071.900.288,00 atau 188,53% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	214.116.953.968,00	208.053.504.347,00	97,17	90.860.946.092,00
2	Belanja Hibah Dana BOS	56.945.580.000,00	56.816.949.533,00	99,77	0,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.124.785.000,00	6.124.785.000,00	100,00	3.062.392.500,00
	TOTAL	**277.187.318.968,00**	**270.995.238.880,00**	**97,77**	**93.923.338.692,00**

5.1.2.1.6 Bantuan Sosial

Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Persentase	Realisasi 2022 (Audited)
32.741.922.000,00	29.185.958.000,00	89,14	44.178.244.900,00

Anggaran Belanja Bansos TA. 2023 adalah sebesar Rp32.741.922.000,00 dan Realisasi bantuan sosial TA 2023 sebesar Rp29.185.958.000,00 atau sebesar 89,14% dari anggaran belanja sebesar Rp32.741.922.000,00 dan terdapat penurunan sebesar Rp14.992.286.900,00 atau sebesar 33,94% dari realisasi tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	15.391.700.000,00	12.037.900.000,00	78,21	35.479.914.400,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	17.350.222.000,00	17.148.058.000,00	98,83	8 698.330.500,00
	TOTAL	32.741.922.000,00	29.185.958.000,00	89,14	44.178.244.900,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Persentase	Realisasi 2022 (Audited)
260.564.465.920,00	232.163.748.376,26	89,10	829.309.474.596,91

Anggaran Belanja Modal tahun 2023 adalah sebesar Rp260.564.465.920,00 dan realisasi belanja modal tahun 2023 sebesar Rp232.163.748.376,26 atau sebesar 89,10% dari anggaran belanja sebesar Rp260.564.465.920,00, Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2022, realisasi Belanja Modal pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp597.145.726.220,65 atau 72,01%.

Jumlah realisasi belanja modal yang melalui APBD sebesar Rp161.718.018.151,76 dan belanja modal BOS sebesar Rp50.223.907.580,00 serta belanja modal BLUD pada 3 RSD dan 50 Puskesmas sebesar Rp20.221.822.644,50 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	**Belanja Modal (APBD)**	173.294.175.399,00	161.718.018.151,76	93,32	774.874.308.476,62
2	**Belanja Modal (BOS)**	50.233.910.726,00	50.223.907.580,00	99,98	25 464.243.591,61
3	Belanja Modal (BLUD)	37.036.379.795,00	20.221.822.644,50	54,60	28.970.922.528,68
	TOTAL	260.564.465.920,00	232.163.748.376,26	89,10	829.309.474.596,91

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp232.163.748.376,26 sudah termasuk di dalamnya belanja modal BOS sebesar Rp50.223.907.580,00, serta belanja modal BLUD pada 3 RSD dan 50 Puskesmas sebesar Rp20.221.822.644,50. Bahwa realisasi anggaran belanja barang dan jasa BOS dan BLUD pada Laporan Realisasi Anggaran Akrual sudah dimasukkan kedalam Belanja modal sesuai klasifikasinya dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal (APBD)

Realisasi belanja modal (APBD) TA. 2023 sebesar Rp161.718.018.151,76 atau sebesar 93,32% dari anggaran belanja sebesar Rp173.294.175.399,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	**Belanja Modal Tanah**	0,00	0,00	0,00	0.00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.527.732.751,00	61.338.281.848,00	92,20	85 090 495.364,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.739.332.406,00	53.339.020.197,00	92,38	114 655 917.596,63

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.936.033 942,00	43.005.753.758,76	95,70	569.344.384.340,99
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.001.076.300,00	3.960.587.348,00	98,99	5.783.511.175,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	90.000.000,00	74.375.000,00	82,64	0,00
	TOTAL	173.294.175.399,00	161.718.018.151,76	93,32	774.874.308.476,62

Bahwa penyajian Belanja Modal berbeda dengan tahun sebelumnya mengacu Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan sudah dilakukan proses migrasi ke SIPD. Penjelasan perbedaan saldo Ralisasi TA 2023 dengan Realisasi TA 2022 sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah (APBD)

Anggaran Belanja Modal Tanah (APBD) TA. 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2023 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Realisasi Belanja Modal Tanah (APBD) untuk TA. 2023 nihil dikarenakan pada tersebut Pemerintah Kabupaten Jember tidak menetapkan Perda APBD sehingga penggunaan anggaran terbatas hanya yang bersifat wajib mengikat.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (APBD)

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin (APBD) TA. 2023 adalah sebesar Rp66.527.732.751,00 dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (APBD) TA. 2023 sebesar Rp61.338.281.848,00 atau sebesar 92,20% dan terdapat penurunan sebesar Rp23.752.213.516,00 atau sebesar 27,91%) dari realisasi tahun lalu. Penurunan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (APBD) dikarenakan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Jember tidak menetapkan Perda APBD sehingga penggunaan anggaran terbatas hanya yang bersifat wajib mengikat.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin (APBD) sebesar Rp66.527.732.751,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Mesin Proses	1.090.000 000,00	1.034.900.000,00	94,94	13 600 000,00
2	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	75.000 000,00	73.900.000,00	98,53	129.750 000,00
3	Belanja Modal Electric Generating Set	157.737.200,00	157.700.000,00	99,98	0,00
4	Belanja Modal Pompa	371.316.300,00	350.412.000,00	94,37	995.000,00
5	Belanja Modal Mesin Bor	0,00	0,00	0,00	36 000.000,00
6	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	581.734.600,00	453.200.000,00	77,90	0,00
7	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	8.883.135.200,00	7.906.400.000,00	89,00	323 626 000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
8	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4 264 967 600,00	3 917 840.000,00	91,86	659 700 000,00
9	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1 850 240 900,00	1 699.786.000,00	91,87	168 120.000,00
10	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	214 602 000,00	213.000.000,00	99,25	0,00
11	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.355.000.000,00	3.026.000.000,00	90,19	0,00
12	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.430 400 000,00	1.191.600.000,00	83,31	38.011.000,00
13	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	344.667.400,00	340.473.000,00	98,78	750.000,00
14	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	92 800.000,00
15	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	41.500 000,00	40.850.000,00	98,43	0,00
16	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	5 176 400,00	5.173.500,00	99,94	0,00
17	Belanja Modal Peralatan Las	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
18	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	200.000.000,00	199.200.000,00	99,60	4 428 716,00
19	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	0,00	0,00	0,00	3 644 800,00
20	Belanja Modal Alat Ukur Universal	127 655 250,00	119 268 200,00	93,43	55 130 250,00
21	Belanja Modal Universal Tester	0,00	0,00	0,00	66 500 000,00
22	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00
23	Belanja Modal Alat Ukur Instrument Workshop	0,00	0,00	0,00	1 445 868,00
24	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	90 000 000,00	88 800 000,00	98,67	538 293 000,00
25	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	29 956 000,00	29 950 000,00	99,98	0,00
26	Belanja Modal Alat Panen	55 231 000,00	53 500 000,00	96,87	0,00
27	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	229 262 675,00
28	Belanja Modal Alat Pasca Panen	106 772 400,00	106 400 000,00	99,65	11 250 000,00
29	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	28 500 000,00	24 850 000,00	87,19	502 815 482,00
30	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	11 403 200,00	10 723 200,00	94,04	10 048 500,00
31	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	53 512 000,00	52 000 000,00	97,17	54 197 500,00
32	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlongkapan Kantor	310 645.364,00	287.002.401,00	92,39	198 626 542,00
33	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3 346 988 487,00	2 924 518 741,00	87,38	4 858 631 351,00
34	Belanja Modal Mebel	2 765 147 219,00	2 614 839 766,00	94,56	4 680 401 777,00
35	Belanja Modal Alat Pembersih	40 477 672,00	16.483.158,00	40,72	157 722 500,00
36	Belanja Modal Alat Pendingin	858.307.400,00	786.873.398,00	91,68	928 666 152,00
37	Belanja Modal Alat Dapur	29.984 746,00	23.076 172,00	76,96	9 429 117,00
38	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.108.581.492,00	6.522.201.655,00	91,75	2 143 842 844,00
39	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	135.263.300,00	110.732.500,00	81,86	553 735 639,00
40	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	311 568 200,00	271.100 000,00	87,01	12 500 000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
41	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	66.464.400,00	62.000.000,00	93,28	0,00
42	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	180.043.100,00	151.000.000,00	83,87	0,00
43	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
44	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	70.900.000,00	70.500.000,00	99,44	48.200.000,00
45	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	122.556.650,00	117.409.685,00	95,80	472.679.343,00
46	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.150.827.270,00
47	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	286.433.800,00	242.403.500,00	84,63	281.286.514,00
48	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	0,00	0,00	11.588.400,00
49	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	400.943.500,00	391.831.000,00	97,73	639.132.232,00
50	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	37.682.750,00	37.050.000,00	98,32	0,00
51	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.704.423.000,00	3.647.625.000,00	98,47	7.831.166.925,00
52	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	198.852.640,00	197.404.000,00	99,27	472.359.040,00
53	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	23.032.500,00
54	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	8.344.615.846,00
55	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	236.195.313,00
56	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	0,00	0,00	0,00	467.800.000,00
57	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	3.885.300,00	2.893.000,00	74,46	0,00
58	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00	2.513.176.100,00
59	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	0,00	0,00	0,00	78.699.000,00
60	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	0,00	0,00	0,00	944.486.183,00
61	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	0,00	0,00	0,00	2.787.715.663,00
62	Belanja Modal Alat Kedokteran Traditional Medicine	0,00	0,00	0,00	237.715.280,00
63	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	7.586.200,00	7.576.700,00	99,87	7.479.238.990,00
64	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	449.430.248,00	437.734.648,00	97,40	4.498.045.109,00
65	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	79.545.000,00
66	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	199.330.600,00	0,00	0,00	0,00
67	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.572.707.000,00
68	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	34.410.000,00	33.900.000,00	98,52	0,00
69	Belanja Modal Komputer Jaringan	122.472.700,00	117.900.000,00	96,27	760.968.900,00
70	Belanja Modal Personal Computer	13.282.577.733,00	12.567.004.803,00	94,61	19.036.951.401,00
71	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	284.000.000,00	196.075.000,00	69,04	388.197.484,00
72	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	780.176.500,00	750.011.621,00	96,13	1.762.217.433,00

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
73	Belanja Modal Peralatan Jaringan	60.134.000,00	56.705.000,00	94,30	247.597.725,00
74	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	743.695.900,00	695.307.000,00	93,49	913.174.690,00
75	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	115.014.000,00
76	Belanja Modal Topi Kerja	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
77	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00	12.670.000,00
78	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	915.000.000,00	910.000.000,00	99,45	0,00
79	Belanja Modal Rambu Bersuar	400.000.000,00	396.600.000,00	99,15	460.128.540,00
80	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	2.897.348.400,00	2.599.643.200,00	89,72	1.880.817.770,00
81	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.597.000.000,00	2.593.254.000,00	99,86	37.076.000,00
82	Belanja Modal Runway/Threshold Light	188.034.000,00	187.500.000,00	99,72	85.215.000,00
83	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	50.000.000,00	49.600.000,00	99,20	2.000.000,00
84	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	168.880.000,00	166.600.000,00	98,65	0,00
	JUMLAH	**66.527.732.751,00**	**61.338.281.848,00**	**92,20**	**85.090.495.364,00**

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan (APBD)

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan (APBD) TA. 2023 sebesar Rp57.739.332.406,00 dan terealisasi sebesar Rp53.339.020.197,00 atau sebesar 92,38% dan jika dibandingkan realisasi tahun lalu terdapat penurunan sebesar Rp61.316.897.399,63 atau sebesar 53,48% dari realisasi tahun lalu dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	47.705.684.406,00	43.872.450.016,00	91,96	3.337.152.555,13
2	Belanja Modal Bangunan Gudang	4.000.000.000,00	3.870.183.470,00	96,75	123.529.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	5.408.903.640,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	13.209.183.693,00
5	Belanja Modal Bangunan Terbuka	2.000.000.000,00	1.904.160.600,00	95,21	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	240.248.000,00	40.240.941,00	16,75	92.471.519.708,50
7	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	1.022.200.000,00	1.008.871.849,00	98,70	0,00
8	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	514.800.000,00	508.217.500,00	98,72	0,00
9	Belanja Modal Asrama	614.800.000,00	606.539.672,00	98,66	0,00
10	Belanja Modal Pagar	1.641.600.000,00	1.528.356.149,00	93,10	105.629.000,00
	JUMLAH	**57.739.332.406,00**	**53.339.020.197,00**	**92,38**	**114.655.917.596,63**

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (APBD)

Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (APBD) TA. 2023 adalah sebesar Rp44.936.033.942,00 dan terealisasi sebesar Rp43.005.753.758,76 atau sebesar 95,70% dan

jika dibandingkan realisasi tahun lalu terdapat penurunan sebesar Rp526.338.630.582,23 atau sebesar 92,45% dari realisasi tahun lalu dikarenakan adanya prioritas pembangunan jalan. Adapun anggaran dan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (APBD) TA. 2023 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	16.260.447.842,00	15.689.793.945,00	96,49	516.245.435.410,43
2	Belanja Modal Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	31.153.958.680,00
3	Belanja Modal Jalan Khusus	9.424.152.000,00	9.132.976.792,00	96,91	0,00
4	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.705.851.000,00	2.665.095.771,76	98,49	6.123.072.772,00
5	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	0,00	14.867.767.478,56
6	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	15.245.583.100,00	14.930.050.250,00	97,93	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	0,00	0,00	0,00	757.254.000,00
8	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	400.000.000,00	392.637.000,00	98,16	196 896 000.00
9	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	900.000.000,00	195.200.000,00	21,69	0,00
	JUMLAH	44.936.033.942,00	43.005.753.758,76	95,70	569.344.384.340,99

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (APBD)

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (APBD) tahun 2023 adalah sebesar Rp4.001.076.300,00 dan tercalisasi sebesar Rp3.960.587.348,00 atau sebesar 98,99%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (APBD) pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.822.923.827,00 atau 31,52% yang disebabkan adanya perbedaan penganggaran belanja modal aset tetap lainnya yang berasal dari anggaran BLUD dan BOS dimana pada tahun 2022 dianggarkan dalam kode rekening belanja modal aset lainnya namun pada tahun 2023 kode rekening tersebut tidak tersedia dalam nomenklatur kode anggaran sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (APBD) disajikan sesuai sumber pendanaan dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	364 700.000,00	346.748.198,00	95,08	3.453.779.875,00
2	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	0 00	0,00	0,00	148.551.300,00
3	Belanja Modal Alat Musik	2.547.175.900,00	2.537.479.000,00	99,62	59.320.000,00
4	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00	525 000 000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
5	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	27 120 000,00	25.215.000,00	92,98	0,00
6	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	0,00	0,00	0,00	93.523.000,00
8	Belanja Modal Tanaman	212.080.400,00	208.797.400,00	98,45	23.507.000,00
9	Belanja Modal Software	250.000.000,00	243.783.750,00	97,51	50.000.000,00
10	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	600.000.000,00	598.564.000,00	99,76	1.429.230.000,00
	JUMLAH	4.001.076.300,00	3.960.587.348,00	98,99	5.783.511.175,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya (APBD)

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya (APBD) tahun 2023 adalah sebesar Rp90.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp74.375.000,00 atau sebesar 82,64%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu nihil.

2. Belanja Modal (BOS)

Realisasi belanja Modal (BOS) TA. 2023 sebesar Rp50.223.907.580,00 merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp50.223.907.580,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (BOS) dianggarkan pada rekening Aset Tetap Lainnya, selanjutnya dilakukan reklasifikasi sesuai kode barang.

3. Belanja Modal (BLUD)

Realisasi belanja Modal (BLUD) TA. 2023 sebesar Rp20.221.822.644,50 dengan rincian sebagai berikut :

JENIS BELANJA	REALISASI 2023 (Rp)	RSD.BALUNG (Rp)	RSD.dr.SOEBANDI (Rp)	RSD.KALISAT (Rp)	50 PUSKESMAS
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.378.240.843,50	2.042.474.100,00	10.194.365.895,50	729.275.218,00	5 412.125.630,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.296.621.681,00	439 204 713,00	280 702.968,00	576.714 000,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	227.466.972,00	0,00	227.466.972,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	319.493.148,00	0,00	166.845.400,00	0,00	152.647.748,00
Jumlah	**20.221.822.644,50**	**2.481.678.813,00**	**10.869.381,235,50**	**1.305.989.218,00**	**5.564.773.378,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD) TA. 2023 sebesar Rp18.378.240.843,50 dengan rincian sebagai berikut :

JENIS BELANJA	REALISASI 2023 (Rp)	RSD.BALUNG (Rp)	RSD.dr.SOEBANDI (Rp)	RSD.KALISAT (Rp)	50 PUSKESMAS
Belanja Modal *Electric Generating Set*	393.502.500,00	0,00	0,00	0,00	393.502.500,00
Belanja Modal Pompa	86.166.600,00	0,00	11.488.500,00	73.495.600,00	1.182.500,00

JENIS BELANJA	REALISASI 2023 (Rp)	RSD.BALUNG (Rp)	RSD.dr.SOEBANDI (Rp)	RSD.KALISAT (Rp)	50 PUSKESMAS
Belanja Modal Perkakas Standard (*Standard Tools*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perkakas bengkel kerja	957.868,00	0,00	0,00	957.868,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur Universal	153.900.000,00	153.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	1.102.800,00	0,00	0,00	0,00	1.102.800,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	420.609.560,00	81.750.000,00	14.574.300,00	0,00	324.285.260,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	458.501.566,00	0,00	63.582.300,00	54.434.250,00	340.485.016,00
Belanja Modal Mebel	910.748.208,50	49.050.000,00	67.849.332,50	50.144.250,00	743.704.626,00
Belanja Modal Alat Pengukur waktu	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00
Belanja Modal Alat Pembersih	31.754.000,00	0,00	0,00	0,00	31.754.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	1.545.359.120,00	147.950.000,00	703.310.500,00	141.420.450,00	552.678.170,00
Belanja Modal Alat Dapur	5.909.800,00	0,00	0,00	0,00	5.909.800,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)	489.386.155,00	54.990.000,00	31.324.200,00	60.443.500,00	342.628.455,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	5.252.500,00	0,00	0,00	0,00	5.252.500,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi lainnya	2.823.870,00	0,00	0,00	0,00	2.823.870,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	8.867.472.435,00	400.331.000,00	7.636.377.607,00	26.373.800,00	804.390.028,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Rehabilitasi Medik	38.887.123,00	0,00	0,00	0,00	38.887.123,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	343.120.106,00	333.350.000,00	0,00	0,00	9.770.106,00
Belanja Modal Alat kedokteran anestesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	11.204.340,00	0,00	0,00	0,00	11.204.340,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	118.159.718,00	0,00	0,00	0,00	118.159.718,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	103.850.000,00	0,00	0,00	0,00	103.850.000,00
Belanja Modal System/Power Supply	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Standansasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer Jaringan	13.470.000,00	0,00	0,00	0,00	13.470.000,00
Belanja Modal Personal Computer	2.795.731.330,00	598.680.000,00	402.600.330,00	286.313.500,00	1.508.137.500,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	673.313.144,00	82.688.000,00	512.258.826,00	35.692.000,00	42.674.318,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	849.535.100,00	98.535.100,00	751.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	18.378.240.843,50	2.042.474.100,00	10.194.365.895,50	729.275.218,00	5.412.125.630,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan (BLUD) TA. 2023 sebesar Rp1.296.621.681,00 dengan rincian sebagai berikut :

- RSD Balung sebesar Rp 439.204.713,00
- RSD dr. Soebandi sebesar Rp 280.702.968,00
- RSD Kalisat sebesar Rp 576.714.000,00

Jumlah **Rp1.296.621.681,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (BLUD) TA. 2023 sebesar Rp227.466.972,00 merupakan belanja modal pada RSD dr. Soebandi sebesar Rp227.466.972,00

Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (BLUD) TA. 2023 sebesar Rp319.493.148,00 dengan rincian sebagai berikut :

JENIS BELANJA	REALISASI 2023 (Rp)	RSD.BALUNG (Rp)	RSD.dr.SOEBANDI (Rp)	RSD.KALISAT (Rp)	50 PUSKESMAS
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Goodwill*	152.647.748,00	0,00	0.00	0.00	152.647.748,00
Belanja Modal *Software*	166.845.400,00	0,00	166.845.400,00	0.00	0.00
JUMLAH	**319.493.148,00**	0,00	**166.845.400,00**	0,00	**152.647.748,00**

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Persentase	Realisasi 2022 (Audited)
45.162.296.180,00	31.854.315.147,00	70,53	1.483.241.150,00

Anggaran Belanja Tidak Terduga tahun 2023 adalah sebesar Rp45.162.296.180,00 dan realisasinya sebesar Rp31.854.315.147,00 atau 70,53%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp30.371.073.997,00 atau sebesar 2.047,62% dari realisasi tahun lalu.

5.1.2.4 Transfer

Anggaran Transfer tahun 2023 adalah sebesar Rp523.738.946.077,00 dan realisasinya sebesar Rp522.644.113.477,00 atau 99,79 %. Jika dibandingkan dengan realisasi transfer tahun 2022, realisasi transfer pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp10.446.649.750,00 atau sebesar 2,04%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening transfer tahun 2022:

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	100,00	22.065.196.658,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	501.238.946.077,00	500.144.113.477,00	99,78	490.132.267.069,00
	TOTAL	**523.738.946.077,00**	522.644.113.477,00	99,79	**512.197.463.727,00**

5.1.2.4.1 Bagi Hasil Pendapatan

	Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Persentase	Realisasi 2022 (Audited)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	18.703.050.930,00	18.703.050.930,00	100,00	18.268.247.588,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.796.949.070,00	3.796.949.070,00	100,00	3.796.949.070,00
TOTAL	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	100,00	22.065.196.658,00

Anggaran Bagi Hasil Pendapatan tahun 2023 adalah sebesar Rp22.500.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp22.500.000.000,00 atau 100%, sama dengan realisasi Bagi Hasil Pendapatan tahun 2022 , yang terdiri dari :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	18.703.050.930,00	18.703.050.930,00	100,00	18.268.247.588,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.796.949.070,00	3.796.949.070,00	100,00	3.796.949.070,00
	TOTAL	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	100,00	22.065.196.658,00

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

	Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Persentase	Realisasi 2022 (Audited)
Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	501.238.946.077,00	500.144.113.477,00	99,78	490.132.267.069,00
TOTAL	501.238.946.077,00	500.144.113.477,00	99,78	490.132.267.069,00

Anggaran belanja bantuan keuangan tahun 2023 sebesar Rp501.238.946.077,00 dan terealisasi 2023 sebesar Rp500.144.113.477,00 atau sebesar 99,78%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2022, realisasi pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.011.846.408,00 atau 2,04 % . Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan yang terdiri dari:

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	501.238.946.077,00	500.144.113.477,00	99,78	490.132.267.069,00
	TOTAL	501.238.946.077,00	500.144.113.477,00	99,78	490.132.267.069,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp500.144.113.477,00. Sedangkan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp500.144.113.477,00, dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
1	21/03/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 31 Desa bagian bln Januari sd Maret TA.2023 surat DISPEMASDES no. 001Tgl 20/3/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	5.677.818.000,00
2	21/03/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 42 Desa bagian bln Januari sd Maret TA.2023 surat DISPEMASDES no. 002 Tgl 21/3/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	8.258.583.000,00
3	29/03/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 40 Desa bagian bln Januari sd Maret TA.2023 surat DISPEMASDES no. 003 Tgl 27/3/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	7.641.946.000,00
4	30/03/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 31 Desa bagian bln Januari sd Maret TA.2023 surat DISPEMASDES no. 004 Tgl 29/3/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	5.671.975.000,00
5	04/04/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 144 Desa bagian bln April TA.2023 surat DISPEMASDES no. 006 Tgl 3/4/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	9.216.774.000,00
6	04/04/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 35 Desa bagian bln Januari sd April TA.2023 surat DISPEMASDES no. 005 Tgl 3/4/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	9.225.248.000,00
7	06/04/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 22 Desa bagian bln Januari sd April TA.2023 surat DISPEMASDES no. 007 Tgl 4/4/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	5.708.084.000,00
8	11/04/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 18 Desa bagian bln Jan sd April TA.2023 surat DISPEMASDES no. 008 Tgl 10/4/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	4.641.836.000,00
9	12/04/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 4 Desa bagian bln Januari-April TA.2023 surat DISPEMASDES no. 009 Tgl 11/4/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	979.864.000,00
10	27/04/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 1 Desa bagian bln Januari s/d April TA.2023 surat DISPEMASDES no. 009 Tgl 26/4/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	255.968.000,00
11	30/04/2023	Dana Desa smt 1 2023	134.311.774.050,00
12	04/05/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 224 Desa bagian bln Mei TA.2023 surat DISPEMASDES no. 010 Tgl 2/5/2023 pd Sub Keg.	14.429.524.000,00

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember, sebagaimana permohonan terlampir.	
13	29/05/2023	Dana Desa tahap 2 periode 2023	18.791.452.200,00
14	29/05/2023	Pembayaran Penyaluran Bantuan Keuangan Pilkades Serentak utk 4 desa TA 2023 pd Keg Penunj Urusan Kewen Pengelolaan Keuda, Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	805.303.300,00
15	29/05/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 1 Desa bagian bln Januari sd Mei TA.2023 surat DISPEMASDES no. 011 Tgl 25/5/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	237.490.000,00
16	06/06/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 225 Desa bag Bln Juni 2023 & 1 Desa bagian bln Januari sd Juni TA.2023 surat DISPEMASDES no. 012 & 13 Tgl 5/6/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebgmna permhnan trlmpr	14.748.762.000,00
17	14/06/2023	Pmbyran Penyaluran BanKeu Pilkades Serentak utk 2 desa TA 2023 bdsr Srt pengajuan DISPEMASDES No. 0610 tgl 12/6 & 0619 tgl 13/6 pd Keg Penunj Urusan Kewen Pengel Keuda, SubKeg. Analisis Perenc & Penyaluran BanKeu, pd BPKAD Kab. Jember sebgmn permhnn trlpr	280.796.332,00
18	30/06/2023	Dana Desa Bulan Juni 2023	43.680.618.050,00
19	04/07/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 226 Desa bag Bln JuLi 2023 surat DISPEMASDES no. 014 Tgl 3/7/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	14.514.812.000,00
20	31/07/2023	Dana Desa gel 3 TA 2023	30.274.724.000,00
21	02/08/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 226Desa bag Bln Agustus TA.2023 surat DISPEMASDES No. 015 Tgl 31/7/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir	14.514.812.000,00
22	31/08/2023	Dana Desa golombang 4	21.496.443.550,00
23	01/09/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 226Desa bag Bln September TA.2023 surat DISPEMASDES no. 016 Tgl 31/8/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir	14.514.812.000,00
24	30/09/2023	Dana Desa periode September 2023	11.520.611.250,00
25	03/10/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 226Desa bag Bln Oktober TA.2023 surat DISPEMASDES no. 017 Tgl 2/10/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir	14.514.812.000,00
26	31/10/2023	Dana Desa per 31 oktober 2023	27.236.857.350,00
27	06/11/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 5 Desa bag Bln November TA.2023 surat DISPEMASDES no. 018 Tgl 2/11/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir	325.123.500,00
28	09/11/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 7 Desa bag Bln November TA.2023 surat DISPEMASDES no. 019 Tgl 6/11/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir	455.429.000,00
29	21/11/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 47 Desa bag Bln November TA.2023 surat DISPEMASDES no. 020 Tgl 13/11/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir	3.253.380.000,00
30	23/11/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 12 Desa bag Bln November TA.2023 surat DISPEMASDES no. 021 Tgl 17/11/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir	826.501.000,00
31	23/11/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 16 Desa bag Bln November TA.2023 surat DISPEMASDES no. 022 Tgl 21/11/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir	1.047.316.500,00
32	29/11/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 28 Desa bag Bln November TA.2023 surat DISPEMASDES no. 023 Tgl 24/11/2023 pd Sub	1.950.441.000,00

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
		Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	
33	30/11/2023	Dana Desa priode november 2023	25.598.714.200,00
34	04/12/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 24 Desa bag Bln November-Desember TA.2023 surat DISPEMASDES no. 023 Tgl 29/11/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	3.170.110.000,00
35	04/12/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 115 Desa bag Bln Desember TA.2023 surat DISPEMASDES no. 025 Tgl 29/11/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	7.858.191.000,00
36	06/12/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 34 Desa bag Bln November-Desember TA.2023 surat DISPEMASDES no. 026 Tgl 5/12/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	4.621.599.445,00
37	11/12/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 29 Desa bag Bln November-Desember TA.2023 surat DISPEMASDES no. 027 Tgl 8/12/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	4.132.099.000,00
38	13/12/2023	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 24 Desa bag Bln November-Desember TA.2023 surat DISPEMASDES no. 028 Tgl 12/12/2023 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	3.273.121.000,00
39	16/12/2023	Dana Desa 1-15 Desember 2023	10.085.387.750,00
		JUMLAH	**500.144.113.477,00**

5.1.3 Surplus/Defisit LRA

Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Persentase	Realisasi 2022 (Audited)
(121.337.947.708,00)	155.204.589.589,93	(127,91)	(448.201.478.113,05)

Defisit anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp121.337.947.708,00 dan Defisit realisasi Anggaran sebesar Rp155.204.589.589,93 atau 127,91% sedangkan tahun 2022 surplus realisasi sebesar Rp448.201.478.113,05 dengan perhitungan:

URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
Pendapatan	3.996.941.711.054,00	3.957.426.651.267,85	99,01	3.715.160.123.903,32
Belanja dan Transfer	4.118.279.658.762,00	3.802.222.061.677,92	92,33	4.163.361.602.016,37
Surplus (Defisit)	(121.337.947.708,00)	155.204.589.589,93	(127,91)	(448.201.478.113,05)

5.1.4 Pembiayaan Netto

	Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)	Persentase	Realisasi 2022 (Audited)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	121.337.947.707,00	121.337.947.710,93	100,00	569.519.825.820,96
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	53.942.500,00	0,00	19.600.000,00
TOTAL	121.337.947.707,00	121.391.890.210,93	100,04	569.539.425.820,96

Anggaran Pembiayaan Netto TA 2023 adalah sebesar Rp121.337.947.707,00 dan Realisasi Pembiayaan Netto TA 2022 sebesar Rp121.337.947.710,93 atau sebesar 100,00% mengalami penurunan sebesar Rp448.147.535.610,03 atau 78,69% dari realisasi tahun lalu yang terdiri dari:

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1.	Penerimaan Pembiayaan	121.337.947.707,00	121.391.890.210,93	100,04	569.539.425.820,96
2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	121.337.947.707,00	121.391.890.210,93	100,04	569.539.425.820,96

a. **Penerimaan Pembiayaan**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp121.391.890.210,93 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp121.337.947.707,00. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
1.	Penggunaan SILPA	121.337.947.707,00	121.337.947.710,93	100,00	569.519.825.820,96
2.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	53.942.500,00	0,00	19 600.000,00
	TOTAL	121.337.947.707,00	121.391.890.210,93	100,04	569.539.425.820,96

- Penggunaan SiLPA sebesar Rp121.337.947.710,93
- Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya merupakan pengembalian pokok pinjaman atas dana bergulir Bank Jatim Bagian Perekonomian sebesar Rp53.942.500,00 yang disetor tanggal 30 Desember 2023.

b. **Pengeluaran Pembiayaan**

Pada Tahun 2023 Pengeluaran Pembiayaan Nihil

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SiLPA)

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
0,00	276.596.479.800,86	121.337.947.707,91

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember TA 2023 sebesar Rp276.596.479.800,86 dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%	REALISASI TA 2022 (Rp)
Pendapatan	3.996.941.711.054,00	3.957.426.651.267,85	99,01	3.715 160 123.903,32
Belanja dan Transfer	4.118.279.658.762,00	3.802.222.061.677,92	92,33	4.163.361 602.016,37
Surplus (Defisit)	(121.337.947.707,00)	155.204.589.589,93	(127,91)	(448.201.478.113,0)
Pembiayaan Netto	121.337.947.707,00	121.391.890.210,93	100,04	569.539.425.820,96
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	276.596.479.800,86	-	121.337.947.707,91

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2023 sebesar Rp276.596.479.800,86

URAIAN	JENIS KAS (Rp)
Kas di Kas Daerah	234.552.670.324,51
Utang Kasda pada Bank Jatim (Pemotongan Qris Dinas Perhubungan)	(105.000,00)
Utang Kasda pada Bank Jatim (Pengembalian Belanja Bakesbangpol yang diinputkan lebih)	(270.000,00)
Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah	873.061.070,00
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.383.500,00
Kas di Bendahara Penerimaan - RSD dr. Soebandi	25.909.450,17
Kas di Bendahara Penerimaan - RSD Balung	19.305.479,00
Kas di Bendahara Penerimaan - RSD Kalisat	14.435.900,00
Kas di BLUD - RSD dr. Soebandi	20 000 178 174,25
Kas di BLUD - RSD Balung	5.595 141.517,49
Kas di BLUD - RSD Kalisat	1.977 920 543,51
Kas di BLUD - Puskesmas	9 307 583 532,45
Kas Dana BOS	55 451.081,48
Kas Lainnya - Dana BOK PUSKESMAS	4 151 814.228,00
SILPA	276.596.479.800,86

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2023 adalah sebagai berikut.

5.2.1 Lebih SAL Awal

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	Persentase
121.337.947.707,91	676.617.037.989,96	(555.279.090.282,05)	82,07

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA pada tahun 2023 sebesar Rp121.337.947.707,91 mengalami penurunan sebesar Rp555.279.090.282,05 atau sebesar

82,07% jika dibandingkan SAL Awal tahun 2022 sebesar Rp676.617.037.989,96.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagaimana Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	Persentase
121.337.947.710,93	569.519.825.820,96	(448.181.878.110,03)	78,69

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2023 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan pada APBD 2023, yaitu sebesar Rp121.337.947.710,93 yang mengalami penurunan sebesar Rp448.181.878.110,03 atau sebesar 78,69% dibandingkan tahun 2022.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	Persentase
276.596.479.800,86	121.337.947.707,91	155.258.532.092,95	127,96

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Adapun SiLPA tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp155.258.532.092,95 atau sebesar 127,96% dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp276.596.479.800,86 yang diuraikan sebagai berikut :

- Defisit Anggaran Rp 155.205.453.651,01
- Pembiayaan Netto Rp 121.391.026.149,85

SiLPA Tahun berjalan Rp 276.596.479.800,86

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	Persentase
0,00	(107.097.212.169,00)	107.097.212.169,00	100

Tidak terdapat koreksi karena kesalahan pembukuan tahun sebelumnya pada LP-SAL TA 2023.

5.2.5 Lain-lain

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	Persentase
3,02	0,00	0,00	0,00

Koreksi lain-lain sebesar Rp3,02 yakni Koreksi Silpa Dana BOS yang merupakan Pembulatan transfer dari Pemerintah Pusat senilai Rp3,02.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
276.596.479.800,86	121.337.947.707,91	155.258.532.092,95	127,96

Saldo Anggaran Lebih akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih TA 2023 sebesar Rp276.596.479.800,86 mengalami kenaikan sebesar Rp155.258.532.092,95 atau sebesar 127,96% jika dibandingkan TA. 2022 yang sebesar Rp121.337.947.707,91.

5.3 NERACA

5.3.1 ASET

5.3.1.1 Aset Lancar

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
454.949.892.131,98	325.069.126.678,38	129.880.765.453,60	39,95

Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp454.949.892.131,98 dan Rp325.069.126.678,38 yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp129.880.765.453,60 dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Nilai Aset Lancar mengalami peningkatan sebesar Rp129.880.765.453,60 atau 39,95%.

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, belanja dibayar dimuka dan persediaan, dengan penjelasan sebagai berikut :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas dan Bank	277.297.712.915,76	122.853.402.288,02
Piutang	366.128.200.889,03	347.765.559.064,94
Penyisihan Piutang	(255.468.435.927,69)	(222.740.299.956,89)
Beban Dibayar Dimuka	2.846.435,66	12.705.000,00
Persediaan	66.989.567.819,22	77.177.760.282,31
Jumlah	**454.949.892.131,98**	**325.069.126.678,38**

Kas dan Bank

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
277.297.712.915,76	122.853.402.288,02

Kas dan Bank per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp277.297.712.915,76 dan Rp122.853.402.288,02, merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah dan ditambah dengan Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Dana BOS, Kas di FKTP dan Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas dan Bank		
Kas di Kas Daerah	234.552.295.324,51	62.782.444.703,37
Kas di Bendahara Penerimaan	956.095.399,17	1.478.913.719,40
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di BLUD	36.880.823.767,70	36.136.229.028,60
Kas Dana BOS	55.451.081,48	165.143.044,54
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	20.775.217.212,00
Kas Lainnya	4.853.047.342,90	1.515.454.580,11
	277.297.712.915,76	122.853.402.288,02

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp234.552.295.324,51 dan Rp62.782.444.703,37 yang merupakan kas murni dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2023

No	Bank	Nomor Rekening	Nilai 2023	Nilai 2022
1.	Bank Jatim Cabang Jember	31070007	234.552.295.324,51	62.782.444.703,37
Jumlah			234.552.295.324,51	62.782.444.703,37

Terdapat selisih anatar Kas di Kas Daerah dengan Rekening Koran Bank Jatim sebesar Rp375.000,00. Dimana selisih tersebut terdiri dari :

- Selisih antara nilai Pendapatan Retribusi Jasa Umum - Dinas Perhubungan dengan Rekening Koran Kas Daerah sebesar Rp107.000,00. Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum - Pengujian Kendaraan Bermotor - Pengujian Kendaraan Bermotor atas pendapatan Dinas

Perhubungan karena doubel transfer, yang disebabkan adanya maintenance QRIS pada bulan Juli 2023 berdasarkan pada surat Bank Jatim nomor 062/896/jbr/Ops. Dana/SRT.

- Selisih antara nilai STS kontra post atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor - Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp270.000,00. Hal tersebut terjadi karena kesalahan input Bank Jatim senilai Rp6.964.000,00 yang seharusnya Rp6.694.000 sehingga terjadi selisih sebesar Rp270.000,00.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp956.095.399,17 dan Rp1.478.913.719,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rekening di Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023

NO	Uraian	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah/Kas BLUD
1	RS dr. Soebandi	25.909.450,17	02-Jan-24
2	RS Balung	19.305.479,00	02-Jan-24
3	RS Kalisat	14.435.900,00	02-Jan-24
4	Dinas Perindustrian dan perdagangan	23.383.500,00	02-Jan-24
5	Badan Pendapatan Daerah	873.061.070,00	02-Jan-24
Jumlah		956.095.399,17	

Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan selama Tahun Anggaran 2023 rinciannya sebagai berikut:

Tabel Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023

No	Keterangan	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	RSD dr. Soebandi	26.787.377,40	25.909.450,17	26.787.377,40	25.909.450,17
2	RSD Balung	18.673.266,00	19.305.479,00	18.673.266,00	19.305.479,00
3	RSD Kalisat	496.700,00	14.435.900,00	496.700,00	14.435.900,00
4	Dinas Kesehatan	900.000,00	-	900.000,00	-
5	Dinas Pariwisata dan kebudayaan	22.058.500,00	-	22.058.500,00	-
6	Dinas Perhubungan	93.500,00	-	93.500,00	-
7	Dinas Perindustrian dan perdagangan	22.881.100,00	23.383.500,00	22.881.100,00	23.383.500,00
8	Badan Pendapatan Daerah	1.387.023.276,00	873.061.070,00	1.387.023.276,00	873.061.070,00
	Jumlah	1.478.913.719,40	956.095.399,17	1.478.913.719,40	956.095.399,17

Kas di Bendahara Penerimaan pada 3 Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Jember merupakan penerimaan Retribusi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD yang diterima saat

batas akhir tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Nomor dan Nama Rekening 3 Rumah Sakit Kabupaten Jember

No	Uraian	Nomor dan Nama Rekeing
1	RS dr. Soebandi	Bank Jawa Timur No Rek 0031019499 an. RS dr. Soebandi
2	RS Balung	Bank Jawa Timur No Rek 0031005019 an. Bendahara Penerimaan RS Balung
3	RS Kalisat	Bank Jawa Timur No Rek 0031016339 a.n RS Kalisat

Kas Bendahara Penerimaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp23.383.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2023

No	Uraian	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Pelataran	3.128.000,00	6.241.500,00	3.128.000,00	6 241 500,00
2	Los	4.396.500,00	7.503.000,00	4.396.500,00	7.503.000,00
3	Kios	9.476.600,00	4.931.000,00	9.476.600,00	4.931.000,00
4	Parkir	1.282.000,00	2.551.000,00	1 282.000,00	2 551.000,00
5	Kamar Mandi/WC	1.156.000,00	2 157 000,00	1 156.000,00	2.157.000,00
6	Kebersihan	3.442.000,00	-	3 442.000,00	-
	Jumlah	22.881.100,00	23.383.500,00	22.881.100,00	23.383.500,00

Tabel Rincian Nomor dan Nama Rekening Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Uraian	Rekening BPD Jawa Timur			Jumlah
		003996961	0039997011	0039996936	
1	Pelataran	-	-	6.241.500,00	6 241.500,00
2	Los	-	-	7.503.000,00	7.503.000,00
3	Kios	-	-	4.931.000,00	4.931.000,00
4	Parkir	-	2.551.000,00	-	2.551.000,00
5	Kamar Mandi/WC	2.157.000,00	-	-	2 157.000,00
Jumlah		2.157.000,00	2.551.000,00	18.675.500,00	23.383.500,00

Kas Bendahara Penerimaan di Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp873.061.070,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah
per 31 Desember 2023

NO	Keterangan	2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	75.000,00
2	Pajak Restoran	152.308.321,00
3	Pajak Reklame	47.058.563,00
4	Pajak Hiburan	10.645.000,00
5	BPHTB	460.100.918,00
6	PBB	193.748.747,00
7	Pajak Air Tanah	9.124.521,00
	Jumlah	873.061.070,00

Tabel Rincian Nomor dan Nama Rekening Kas di Bendahara Penerimaan
pada Badan Pendapatan Daerah

No	Nama Bank	Nomor dan Nama Rekening	Nominal
1	Bank BRI	002101003999301 a/n Giro Tres NotP	1.913.700,00
2	Bank BNI	1946336336 a/n Penerimaan Pajak Daerah Kab. Jember	25 495.306,00
3	Bank Mandiri	1430023945734 a/n Penerimaan Pajak Daerah Kab Jember	117.202 786,00
4	Bank Jatim (PBB)	0031023564 a/n Giro Pemda Kabupaten	123.309.329,00
5	Bank Jatim (Resto)	0031023599 a/n Giro Pemda Kabupaten	806.400,00
6	Magna Karsa Mulva (Indomaret).		32.922 454,00
7	Kantor Pos		571.411.095,00
	Jumlah		873.061.070,00

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp36.880.823.767,70 dan Rp36.136.229.028,60 terdiri dari:

1. Kas di Bendahara RS Soebandi

Rekening giro RS di Bank Jatim Rek 0031019499	Rp	8.621.547.341,25
Rekening giro RS di BNI Rek 0329701594	Rp	1.378.630.833,00
Deposito Bank Syariah Indonesia	Rp	10.000.000.000,00
Deposito Bank BUKOPIN	Rp	0,00
Jumlah	**Rp**	**20.000.178.174,25**

2. Kas di Bendahara RS Balung

Kas di Bendahara Penerimaan Rekening giro		
RS Balung di Bank Jatim Rek 0031005019	Rp	5.595.141.517,49
Jumlah	**Rp**	**5.595.141.517,49**

3.	Kas di Bendahara RS Kalisat		
	Rekening giro RS Kalisat di Bank Jatim Rek 0031016339	Rp	1.977.920.543,51
	Jumlah	**Rp**	**1.977.920.543,51**
4	Kas di BLUD - 50 Puskesmas		9.307.583.532,45

5.3.1.1.5 Kas Dana BOS

Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp55.451.081,48 dan Rp165.143.044,54 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Kas Dana BOS per 31 Desember 2023

No	Lembaga	Saldo Akhir 2023	Saldo Akhir 2022
1	SD	42.037.588,56	125.146.428,86
2	SMP	13.413.492,92	39.996.615,68
Jumlah		**55.451.081,48**	**165.143.044,54**

Tabel Mutasi Kas Dana BOS – Dinas Pendidikan per 31 Desember 2023

No	Lembaga	2022 Rp	Koreksi Saldo Awal	Penerimaan	Pengurangan	2023 Rp
1	SD	125.146.428,86	1,78	141.470.338.507,00	141.553.447.349,08	42.037.588,56
2	SMP	39.996.615,68	1,24	50.592.916.539,00	50.619.499.663,00	13.413.492,92
Jumlah		**165.143.044,54**	**3,02**	**192.063.255.046,00**	**192.172.947.012,08**	**55.451.081,48**

Kas Dana BOS terdiri dari Negeri dan Swasta, adapun Kas Dana BOS Sekolah Swasta adalah sebagai berikut :

Tabel Mutasi Kas Dana BOS (Sekolah Swasta) – Dinas Pendidikan per 31 Desember 2023

No	Lembaga	2022 Rp	Penerimaan	Pengurangan	2023 Rp
1	SD	30.121.820,01	21.289.906.387,00	21.289.906.387,00	30.121.820,01
2	SMP	141.618.647,06	35.527.043.146,00	35.527.043.146,00	141.618.647,06
Jumlah		**171.740.467,07**	**56.816.949.533,00**	**56.816.949.533,00**	171.740.467,07

5.3.1.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Saldo kas per 31 Desember 2022 di Bendahara FKTP - JKN sebesar Rp0,00. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 TAhun 2021, bahwa pengelolaan JKN - Puskesmas yang telah menerapkan pola BLUD, maka sisa dana kapitasi yang ada di Bendahara Kapitasi JKN disetorkan ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rekening di Kas di Bendahara FKTP

NO.	Uraian	Keterangan	Sisa Pendapatan JKN Tahun 2022	Bunga Giro		Jumlah Yang Disetor	Tanggal Setor
				Tahun 2022	Tahun 2023		
1	Puskesmas Kencong	Kas di BNI No Rek 344 376 450	137.259.402,00	11.138.708,00	1.087.535,00	149.485.645,00	24/11/2023
2	Puskesmas Cakru	Kas di BNI No Rek 344 660 046	16.874.734,00	472.699,00	55.423,00	17.402.856,00	24/11/2023
3	Puskesmas Gumukmas	Kas di BNI No Rek 344 620 423	99.381.827,00	2.019.621,00	664.778,00	102.066.226,00	24/11/2023, 28/12/2023
4	Puskesmas Tembokrejo	Kas di BNI No Rek 344 660 669	4.086.402,00	890.986,00	-	4.977.388,00	24/11/2023
5	Puskesmas Puger	Kas di BNI No Rek 344 620 922	96.893.168,00	3.246.231,00	653.425,00	100.792.824,00	29/12/2023, 24/11/2023
6	Puskesmas Kasiyan	Kas di BNI No Rek 344 661 233	48.388.658,00	3.353.233,00	218.066,00	51.959.957,00	24/11/2023
7	Puskesmas Wuluhan	Kas di BNI No Rek 344 621 405	291.184.240,00	13.086.337,00	2.489.675,00	306.760.252,00	24/11/2023, 27/11/2023
8	Puskesmas Lojejor	Kas di BNI No Rek 344 661 685	75.494.313,00	3.445.488,00	462.724,00	79.402.525,00	24/11/2023, 22/12/2023
9	Puskesmas Ambulu	Kas di BNI No Rek 344 626 902	461.630.971,00	8.831.666,00	3.972.412,00	474.435.049,00	23/11/2023, 29/11/2023, 22/12/2023
10	Puskesmas Sabrang	Kas di BNI No Rek 344 662 077	52.885.168,00	4.736.037,00	270.953,00	57.892.158,00	24/11/2023, 22/12/2023
11	Puskesmas Andongsari	Kas di BNI No Rek 344 662 656	1.205.038,00	449.261,00	-	1.654.299,00	23/11/2023
12	Puskesmas Tempurejo	Kas di BNI No Rek 344 633 227	98.239.182,00	4.351.653,00	675.477,00	103.266.312,00	24/11/2023, 28/12/2023
13	Puskesmas Curahnongko	Kas di BNI No Rek 344 663 218	59.561.823,00	957.184,00	296.109,00	60.815.116,00	23/11/2023, 15/12/2023
14	Puskesmas Silo I	Kas di BNI No Rek 344 636 206	57.858.613,00	10.645.586,00	373.382,00	68.877.581,00	28/11/2023, 29/12/2023

NO.	Uralan	Keterangan	Sisa Pendapatan JKN Tahun 2022	Bunga Giro		Jumlah Yang Disetor	Tanggal Setor
				Tahun 2022	Tahun 2023		
15	Puskesmas Silo II	Kas di BNI No Rek 344 637 925	1.127.812.300,00	32.054.654,00	12.800.716,00	1.172.667.670,00	24/11/2023, 22/12/2023
16	Puskesmas Mayang	Kas di BNI No Rek 344 638 168	916.667.382,00	27.750.620,00	9.228.491,00	953.646.493,00	23/11/2023, 18/12/2023
17	Puskesmas Mumbulsari	Kas di BNI No Rek 344 638 384	3.701.006.297,00	93.713.909,00	60.211.391,00	3.854.931.597,00	23/11/2023, 29/12/2023
18	Puskesmas Jenggawah	Kas di BNI No Rek 344 638 601	219.764.308,00	8.989.900,00	1.804.814,00	230.559.022,00	23/11/2023, 28/12/2023
19	Puskesmas Kemungsarikidul	Kas di BNI No Rek 344 663 717	76.487.870,00	2.184.620,00	458.908,00	79.131.398,00	23/11/2023 29/12/2023
20	Puskesmas Ajung	Kas di BNI No Rek 344 638 725	383.294.027,00	15.543.149,00	3.330.087,00	402.167.263,00	24/11/2023, 22/12/2023
21	Puskesmas Rambipuji	Kas di BNI No Rek 344 638 894	176.431.399,00	5.158.047,00	1.386.104,00	182.975.550,00	24/11/2023, 27/12/2023
22	Puskesmas Nogosari	Kas di BNI No Rek 344 639 070	20.718.812,00	476.780,00	72.474,00	21.268.066,00	23/11/2023, 22/12/2023
23	Puskesmas Balung	Kas di BNI No Rek 344 639 263	174.430.393,00	4.922.976,00	1.361.793,00	180.715.162,00	23/11/2023, 27/12/2023
24	Puskesmas Karangduren	Kas di BNI No Rek 344 664 585	6.539.171,00	536.166,00	9.287,00	7.084.624,00	23/11/2023, 22/12/2023
25	Puskesmas Umbulsari	Kas di BNI No Rek 344 639 478	9.926.187,00	1.296.721,00	27.934,00	11.250.842,00	24/11/2023, 27/12/2023
26	Puskesmas Paleran	Kas di BNI No Rek 344 665 283	25.537.759,00	1.232.132,00	97.717,00	26.867.608,00	24/11/2023
27	Puskesmas Somboro	Kas di BNI No Rek 344 665 715	348.723.456,00	12.465.532,00	3.001.683,00	364.190.671,00	24/11/2023, 24/12/2023
28	Puskesmas Jombang	Kas di BNI No Rek 344 666 208	184.028.162,00	3.163.651,00	1.432.087,00	188.623.900,00	23/11/2023
29	Puskesmas Sumberbaru	Kas di BNI No Rek 344 666 809	671.864.495,00	31.215.381,00	6.540.503,00	709.620.379,00	28/12/2023, 24/11/2023

NO.	Uralan	Keterangan	Sisa Pendapatan JKN Tahun 2022	Bunga Giro		Jumlah Yang Disetor	Tanggal Setor
				Tahun 2022	Tahun 2023		
30	Puskesmas Rowotengah	Kas di BNI No Rek 344 667 905	1.006.479.653,00	24.260.598,00	10.435.840,00	1.041.176.091,00	23/11/2023, 27/12/2023
31	Puskesmas Tanggul	Kas di BNI No Rek 344 668 342	899.766.772,00	32.184.529,00	9.088.601,00	941.039.902,00	23/11/2023, 27/12/2023
32	Puskesmas Klatakan	Kas di BNI No Rek 344 669 196	280.243.968,00	8.613.683,00	2.351.032,00	291.208.683,00	24/12/2023, 24/11/2023
33	Puskesmas Bangsalsari	Kas di BNI No Rek 344 669 833	837.337.752,00	37.411.344,00	8.446.726,00	883.195.822,00	23/11/2023, 27/12/2023
34	Puskesmas Sukorejo	Kas di BNI No Rek 344 670 394	112.610.270,00	7.321.072,00	831.459,00	120.762.801,00	24/11/2023, 27/12/2023
35	Puskesmas Panti	Kas di BNI No Rek 344 671 003	345.053.774,00	23.404.500,00	3.057.654,00	371.515.928,00	23/11/2023, 22/12/2023
36	Puskesmas Sukorambi	Kas di BNI No Rek 344 671 456	154.070.006,00	4.367.365,00	1.174.224,00	159.611.595,00	23/11/2023, 22/12/2023
37	Puskesmas Arjasa	Kas di BNI No Rek 344 672 971	222.798.999,00	13.543.554,00	1.872.865,00	238.215.418,00	23/11/2023, 19/12/2023
38	Puskesmas Pakusari	Kas di BNI No Rek 344 674 322	213.645.213,00	12.439.458,00	1.780.874,00	227.865.545,00	23/11/2023, 22/12/2023
39	Puskesmas Kalisat	Kas di BNI No Rek 344 675 020	2.936.902.259,00	81.675.191,00	46.377.143,00	3.064.954.593,00	24/11/2023, 27/12/2023
40	Puskesmas Ledokombo	Kas di BNI No Rek 344 678 043	1.550.884.708,00	50.784.606,00	20.717.502,00	1.622.386.816,00	23/11/2023, 15/12/2023
41	Puskesmas Sumberjambe	Kas di BNI No Rek 344 679 477	828.582.976,00	37.531.954,00	8.375.590,00	874.490.520,00	24/11/2023, 28/12/2023
42	Puskesmas Sukowono	Kas di BNI No Rek 344 680 109	484.467.562,00	26.928.244,00	4.382.952,00	515.778.758,00	24/11/2023, 22/12/2023
43	Puskesmas Jelbuk	Kas di BNI No Rek 344 680 777	91.216.302,00	5.703.293,00	622.543,00	97.542.138,00	23/11/2023, 27/12/2023
44	Puskesmas Kaliwates	Kas di BNI No Rek 344 681 443	91.175.757,00	2.126.953,00	591.927,00	93.894.637,00	24/11/2023, 22/12/2023

NO.	Uraian	Keterangan	Sisa Pendapatan JKN Tahun 2022	Bunga Giro		Jumlah Yang Disetor	Tanggal Setor
				Tahun 2022	Tahun 2023		
45	Puskesmas Mangli	Kas di BNI No Rek 344 682 436	32.651.990,00	1.214.150,00	129.170,00	33.995.310,00	27/11/2023, 27/12/2023
46	Puskesmas Jemberkidul	Kas di BNI No Rek 344 683 042	21.186.368,00	1.488.111,00	79.091,00	22.753.570,00	23/11/2023, 29/12/2023
47	Puskesmas Sumbersari	Kas di BNI No Rek 344 683 723	4.666.269,00	11.999.774,00	52.202,00	16.718.245,00	23/11/2023, 22/12/2023
48	Puskesmas Gladakpakem	Kas di BNI No Rek 344 684 535	13.894.874,00	802.118,00	43.392,00	14.740.384,00	24/11/2023, 29/12/2023
49	Puskesmas Patrang	Kas di BNI No Rek 344 685 108	1.076.484.571,00	31.527.644,00	11.827.403,00	1.119.839.618,00	23/11/2023, 23/12/2023, 27/11/2023
50	Puskesmas Banjarsengon	Kas di BNI No Rek 455 283 423	26.921.612,00	2.236.033,00	108.434,00	29.266.079,00	24/11/2023, 28/12/2023
Jumlah			20.775.217.212,00	725.893.102,00	245.330.572,00	21.746.440.886,00	

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.853.047.342,90 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.515.454.580,11dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2023

NO	Keterangan	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Kas Lainnya - Bunga JKN – Dinas Kesehatan	725.893.102,00	0,00	725.893.102,00	0,00
2	Kas Lainnya – Bantuan Operasional Kesehatan - 50 Puskesmas	0,00	4.151.814.228,00	0,00	4.151.814.228,00
3	Kas Lainnya - Rekening Titipan Pasien di Bank Jatim - RS dr. Soebandi	789.561.478,11	701.233.114,90	789.561.478,11	701.233.114,90
Jumlah		1.515.454.580,11	4.853.047.342,90	1.515.454.580,11	4.853.047.342,90

- Kas Lainnya Bantuan Operasional Kesehatan 50 Puskesmas

Kas Lainnya pada Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas sebesar Rp4.151.814.228,00 adalah selisih antara pendapatan dan realisasi belanja. Proses salur uang dilakukan secara langsung ke rekening Puskesmas, belanja dilakukan sesuai kebutuhan kemudian dimasukkan ke e-renggar dan e-renggar masuk ke va BNI direct.

Terdapat Selisih antara Rekening Koran BOK Puskesmas dengan Sisa Pendapatan dan Belanja BOK dengan total sebesar Rp2.494.776,00 karena Kesalahan transfer dana Jampersal - Kemenkes berupa Honor Tenaga Kesehatan sebesar Rp2.100.000,00 pada Puskesmas Tanggul dan kesalahan Transfer Insentif UKM sebesar Rp394.776,00 pada Puskesmas Kemuningsari.

- Kas Lainnya RS dr. Soebandi

Kas Lainnya RS dr. Soebandi di rekening Bank Jatim Nomer 0031019508 adalah rekening titipan pasien dengan saldo per 31 Desember 2023 di rekening Bendahara Pengeluaran RS Soebandi sebesar Rp701.233.114,90.

- Piutang

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
366.128.200.889,03	347.765.559.064,94	18.362.641.824,09	5,28

Piutang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp366.128.200.889,03 dan Rp347.765.559.064,94 yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp18.362.641.824,09 dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Nilai Piutang mengalami peningkatan sebesar Rp18.362.641.824,09 atau 5,28%.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran atau manfaat dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Perundang – undangan. Saldo Piutang pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2023 sebesar Rp366.128.200.889,03 dengan perhitungan sebagai berikut :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Pajak Daerah	306.047.175.977,57	271.911.925.309,57
Piutang Retribusi	6.500.877.373,50	5.175.404.867,50
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.688.441.242,95	3.526.531.848,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	48.891.706.295,01	48.805.638.639,87
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	18.346.058.400,00
Jumlah Piutang	366.128.200.889,03	347.765.559.064,94
Penyisihan Piutang	(255.468.435.927,69)	(222.740.299.956,89)
Jumlah Piutang bersih	110.659.764.961,34	125.025.259.108,05

Mutasi Piutang Pemerintah Kabupaten Jember selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Piutang Pemerintah Kabupaten Jember selama Tahun 2023

No	Jenis Piutang	2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	271.911.925.309,57	(616.403.346,00)	224.441.388.192,00	189.689.734.178,00	306.047.175.977,57
2	Piutang Retribusi	5.175.404.867,50	0,00	1.708.901.755,00	383.429.249,00	6.500.877.373,50
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.526.531.848,00	0,00	2.411.909.394,95	1.250.000.000,00	4.688.441.242,95
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	48.805.638.639,87	(2.364.086.285,00)	219.820.816.818,96	217.370.662.878,82	48.891.706.295,01
5	Piutang Transfer Antar Daerah	18.346.058.400,00	0,00	97.538.286.400,00	115.884.344.800,00	0,00
Jumlah Piutang		347.765.559.064,94	(2.980.489.631,00)	545.921.302.560,91	524.678.171.106,82	366.128.200.889,03
6	Penyisihan Piutang	(222.740.299.956,89)	0,00	0,00	32.728.135.970,80	(255.468.435.927,69)
Piutang bersih		125.025.259.108,05	(2.980.489.631,00)	545.921.302.560,91	557.306.307.076,62	110.659.764.961,34

Saldo dan mutasi dari masing – masing Piutang Per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
306.047.175.977,57	271.911.925.309,57	34.135.250.668,00	12,55

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp306.047.175.977,57 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp271.911.925.309,57 mengalami kenaikan sebesar Rp34.135.250.668,00 atau 12,55% dibandingkan Tahun Anggaran 2022.

Piutang pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp306.047.175.977,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023

No	Uraian	2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Reklas	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	1.088.269.912,00	(280.158.351,00)	0,00	7.372.519.059,00	6.791.502.369,00	1.389.128.251,00
2	Piutang Pajak Restoran	1.676.115.024,00	(329.279.179,00)	0,00	29.779.650.047,00	29.826.693.732,00	1.299.792.160,00
3	Piutang Pajak Hiburan	161.730.774,00	(5.000,00)	0,00	3.328.973.709,00	3.271.474.989,00	219.224.494,00
4	Piutang Reklame	1.365.541.197,00	0,00	0,00	5.987.523.647,00	5.497.529.454,00	1.855.535.390,00
5	Piutang Pajak Peneranagn Jalan Non PLN	14.622.147,00	(6.669.216,00)	0,00	0,00	0,00	7.952.931,00
6	Pajak Parkir	3.186.300,00	(291.600,00)	0,00	2.137.821.831,00	2.134.794.328,00	5.922.203,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	6.219.217,00	0,00	0,00	815.806.554,00	805.347.049,00	16.678.722,00
8	**Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**						
	Piutang Pajak Galian C - Baponda	26.504.728,00	0,00	35.317.325,00	9.038.905.199,00	9.017.713.199,00	83.014.053,00
	Piutang Pajak Batu Kapur - Disperindag	35.317.325,00	0,00	(35.317.325,00)	0,00	0,00	0,00
9	Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan	267.367.958.112,57	0,00	0,00	90.819.399.750,00	57.017.430.089,00	301.169.927.773,57
10	Piutang Pajak BPHTB	166.460.573,00	0,00	0,00	75.160.788.396,00	75.327.248.969,00	-
Jumlah		271.911.925.309,57	(616.403.346,00)	0,00	224.441.388.192,00	189.689.734.178,00	306.047.175.977,57

Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Jember sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

➢ **Piutang Pajak Hotel**

Nilai piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.389.128.251,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023

Tahun SKP	2022 (Rp)	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2008	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2017	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
2019	302.939.501,00	(279.033.601,00)	0,00	0,00	23.905.900,00
2020	182.300,00	0,00	0,00	0,00	182.300,00
2021	424.145.322,00	(1.114.750,00)	0,00	419.265.572,00	3.765.000,00
2022	356.912.789,00	(10.000,00)	0,00	332.215.540,00	24.687.249,00
2023	0,00	0,00	7.372.519.059,00	6.040.021.257,00	1.332.497.802,00
Jumlah	**1.088.269.912,00**	**(280.158.351,00)**	**7.372.519.059,00**	**6.791.502.369,00**	**1.389.128.251,00**

Pergerakan Piutang Pajak Hotel selama tahun 2023 sebagai berikut :

Terdapat koreksi kurang atas piutang pajak hotel sebesar Rp280.148.351,00 terjadi karena :

- terdapat koreksi kurang atas pajak hotel tahun 2019 senilai Rp279.033.601 dengan tanggal bayar 19/11/2021 sebanyak 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp59.708.690,00 dan tanggal bayar 28/11/2022 sebanyak 4 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp219.324.911,00
- terdapat koreksi tambah pajak hotel tahun 2021 sebanyak 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp670.250,00 (penambahan penetapan pajak hotel) dan koreksi kurang pajak hotel tahun 2021 tanggal bayar 10/11/2021 sebanyak 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp1.785.000,00
- terdapat koreksi kurang pajak hotel tahun 2022 sebanyak 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp10.000,00 dikarenakan uji coba aplikasi

Penambahan piutang pajak hotel sebesar Rp7.372.519.059,00 terjadi karena :

- terdapat penetapan SPTPD pajak hotel tahun 2023 sebanyak 891 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp7.372.519.059,00

Pengurangan piutang pajak hotel sebesar Rp6.791.502.369,00 dengan rincian terjadi karena :

- terdapat pembayaran atas penetapan SPTPD pajak hotel tahun 2021 sebanyak 11 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp419.265.572,00
- terdapat pembayaran atas penetapan SPTPD pajak hotel tahun 2022 sebanyak 8 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp332.215.540,00
- terdapat pembayaran atas penetapan SPTPD pajak hotel tahun 2023 sebanyak 841 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp6.040.021.257,00

➢ **Piutang Pajak Restoran**

Piutang pajak restoran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.299.792.160,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023

Tahun SKP	2022 (Rp)	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2005	12.936.500,00	0,00	0,00	0,00	12.936.500,00
2006	21.108.500,00	0,00	0,00	0,00	21.108.500,00
2007	27.813.700,00	0,00	0,00	0,00	27.813.700,00
2008	24.469.900,00	0,00	0,00	0,00	24.469.900,00
2010	1.472.787,00	0,00	0,00	0,00	1.472.787,00
2011	363.500,00	0,00	0,00	0,00	363.500,00
2012	1.389.000,00	0,00	0,00	0,00	1.389.000,00
2013	1.726.200,00	0,00	0,00	0,00	1.726.200,00
2017	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
2018	350.760,00	0,00	0,00	0,00	350.760,00
2019	258.537.622,00	(165.994.746,00)	0,00	0,00	92.542.876,00
2020	156.860.467,00	(80.256.721,00)	0,00	1.000.000,00	75.603.746,00
2021	920.197.264,00	(30.716.336,00)	0,00	274.202.017,00	615.278.911,00
2022	247.718.824,00	(18.000,00)	0,00	242.612.408,00	5.088.416,00
2023	0,00	0,00	29.779.650.047,00	29.361.172.683,00	418.477.364,00
Jumlah	1.676.115.024,00	(276.985.803,00)	29.779.650.047,00	29.878.987.108,00	1.299.792.160,00

Pergerakan piutang pajak restoran selama tahun 2023 sebagai berikut:

Terdapat koreksi kurang atas piutang pajak restoran sebesar Rp276.985.803,00 terjadi karena:

- terdapat koreksi kurang atas pajak restoran tahun 2019 tanggal bayar 19/11/2021 sebanyak 5 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp165.994.746,00
- terdapat koreksi tambah pajak restoran tahun 2020 sebanyak 2 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp43.834.765,00 (penambahan penetapan pajak restoran) dan koreksi kurang pajak restoran tahun 2020 dengan tanggal bayar 09/09/2020, 10/08/2020 dan 09/09/2020 sebanyak 3 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp124.091.486,00
- terdapat koreksi kurang atas pajak restoran tahun 2021 dengan pokok pajak senilai Rp30.716.336,00 dengan tanggal bayar 10/12/2021 dan 16/12/2021 sebanyak 2 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp29.664.836 dan 5 SPTPD senilai Rp1.051.500,00 dikarenakan uji coba aplikasi

- terdapat koreksi kurang atas pajak restoran tahun 2022 sebanyak 3 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp18.000,00 dikarenakan uji coba aplikasi.

Penambahan terjadi karena :

- terdapat penetapan SPTPD pajak restoran tahun 2023 sebanyak 11.290 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp29.779.650.047,00

Pengurangan terjadi karena :

- terdapat pembayaran atas penetapan SPTPD pajak restoran tahun 2020 sebanyak 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp1.000.000,00
- terdapat pembayaran atas penetapan SPTPD pajak restoran tahun 2021 sebanyak 46 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp221.908.641,00
- terdapat pembayaran atas penetapan SKP pajak restoran tahun 2021 sebanyak 2 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp52.293.376,00
- terdapat pembayaran atas penetapan SPTPD pajak restoran tahun 2022 sebanyak 39 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp242.612.408,00
- terdapat pembayaran atas penetapan SPTPD pajak restoran tahun 2023 sebanyak 11.220 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp29.361.172.683,00

➢ **Piutang Pajak Hiburan**

Piutang Pajak Hiburan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp219.229.494,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2023

Tahun SKP	2022 (Rp)	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2005	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
2006	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00
2007	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2008	529.100,00	0,00	0,00	0,00	529.100,00
2009	14.720.000,00	0,00	0,00	0,00	14.720.000,00
2010	2.726.550,00	0,00	0,00	0,00	2.726.550,00
2019	110.244.500,00	0,00	0,00	0,00	110.244.500,00
2020	2.686.364,00	0,00	0,00	0,00	2.686.364,00
2021	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2022	20.484.180,00	(5.000,00)	0,00	15.772.880,00	4.706.300,00
2023	0,00	0,00	3.328.973.709,00	3.255.702.109,00	73.271.600,00
Jumlah	161.730.774,00	(5.000,00)	3.328.973.709,00	3.271.474.989,00	219.224.494,00

Pergerakan Piutang Pajak Hiburan selama tahun 2023 sebagai berikut:

Terdapat koreksi kurang atas piutang pajak Hiburan sebesar Rp5.000,00 terjadi karena :

- terdapat koreksi kurang atas pajak Hiburan tahun 2022 sebanyak 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai 5.000,00 dikarenakan Ujicoba aplikasi

Penambahan Piutang Pajak Hiburan terjadi karena :

- terdapat penetapan SPTPD pajak hiburan tahun 2023 sebanyak 592 SPTPD senilai Rp3.328.973.709,00

Pengurangan piutang pajak hiburan terjadi karena :

- terdapat pembayaran atas penetapan SPTPD pajak hiburan tahun 2022 sebanyak 7 SPTPD senilai Rp15.772.880,00
- terdapat pembayaran atas penetapan SPTPD pajak hiburan tahun 2023 sebanyak 568 SPTPD senilai Rp3.255.702.109,00

➢ **Piutang Pajak Reklame**

Piutang Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.855.535.390,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023

Tahun SKP	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2004	8.030.000,00	0,00	0,00	8.030.000,00
2005	4.899.500,00	0,00	0,00	4.899.500,00
2006	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00
2007	10.650.000,00	0,00	0,00	10.650.000,00
2008	22.175.000,00	0,00	0,00	22.175.000,00
2009	14.475.000,00	0,00	0,00	14.475.000,00
2010	9.088.500,00	0,00	0,00	9.088.500,00
2011	6.543.500,00	0,00	0,00	6.543.500,00
2012	117.359.033,00	0,00	0,00	117.359.033,00
2013	5.112.625,00	0,00	0,00	5.112.625,00
2016	5.590.625,00	0,00	0,00	5.590.625,00
2017	17.603.688,00	0,00	0,00	17.603.688,00
2018	140.138.354,00	0,00	0,00	140.138.354,00
2019	346.352.820,00	0,00	0,00	346.352.820,00
2020	317.179.076,00	0,00	9.200.000,00	307.979.076,00
2021	225.877.625,00	9.200.000,00	3.085.000,00	231.992.625,00
2022	109.115.851,00	0,00	65.268.476,00	43.847.375,00
2023	0,00	5.987.523.647,00	5.429.175.978,00	558.347.669,00
Jumlah	1.365.541.197,00	5.996.723.647,00	5.506.729.454,00	1.855.535.390,00

Pergerakan piutang pajak reklame selama tahun 2023 sebagai berikut:

Penambahan terjadi karena :

- terdapat Penambahan pajak reklame tahun 2021 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp. 9.200.000,00
- terdapat penetapan SPTPD pajak reklame tahun 2023 sebanyak 4.520 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp5.987.523.647,00

Pengurangan terjadi karena :

- terdapat Pengurangan terdapat pembayaran atas penetapan SPTPD pajak reklame tahun 2020 sebanyak 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp. 9.200.000,00
- terdapat pembayaran atas penetapan SPTPD pajak reklame tahun 2021 sebanyak 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp3.085.000,00
- terdapat pembayaran atas penetapan SPTPD pajak reklame tahun 2022 sebanyak 44 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp65.268.476,00
- pembayaran atas penetapan SPTPD pajak reklame tahun 2023 sebanyak 4.281 SPTPD dengan nilai Rp5.429.175.978,00

➢ **Piutang Pajak Penerangan Jalan – Non PLN**

Piutang pajak penerangan jalan Non PLN sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp14.622.147,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Piutang Pajak PPJ non PLN per 31 Desember 2023

Tahun SKP	2022 (Rp)	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2019	**730.804,00**	**(100.440,00)**	**0,00**	0,00	630.364,00
2020	**7.071.030,00**	(6.568.776,00)	**0,00**	0,00	502.254,00
2021	**2.236.244,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2.236.244,00**
2022	**4.584.069,00**	0,00	**0,00**	0,00	4.584.069,00
2023	0,00	0,00	**0,00**	0,00	-
Jumlah	14.622.147,00	(6.669.216,00)	0,00	0,00	7.952.931,00

Pergerakan piutang pajak parkir selama tahun 2023 sebagai berikut:

Terdapat koreksi kurang atas Piutang Pajak PPJ non PLN sebesar Rp6.669.216,00 dengan rincian terjadi karena :

- terdapat koreksi kurang pajak penerangan jalan – Non PLN tahun 2019 sebanyak 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp100.440,00 dikarenakan Ujicoba Aplikasi.
- terdapat koreksi kurang pajak penerangan jalan – Non PLN tahun 2020 dengan pokok pajak sebesar Rp6.568.776,00 dengan tanggal bayar 15/10/2020 sebanyak 3 SPTPD dengan pembayaran senilai Rp1.431.270,00, pembayaran pada tanggal 13/11/2020

sebanyak 3 SPTPD senilai Rp1.883.250,00, serta pembayaran pada tanggal 29/12/2020 sebanyak 6 SPTPD senilai Rp3.254.256,00

Penambahan terjadi karena :

- Tidak terdapat penetapan SPTPD Pajak Penerangan Jalan Non PLN tahun 2023

Pengurangan terjadi karena :

- Tidak terdapat pembayaran atas penetapan SPTPD Pajak Penerangan Jalan Non PLN tahun 2023

➢ **Piutang Pajak Parkir**

Piutang Pajak Parkir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.922.203,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2023

Tahun SKP	2022 (Rp)	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2018	226.700,00	0,00	0,00	0,00	226.700,00
2021	521.600,00	(291.600,00)	0,00	0,00	230.000,00
2022	2.438.000,00	0,00	0,00	0,00	2.438.000,00
2023	0,00	0,00	2.137.821.831,00	2.134.794.328,00	3.027.503,00
Jumlah	**3.186.300,00**	**(291.600,00)**	**2.137.821.831,00**	**2.134.794.328,00**	**5.922.203,00**

Pergerakan piutang pajak parkir selama tahun 2023 sebagai berikut:

Terdapat koreksi kurang atas Piutang Pajak Parkir sebesar Rp291.600,00 dengan rincian terjadi karena :

- terdapat koreksi kurang atas pajak parkir tahun 2021 dengan tanggal bayar 30/06/2021 sebanyak 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp291.600,00

Penambahan terjadi karena :

- terdapat penetapan SPTPD pajak parkir tahun 2023 sebanyak 907 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp2.137.821.831,00

Pengurangan terjadi karena:

- terdapat pembayaran atas penetapan SPTPD pajak parkir tahun 2023 sebanyak 892 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp2.134.794.328,00

➢ **Piutang Pajak Air Tanah**

Piutang pajak air tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.678.722,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2023

Tahun SKP	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2020	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
2021	464.201,00	0,00	2.850,00	461.351,00
2022	5.751.026,00	0,00	4.903.592,00	847.434,00
2023	0,00	815.806.554,00	800.436.617,00	15.369.937,00
Jumlah	6.219.217,00	815.806.554,00	805.347.049,00	16.678.722,00

Pergerakan Piutang Pajak Air Tanah selama tahun 2023 sebagai berikut:

Penambahan terjadi karena :

- penetapan SPTPD pajak air tanah tahun 2023 sebanyak 3.410 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp815.806.554,00

Pengurangan terjadi karena :

- terdapat pembayaran atas penetapan SPTPD pajak air tanah tahun 2020 sebanyak 1 SPTPD senilai Rp3.990,00
- terdapat pembayaran atas penetapan SPTPD pajak air tanah tahun 2021 sebanyak 1 SPTPD senilai Rp2.850,00
- terdapat pembayaran atas penetapan SPTPD pajak air tanah tahun 2022 sebanyak 56 SPTPD senilai Rp4.903.592,00
- terdapat pembayaran atas penetapan SPTPD pajak air tanah tahun 2023 sebanyak 3.211 SPTPD senilai Rp800.436.617,00

➢ **Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp83.014.053,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2023

Tahun SKP	2022 (Rp)	Reklas	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2011	4.170.000,00	0,00	0,00	0,00	4.170.000,00
2012	6.157.700,00	0,00	0,00	0,00	6.157.700,00
2014	355.931,00	0,00	0,00	0,00	355.931,00
2015	7.489.300,00	0,00	0,00	0,00	7.489.300,00
2016	0,00	35.317.325,00	0,00	0,00	35.317.325,00
2018	486.981,00	0,00	0,00	0,00	486.981,00
2019	7.338.381,00	0,00	0,00	0,00	7.338.381,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2021	506.435,00	0,00	0,00	0,00	506.435,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Tahun SKP	2022 (Rp)	Reklas	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2023	0,00	0,00	9.038.905.199,00	9.017.713.199,00	21.192.000,00
Jumlah	26.504.728,00	35.317.325,00	9.038.905.199,00	9.017.713.199,00	83.014.053,00

Pergerakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama tahun 2023 sebagai berikut:

Penambahan terjadi karena :

- terdapat reklas saldo awal piutang Pajak Galian C/Mineral Bukan Logam dan Batuan dikarenakan adanya perpindahan pemungut pajak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke Badan Pendapatan Daerah atas dasar Surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor:800/65/35.09.331/2023, Perihal : Pemindahan Tenaga Administrasi Non PNS Gunung Sadeng Kecamatan Puger, sebesar Rp35.317.325,00
- terdapat Penetapan SPTPD pajak galian C/Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2023 sebanyak 67 SKP senilai Rp9.038.905.199,00

Pengurangan terjadi karena :

- terdapat pembayaran atas penetapan SPTPD Pajak Galaian C/Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2023 sebanyak 66 SPTPD senilai Rp9.017.713.199,00

➢ **Piutang Pajak Bumi dan Bangunan**

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp301.169.927.773,57 dengan rincian sebesar berikut :

Tabel Rincian Piutang Pajak PBB per 31 Desember 2023

Tahun SKP	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2001	24.129.034.086,00	0,00	46.574,00	24.128.987.512,00
2002	1.456.374.169,88	0,00	2.970,00	1.456.371.199,88
2003	643.525.506,60	0,00	12.700,00	643.512.806,60
2004	2.536.050.124,56	0,00	76.351,00	2.535.973.773,56
2005	4.885.603.393,12	0,00	116.011,00	4.885.487.382,12
2006	8.142.950.597,48	0,00	80.453,00	8.142.870.144,48
2007	4.587.142.111,84	0,00	101.741,00	4.587.040.370,84
2008	10.693.852.661,44	0,00	106.312,00	10.693.746.349,44
2009	487.202.834,44	0,00	25.625.900,00	461.576.934,44
2010	1.247.518.320,44	0,00	70.405.764,00	1.177.112.556,44
2011	3.372.642.896,14	0,00	147.777.901,00	3.224.864.995,14
2012	4.023.866.493,63	0,00	159.082.811,00	3.864.783.682,63
2013	3.409.180.219,00	0,00	134.620.743,00	3.274.559.476,00
2014	10.292.721.105,00	0,00	299.148.306,00	9.993.572.799,00
2015	14.169.133.933,00	0,00	401.795.174,00	13.767.338.759,00
2016	14.844.974.784,00	0,00	493.372.588,00	14.351.602.196,00

Tahun SKP	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2017	13.692.046.773,00	0,00	409.155.268,00	13.282.891.505,00
2018	14.060.858.487,00	0,00	481.980.772,00	13.578.877.715,00
2019	14.874.865.010,00	0,00	531.040.578,00	14.343.824.432,00
2020	34.910.944.572,00	0,00	1.330.095.494,00	33.580.849.078,00
2021	37.399.113.585,00	0,00	2.010.614.593,00	35.388.498.992,00
2022	43.508.356.449,00	0,00	4.991.971.476,00	38.516.384.973,00
2023	0,00	90.819.399.750,00	45.530.199.609,00	45.289.200.141,00
Jumlah	267.367.958.112,57	90.819.399.750,00	57.017.430.089,00	301.169.927.773,57

Pergerakan Pajak Bumi dan Bangunan selama tahun 2023 sebagai berikut:

Penambahan terjadi karena terdapat penetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 sebanyak 1.088.186 SPPT dengan pokok pajak senilai Rp90.828.171.372,00

Pengurangan terjadi karena terdapat pembayaran pajak PBB ketetapan tahun 2001 - 2023 sebanyak 660.312 SPPT dengan pokok pajak senilai Rp57.017.430.089,00

➢ **Piutang Pajak BPHTB**

Piutang pajak BPHTB sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp166.460.573,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Piutang Pajak BPHTB per 31 Desember 2023

Tahun SKP	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2022	**166.460.573,00**	0,00	166.460.573,00	0,00
2023	0,00	75.160.788.396,00	75.160 788 396,00	0,00
Jumlah	166.460.573,00	75.160.788.396,00	75.327.248.969,00	0,00

Pergerakan piutang pajak BPHTB selama tahun 2023 sebagai berikut:

Penambahan terjadi karena terdapat penetapan SKP pajak BPHTB tahun 2023 sebanyak 10.033 SKP senilai Rp75.160.788.396,00

Pengurangan terjadi karena :

- terdapat pembayaran atas penetapan SKP pajak BPHTB tahun 2022 sebanyak 33 SKP senilai Rp166.460.573,00
- terdapat pembayaran atas penetapan SKP pajak BPHTB tahun 2023 sebanyak 10.033 SKP senilai Rp75.160.788.396,00

5.3.1.1.9 Piutang Retribusi Daerah

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
6.500.877.373,50	5.175.404.867,50	1.325.472.506,00	25,61

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.500.877.373,50 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.175.404.867,50 mengalami kenaikan sebesar Rp1.325.472.506,00 atau 25,61% dibandingkan Tahun Anggaran 2022.

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.500.877.373,50 terdiri dari:

Tabel Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023

No	Uraian	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Dinas Perhubungan	1.790.887.750,00	0,00	0,00	1.790.887.750,00
2	Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Dinas Informasi dan Komunikasi	206.691.899,00	1.127.137.630,00	206.691.899,00	1.127.137.630,00
3	Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.843.434.240,00	564.364.125,00	159.037.350,00	3.248.761.015,00
4	Piutang Retribusi Jasa Usaha - Penyewaan Tanah dan Bangunan - DPU Bina Marga	88.826.478,50	0,00	0,00	88.826.478,50
5	Piutang Retribusi Jasa Usaha - Penyewaan Tanah dan Bangunan - Badan Pendapatan Daerah	39.954.500,00	17.400.000,00	17.700.000,00	39.654.500,00
6	Piutang Retribusi Jasa Usaha - Piutang Retribusi Pemakaian Alat - DPU Bina Marga	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00
7	Piutang Retribusi Jasa Usaha - Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	65.610.000,00	0,00	0,00	65.610.000,00
Jumlah		**5.175.404.867,50**	**1.708.901.755,00**	**383.429.249,00**	**6.500.877.373,50**

➢ **Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan dalam tahun 2023 tidak ada mutasi penambahan dan pengurangan, dimana mutasinya adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Piutang Retribusi Jasa Umum – Dinas Perhubungan per 31 Desember 2023

Tahun SKP	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2014	44.849.550,00	0,00	0,00	44.849.550,00
2015	1.746.038.200,00	0,00	0,00	1.746.038.200,00
Jumlah	1.790.887.750,00	0,00	0,00	1.790.887.750,00

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini sesuai dengan peraturan Bupati Nomor :11 Tahun 2012. Tetapi retribusi ini pada tanggal 9 Juni 2015, sesuai surat Kementrian keuangan RI Nomor: S-349/PK/2015 perihal penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) , tarif retribusi harus disesuaikan. Daftar Nama-nama penanggung piutang sebagai berikut:

Tabel Rincian Nama Penanggung Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengendalian Menara

NO	Perusahaan (PT)	Piutang 2014	Piutang 2015
1	Bakrie Tel	0,00	6.212.800,00
2	Daya Mitra Tel	0,00	99.981.000,00
3	Flexi (Telkom)	44.849.550,00	0,00
4	Inti Bangun Sejahtera (IBS)	0,00	0,00
5	Indosat	0,00	174.499.600,00
6	Naragita DK	0,00	16.478.200,00
7	Persada ST	0,00	17.567.100,00
8	Protelindo	0,00	236.838.600,00
9	Sampoerna Tel	0,00	25.707.100,00
10	Smart Tel	0,00	7.284.300,00
11	Solusi Tunas Pratama (STP)	0,00	122.149.800,00
12	Tower Bersama Grup (TBG)	0,00	293.196.100,00
13	Telkomsel	0,00	455.520.100,00
14	XL Axiata	0,00	290.603.500,00
	JUMLAH	44.849.550,00	1.746.038.200,00

➢ **Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Dinas Informasi dan Komunikasi**

Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Dinas Informasi dan Komunikasi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023

Tahun SKR	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2023	0,00	1.127.137.630,00	0,00	1.127.137.630,00
Jumlah	**0,00**	**1.127.137.630,00**	**0,00**	**1.127.137.630,00**

Tabel Rincian Nama Penanggung Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengendalian Menara Telekomunikasi – Dinas Informasi dan Komunikasi

No	Pemilik Tower	Jumlah Tower	Nilai Piutang (Rp)
1	PT. Citra Gaia	3	19.809.352,00
2	PT. Komet Infra Nusantara (Kin)	1	7.092.237,00
3	PT. Protelindo	123	5.042.989,00
4	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	70	8,00
5	PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk	5	0,00
6	PT. Tower Bersama Infrastructure, Tbk	135	888.462.240,00
7	PT. Centratama Menara Indonesia	24	0,00
8	PT. Solusi Tunas Pratama	35	206.727.903,00
9	PT. Iforte	2	2.901,00
10	PT. Telkomsel	1	0,00
11	PT. Daya Mitra Telekomunikasi (2 Tower)	2	0,00
12	PT Era Bangun Towerindo	2	0,00
	Jumlah	**403**	**1.127.137.630,00**

- **Piutang Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Pasar - Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
  - **Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan**

Piutang Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - Kios per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.248.761.015,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Piutang Retribusi Jasa Umum - Kios Pasar per 31 Desember 2023

Tahun SKR	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2012	39.410.090,00	0,00	0,00	39.410.090,00
2016	109.856.100,00	0,00	0,00	109.856.100,00
2017	6.726.300,00	0,00	0,00	6.726.300,00
2018	110.553.750,00	0,00	6.771.000,00	103.782.750,00
2019	531.545.100,00	0,00	23.250.000,00	508.295.100,00
2020	619.581.200,00	0,00	31.299.000,00	588.282.200,00
2021	678.894.000,00	0,00	40.374.750,00	638.519.250,00
2022	746.867.700,00	0,00	57.342.600,00	689.525.100,00

Tahun SKR	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2023	0,00	564.364.125,00	0,00	564.364.125,00
Jumlah	2.843.434.240,00	564.364.125,00	159.037.350,00	3.248.761.015,00

Pergerakan Piutang Retribusi Jasa Umum - Kios Pasar selama tahun 2023 sebagai berikut:

Penambahan terjadi karena :

- terdapat penetapan SKR tahun 2023 sebanyak 6.707 dengan senilai Rp564.364.125,00.

Pengurangan terjadi karena :

- terdapat pembayaran:
  - Tahun 2018 sebanyak 42 SKR Pasar Tanjung senilai Rp6.771.000,00
  - Tahun 2019 sebanyak 138 SKR Pasar Tanjung senilai Rp23.250.000,00
  - Tahun 2020 sebanyak 293 SKR senilai Rp31.299.000,00
  - Tahun 2021 sebanyak 274 SKR senilai Rp40.374.750,00
  - Tahun 2022 sebanyak 466 SKR senilai Rp57.342.600,00

➢ **Piutang Retribusi Jasa Usaha – DPU Bina Marga**

o **Piutang Retribusi Jasa Usaha - Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan**

Piutang retribusi Jasa Usaha - Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp88.826.478,50 dengan rincian sebagai berikut :

- Piutang Retribusi Jasa Usaha - Sewa Rumah Dinas

Tabel Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha - Sewa Rumah Dinas per 31 Desember 2023

Tahun SKR	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2016	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Jumlah	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00

- Piutang Retribusi Jasa Usaha - Sewa Penggunaan Tanah

Tabel Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha - Sewa Penggunaan Tanah per 31 Desember 2023

Tahun SKR	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2016	**82.826.478,50**	0,00	0,00	82.826.478,50
Jumlah	82.826.478,50	0,00	0,00	82.826.478,50

➢ **Piutang Retribusi Jasa Usaha – Penyewaan Tanah dan Bangunan**

Piutang Retribusi Rumah Dinas – Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2023 sebesar

Rp39.654.500,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha – Penyewaan Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2023

Tahun SKR	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2005	8.738.500,00	0,00	0,00	8.738.500,00
2006	5.669.000,00	0,00	0,00	5.669.000,00
2007	5.594.500,00	0,00	0,00	5.594.500,00
2008	6.532.500,00	0,00	0,00	6.532.500,00
2009	1.292.500,00	0,00	0,00	1.292.500,00
2010	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
2011	2.392.500,00	0,00	0,00	2.392.500,00
2012	2.445.000,00	0,00	0,00	2.445.000,00
2013	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
2014	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2015	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2016	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2017	720.000,00	0,00	0,00	720 000,00
2018	720.000,00	0,00	0,00	720 000,00
2019	840.000,00	0,00	0,00	840 000,00
2022	3.000.000,00	0,00	1.200 000,00	1 800.000,00
2023	0,00	17.400.000,00	16.500.000,00	900.000,00
Jumlah	39.954.500,00	17.400.000,00	17.700.000,00	39.654.500,00

Pergerakan Piutang Retribusi Retribusi Jasa Usaha – Penyewaan Tanah dan Bangunan selama tahun 2023 sebagai berikut:

Penambahan terjadi karena :

- terdapat penetapan SKRD rumah dinas tahun 2023 sebanyak 57 SKRD senilai Rp17.400.000,00

Pengurangan terjadi karena :

- terdapat pembayaran atas penetapan SKRD rumah dinas tahun 2022 sebanyak 4 SKRD senilai Rp1.200.000,00
- terdapat pembayaran atas penetapan SKRD rumah dinas tahun 2023 sebanyak 54 SKRD senilai Rp16.500.000,00

➢ **Piutang Retribusi Jasa Usaha – Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Alat**

Mutasi Piutang Retribusi Jasa Usaha – Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Alat adalah sebesar Rp140.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha – Pemakian Alat per 31 Desember 2023

Tahun SKR	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2017	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00
Jumlah	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00

- **Piutang Retribusi Jasa Usaha - Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Bebagai Jenis Barang yang dikontrakkan – Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang Ayng Dikontrakkan - Jompo Shopping Centre per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp65.610.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha - Pasar Grosir/Pertokoan per 31 Desember 2023

Tahun SKR	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2016	13.230.000,00	0,00	0,00	13.230.000,00
2017	7.560.000,00	0,00	0,00	7.560.000,00
2018	26.820.000,00	0,00	0,00	26.820.000,00
2019	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	65.610.000,00	0,00	0,00	65.610.000,00

5.3.1.1.10 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
4.688.441.242,95	3.526.531.848,00	1.161.909.394,95	32,95

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.688.441.242,95 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.526.531.848,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.161.909.394,95 atau 32,95% dibandingkan Tahun Anggaran 2022.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.688.441.242,95 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2023

No	Uraian	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – PDAM	3.526.531.848,00	2.411.909.394,95	1.250.000.000,00	4.688.441.242,95
Jumlah		3.526.531.848,00	2.411.909.394,95	1.250.000.000,00	4.688.441.242,95

Mutasi Tambah sebesar Rp2.411.909.394,95 merupakan bagian laba pemda sebesar 55% dari pendapatan bersih PDAM (Perumdam Tirta Pandalungan) Kabupaten Jember tahun 2022 sesuai Peraturan Daerah nomor 04 tahun 1975 PDAM (Perumdam Tirta Pandalungan) Kabupaten Jember telah mencadangkan bagian laba tersebut di kewajiban lainnya dalam laporan keuangan PDAM Tahun 2023 Audited.

Mutasi kurang sebesar Rp1.250.000.000,00 merupakan pengurangan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan atas penyetoran bagian laba penyertaan modal oleh PDAM kepada Pemerintah Kabupaten Jember di Tahun 2023.

5.3.1.1.11 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
48.891.706.295,01	48.805.638.639,87	86.067.655,14	0,18

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp48.891.706.295,01 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp48.805.638.639,87 mengalami kenaikan sebesar Rp86.067.655,14 atau 0,18% dibandingkan Tahun Anggaran 2022.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp48.891.706.295,01 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023

No	Uraian	2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - BPKAD	5.198.793,82	0,00	0,00	5.198.793,82	0,00

No	Uraian	2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - Dinas Perhubungan	16.477.484,00	12.473.016,00	0,00	10.000.000,00	18.950.500,00
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Piutang Pendapatan Denda PBB - Bapenda	42.495.378.229,77	0,00	588.998.940,00	732.901.187,00	42.351.475.982,77
4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga-BPKAD	494.285.600,00	0,00	0,00	494.285.600,00	0,00
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten - DPU Bina Marga	0,00	0,00	92.195.000,00	0,00	92.195.000,00
6	Piutang Pendapatan BLUD	5.794.298.532,28	(2.376.559.301,00)	219.139.622.878,96	216.128.277.298,00	6.429.084.812,24
JUMLAH		48.805.638.639,87	(2.364.086.285,00)	219.820.816.818,96	217.370.662.878,82	48.891.706.295,01

➢ **Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - BPKAD**

Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang SAH - Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah – Remunerasi Dana Bagi Hasil Pajak – Rekening TDF BI TAhun 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - BPKAD per 31 Desember 2023

No	Uraian	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - BPKAD	5.198.793,82	0,00	5.198.793,82	0,00
JUMLAH		5.198.793,82	0,00	5.198.793,82	0,00

➢ **Piutang Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah -Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara – Dinas Perhubungan**

Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang SAH - Piutang Konsensi - Dinas Perhubungan sebesar Rp18.950.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Piutang Konsensi - Dinas Perhubungan
per 31 Desember 2023

Tahun SKR	2022 (Rp)	Koreksi Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2018	10.385.984,00	12.470.716,00	0,00	10.000.000,00	12.856.700,00
2020	6.091.500,00	2.300,00	0,00	0,00	6.093.800,00
Jumlah	16.477.484,00	12.473.016,00	0,00	10.000.000,00	18.950.500,00

Terdapat Koreksi Saldo Awal Piutang Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara – Dinas Perhubungan atas PT. Quarta sebesar Rp12.470.716,00 dan PT. RAJ Rp2.300,00.

Mutasi kurang sebesar Rp10.000.000,00 adalah pembayaran atas angsuran PT. Quarta dari tindak lanjut temuan BPK.

➢ **Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Piutang Pendapatan Denda PBB**

Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Piutang Pendapatan denda PBB sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp42.351.475.982,77 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rincian Piutang Atas Denda PBB per 31 Desember 2023

Tahun SKP	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2001	11.581.940.594,56	0,00	22.356,00	11.581.918.238,56
2002	699.059.601,14	0,00	1.426,00	699.058.175,14
2003	308.892.244,45	0,00	6.096,00	308.886.148,45
2004	1.217.304.058,91	0,00	36.648,00	1.217.267.410,91
2005	2.345.089.629,70	0,00	55.686,00	2.345.033.943,70
2006	3.908.616.286,55	0,00	38.618,00	3.908.577.668,55
2007	2.202.083.492,44	0,00	48.835,00	2.202.034.657,44
2008	5.143.225.451,05	0,00	51.030,00	5.143.174.421,05
2009	246.851.050,41	0,00	1.483.547,00	245.367.503,41
2010	658.539.584,85	0,00	7.643.836,00	650.895.748,85
2011	1.737.685.846,67	0,00	16.456.358,00	1.721.229.488,67
2012	2.053.774.458,06	0,00	17.137.572,00	2.036.636.886,06
2013	1.735.617.541,36	0,00	15.938.167,00	1.719.679.374,36
2014	5.154.938.649,56	0,00	36.517.254,00	5.118.421.395,56
2015	3.501.759.740,06	0,00	48.464.818,00	3.453.294.922,06
2016	0,00	53.870.576,00	53.870.576,00	0,00
2017	0,00	51.736.426,00	51.736.426,00	0,00

Tahun SKP	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2018	0,00	52.286.518,00	52.286.518,00	0,00
2019	0,00	65.398.556,00	65.398.556,00	0,00
2020	0,00	146.164.542,00	146.164.542,00	0,00
2021	0,00	140.565.656,00	140.565.656,00	0,00
2022	0,00	78.711.449,00	78.711.449,00	0,00
2023	0,00	265.217,00	265.217,00	0,00
Jumlah	42.495.378.229,77	588.998.940,00	732.901.187,00	42.351.475.982,77

Penambahan terjadi karena terdapat pembayaran denda Pajak PBB tahun 2016-2023 senilai Rp588.998.940,00. Sedangkan pengurangan terjadi karena terdapat pembayaran denda pajak PBB ketetapan tahun 2004 –2023 senilai Rp732.901.187,00.

➢ **Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga-BPKAD**

Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga-BPKAD sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga - BPKAD per 31 Desember 2023

No	Uraian	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Pengembalian Kelebihan BTT 2020 atas CV. Putra Rasamala	344.552.600,00	0,00	344.552.600,00	0,00
2	Pengembalian Kelebihan BTT 2020 atas CV. Arsa	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
3	Pengembalian Kelebihan BTT 2020 atas CV. Arsa	129.733.000,00	0,00	129.733.000,00	0,00
Jumlah		494.285.600,00	0,00	494.285.600,00	0,00

Pengurangan terjadi karena terdapat pembayaran Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Oleh CV. Putra Rasamala sebesar Rp344.552.600,00 dan oleh Cv. Arsa sebesar Rp20.000.000,00 dan Rp129.733.000,00.

➢ **Piutang Pendapatan BLUD**

Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.980.266.106,24 terdiri dari:

Tabel Rincian Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2023

No	Keterangan	2022	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	2023
1	**RS. dr. Soebandi**	**5.037.782.268,28**	**(2.380.559.345,00)**	**169.869.323.872,96**	**169.608.285.021,00**	**2.918.261.775,24**
	Piutang BPJS	178.174.929,00	0,00	156.293.483.980,00	156.324.151.156,00	147.507.753,00
	Piutang SPM	1.077.830.244,24	0,00	441.785.269,00	360.068.069,00	1.159.547.444,24
	Piutang Biaskes propinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang kepada Asuransi Lainnya	1.396.793.735,04	(114.653.145,00)	11.292.162.583,96	10.963.096.596,00	1.611.206.578,00
	Kemenkes (COVID - 19)	2.384.983.360,00	(2.265.906.200,00)	1.841.892.040,00	1.960.969.200,00	-
2	**RS. Balung**	**552.993.970,00**	**44,00**	**46.289.198.053,00**	**46.127.291.983,00**	**714.900.084,00**
	Piutang BPJS	136.681.483,00	44,00	43.677.728.982,00	43.794.083.829,00	20.326.680,00
	Piutang Jasa Raharja	254.632.287,00		1.767.937.071,00	1.921.581.954,00	100.987.404,00
	Piutang SPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kemenkes (COVID - 19)	161.680.200,00		843.532.000,00	411.626.200,00	593.586.000,00
3	**RS. Kalisat**	**203.622.294,00**	**4.000.000,00**	**1.122.550.403,00**	**392.700.294,00**	**937.372.403,00**
	Piutang BPJS	48.632.223,00	0,00	854.593.700,00	48.632.223,00	854.593.700,00
	Piutang JAMPERSAL	120.720.200,00	0,00	-	120.720.200,00	-
	Piutang Jasa Raharja	18.046.301,00	0,00	11.151.252,00	18.046.301,00	11.151.252,00
	Piutang Ketenagakerjaan	8.331.070,00	0,00	71.627.451,00	8.331.070,00	71.627.451,00
	Kemenkes (COVID - 19)	7.792.500,00	0,00	185.178.000,00	192.970.500,00	0,00
	Piutang Parkir	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
4	**Piutang BPJS - Non Kapitasi**	**0,00**	**0,00**	**1.858.550.550,00**	**0,00**	**1.858.550.550,00**
	Puskesmas Kencong	0,00	0,00	54.030.000,00	0,00	54.030.000,00
	Puskesmas Cakru	0,00	0,00	26.420.750,00	0,00	26.420.750,00
	Puskesmas Gumukmas	0,00	0,00	20.590.000,00	0,00	20.590.000,00
	Puskesmas Tembokrejo	0,00	0,00	9.995.000,00	0,00	9.995.000,00
	Puskesmas Puger	0,00	0,00	27.633.300,00	0,00	27.633.300,00
	Puskesmas Kasiyan	0,00	0,00	17.522.500,00	0,00	17.522.500,00
	Puskesmas Wuluhan	0,00	0,00	35.606.750,00	0,00	35.606.750,00
	Puskesmas Lojejer	0,00	0,00	3.590.000,00	0,00	3.590.000,00

No	Keterangan	2022	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	2023
	Puskesmas Ambulu	0,00	0,00	130.641.500,00	0,00	130.641.500,00
	Puskesmas Sabrang	0,00	0,00	15.602.500,00	0,00	15.602.500,00
	Puskesmas Andongsari	0,00	0,00	26.843.250,00	0,00	26.843.250,00
	Puskesmas Tempurejo	0,00	0,00	71.750.000,00	0,00	71.750.000,00
	Puskesmas Curahnongko	0,00	0,00	15.135.750,00	0,00	15.135.750,00
	Puskesmas Silo I	0,00	0,00	28.715.000,00	0,00	28.715.000,00
	Puskesmas Silo II	0,00	0,00	40.577.500,00	0,00	40.577.500,00
	Puskesmas Mayang	0,00	0,00	55.610.000,00	0,00	55.610.000,00
	Puskesmas Mumbulsari	0,00	0,00	56.735.000,00	0,00	56.735.000,00
	Puskesmas Jenggawah	0,00	0,00	73.050.000,00	0,00	73.050.000,00
	Puskesmas Kemungsari Kidul	0,00	0,00	12.250.000,00	0,00	12.250.000,00
	Puskesmas Ajung	0,00	0,00	96.767.000,00	0,00	96.767.000,00
	Puskesmas Rambipuji	0,00	0,00	55.272.500,00	0,00	55.272.500,00
	Puskesmas Nogosari	0,00	0,00	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00
	Puskesmas Balung	0,00	0,00	13.375.000,00	0,00	13.375.000,00
	Puskesmas Karangduren	0,00	0,00	27.093.000,00	0,00	27.093.000,00
	Puskesmas Umbulsari	0,00	0,00	32.602.500,00	0,00	32.602.500,00
	Puskesmas Paleran	0,00	0,00	38.370.000,00	0,00	38.370.000,00
	Puskesmas Semboro	0,00	0,00	76.337.500,00	0,00	76.337.500,00
	Puskesmas Jombang	0,00	0,00	7.098.250,00	0,00	7.098.250,00
	Puskesmas Sumberbaru	0,00	0,00	-	0,00	-
	Puskesmas Rowotengah	0,00	0,00	27.162.500,00	0,00	27.162.500,00
	Puskesmas Tanggul	0,00	0,00	31.522.500,00	0,00	31.522.500,00
	Puskesmas Klatakan	0,00	0,00	28.088.000,00	0,00	28.088.000,00
	Puskesmas Bangsalsari	0,00	0,00	78.720.000,00	0,00	78.720.000,00
	Puskesmas Sukorejo	0,00	0,00	40.016.000,00	0,00	40.016.000,00
	Puskesmas Panti	0,00	0,00	100.305.000,00	0,00	100.305.000,00
	Puskesmas Sukorambi	0,00	0,00	16.095.000,00	0,00	16.095.000,00
	Puskesmas Arjasa	0,00	0,00	20.142.000,00	0,00	20.142.000,00
	Puskesmas Pakusari	0,00	0,00	12.429.000,00	0,00	12.429.000,00

No	Keterangan	2022	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	2023
	Puskesmas Kalisat	0,00	0,00	10.865.000,00	0,00	10.865.000,00
	Puskesmas Ledokombo	0,00	0,00	28.804.000,00	0,00	28.804.000,00
	Puskesmas Sumberjambe	0,00	0,00	80.240.000,00	0,00	80.240.000,00
	Puskesmas Sukowono	0,00	0,00	106.557.500,00	0,00	106.557.500,00
	Puskesmas Jelbuk	0,00	0,00	39.355.000,00	0,00	39.355.000,00
	Puskesmas Kaliwates	0,00	0,00	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00
	Puskesmas Mangli	0,00	0,00	49.767.000,00	0,00	49.767.000,00
	Puskesmas Jemberkidul	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	Puskesmas Sumbersari	0,00	0,00	21.710.000,00	0,00	21.710.000,00
	Puskesmas Gladakpakem	0,00	0,00	7.680.000,00	0,00	7.680.000,00
	Puskesmas Patrang	0,00	0,00	23.855.000,00	0,00	23.855.000,00
	Puskesmas Banjarsengon	0,00	0,00	16.002.500,00	0,00	16.002.500,00
Jumlah		**5.794.298.532,28**	**(2.376.559.301,00)**	**219.139.622.878,96**	**216.128.277.298,00**	**6.429.084.812,24**

Terdapat koreksi saldo awal Piutang BLUD tahun 2023 pada RS. dr. Soebandi sebesar Rp114.653.145,00 kepada Asuransi lainnya sebesar Rp114.653.145,00 yang terdiri dari :

1. Piutang kepada PT. Telkom Rp 4.935.145,00
2. Piutang MDR Dinkes Jember Rp 105.028.000,00
3. Piutang kepada RSUD dr Koesnadi Bondowoso Rp 4.690.000,00

   Jumlah Rp 114.653.145,00

Koreksi tersebut dikarenakan kesalahan pencatatan atas pengakuan piutang kepada Pihak Asuransi Lainnya pada tahun 2022.

Selain itu juga terdapat koreksi atas piutang kepada Kemenkes RI (Covid-19). Koreksi tersebut merupakan hasil temuan Tim Audit Inspektorat Jenderal pada Kemenkes RI berupa kelebihan klaim penggantian biaya pelayanan pasien Corona Virus Disease (Covid-19) sebesar Rp2.265.906.200,00.

Terdapat koreksi saldo awal Piutang BLUD tahun 2023 pada RS Balung atas Piutang BPJS Kesehatan RS Balung sebesar Rp44,00 karena kesalahan pencatatan Klaim Pembayaran Asuransi yang terjadi di bulan Desember tahun 2022.

Terdapat koreksi saldo awal Piutang BLUD tahun 2023 pada RS. Kalisat sebesar Rp4.000.000,0 dari Piutang Parkir atas hasil Pemeriksaan KAP Tahun 2022.

5.3.1.1.12 Piutang Transfer Antar Daerah – Provinsi Jawa Timur

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
0,00	18.346.058.400,00	(18.346.058.400,00)	(100,00)

Piutang Transfer antar Daerah per 31 Desember 2023 sebesar 0,0 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp18.346.058.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.346.058.400,00 atau 100% dibandingkan Tahun Anggaran 2022.

Piutang Dana Transfer Umum – DBH Pajak Rokok per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 terdiri dari:

Tabel Mutasi Piutang Dana Transfer Umum – DBH Pajak Rokok per 31 Desember 2023

No	Uraian	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Piutang Bea DBH Pajak Rokok	18.346.058.400,00	97.538.286.400,00	115.884.344.800,00	0,00
Jumlah		18.346.058.400,00	97.538.286.400,00	115.884.344.800,00	0,00

5.3.1.1.13 Penyisihan Piutang

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
(255.468.435.927,69)	(222.740.299.956,89)	(32.728.135.970,80)	14,69

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp255.468.435.927,69 dan Rp222.740.299.956,89, yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp32.728.135.970,80 dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Nilai Penyisihan Piutang mengalami peningkatan sebesar Rp32.728.135.970,80 atau 14,69%.

Penyisihan Piutang Tahun sebesar 2023 Rp255.468.435.927,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Penyisihan Piutang Per Jenis per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Jenis Penyisihan Piutang	Nilai Penyisihan 2023	Nilai Penyisihan 2022
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	205.553.720.285,77	174.601.713.096,00
2	Penyisihan Piutang Retribusi	3.875.485.412,28	3.302.832.866,50
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.068.425.083,68	2.171.953.476,41

No	Jenis Penyisihan Piutang	Nilai Penyisihan 2023	Nilai Penyisihan 2022
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	42.970.805.145,96	42.663.800.517,98
5	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Total Penyisihan Piutang		**255.468.435.927,69**	**222.740.299.956,89**

Penyisihan Piutang Tahun 2023 dengan rincian per Jenis pajaknya adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Penyisihan Piutang Per Jenis per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Jenis Penyisihan Piutang	Nilai Penyisihan 2023	Nilai Penyisihan 2022
1	**Penyisihan Piutang Pajak Daerah**		
	Piutang Pajak Hotel	27.147.813,91	199.304.996,65
	Piutang Pajak Restoran	487.114.841,92	392.997.832,02
	Piutang Pajak Hiburan	85.618.110,00	84.883.510,90
	Piutang Pajak Parkir	600.637,52	177.700,00
	Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN	2.142.837,90	4.512.863,75
	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	58.005.605,00	61.366.261,50
	Piutang Reklame	1.144.520.509,35	895.091.524,76
	Piutang Pajak Air Tanah	392.268,59	77.170,23
	Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan	203.748.177.661,58	172.962.468.933,32
	Piutang Pajak BPHTB	0,00	832.302,87
2	**Penyisihan Piutang Retribusi**		
	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Dishub	1.790.887.750,00	1.790.887.750,00
	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Diskominfo	5.635.688,15	1.033.459,50
	Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - Disperindag	1.747.386.495,63	1.179.505.678,50
	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - DPU Bina Marga	88.826.478,50	88.826.478,50
	Piutang Retribusi Jasa Umum - Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Bangunan - Bapenda	37.139.000,00	36.969.500,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Alat - DPU Bina Marga	140.000.000,00	140.000.000,00
	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Bebagai Jenis Barang yang dikontrakkan	65.610.000,00	65.610.000,00
3	**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**		
	Piutang PDAM	3.068.425.083,68	2.171.953.476,41
4	**Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah**		

No	Jenis Penyisihan Piutang	Nilai Penyisihan 2023	Nilai Penyisihan 2022
	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - DISHUB	18.950.500,00	10.995.134,00
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Piutang Pendapatan Denda PBB	42.351.475.982,77	42.495.378.229,77
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga-BPKAD	0,00	2.471.428,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten - DPU Bina Marga	460.975,00	0,00
	Piutang Pendapatan BLUD	599.917.688,19	154.955.726,21
5	**Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**		
	Piutang Bea DBH Pajak Rokok	0,00	0,00
Total Penyisihan Piutang		**265.468.435.927,69**	**222.740.299.956,89**

1. Penyisihan Piutang Pajak per jenis pajak sebesar Rp205.553.720.285,77 adalah sebagai berikut :

   a. *Self Asessment*

Tabel Rincian Penyisihan Piutang Pajak *Self Asessment* per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang				Uraian
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-5 Tahun	> 5 Tahun	
	0,50%	10%	50%	100%	
Piutang Pajak Hotel	1.332.497.802,00	24.687.249,00	27.853.200,00	4.090.000,00	1.389.128.251,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.662.489,01	2.468.724,90	13.926.600,00	4.090.000,00	27.147.813,91
NRV	1.325.835.312,99	22.218.524,10	13.926.600,00	0,00	1.361.980.437,09
Piutang Pajak Restoran	418.477.364,00	5.088.416,00	783.425.533,00	92.800.847,00	1.299.792.160,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	2.092.386,82	508.841,60	391.712.766,50	92.800.847,00	487.114.841,92
NRV	416.384.977,18	4.579.574,40	391.712.766,50	0,00	812.677.318,08
Piutang Pajak Hiburan	73.271.600,00	4.706.300,00	112.930.944,00	28.315.650,00	219.224.494,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	366.358,00	470.630,00	56.465.472,00	28.315.650,00	85.618.110,00
NRV	72.905.242,00	4.235.670,00	56.465.472,00	0,00	133.606.384,00

Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang				Uraian
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-5 Tahun	> 5 Tahun	
	0,50%	10%	50%	100%	
Piutang Pajak Parkir	3.027.503,00	2.438.000,00	230.000,00	226.700,00	5.922.203,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	15.137,52	243.800,00	115.000,00	226.700,00	600.637,52
NRV	3.012.365,49	2.194.200,00	115.000,00	0,00	5.321.565,49
Piutang Pajak PPJ Non PLN	0,00	4.584.069,00	3.368.862,00	0,00	7.952.931,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	458.406,90	1.684.431,00	0,00	2.142.837,90
NRV	0,00	4.125.662,10	1.684.431,00	0,00	5.810.093,10
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	21.192.000,00	0,00	7.844.816,00	53.977.237,00	83.014.053,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	105.960,00	0,00	3.922.408,00	53.977.237,00	58.005.605,00
NRV	21.086.040,00	0,00	3.922.408,00	0,00	25.008.448,00

b. *Official Asessment*

Tabel Rincian Penyisihan Piutang Pajak *Official Asessment* per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang				Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-3 Tahun	> 3 Tahun	
	0,50%	10%	50%	100%	
Piutang Pajak Reklame	558.347.669,00	43.847.375,00	231.992.625,00	1.021.347.721,00	1.855.535.390,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	2.791.738,35	4.384.737,50	115.996.312,50	1.021.347.721,00	1.144.520.509,35
NRV	555.555.930,66	39.462.637,50	115.996.312,50	0,00	711.014.880,66
Piutang Pajak Air Tanah	15.369.937,00	847.434,00	461.351,00	0,00	16.678.722,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	76.849,69	84.743,40	230.675,50	0,00	392.268,59
NRV	15.293.087,32	762.690,60	230.675,50	0,00	16.286.453,42

Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang				Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-3 Tahun	> 3 Tahun	
	0,50%	10%	50%	100%	
Piutang PBB	45.289.200.141,00	38.516.384.973,00	35.388.498.992,00	181.975.843.667,57	301.169.927.773,57
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	226.446.000,71	3.851.638.497,30	17.694.249.496,00	181.975.843.667,57	203.748.177.661,58
NRV	45.062.754.140,30	34.664.746.475,70	17.694.249.496,00	0,00	97.421.750.112,00

2. Penyisihan Piutang Retribusi per jenis retribusi sebesar Rp3.875.485.412,28 adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang					Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-3 Tahun	> 3-5 Tahun	> 5 Tahun	
	0,50%	10%	50%	100%	100%	
Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Dishub	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.887.750,00	1.790.887.750,00
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.887.750,00	1.790.887.750,00
NRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Diskominfo	1.127.137.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.137.630,00
Jumlah Penyisihan Piutang	5.635.688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635.688,15
NRV	1.121.501.941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.501.941,85
Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - Disperindag	564.364.125,00	689.525.100,00	638.519.250,00	1.096.577.300,00	259.775.240,00	3.248.761.015,00
Jumlah Penyisihan Piutang	2.821.820,63	68.952.510,00	319.259.625,00	1.096.577.300,00	259.775.240,00	1.747.386.495,63
NRV	561.542.304,37	620.572.590,00	319.259.625,00	0,00	0,00	1.501.374.519,37

Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang					Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-3 Tahun	> 3-5 Tahun	> 5 Tahun	
	0,50%	10%	50%	100%	100%	
Piutang Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan - DPU Bina Marga	0,00	0,00	0,00	0,00	88.826.478,50	88.826.478,50
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	88.826.478,50	88.826.478,50
NRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa Umum - Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Bangunan - Bapenda	900.000,00	1.800.000,00	0,00	840.000,00	36.114.500,00	39.654.500,00
Jumlah Penyisihan Piutang	4.500,00	180.000,00	0,00	840.000,00	36.114.500,00	37.139.000,00
NRV	895.500,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	2.515 500,00
Piutang Retribusi Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Alat - DPU Bina Marga	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000 000,00
NRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha - Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Bebagai Jenis Barang yang dikontrakkan - Disperindag	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	47.610.000,00	65.610.000,00
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	47.610.000,00	65.610.000,00
NRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp3.068.425.083,68 adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang					Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-3 Tahun	> 3-5 Tahun	> 5 Tahun	
	0,50%	10%	50%	100%	100%	
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – PDAM	1.161.909.395,00	162.036.162,00	636.167.531,00	1.241.603.225,00	1.486.724.930,00	4.688.441.243,00
Jumlah Penyisihan Piutang	5.809.546,98	16.203.616,20	318.083.765,50	1.241.603.225,00	1.486.724.930,00	3.068.425.083,68
NRV	1.156.099.848,02	145.832.545,80	318.083.765,50	0,00	0,00	1.620.016.159,32

4. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp42.970.805.145,96 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang					Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-3 Tahun	> 3-5 Tahun	> 5 Tahun	
	0,50%	10%	50%	100%	100%	
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara – Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	6.093 800,00	12 856 700,00	18.950.500,00
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	6.093.800,00	12.856.700,00	18.950.500,00
NRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Piutang Pendapatan Denda PBB - Bapenda	0,00	0,00	0,00	0,00	42.351.475.982,77	42.351.475.982,77
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	42.351.475.982,77	42.351.475.982,77
NRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	92.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.195.000,00

Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang					Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-3 Tahun	> 3-5 Tahun	> 5 Tahun	
	0,50%	10%	50%	100%	100%	
Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten - DPU Bina Marga						
Jumlah Penyisihan Piutang	460.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.975,00
NRV	91.734.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.734.025,00
Piutang Pendapatan BLUD	5.299.803.991,00	48.690.481,00	1.024.081.440,24	56.508.900,00	0,00	6.429.084.812,24
Jumlah Penyisihan Piutang	26.499.019,97	4.869.048,10	512.040.720,12	56.508.900,00	0,00	599.917.688,19
NRV	5.273.304.971,03	43.821.432,90	512.040.720,12	0,00	0.00	5.829.167.124,05

Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp599.917.688,19 adalah sebagai berikut :

Tabel Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Nilai Bruto 2023	Penyisihan 2023	Netto 2023
1	**RS. dr. Soebandi**	**2.918.261.775,24**	**577.243.385,78**	**2.341.018.389,46**
	Piutang BPJS	147.507.753,00	737.538,77	146 770.214,23
	Piutang SPM	1.159.547.444,24	555.848.044,12	603.699.400,12
	Piutang kepada Asuransi Lainnya	1.611 206.578,00	20.657.802,89	1.590.548.775,11
	Kemenkes (COVID - 19)	0,00	0,00	0,00
2	**RS. Balung**	**714.900.084,00**	**8.694.687,64**	**706.205.396,36**
	Piutang BPJS	20.326.680,00	101.633,40	20.225.046,60
	Piutang Jasa Raharja	100.987.404,00	5.625.124,24	95 362.279,76
	Piutang SPM	0,00	0,00	0,00
	Kemenkes (COVID - 19)	593 586.000,00	2 967.930,00	590.618.070,00
3	**RS. Kalisat**	**937.372.403,00**	**4.686.862,02**	**932.685.640,98**
	Piutang BPJS	854.593.700,00	4.272.968,50	850 320 731,50
	Piutang JAMPERSAL	0,00	0,00	0,00
	Piutang Jasa Raharja	11.151.252,00	55.756,26	11.095.495,74
	Piutang Ketenagakerjaan	71.627.451,00	358.137,26	71.269.313,74

No	Uraian	Nilai Bruto 2023	Penyisihan 2023	Netto 2023
	Kemenkes (COVID - 19)	0,00	0,00	0,00
	Piutang Parkir	0,00	0,00	0,00
4	**Piutang BPJS - Non Kapitasi**	**1.858.550.550,00**	**9.292.752,75**	**1.849.257.797,25**
	Puskesmas Kencong	54.030.000,00	270.150,00	53.759.850,00
	Puskesmas Cakru	26.420.750,00	132.103,75	26.288.646,25
	Puskesmas Gumukmas	20.590.000,00	102.950,00	20.487.050,00
	Puskesmas Tembokrejo	9.995.000,00	49.975,00	9.945.025,00
	Puskesmas Puger	27.633.300,00	138.166,50	27.495.133,50
	Puskesmas Kasiyan	17.522.500,00	87.612,50	17.434.887,50
	Puskesmas Wuluhan	35.606.750,00	178.033,75	35.428.716,25
	Puskesmas Lojejer	3.590.000,00	17.950,00	3.572.050,00
	Puskesmas Ambulu	130.641.500,00	653.207,50	129.988.292,50
	Puskesmas Sabrang	15.602.500,00	78.012,50	15.524.487,50
	Puskesmas Andongsari	26.843.250,00	134.216,25	26.709.033,75
	Puskesmas Tempurejo	71.750.000,00	358.750,00	71.391.250,00
	Puskesmas Curahnongko	15.135.750,00	75.678,75	15.060.071,25
	Puskesmas Silo I	28.715.000,00	143.575,00	28.571.425,00
	Puskesmas Silo II	40.577.500,00	202.887,50	40.374.612,50
	Puskesmas Mayang	55.610.000,00	278.050,00	55.331.950,00
	Puskesmas Mumbulsari	56.735.000,00	283.675,00	56.451.325,00
	Puskesmas Jenggawah	73.050.000,00	365.250,00	72.684.750,00
	Puskesmas Kemungsari Kidul	12.250.000,00	61.250,00	12.188.750,00
	Puskesmas Ajung	96.767.000,00	483.835,00	96.283.165,00
	Puskesmas Rambipuji	55.272.500,00	276.362,50	54.996.137,50
	Puskesmas Nogosari	22.200.000,00	111.000,00	22.089.000,00
	Puskesmas Balung	13.375.000,00	66.875,00	13.308.125,00
	Puskesmas Karangduren	27.093.000,00	135.465,00	26.957.535,00
	Puskesmas Umbulsari	32.602.500,00	163.012,50	32.439.487,50
	Puskesmas Paleran	38.370.000,00	191.850,00	38.178.150,00
	Puskesmas Semboro	76.337.500,00	381.687,50	75.955.812,50
	Puskesmas Jombang	7.098.250,00	35.491,25	7.062.758,75
	Puskesmas Sumberbaru	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Rowotengah	27.162.500,00	135.812,50	27.026.687,50
	Puskesmas Tanggul	31.522.500,00	157.612,50	31.364.887,50
	Puskesmas Klatakan	28.088.000,00	140.440,00	27.947.560,00

No	Uraian	Nilai Bruto 2023	Penyisihan 2023	Netto 2023
	Puskesmas Bangsalsari	78.720.000,00	393.600,00	78.326.400,00
	Puskesmas Sukorejo	40.016.000,00	200.080,00	39.815.920,00
	Puskesmas Panti	100.305.000,00	501.525,00	99.803.475,00
	Puskesmas Sukorambi	16.095.000,00	80.475,00	16.014.525,00
	Puskesmas Arjasa	20.142.000,00	100.710,00	20.041.290,00
	Puskesmas Pakusari	12.429.000,00	62.145,00	12.366.855,00
	Puskesmas Kalisat	10.865.000,00	54.325,00	10.810.675,00
	Puskesmas Ledokombo	28.804.000,00	144.020,00	28.659.980,00
	Puskesmas Sumberjambe	80.240.000,00	401.200,00	79.838.800,00
	Puskesmas Sukowono	106.557.500,00	532.787,50	106.024.712,50
	Puskesmas Jelbuk	39.355.000,00	196.775,00	39.158.225,00
	Puskesmas Kaliwates	27.020.000,00	135.100,00	26.884.900,00
	Puskesmas Mangli	49.767.000,00	248.835,00	49.518.165,00
	Puskesmas Jemberkidul	800.000,00	4.000,00	796.000,00
	Puskesmas Sumbersari	21.710.000,00	108.550,00	21.601.450,00
	Puskesmas Gladakpakem	7.680.000,00	38.400,00	7.641.600,00
	Puskesmas Patrang	23.855.000,00	119.275,00	23.735.725,00
	Puskesmas Banjarsengon	16.002.500,00	80.012,50	15.922.487,50

Piutang Lain-lain PAD yang SAH per 31 Desember 2023 sebesar Rp48.891.706.295,01 tidak termasuk tagihan berupa temuan hasil pemeriksaan BPK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Temuan BPK RI per 31 Desember 2023

NO	Uraian	Saldo 31 Desember 2023
1	Pemeriksaan LKD th 2004 Kelebihan Biaya Ops & Belanja daerah yg tdk sesuai ketentuan	2.307.036.500,00
2	Dari hasil pemeriksaan investigasi BPK RI th 2005	
	Kelekoran kas & Pengurangan kas yg tdk sesuai ketentuan	128.759.374.669,36
	biaya pengurusan pemindahan ijin radio Kendedes dari banyuwangi ke Jember	700.000.000,00
	pemotongan dana bantuan keuangan untuk pembinaan kecamatan	3.348.000.000,00
3	Dari hasil pemeriksaan LKD th 2005	
	DPRD kelebihan biaya penunjang oprs pimpinan dan ketua DPRD dan belanja daerah DPRD th 2004 yg tdk sesuai ketentuan	80.500.000,00
	THR DPRD dan Muspida yang diberikan tidak sesuai ketentuan	275.000.000,00
	Biaya Oprs PPJ dan sumbangan pihak ketiga ygdiberikan secara tunai	146.598.477,19
	Denda keterlambatan penyerahan pengadaan obat yng tidak dikenakan	85.056.776,00
4	dari hasil pemeriksaan LKD th. 2006	

NO	Uraian	Salso 31 Desember 2023
	DPRD, tunjangan komunikasi intensif dan danaOprs bagi pimpinan dan anggota DPRD	69.317.000,00
	DPRD Honorarium Pimpinan DPRD	81.600.000,00
	Bantuan Keuangan pada parpol yg melebihi ketentuan	53.580.000,00
	Biaya perjalanan Dinas tetap yg tidak sesuai ketentuan	29.935.490,00
5	Dari hasil pemeriksaan LKD th. 2007	
	Bantuan uang muka perumahan PNS (BKD)	850.625.000,00
	Pengenaan pajak bunga tabungan dana askes (Dinas Kesehatan)	2.109.529,00
	Honor panitia muspida inti muspida plus (Bagian Pemerintahan)	242.500.000,00
	Denda keterlambatan pengadaan alkes danpemeliharaan rutin berkala (RSD Soebandi)	2.474.875,50
	Jumlah	137.034.308.317,05

5.3.1.1.14 Beban Dibayar Dimuka

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
2.846.435,66	12.705.000,00	(9.858.564,34)	(77,60)

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.846.435,66 dan Rp12.705.000,00 yaitu mengalami penurunan sebesar Rp9.858.564,34 dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Nilai Beban dibayar dimuka mengalami penurunan sebesar Rp9.858.564,34 atau 77,60%.

Saldo Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.846.435,66 merupakan pengeluaran biaya Tahun 2023 yang belum menjadi beban pada periode Tahun Anggaran 2023 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Jember. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023

No	Uraian	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Beban dibayar dimuka - Sewa tempat parkir mobil pelayanan kesehatan (Bus) – Dinas Kesehatan	12.705.000,00		12.705.000,00	0,00
2	Beban dibayar dimuka - Sewa Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Tinggal - RS Kalisat	0,00	2.846.435,66	0,00	2.846.435,66
	Jumlah	12.705.000,00	2.846.435,66	12.705.000,00	2.846.435,66

Beban dibayar dimuka - Sewa Bangunan Gedung – Bangunan Gedung Tempat Tinggal - RS Kalisat dengn nilai Kontrak sebesar Rp2.846.435,66 sesuai dengan perjanjian kesepakatan bersama antara RS Kalisat dengan pihak ketiga tentang kerjasama belanja sewa Gudang Peralatan. Surat Keterangan Nomor : 4KOL.SKET/X/2024.02.05-001, dengan Nilai Sewa Rp8.539.307,00, Tanggal Sewa 01 Mei 2023 – 31 April 2024, sehingga saldo beban dibayar dimuka – Sewa Tempat Parkir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.846.435,66.

5.3.1.1.15 Persediaan

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
66.989.567.819,22	77.177.760.282,31	(10.188.192.463,09)	13,20%

Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp66.989.567.819,22 Jika dibandingkan dengan nilai saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp77.177.760.282,31 maka nilai persediaan per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp10.188.192.463,09 atau sebesar 13,20% Adapun rincian persediaan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	77.177.760.282,31
Penambahan Tahun 2023	Rp	455.098.694.729,00
Jumlah Penambahan	**Rp**	**532.276.455.011,31**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	465.286.887.192,09
Jumlah Pengurangan	**Rp**	**465.286.887.192,09**
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**66.989.567.819,22**

Pemerintah Kabupaten Jember menggunakan sistem informasi/aplikasi untuk penatausahaan persediaan yaitu Sistem Informasi Persediaan Daerah (SIPERDA). Seluruh jenis persediaan telah dicatat ke dalam aplikasi SIPERDA kecuali jenis persediaan medis pada Dinas Kesehatan, 3 (tiga) Rumah Sakit Daerah, Puskesmas dan persediaan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan. Persediaan yang tidak dicatat dalma SIPERDA masih dicatat secara manual dengan menggunakan *Microsoft Excel*.

Tabel Mutasi Jenis Persediaan

No.	REKENING PERSEDIAAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	Bahan bangunan dan konstruksi	1.556.320.075,00	27.941.071.617,00	28.346.495.519,00	1.150.896.173,00
2	Bahan kimia	9.758.939.596,55	30.804.581.804,94	32.907.052.682,65	7.656.468.718,84
3	Bahan bakar dan pelumas	21.280.000,00	19.047.741.063,00	19.033.061.088,00	35.959.975,00
4	Bahan baku	16.949.700,00	1.759.146.025,00	1.776.095.725,00	0,00
5	Bahan/bibit tanaman	47.749.850,00	949.930.620,00	949.930.620,00	47.749.850,00
6	Isi tabung pemadam kebakaran	-	123.765.040,00	117.155.760,00	6.609.280,00
7	Isi tabung gas	287.675.250,00	702.464.196,00	977.000.296,00	13.139.150,00
8	Bahan lainnya	6.521.673.694,32	55.917.159.940,77	51.455.592.750,46	10.983.240.884,63
9	Suku cadang alat angkutan	2.299.500,00	3.653.654.948,00	3.593.643.948,00	62.310.500,00
10	Suku cadang alat besar	0,00	141.449.000,00	141.449.000,00	0,00
11	Suku cadang alat Kedokteran	898.345.104,49	1.716.340.701,00	1.757.153.729,34	857.532.076,15
12	Suku cadang alat laboratorium	0,00	19.366.200,00	19.366.200,00	0,00
13	Suku cadang alat studio dan komunikasi	0,00	23.447.150,00	23.447.150,00	0,00
14	Suku cadang alat pertanian	0,00	684.694.200,00	682.833.200,00	1.861.000,00
15	Suku cadang alat bengkel	0,00	57.683.500,00	57.023.500,00	660.000,00
16	Suku cadang lainnya	10.560.000,00	365.834.747,00	376.394.747,00	0,00
17	Alat tulis kantor	3.693.011.536,70	32.055.812.793,00	34.476.188.039,60	1.272.636.290,10
18	Kertas dan cover	324.930.872,50	9.692.021.508,00	9.533.379.486,50	483.572.894,00
19	Bahan cetak	8.114.500.683,71	20.153.509.994,01	25.779.745.700,88	2.488.264.976,84
20	Benda pos	89.575.299,90	1.161.492.505,00	1.211.514.304,90	39.553.500,00
21	Persediaan dokumen/administrasi tender	1.386.000,00	12.000.000,00	12.907.500,00	478.500,00
22	Bahan komputer	687.372.120,48	9.263.116.460,00	9.265.286.770,27	685.201.810,21
23	Perabot kantor	951.531.126,33	11.746.823.538,00	11.885.783.905,40	812.570.758,93
24	Alat listrik	3.852.844.346,02	6.526.790.925,00	6.763.429.169,43	3.616.206.101,59
25	Perlengkapan dinas	1.653.547.110,00	13.801.944.534,00	14.260.666.914,00	1.194.824.730,00
26	Perlengkapan pendungkung olah raga	1.360.000,00	3.504.489.446,00	3.505.103.446,00	746.000,00
27	Suvenir/cendera mata	54.335.200,00	3.077.801.762,00	2.930.482.962,00	201.654.000,00

No.	REKENING PERSEDIAAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
28	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	1.404.278.812,75	3.796.823.332,83	4.630.898.479,45	570.203.666,13
29	Obat	18.608.508.284,95	123.669.605.407,85	119.935.703.529,62	22.342.410.163,18
30	Obat-obatan lainnya	2.371.977.843,02	15.317.000.339,52	15.521.542.987,92	2.167.435.194,62
31	Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	16.154.459.578,00	51.518.147.280,00	57.620.799.508,25	10.051.807.349,75
32	Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya	0,00	47.813.125,00	47.813.125,00	0,00
33	Natura	92.348.697,59	4.828.655.382,11	4.799.522.703,45	121.481.376,25
34	Pakan	0,00	353.350.000,00	353.350.000,00	0,00
35	Natura dan pakan lainnya	0,00	408.895.754,00	284.802.854,00	124.092.900,00
36	Komponen peralatan	0,00	43.751.540,00	43.751.540,00	0,00
37	Komponen rambu-rambu	0,00	244.200,00	244.200,00	0,00
38	Komponen lainnya	0,00	191.242.000,00	191.242.000,00	0,00
39	Pipa air besi tuang (dci)	0,00	2.566.000,00	2.566.000,00	0,00
40	Pipa baja	0,00	5.627.500,00	5.627.500,00	0,00
41	Pipa plastik pvc (upvc)	0,00	10.838.650,00	10.838.650,00	0,00
JUMLAH TOTAL (Rp)		77.177.760.282,31	455.098.694.729,00	465.286.887.192,09	66.989.567.819,22

Mutasi Persediaan selama tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Saldo awal persediaan tahun 2023 sebesar Rp77.177.760.282,31 merupakan saldo akhir persediaan tahun 2022 (*audited*) yang berasal dari akumulasi persediaan yang tercatat dalam Aplikasi Sistem Informasi Persediaan Daerah (SIPERDA) dan persediaan yang tercatat secara manual (*excel*), dengan rincian sebagai berikut :

SIPERDA	Rp	34.613.131.995,15
MANUAL	Rp	42.564.628.287,16
JUMLAH	**Rp**	**77,177,760,282.31**

b. Penambahan persediaan tahun 2023 sebesar **Rp455.098.694.729,00** merupakan akumulasi penambahan persediaan yang tercatat dalam Aplikasi Sistem Infromasi Persediaan Daerah (SIPERDA) dan penambahan persediaan yang tercatat secara manual (*excel*), dengan rincian sebagai berikut :

SIPERDA	Rp	142.404.005.422,68

MANUAL	Rp	312.694.689.306,32
JUMLAH	**Rp**	**455.098.694.729,00**

Adapaun rincian sebesar Rp455.098.694.729,00 terdiri dari :

1)	Belanja persediaan APBD	Rp	138.196.133.528,00
2)	Belanja persediaan BLUD	Rp	117.989.442.785,71
3)	Penerimaan persediaan dari Hibah	Rp	36.969.908.077,19
4)	Belanja Persediaan dari BOS	Rp	76.631.367.694,00
5)	Hutang Persediaan	Rp	35.027.177.366,14
6)	Reklasifikasi belanja modal	Rp	906.760.321,00
7)	Reklasifikasi sub akun	Rp	847.875.675,00
8)	Mutasi antar OPD	Rp	48.530.029.281,95

Penambahan persediaan tahun 2023 tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1) Belanja persediaan APBD sebesar **Rp138.196.133.528,00** merupakan realisasi belanja persediaan yang telah dianggarkan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari bahan bangunan dan alat konstruksi, bahan kimia, bahan bakar dan pelumas, bahan baku, bahan bibit tanaman, isi tabung pemadam kebakaran, isi tabung gas, bahan bibit ternak ikan, bahan lainnya, suku cadang alat angkutan, suku cadang alat laboratorium, suku cadang alat besar, suku cadang alat kedokteran, suku cadang alat pertanian, suku cadang lainnya, alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, benda pos, dokumen administrasi tender, bahan komputer, perabot kantor, alat listrik, perlengkapan dinas, perlengkapan pedukung olahraga, souvenir cinderamata, kegiatan kantor lainnya, obat, obat lainnya, persediaan yang akan dijual/diserahkan ke masyarakat, persediaan yang akan dijual/diserahkan ke masyarakat lainnya, natura, pakan, serta natura dan pakan lainnya, dan komponen rambu-rambu. Adapun rincian belanja persediaan APBD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Belanja Persediaan APBD

NO	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Bahan bangunan dan konstruksi	12.331.203.701,00
2	Bahan kimia	5.517.673.925,00
3	Bahan bakar dan pelumas	16.099.958.205,00
4	Bahan baku	1.307.805.900,00
5	Bahan/bibit tanaman	317.692.825,00

NO	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
6	Isi tabung pemadam kebakaran	30.761.925,00
7	Isi tabung gas	40.703.300,00
8	Bahan lainnya	7.323.494.019,00
9	Suku cadang alat angkutan	3.345.184.607,00
10	Suku cadang alat besar	141.449.000,00
11	Suku cadang alat kedokteran	399.990.482,00
12	Suku cadang alat laboratorium	9.608.700,00
13	Suku cadang alat pertanian	680.015.700,00
14	Suku cadang alat bengkel	57.683.500,00
15	Suku cadang lainnya	365.834.747,00
16	Alat tulis kantor	2.565.283.974,00
17	Kertas dan cover	3.038.495.409,00
18	Bahan cetak	10.131.142.290,00
19	Benda pos	606.421.205,00
20	Persediaan dokumen/administrasi tender	12.000.000,00
21	Bahan komputer	3.866.966.770,00
22	Perabot kantor	2.807.454.721,00
23	Alat listrik	2.611.014.355,00
24	Perlengkapan dinas	11.867.234.142,00
25	Perlengkapan pendungkung olah raga	654.580.916,00
26	Suvonir/condera mata	2.829.119.509,00
27	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	1.269.570.226,00
28	Obat	3.675.335.233,00
29	Obat-obatan lainnya	560.790.100,00
30	Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	40.261.672.776,00
31	Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya	39.500.000,00
32	Natura	2.578.003.612,00
33	Pakan	353.350.000,00
34	Natura dan pakan lainnya	408.895.754,00
35	Komponen lainnya	191.242.000,00
TOTAL (Rp)		**138.196.133.628,00**

2) Belanja persediaan BLUD sebesar **Rp117.989.442.785,71** merupakan realisasi belanja persediaan yang telah dianggarkan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari bahan bangunan dan alat konstruksi, bahan kimia, bahan bakar dan pelumas, bahan baku, bahan bibit tanaman, isi tabung pemadam kebakaran, isi tabung gas, bahan bibit ternak ikan, bahan lainnya, suku cadang alat angkutan, suku cadang alat laboratorium, suku cadang alat besar, suku cadang alat kedokteran, suku cadang alat pertanian, suku cadang lainnya, alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, benda pos, dokumen administrasi tender, bahan komputer, perabot kantor, alat listrik, perlengkapan dinas, perlengkapan pedukung olahraga, souvenir

cinderamata, kegiatan kantor lainnya, obat, obat lainnya, persediaan yang akan dijual/diserahkan ke masyarakat, persediaan yang akan dijual/diserahkan ke masyarakat lainnya, natura, pakan, serta natura dan pakan lainnya, dan komponen rambu-rambu. Adapun rincian belanja persediaan BLUD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Belanja Persediaan BLUD

NO	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Bahan bangunan dan konstruksi	89.281.929,00
2	Bahan kimia	15.024.929.465,85
3	Bahan bakar dan pelumas	2.891.409 235,00
4	Isi tabung pemadam kebakaran	92.143.115,00
5	Isi tabung gas	334 244 366,00
6	Bahan lainnya	33.772.774 701,76
7	Suku cadang alat angkutan	308.470.341,00
8	Suku cadang alat kedokteran	925.070.647,00
9	Alat tulis kantor	1.556.089.332,00
10	Kertas dan cover	523.256.668,00
11	Bahan cetak	4 318 232 502,00
12	Benda pos	112 108 000,00
13	Bahan komputer	895 968 578,00
14	Perabot kantor	931 996 062,00
15	Alat listrik	684 308 556,00
16	Perlengkapan dinas	1 156 381.883,00
17	Perlengkapan pendungkung olah raga	6 061 710,00
18	Suvenir/cendera mata	180 675 893,00
19	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	2 506 136 996,84
20	Obat	39 547.049.594,63
21	Obat-obatan lainnya	10 914.948.470,78
22	Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya	8.313.125,00
23	Natura	1.209.591.613,85
TOTAL (Rp)		117.989.442.785,71

3) Penerimaan persediaan dari hibah sebesar **Rp36.969.908.077,19** merupakan penerimaan persediaan yang berasal dari instansi vertikal dan/atau pihak lain diluar Pemerintah Kabupaten Jember. Adapun rincian Penerimaan persediaan dari hibah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Penerimaan Persediaan dari Hibah

NO	NAMA OPD	ASAL HIBAH	NILAI (Rp)
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	Bkkbn Provinsi Jawa Timur	3 802 525 237,00
2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Direktorat Jendral Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	901.635 550,00

NO	NAMA OPD	ASAL HIBAH	NILAI (Rp)
3	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	32.119.647.290,19
4	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Upt Proteksi Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Jawa Timur	146.100.000,00
TOTAL (Rp)			36.969.908.077,19

4) Belanja Persediaan dari BOS dan BOP PAUD sebesar **Rp76,631,367,694.00** merupakan belanja persediaan yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri serta PAUD Negeri yang berada di wilayah kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Adapun rincian Penerimaan dari BOS tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Penerimaan dari BOS

NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
Dinas Pendidikan	Bahan Bangunan dan Kontruksi	15.520 585 987,00
	Bahan kimia	56 509 279,00
	Bahan Bakar dan Pelumas	51.767 948,00
	Bahan baku	451 340 125,00
	Bahan bibit tanaman	632 237 795,00
	Isi tabung pemadam kebakaran	860 000,00
	Isi tabung gas	74.447.780,00
	Suku cadang alat laboratorium	9 757 500,00
	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	23 447 150,00
	Suku cadang alat pertanian	4 678 500,00
	Alat tulis kantor	27 934.439.487,00
	Kertas dan Cover	6.130.269.431,00
	Bahan cetak	4.661.401.652,00
	Benda pos	442 963 300,00
	Bahan komputer	4 429 293 457,00
	Perabot kantor	8.007.345 755,00
	Alat listrik	2.632.484.014,00
	Perlengkapan dinas	484 074.509,00
	Perlengkapan pendukung olahraga	2.843 846 820,00
	Souvenir cinderamata	68.006.360,00
	Obat	1 958 211 505,00
	Natura	150 371 450,00
	Komponen peralatan	43.751.540,00
	Komponen Rambu-rambu	244 200,00
	Pipa air besi tuang (dci)	2.566.000,00
	Pipa baja	5 627.500,00

NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
	Pipa plastik pvc (upvc)	10.838.650,00
TOTAL		76.631.367.694,00

5) Reklasifikasi dari belanja modal sebesar **Rp906,760,321.00** merupakan tindakan korektif atas realisasi belanja modal tahun 2023 yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap sehingga dicatat menjadi Persediaan. Adapun rincian Reklasifikasi dari belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel Reklasifikasi Belanja Modal

NO	NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Persediaan dijual/diserahkan kepada masyarakat	25 215.000,00
2	Bagian Umum	Bahan komputer	900 000.00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	2 980 000.00
4	Dinas Pendidikan	Bahan lainnya	2 010 000.00
		Bahan komputer	69 987 655.00
		Alat listrik	3 410 000.00
		Perlengkapan dinas	37 619 000.00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	Alat listrik	595.574.000.00
		Persediaan dijual/diserahkan kepada masyarakat	148 950 000,00
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	7 500.000,00
8	Puskesmas Ajung	Perabot kantor	27.000,00
9	Puskesmas Ambulu	Bahan lainnya	502 056,00
10	Puskesmas Curahnongko	Bahan cetak	72.000,00
11	Puskesmas Ledokombo	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	3 698.520,00
12	Puskesmas Panti	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	4 072.590,00
13	Puskesmas Patrang	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	3 865.000,00
14	Puskesmas Tempurejo	Bahan lainnya	377 500,00
	TOTAL		906.760.321,00

6) Hutang Persediaan sebesar **Rp35.027.177.366,14** merupakan persediaan yang telah diterima oleh RSD dr. Soebandi, RSD Balung, RSD Kalisat dan Puskesmas Cakru namun belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2023. Adapun rincian hutang persediaan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel Hutang Persediaan Tahun 2023

NO	NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	Bahan Bakar dan Pelumas	4 605 675,00
		Obat	3.874 870 015,96
		Obat-obatan lainnya	3.695.161.768,74
		Natura	42.813.031,25
2	Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr Soebandi	Bahan kimia	5.210.598 124,00
		Bahan lainnya	12.889 717 227,95
		Obat	9.217.088.983,25
3	Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalisat	Bahan lainnya	91 836.085,00
4	Puskesmas Cakru	Obat	486.455,00
TOTAL			35.027.177.366,14

7) Reklasifikasi sub akun sebesar **Rp847.875.675,00** dari belanja makan minum pasien ke natura berupa bahan makanan pada Rumah Sakit Daerah Kalisat.

8) Mutasi antar OPD sebesar **Rp48.530.029.281,95** merupakan perpindahan persediaan antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Mutasi Antar OPD Tahun 2023

NO	NAMA OPD	NILAI (Rp)
1	Bagian Tata Pemerintahan	8 459 000,00
2	Bagian Umum	7 690 000,00
3	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4 614 000,00
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9 228 000,00
5	Dinas Pendidikan	7 690 000,00
6	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	209.397.500,00
7	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	7 690.000,00
8	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9 228 000,00
9	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3 076.000,00
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2 307 000,00
11	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	28 453 000,00
12	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	**74 787 784,33**
13	Kecamatan Ajung	3 076.000,00
14	Kecamatan Ambulu	3.076.000,00
15	Kecamatan Arjasa	3 076 000,00
16	Kecamatan Balung	3 076 000,00
17	Kecamatan Bangsalsari	3 076 000,00
18	Kecamatan Gumukmas	3 076 000,00
19	Kecamatan Jelbuk	3.076.000,00
20	Kecamatan Jenggawah	3 076 000,00
21	Kecamatan Jombang	4.614.000,00
22	Kecamatan Kalisat	4 614 000,00
23	Kecamatan Kaliwates	4 614 000,00

NO	NAMA OPD	NILAI (Rp)
24	Kecamatan Kencong	4.614.000,00
25	Kecamatan Ledokombo	3.076.000,00
26	Kecamatan Mayang	4.614.000,00
27	Kecamatan Mumbulsari	3.076.000,00
28	Kecamatan Pakusari	9 228 000,00
29	Kecamatan Panti	6.152.000,00
30	Kecamatan Patrang	4 614.000,00
31	Kecamatan Puger	4.614.000,00
32	Kecamatan Rambipuji	4.614.000,00
33	Kecamatan Semboro	4.614.000,00
34	Kecamatan Silo	4 614.000,00
35	Kecamatan Sukorambi	3 076 000,00
36	Kecamatan Sukowono	3 076 000,00
37	Kecamatan Sumberbaru	4 614 000,00
38	Kecamatan Sumberjambe	4.614.000,00
39	Kecamatan Sumbersari	4 614 000,00
40	Kecamatan Tanggul	4 614.000,00
41	Kecamatan Tempurejo	3 076 000,00
42	Kecamatan Umbulsari	3 076 000,00
43	Kecamatan Wuluhan	3 076 000 00
44	Puskesmas Ajung	1 458 631 372,13
45	Puskesmas Ambulu	1.389.732.576,58
46	Puskesmas Andongsari	589.896.210,80
47	Puskesmas Arjasa	702 352 261,33
48	Puskesmas Balung	713.460.176,14
49	Puskesmas Bangsalsari	1 342 591.079,99
50	Puskesmas Banjarsengon	723 671 461 78
51	Puskesmas Cakru	574.150.010,60
52	Puskesmas Curahnongko	670 253.955,87
53	Puskesmas Gladakpakem	696.265.071,45
54	Puskesmas Gumukmas	919.335.311,47
55	Puskesmas Jelbuk	623.359.120,58
56	Puskesmas Jember Kidul	1 002 601 160,15
57	Puskesmas Jenggawah	913 601 151,03
58	Puskesmas Jombang	818 385.008,88
59	Puskesmas Kalisat	1.788 668.183,44
60	Puskesmas Kalliwates	1.079 207 570,59
61	Puskesmas Karangduren	836.405.367,61
62	Puskesmas Kasiyan	817 240 108,40
63	Puskesmas Kemuningsari Kidul	721 973.271,14
64	Puskesmas Kencong	1 322 892 153 10
65	Puskesmas Klatakan	682 511.821,76

NO	NAMA OPD	NILAI (Rp)
66	Puskesmas Ledokombo	1.123.676.941,15
67	Puskesmas Lojejer	964.000.350,42
68	Puskesmas Mangli	922.307.084,64
69	Puskesmas Mayang	885.996.762,46
70	Puskesmas Mumbulsari	1.129.623.902,43
71	Puskesmas Nogosari	557.342.401,51
72	Puskesmas Pakusari	1.337.894.157,06
73	Puskesmas Paleran	689.825.842,59
74	Puskesmas Panti	963.437.391,30
75	Puskesmas Patrang	896.287.481,01
76	Puskesmas Puger	1.092.119.122,03
77	Puskesmas Rambipuji	1.039.051.125,75
78	Puskesmas Rowotengah	917.177.149,65
79	Puskesmas Sabrang	815.493.018,09
80	Puskesmas Semboro	811.878.078,34
81	Puskesmas Silo I	920.442.241,28
82	Puskesmas Silo Ii	847 801.529,07
83	Puskesmas Sukorambi	856.138.393,75
84	Puskesmas Sukorejo	977.153.573,28
85	Puskesmas Sukowono	1.127 717.095,47
86	Puskesmas Sumberbaru	973 457 253,87
87	Puskesmas Sumberjambe	1.315 320 350,43
88	Puskesmas Sumbersari	1.281.936.914,57
89	Puskesmas Tanggul	1.446 182.223,34
90	Puskesmas Tembokrejo	549 286.146,14
91	Puskesmas Tempurejo	887.081.444,38
92	Puskesmas Umbulsari	1.010.288.062,18
93	Puskesmas Wuluhan	1.305.192.556,61
TOTAL (Rp)		48.530.029.281,95

c. Pengurangan persediaan tahun 2023 sebesar **Rp465.286.887.192,09** merupakan akumulasi pengurangan persediaan yang tercatat dalam Aplikasi Sistem Infromasi Persediaan Daerah (SIPERDA) dan pengurangan persediaan yang tercatat secara manual (*excel*), dengan rincian sebagai berikut :

SIPERDA	Rp	156.472.576.319,15
MANUAL	Rp	308.814.310.872,94
JUMLAH	**Rp**	**465.286.887.192,09**

Pengurangan persediaan tahun 2023 tersebut terdiri dari :

1)	Pemakaian persediaan yang bersumber dari APBD	Rp	124.734.250.978,35
2)	Pemakaian persediaan yang bersumber dari BLUD	Rp	121.414.863.650,00
3)	Pemakaian persediaan yang bersumber dari Hibah	Rp	5.795.556.222,90
4)	Pemakaian persediaan yang bersumber dari BTT	Rp	66.666.250,00
5)	Pemakaian persediaan yang bersumber dari BOS	Rp	76.848.903.316,00
6)	Pemakaian persediaan yang bersumber dari koreksi belanja modal	Rp	903,402,821.00
7)	Pemakaian Persediaan dari mutasi antar OPD	Rp	44.559.838.747,88
8)	Pemakaian persediaan yang bersumber dari Hutang	Rp	35.062.841.518,11
9)	Persediaan kadaluarsa/usang/rusak	Rp	5.735.674.405,90
10)	Pengurangan persediaan dikarenakan koreksi ke belanja modal	Rp	2.010.361.500,00
11)	Pengurangan Persediaan dikarenakan mutasi antar OPD	Rp.	48.154.527.781,94

Pengurangan persediaan tahun 2023 tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1) Pemakaian persediaan yang bersumber dari APBD sebesar **Rp124.734.250.978,35** merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari belanja persediaan pada perangkat daerah dan hutang persediaan pada tahun 2023. Rincian pemakaian persediaan yang bersumber dari APBD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Pemakaian persediaan yang bersumber dari APBD

NO	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Bahan bangunan dan konstruksi	12.728.580.468,00
2	Bahan kimia	1.321.828.249,57
3	Bahan bakar dan pelumas	16.089.883.905,00
4	Bahan baku	1.324.755 600,00
5	Bahan/bibit tanaman	317 692.825,00
6	Isi tabung pemadam kebakaran	30 761 925,00
7	Isi tabung gas	40 514.550,00
8	Bahan lainnya	1.812.052.091,00
9	Suku cadang alat angkutan	3.285.173.607,00
10	Suku cadang alat besar	141.449 000,00
11	Suku cadang alat kedokteran	25 941.938,00
12	Suku cadang alat laboratorium	9.608.700,00

NO	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
13	Suku cadang alat pertanian	678.154.700,00
14	Suku cadang alat bengkel	57.023.500,00
15	Suku cadang lainnya	376.394.747,00
16	Alat tulis kantor	4.311.960.939,99
17	Kertas dan cover	3.099.836.320,50
18	Bahan cetak	10.900.106.892,00
19	Benda pos	614.727.205,00
20	Persediaan dokumen/administrasi tender	12.807.500,00
21	Bahan komputer	3.857.713.862,60
22	Perabot kantor	2.359.517.670,40
23	Alat listrik	2.270.665.204,03
24	Perlengkapan dinas	12.000.720.222,00
25	Perlengkapan pendungkung olah raga	653.834.916,00
26	Suvenir/cendera mata	2.681 800.709,00
27	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	1 278.663 996,00
28	Obat	3.593.019.457,36
29	Obat-obatan lainnya	641.964.809,00
30	Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	34 728.831.428,90
31	Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya	39.500 000,00
32	Natura	2.619 369.186,00
33	Pakan	353.350.000,00
34	Natura dan pakan lainnya	284.802.854,00
35	Komponen lainnya	191.242.000,00
TOTAL		124.734.250.978,35

2) Pemakaian persediaan yang bersumber dari BLUD sebesar **Rp121.414.863.650,00** merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari belanja persediaan pada perangkat daerah dan hutang persediaan pada tahun 2023. Rincian pemakaian persediaan yang bersumber dari APBD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Bahan bangunan dan konstruksi	89.015.764,00
2	Bahan kimia	16.672.281.552,45
3	Bahan bakar dan pelumas	2 891 409 235,00
4	Isi tabung pemadam kebakaran	85.533.835,00
5	Isi tabung gas	360 513.466,00
6	Bahan lainnya	33.853.894 808,40
7	Suku cadang alat angkutan	308.470.341,00
8	Suku cadang alat kedokteran	1.026 182 331,20

NO	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
9	Alat tulis kantor	2.146.409.636,60
10	Kertas dan cover	269.129.375,00
11	Bahan cetak	4.542.860.908,88
12	Benda pos	150.451.499,90
13	Persediaan dokumen/administrasi tender	100.000,00
14	Bahan komputer	869.662.091,66
15	Perabot kantor	1.158.669.282,00
16	Alat listrik	1.243.256.601,40
17	Perlengkapan dinas	1.282.178.183,00
18	Perlengkapan pendungkung olah raga	6.061.710,00
19	Suvenir/cendera mata	180.675.893,00
20	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	3.333.098.373,45
21	Obat	38.718.408.350,42
22	Obat-obatan lainnya	10.188.505.219,21
23	Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya	8 313 125,00
24	Natura	2.029.782.067,43
TOTAL (Rp)		121.414.863.650,00

3) Pemakaian persediaan yang bersumber dari hibah sebesar **Rp5.795.556.222,90** merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari penerimaan hibah pada OPD. Rincian pemakaian persediaan yang bersumber dari penerimaan persediaan dari hibah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Pemakaian Persediaan Yang Bersumber Dari Hibah

NO	NAMA OPD	NILAI (Rp)
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	3.760.688.487,00
2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	891.453.550,00
3	Dinas Kesehatan	801.016.097,20
4	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan	201.712.000,00
5	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	65.465.529,00
6	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	75 220.559,70
TOTAL (Rp)		5.795.556.222,90

4) Pemakaian persediaan yang bersumber dari BTT sebesar Rp66.666.250,00 merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Rincian pemakaian sisa persediaan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah sebagai berikut:

Tabel Pemakaian sisa Persediaan yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga (BTT)

NO	NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bahan bangunan dan konstruksi	2 542 500,00
		Bahan kimia	250.000,00
		Bahan lainnya	40 122 250,00

NO	NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
		Alat listrik	12.501.500,00
		Perlengkapan dinas	11.250.000,00
TOTAL			66.666.250,00

5) Pemakaian persediaan yang bersumber dari BOS dan BOP PAUD sebesar **Rp76.848.903.316,00** merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri serta PAUD Negeri yang berada di wilayah kerja Dinas Pendidikan kabupaten Jember. Rincian Pemakaian persediaan yang bersumber dari BOS tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Pemakaian Persediaan Yang Bersumber Dari BOS dan BOP PAUD

NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
Dinas Pendidikan	Bahan Bangunan dan Konstruksi	15.526.356.787,00
	Bahan kimia	57.066.459,00
	Bahan Bakar dan Pelumas	51.767.948,00
	Bahan-bibit Tanaman	451.340 125,00
	Bahan baku	632 237 795 00
	Isi tabung pemadam kebakaran	860 000,00
	Isi tabung gas	74 487.780,00
	Suku cadang alat laboratorium	9.757.500,00
	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	23 447.150,00
	Suku cadang alat pertanian	4.678.500,00
	Alat tulis kantor	28 017 817 463,00
	Kertas dan Cover	6 164 413 791,00
	Bahan cetak	4.670.908.602,00
	Benda pos	446.335.600,00
	Bahan komputer	4.438 274.161,00
	Perabot kantor	8.057 504.953,00
	Alat listrik	2.638.021.864,00
	Perlengkapan dinas	476 485.509,00
	Perlengkapan pendukung olahraga	2 845 206 820,00
	Souvenir cinderamata	68.006.360,00
	Obat	1.980.528.809,00
	Natura	150 371.450,00
	Komponen peralatan	43.751.540,00
	Komponen Rambu-rambu	244 200,00
	Pipa air besi tuang (dci)	2 566.000,00
	Pipa baja	5 627.500,00

NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
	Pipa plastik pvc (upvc)	10.838.650,00
TOTAL (Rp)		76.848.903.316,00

6) Pemakaian persediaan yang bersumber dari koreksi belanja modal sebesar **Rp903.402.821,00** merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari tindakan korektif atas realisasi belanja modal tahun 2023 yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap sehingga dikoreksi menjadi Persediaan. Adapun rincian pemakaian persediaan yang bersumber dari koreksi belanja modal tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Pemakaian Persediaan Yang Bersumber dari Koreksi Belanja Modal

NO	NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	25.215.000,00
2	Bagian Umum	Bahan komputer	900.000,00
3	Dinas Pendidikan	Bahan lainnya	2.010.000,00
		Bahan komputer	69 987.655,00
		Alat listrik	3.410.000,00
		Perlengkapan dinas	37.619.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	Alat listrik	595.574.000,00
		Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	148.950.000,00
5	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	7 500.000,00
6	Puskesmas Ajung	Perabot kantor	27.000,00
7	Puskesmas Ambulu	Bahan lainnya	502.056,00
8	Puskesmas Curahnongko	Bahan cetak	72.000,00
9	Puskesmas Ledokombo	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	3.698.520,00
10	Puskesmas Patrang	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	3 865 000,00
11	Puskesmas Panti	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	4 072 590,00
TOTAL			903.402.821,00

7) Pemakaian persediaan dari mutasi antar OPD yang diserahkan kepada masyarakat sebesar **Rp44.559.838.747,88** dengan rincian OPD sebagai berikut :

NO	NAMA OPD	NILAI (Rp)
1	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	132.497.500,00
2	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	28.453.000,00
3	Kecamatan Jenggawah	3.076.000,00
4	Kecamatan Jombang	4.614.000,00

NO	NAMA OPD	NILAI (Rp)
5	Kecamatan Kalisat	4.614.000,00
6	Kecamatan Pakusari	7.690.000,00
7	Kecamatan Panti	3.076.000,00
8	Kecamatan Silo	1.538.000,00
9	Puskesmas Ajung	1.450.875.102,66
10	Puskesmas Ambulu	1.353.623.919,48
11	Puskesmas Andongsari	531.911.461,21
12	Puskesmas Arjasa	674.251.430,01
13	Puskesmas Balung	685.353.765,44
14	Puskesmas Bangsalsari	1.333.069.447,41
15	Puskesmas Banjarsengon	640.589.959,56
16	Puskesmas Cakru	529.539 629,56
17	Puskesmas Curahnongko	627.025.218,27
18	Puskesmas Gladakpakem	664 127 095,37
19	Puskesmas Gumukmas	843.103.659,12
20	Puskesmas Jelbuk	594.166.994,26
21	Puskesmas Jember Kidul	943.047.057,74
22	Puskesmas Jenggawah	733 154.109,88
23	Puskesmas Jombang	778.124.410,04
24	Puskesmas Kalisat	1 644.038 057,30
25	Puskesmas Kaliwates	976.172.245,96
26	Puskesmas Karangduren	787.861.901,46
27	Puskesmas Kaslyan	807.511.106,57
28	Puskesmas Kemuningsari Kidul	674.365 566,73
29	Puskesmas Kencong	1.144.455.997,07
30	Puskesmas Klatakan	632.474 792,29
31	Puskesmas Ledokombo	1.049.909 856,51
32	Puskesmas Lojejer	874.262.303,55
33	Puskesmas Mangli	820.450 951,82
34	Puskesmas Mayang	833.567 489,56
35	Puskesmas Mumbulsari	1.046 068 898,10
36	Puskesmas Nogosari	550.969.181,13
37	Puskesmas Pakusari	1.260.331 589,64
38	Puskesmas Paleran	645.376 553,82
39	Puskesmas Panti	946.030.165,31
40	Puskesmas Patrang	875.477.978,72
41	Puskesmas Puger	990.596 619,66

NO	NAMA OPD	NILAI (Rp)
42	Puskesmas Rambipuji	912.719.829,71
43	Puskesmas Rowotengah	915.919.076,95
44	Puskesmas Sabrang	706.939.265,85
45	Puskesmas Semboro	788.806.680,49
46	Puskesmas Silo I	846.460.676,50
47	Puskesmas Silo Ii	761.805.851,47
48	Puskesmas Sukorambi	795.434.130,25
49	Puskesmas Sukorejo	440.123.889,14
50	Puskesmas Sukowono	1.092.429.497,61
51	Puskesmas Sumberbaru	951.429.423,20
52	Puskesmas Sumberjambe	1.107.425.227,97
53	Puskesmas Sumbersari	1.252.505.091,18
54	Puskesmas Tanggul	1.279.024.733,25
55	Puskesmas Tembokrejo	454.293.565,30
56	Puskesmas Tempurejo	802.262 525,56
57	Puskesmas Umbulsari	1.067 710 516,01
58	Puskesmas Wuluhan	1 257 105 752,24
TOTAL (Rp)		44.559.838.747,88

8) Pemakaian persediaan yang bersumber dari hutang sebesar **Rp35.062.841.518,11** merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari hutang persediaan. Adapun pengurangan hutang Pemakaian persediaan yang bersumber dari hutang terinci sebagai berikut :

Tabel Pemakaian Persediaan Yang Bersumber Dari Hutang

NO	NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	Obat	4,052,263,680.84
		Obat lainnya	4,488,487,728.70
2	Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr Soebandi	Bahan kimia	5,328,610,869.99
		Bahan lainnya	12,286,158,960 94
		Obat	8.093.858.016 29
3	Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalisat	Bahan lainnya	530 710 545,22
		Obat	282 751.716,13
TOTAL (Rp)			35.062.841.518,11

9) Persediaan kadaluarsa/usang/rusak sebesar **Rp5.735.674.405,90** merupakan pengurangan persediaan yang disebabkan karena adanya persediaan yang kadaluarsa/usang/rusak, bukan

karena pemakaian persediaan. Rincian persediaan kadaluarsa tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Persediaan Kadaluarsa/Usang/Rusak

NO	NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Bahan cetak	4.498.639.812,00
2	Dinas Kesehatan	Bahan kimia	413.101.065,01
		Suku cadang alat kedokteran	32.390.000,00
		Obat	709.037.875,47
2	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	Obat	3.046.729,00
		Obat-obatan lainnya	873.23,.00
3	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	Bahan lainnya	377.700,00
		Obat	29.673 284,16
4	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	Bahan lainnya	3.244 800,00
		Obat	45.289 909,26
TOTAL			5.735.674.405,90

10) Pengurangan persediaan dikarenakan koreksi ke belanja modal sebesar **Rp2.010.361.500,00** merupakan persediaan yang dikarenakan kesalahan perencanaan anggaran belanja pada perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Koreksi ke Belanja Modal

NO	NAMA OPD	NILAI (Rp)
1	Bagian Administrasi Pembangunan	228.835.000,00
2	Bagian Tata Pemerintahan	8.459.000,00
3	Bagian Umum	5.383 000,00
4	Inspektorat Kabupaten	79.600.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.614.000,00
6	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	11 599 000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.790.000,00
8	Badan Pendapatan Daerah	43.800.000,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.228 000,00
10	Dinas Pendidikan	7.690 000,00
11	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.344.469.500,00
12	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan	37.110.000,00
13	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	76.900.000,00
14	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	7.690.000,00
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9.228.000,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.076.000,00

NO	NAMA OPD	NILAI (Rp)
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.307.000,00
18	Kecamatan Ajung	3.076.000,00
19	Kecamatan Ambulu	3.076.000,00
20	Kecamatan Arjasa	3.076.000,00
21	Kecamatan Balung	3.076.000,00
22	Kecamatan Bangsalsari	3.076.000,00
23	Kecamatan Gumukmas	3.076.000,00
24	Kecamatan Jelbuk	3.076.000,00
25	Kecamatan Kaliwates	4.614.000,00
26	Kecamatan Kencong	4.614.000,00
27	Kecamatan Ledokombo	3.076 000,00
28	Kecamatan Mayang	4.614.000,00
29	Kecamatan Mumbulsari	3.076.000,00
30	Kecamatan Pakusari	1.538 000,00
31	Kecamatan Panti	3.076.000,00
32	Kecamatan Patrang	4.614.000,00
33	Kecamatan Puger	4 614 000,00
34	Kecamatan Rambipuji	4 614 000,00
35	Kecamatan Semboro	4.614 000,00
36	Kecamatan Silo	3.076 000,00
37	Kecamatan Sukorambi	3 076 000,00
38	Kecamatan Sukowono	3 076.000,00
39	Kecamatan Sumberbaru	4.614.000,00
40	Kecamatan Sumberjambe	4.614.000,00
41	Kecamatan Sumbersari	4.614 000,00
42	Kecamatan Tanggul	4.614.000,00
43	Kecamatan Tempurejo	3.076 000,00
44	Kecamatan Umbulsari	3 076.000,00
45	Kecamatan Wuluhan	3.076 000,00
46	Puskesmas Ambulu	4.230 000,00
47	Puskesmas Mangli	3 845 000,00
TOTAL (Rp)		2.010.361.500,00

11) Pengurangan persediaan dikarenakan Mutasi antar OPD sebesar **Rp48.154.527.781,94** pada Dinas Kesehatan Berupa bahan kimia, isi tabung gas, bahan lainnya, suku cadang alat

kedokteran, bahan cetak, perlengkapan dinas, obat yang diserahkan ke 50 puskesmas (BLUD) dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan berupa Tenda yang diserahkan kepada OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember.

Tabel Pengurangan Mutasi Antar OPD

NO	NAMA OPD	NILAI (Rp)
1	Dinas Kesehatan	48.102.235.781,94
2	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	52.292 000,00
TOTAL (Rp)		48.154.527.781,94

Saldo akhir persediaan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp66.989.567.819,22** merupakan akumulasi saldo akhir persediaan yang tercatat dalam Aplikasi Sistem Infromasi Persediaan Daerah (SIPERDA) dan saldo akhir persediaan yang tercatat secara manual (excel), dengan rincian sebagai berikut :

SIPERDA	Rp	20.544.561.098,68
MANUAL	Rp	46.445.006.720,54
JUMLAH	**Rp**	**66.989.567.819,22**

Saldo akhir persediaan tersebut berdasarkan hasil *stock opname* dapat dirinci per jenis persediaan sebagai berikut:

Tabel Rincian Persediaan Per Jenis Persediaan

No.	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Bahan bangunan dan konstruksi	1.150.896.173,00
2	Bahan kimia	7.656 468.718,82
3	Bahan bakar dan pelumas	35.959 975,00
4	Bahan/bibit tanaman	47.749 850,00
5	Isi tabung pemadam kebakaran	6 609 280,00
6	Isi tabung gas	13 139 150,00
7	Bahan lainnya	10 983 240 884,63
8	Suku cadang alat angkutan	62.310.500,00
9	Suku cadang alat kedokteran	857 532 076,15
10	Suku cadang alat pertanian	1 861 000,00
11	Suku cadang alat bengkel	660.000,00
12	Alat tulis kantor	1.272 636 290,10
13	Kertas dan cover	483 572.894,00
14	Bahan cetak	2.488 264 976,83
15	Benda pos	39.553.500,00

No.	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
16	Persediaan dokumen/administrasi tender	478.500,00
17	Bahan komputer	685.201.810,22
18	Perabot kantor	812.570.758,93
19	Alat listrik	3.616.206 101,60
20	Perlengkapan dinas	1.194.824.730,00
21	Perlengkapan pendungkung olah raga	746.000,00
22	Suvenir/cendera mata	201.654.000,00
23	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	570.203.666,13
24	Obat	22.342.410.163,18
25	Obat-obatan lainnya	2.167.435.194,62
26	Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	10.051 807 349,75
27	Natura	121 481.376,26
28	Natura dan pakan lainnya	124 092.900,00
TOTAL (Rp)		66.989.567.819,22

Untuk jenis persediaan yang saldo persediaannya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 tidak ditampilkan dalam rincian tabel diatas.

Selain persediaan sebagaimana telah dijelaskan diatas, terdapat persediaan Pemerintah Kabupaten Jember yang merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2023 yang kondisinya rusak/usang/kadaluarsa schingga tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan operasional perangkat daerah dan tidak dilaporkan di Neraca sehingga nilainya tidak mempengaruhi saldo akhir persediaan Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2023, sebagaimana dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel Rinclan Persedlaan Rusak/Usang/Kadaluarsa tahun 2022 dan 2023

NO	NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	2022	2023
1	Dinas Kesehatan	Bahan kimia	-	413.101.065,01
		Bahan lainnya	51,746,175.93	51.746.175,93
		Suku cadang alat kedokteran	49,948,800.00	82 338 800.00
		Obat	5,073,514,385.80	5 782 552.261,27
2	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	Obat	139.632.031,69	3 046.729,00
		Obat-obatan lainnya	-	873.231,00
3	Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi	Obat	78,157,710	107.830 994
		Bahan lainnya	-	377 700
4	Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalisat	Bahan lainnya	2.299 275,00	
		Obat	39.733.090,39	3.244.800,00
		Alat tulis kantor	1.921.750,00	45 289.909,26

TOTAL (Rp)	5.436.953.218,81	6.490.401.665,63

Terdapat Penghapusan atas barang persediaan rusak/using/kadaluarsa dengan cara dimusnahkan selama tahun 2023 sebesar Rp4.823.312.665,10 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp4.498.639.812,00 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah No. 188.4/18/SEKDA/1.12/2024 dan pada Rumah Sakit Daerah Balung sebesar Rp139.632.031,69 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah No. 188.4 / 174 / SEKDA / 1.12 / 2023 tanggal 28 Desember 2023 dan pada Rumah Sakit Daerah Kalisat sebesar Rp185.040.821,41 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah No. 188.4 / 147 / SEKDA / 1.12 / 2023 tanggal 26 September 2023 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah No. 188.4 / 50 / SEKDA / 1.12 / 2023.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
140.052.940.901,00	139.771.034.326,17	281.906.574,83	0,20

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp140.052.940.901,00 dan Rp139.771.034.326,17, yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp281.906.574,83 dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Nilai Investasi Jangka Panjang mengalami peningkatan sebesar Rp281.906.574,83 atau 0,20%.

Investasi Jangka Panjang 2023 terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen sebesar Rp140.052.940.901,00 setelah dikurangi oleh penyisihan dana bergulir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023

No	Uraian	2022	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2023
A	Investasi NonPermanen					
1	Dana Bergulir Bank Jatim	1.439.941.702,00	0,00	0,00	53.942.500,00	1.385.999.202,00
2	Dana Bergulir Hewan Ternak	3.005.735.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005.735.000,00
	Jumlah A	4.445.676.702,00	0,00	0,00	53.942.500,00	4.391.734.202,00
B	Investasi Permanen					
1	PDP Kabupaten Jember	34.348.823.094,17	175.746.766,83	0,00	1.445.017.956,00	33.079.551.905,00
2	PDAM Kabupaten Jember	77.455.492.482,00	0,00	1.551.177.764,00	0,00	79.006.670.246,00
3	Bank Jatim	27.966.718.750,00	0,00	0,00	0,00	27.966.718.750,00
	Jumlah B	139.771.034.326,17	175.746.766,83	1.551.177.764,00	1.445.017.956,00	140.052.940.901,00

No	Uraian	2022	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2023
	Jumlah Investasi (A+B)	144.216.711.028,17	175.746.766,83	1.551.177.764,00	1.498.960.456,00	144.444.675.103,00

Adapun tentang masing-masing jenis investasi tersebut dijabarkan sebagai berikut penjelasan:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
a) Investasi Non Permanen	**(Rp)**	**(Rp)**
	0,00	**0,00**

Investasi Non Permanen sebesar Rp0,00 merupakan NRV dari Dana Bergulir senilai Rp4.391.734.202,00 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel Investasi Non Permanen Dana Bergulir per 31 Desember 2023

No	OPD	2022 (Rp)	Pengurangan	(NRV)	2023 (Rp)
1	Dana Bergulir Bank Jatim	1.439.941.702,00	53.942.500,00	0,00	1.385.999.202,00
2	Dana Bergulir Hewan Ternak	3.005.735.000,00	0,00	0,00	3.005.735.000,00
	Jumlah	4.445.676.702,00	53.942.500,00	0,00	4.391.734.202,00

Saldo awal Dana Bergulir Bank Jatim adalah sebesar Rp1.439.941.702,00. pada tahun 2023 terjadi mutasi pengurangan karena adanya pembayaran sebesar Rp53.942.500,00 sehingga saldo akhir sebesar Rp1.385.999.202,00. Dari nilai Rp1.385.999.202,00 tersebut telah disisihkan atau diragukan tertagih sebesar Rp1.385.999.202,00 sehingga NRV yang disajikan dalam neraca adalah Rp0,00.

Saldo awal Dana Bergulir Hewan Ternak sebesar Rp3.005.735.000,00 dan tidak ada mutasi penambahan maupun pengurangan selama tahun 2023. Dari jumlah tersebut terdapat penyisihan atau diragukan tertagih sebesar Rp3.005.735.000,00 sehingga NRV yang disajikan dalam neraca adalah Rp0,00.

31 Desember 2023	31 Desember 2022

b) Investasi Permanen

(Rp)	(Rp)
140.052.940.901,00	139.771.034.326,17

Nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2023 sebesar Rp140.052.940.901,00. Nilai tersebut berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember pada beberapa perusahaan, yang terdiri dari:

Tabel Penyertaan Modal Pemerintah per 31 Desember 2023

No	Uraian	metode pencatatan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	PDP Kabupaten Jember	Metode Ekuitas	33.079.551.905,00	34.348.823.094,17
2	PDAM Kabupaten Jember	Metode Ekuitas	79.006.670.246,00	77 455.492.482,00
3	Bank Jatim	Metode Biaya	27.966.718.750,00	27 966 718 750,00
	Jumlah		140.052.940.901,00	139.771.034.326,17

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp140.052.940.901,00. dalam bentuk penyertaan modal, yang terdiri atas penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Kabupaten Jember, PDAM Kabupaten Jember, dan Bank Jatim. Pencatatan atas penyertaan modal pada PDP Kahyangan Kabupaten Jember dan PDAM (Perumdam Tirta Pandalungan) Kabupaten Jember mengunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan untuk penyertaan modal pada Bank Jatim menggunakan metode biaya (*cost method*). Perbedaan metode pencatatan tersebut dikarenakan jumlah kepemilikan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada masing-masing perusahaan daerah tersebut. Berikut penjelasan penyertaan Investasi Permanen pada perusahan daerah per 31 Desember 2023.

1. **Pada PDP Kahyangan Kabupaten Jember**

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
33.079.551.905,00	34.348.823.094,17	(1.269.271.189,17)	(3,70)

Saldo Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember pada PDP Kahyangan Jember per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp33.079.551.905,00 dan Rp34.348.823.094,17 terjadi penurunan sebesar Rp1.269.271.189,17 atau 3,70%.

PDP Kahyangan Jember telah didirikan sejak tahun 1969 berdasarkan perda nomor 1 tahun 1969. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember pada PDP Kahyangan terbaru dilakukan di tahun 2020 sesuai Perda nomor 5 tahun 2020 sebesar Rp5.800.000.000,00. Porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Jember pada PDP Kahyangan Jember per 31 Desember 2023 adalah sebesar 100%.

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember pada PDP Kahyangan Jember per 31 Desember 2023 berdasarkan informasi Laporan Keuangan PDP Kahyangan Jember Tahun 2023 unaudited. Rincian perubahan ekuitas PDP Kahyangan Jember Tahun 2023 unaudited adalah sebagai berikut :

Tabel Penyertaan Modal Pemerintah Pada PDP Kahyangan per 31 Desember 2023

No	Uralan	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Modal Pemerintah Jember	16.885.227.715,00	-	-	16.885.227.715,00
2	Disvestasi Kebun Kelajik ke koperasi Kelajik Makmur	(870.868.101,54)	-	-	(870.868.101,54)
3	Penggunaan Cadangan Umum	2.715.000.000,00	-	-	2.715.000.000,00
4	Cadangan	16.495.455.092,53	-	773.401.132,00	15.722.053.960,53
5	Laba/Rugi Tahun Berjalan	(875.991.611,82)	-	671.616.824,00	(1.547.608.435,82)
6	Koreksi Audited	-	175.746.766,83	-	175.746.766,83
Total Ekuitas PDP		**34.348.823.094,17**	**175.746.766,83**	**1.445.017.956,00**	**33.079.551.906,00**

Mutasi tambah sebesar Rp175.746.766,83 adalah koreksi tambah saldo awal penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah pada Laporan Keuangan Audited PDP Kahyangan Jember Tahun 2022. Mutasi Kurang sebesar Rp1.445.017.956,00 berasal dari:

1. Penggunaan dana cadangan sebesar Rp773.401.132,00 untuk keperluan sosial dan pendidikan di tahun 2023;
2. Penambahan jumlah kerugian tahun 2023 sebesar Rp671.616.824,00;

2. Pada PDAM Kabupaten Jember

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
79.006.670.246,00	77.455.492.482,00	1.551.177.764,00	2,00

Saldo penyertaan modal pemerintah kabupaten Jember pada PDAM Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp79.006.670.245,00 dan Rp77.455.492.482,00 terjadi kenaikan sebesar

Rp1.551.177.763,00 atau 2,00 %.

PDAM Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember telah didirikan sejak tahun 1975 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1975. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember pada PDAM Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember terbaru dilakukan di tahun 2020 sebesar Rp15.000.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan, Pelaksanaan dan Tata cara Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jember dan Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/382.1/1.12/2019 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020.

Porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Jember pada PDAM Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember per 31 Desember 2022 adalah sebesar 100% dan telah dinyatakan oleh Direktur sesuai surat pernyataan Nomor 690/390/436.62/2022 tanggal 11 April 2022.

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember pada PDAM Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember per 31 Desember 2023 berdasarkan informasi Laporan Keuangan PDAM Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember Tahun 2023 Audited Rincian perubahan ekuitas PDAM Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember Tahun 2023 audited adalah sebagai berikut :

Tabel Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM per 31 Desember 2023

No	Uraian	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Modal Pemerintah Jember	41.778.656.151,00	-	-	41.778.656.151,00
2	Modal Pemerintah Pusat	1.592.999.981,00	-	-	1.592.999.981,00
3	Hibah	388.376.559,00	-	-	388.376.559,00
4	Penyertaan Pemerintah Yang Belum Jelas Statusmya	38.410.657.752,00	-	-	38 410 657 752,00
5	Akumulasi Laba (Rugi)	(4.715.197.961,00)	7.686.111.999,00	6.134.934.235,00	(3.164.020 197,00)
Total Ekuitas PDAM		77.455.492.482,00	7.686.111.999,00	6.134.934.235,00	79.006.670.246,00

Mutasi tambah sebesar Rp7.686.111.999,00 merupakan keuntungan tahun 2023. Mutasi Kurang sebesar Rp6.134.934.235,00 berasal dari:

1. Pencadangan laba ke kewajiban lainnya sebesar Rp3.503.760.351,00

2. Bagi Laba Pemerintah Daerah 55% dari tahun 2022 Rp2.411.909.394,00;
3. Pembayaran jasa produksi tahun 2022 sebesar Rp219.264.490,00.

3. **Pada Bank Jatim**

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
27.966.718.750,00	27.966.718.750,00	-	-

Saldo Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember pada Bank Jatim per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp27.966.718.750,00 dan Rp27.966.718.750,00. tidak terjadi kenaikan maupun penurunan nilai penyertaan modal dari awal berdiri sampai tahun 2023.

5.3.1.3 Aset Tetap

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Tetap	**5.721.644.054.344,41**	**5.867.262.523.776,79**

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.721.644.054.344,41 dan Rp5.867.262.523.776,79. Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 berasal dari nilai perolehan sebesar Rp10.998.105.354.653,00 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset tetap sebesar Rp5.276.461.300.308,57. Ringkasan aset tetap disajikan sebagai berikut:

ASET TETAP	SALDO AKHIR 2022 Audited	SALDO AKHIR 2023 Audited	KENAIKAN/PENURUNAN (%)
Tanah	1.498.329.559 476,54	1 497 631.646.038,32	(0,05)
Peralatan dan Mesin	1.562.606.902.989,04	1.700.939.457.597,54	8,85
Gedung dan Bangunan	2.508.073.007.620,45	2.338.714.217.138,97	(6,75)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.901.659.726.280,67	5.181.979.525.235,39	5,72
Aset Tetap Lainnya	226.968.749.377,39	253.570.816.528,51	11,72
Konstruksi dalam Pengerjaan	25.115.446.180,91	25.269.692 114,25	0,61
NILAI PEROLEHAN	10.722.753.391.925,00	10.998.105.354.652,98	2,57
Akumulasi Penyusutan	4.855.490.868.148,21	5.276.461.300.308,57	8,67
NILAI BUKU	5.867.262.523.776,79	5.721.644.054.344,41	(2,48)

Nilai aset tetap per 31 Desember 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp275.351.962.727,99 atau 2,57%. Kenaikan aset tetap berasal dari Peralatan Mesin, Jalan,Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya.

Adapun rincian Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.721.644.054.344,41 dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	Rp	10.722.753.391.925,00
Penambahan Tahun 2023	Rp	568.572.834.297,42
Jumlah	**Rp**	**11.291.326.226.222,42**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	293.220.871.569,44
Aset Tetap per 31 Desember 2023	**Rp**	**10.998.105.354.652,98**
Penyusutan s/d Tahun 2023	Rp	5.276.461.300.308,57
Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2023	**Rp**	**5.721.644.054.344,41**

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2023 tersebut meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya. Jenis dan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Aset Tetap

NO	JENIS ASET	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
1	Tanah	1.498.329.559.476,54	0,00	697 913.438,22	1 497 631 646.038,32
2	Peralatan dan Mesin	1.562.606.902.989,04	147.749.147.330,65	9.416.592.722,15	1 700 939.457.597,54
3	Gedung dan Bangunan	2.508.073.007.620,45	77.015.006.029,69	246.373.796.511,17	2 338.714.217.138,97
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.901.659.726.280,67	284.957.933.375,73	4.638.134.421,01	5 181.979.525.235,39
5	Aset Tetap Lainnya	226.968.749.377,39	58.149.824.628,00	31.547.757.476,88	253.570.816.528,51
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	25.115.446.180,91	700.922.933,34	546.677.000,00	25.269.692.114,25
NILAI ASET		10.722.753.391.925,00	568.572.834.297,42	293.220.871.569,43	10.998.105.354.652,98
Akumulasi Penyusutan		4.855.490.868.148,21	460.661.982.416,38	39.691.550.256,02	5 276.461.300.308,57
NILAI BUKU		5.867.262.523.776,79	107.910.851.881,04	253.529.321.313,41	5.721.644.054.344,41

Saldo dan mutasi Aset Tetap pada masing-masing jenis per 31 Desember 2023 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase

1.497.631.646.038,32	1.498.329.559.476,54	697.913.438,22	0,05

Nilai Aset Tetap-Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.497.631.646.038,32 dan Rp1.498.329.559.476,54. Terjadi Penurunan nilai Aset Tetap-Tanah dibandingkan tahun lalu sebesar Rp697.913.438,22 atau sebesar 0,05%. Penurunan nilai Aset Tetap tanah ini karena telah dihibahkan dan adanya pengurangan koreksi.

Perhitungan nilai Aset Tetap-Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.497.631.646.038,32 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	:	1.498.329.559.476,54
Penambahan Tahun 2023	:	0,00
Jumlah	:	**1.498.329.559.476,54**
Pengurangan Tahun 2023	:	697.913.438,22
Nilai AT-Tanah Tahun 2023	:	**1.497.631.646.038,32**

Mutasi Aset Tetap-Tanah pada tahun 2023 secara terinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel Mutasi Aset Tetap–Tanah

JENIS ASET TETAP	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Tanah	1.498.329.559.476,54	0,00	697 913 438,22	1.497.631.646.038,32
Jumlah	1.498.329.559.476,54	0,00	697.913.438,22	1.497.631.646.038,32

Pada Tahun 2023, tidak terdapat penambahan tanah namun terdapat penambahan bidang tanah sebanyak 25 (dua puluh lima) bidang dikarenakan adanya pemecahan bidang tanah sesuai dengan kondisi lapangan berupa tanah untuk jalan pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jember.

Pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp697.913.438,22 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp682.901.098,22 karena telah dihibahkan sebanyak 2 (dua) bidang tanah kepada Kepolisian Republik Indonesia Resor Jember sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten jember Nomor 35 Tahun 2022 tentang Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember kepada Kepolisian Resor Jember dan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/72/1.12/2023 seluas 15.332 M^2 dan 17.359 M^2 dengan nilai Rp645.000.000,00. Terdapat Hibah sebagian tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 36 Tahun 2022 tentang Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemerintah Daerah

Kabupaten Jember kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/71/1.12/2023 dengan nilai Rp37.901.098,22 seluas 5.764 M².

2. Pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp15.012.340,00 merupakan koreksi atas biaya-biaya persiapan pengadaan tanah yang tidak terealisasi pembeliannya pada Bagian Tata Pemerintahan;
3. Adanya koreksi pengurangan jumlah tanah sebanyak 16 (enam belas) bidang tanah, terdiri dari 3 (tiga) unit yang merupakan pengurangan akibat koreksi atas belanja atas biaya persiapan pengadaan tanah namun tidak terealisasi pengadaan tanahnya pada tahun 2015, sebanyak 2 (dua) unit merupakan belanja barang dan jasa yang telah dikapitalisasikan ke aset tanahnya serta sebanyak 11 (sebelas) unit dilakukan koreksi karena bernilai Rp0,00 merupakan tanah milik PTPN dan Tanah Kas Desa.

Aset Tetap-Tanah Tahun 2023 sebesar Rp1.497.631.646.038,32 tersebut merupakan akumulasi dari keseluruhan nilai tanah milik Pemerintah Kabupaten Jember yang jumlahnya mencapai 6.210 bidang. Dari seluruh bidang tanah tersebut terdapat 858 bidang tanah yang telah bersertifikat sedangkan sisanya sebanyak 5.352 bidang tanah belum bersertifikat. Adapun Aset Tetap-Tanah Tahun 2023 sebesar Rp1.497.631.646.038,32 tersebut dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Sebanyak 6.210 bidang milik Pemerintah Kabupaten Jember, seluruhnya telah digunakan/ dimanfaatkan dalam rangka optimaliasi barang milik daerah tanpa mengubah status kepemilikan namun sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Jember belum menetapkan status penggunaan atas barang milik daerah. Rincian atas penggunaan dan pemanfaatan Aset Tetap-Tanah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Tetap-Tanah

NO	KODE	URAIAN	JUMLAH
1	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	252
2	1 3 1 01.01 01 012	Dst - Tanah G Tempat Tinggal	10
3	1.3.1.01.01.04.026	Dst.. - Tanah Bangunan Tempat Kerja	36
4	1.3.1.01.03.07.001	Tanah Untuk Jalan Nasional	19
5	1.3.1.01.02.07.001	Tanah Usaha	94
6	1.3.1.01.03.17.001	Tanah Kampung.	2
7	1.3.1.01.02.02.002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	15
8	1.3.1.01.01.06.001	Tanah Untuk Bangunan Masjid	1
9	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1 013
10	1.3.1.01.02.06.003	Tanah Padang Semak Belukar	1
11	1.3.1.01.01.02.006	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/Motel	1
12	1.3.1.01.02.01.003	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	2
13	1.3.1.01.01.01.005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	6
14	1.3 1 01 03.08 005	Alam Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	5

NO	KODE	URAIAN	JUMLAH
15	1.3.1.01.03.08.007	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	1
16	1.3.1.01.02.01.005	Tanah Sawah Irigasi	4
17	1.3.1.01.01.05.001	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	11
18	1.3.1.01.01.06.007	Dst.. - Tanah Bangunan Tempat Ibadah	4
19	1.3.1.01.01.01.004	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	4
20	1.3.1.01.02.03.002	Tanah Kebun Induk	15
21	1.3.1.01.01.02.003	Tanah Bangunan Gudang	17
22	1.3.1.01.02.02.001	Tanah Tegalan	1
23	1.3.1.01.03.08.006	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	1
24	1.3.1.01.02.06.002	Tanah Padang Rumput	3
25	1.3.1.01.03.13.003	Dst.. - Tanah Untuk Taman	2
26	1.3.1.01.01.04.004	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	6
27	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	180
28	1.3.1.01.01.02.013	Tanah Bangunan Apotik	3
29	1.3.1.01.02.06.001	Tanah Padang Alang-Alang	2
30	1.3.1.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	51
31	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	2 747
32	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	918
33	1.3.1.01.01.02.007	Tanah Bangunan Terminal Darat	12
34	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1
35	1.3.1.01.01.02.001	Tanah Bangunan Pasar	41
36	1.3.1.01.01.04.012	Tanah Bangunan Kandang Hewan	1
37	1.3.1.01.03.07.011	Dst.. - Tanah Untuk Jalan	39
38	1.3.1.01.01.04.013	Tanah Bangunan Bangunan Pembibitan	5
39	1.3.1.01.01.01.003	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	2
40	1.3.1.01.03.03.003	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	6
41	1.3.1.01.01.04.014	Tanah Bangunan Rumah Pendingin	1
42	1.3.1.01.01.04.003	Tanah Bangunan Rumah Sakit	8
43	1.3.1.01.03.12.005	Tanah Untuk Makam Umum	4
44	1.3.1.01.03.18.002	Dst.. - Emplasment	1
45	1.3.1.01.03.01.025	Dst.. - Tanah Lapangan Olah Raga	7
46	1.3.1.01.03.01.005	Tanah Lapangan Sepak Bola	14
47	1.3.1.01.03.07.004	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	641
TOTAL			6.210

2. Nilai 858 bidang tanah sebesar Rp321.110.338.157,00 merupakan bidang tanah yang telah bersertifikat. Rincian Aset Tetap-Tanah yang telah bersertifikat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel Aset Tetap-Tanah Yang Bersertifikat

NO	OPD	TANAH BERSERTIFIKAT		
		JUMLAH	LUAS (m2)	NILAI (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	1	1.933	2.899.500.000,00

NO	OPD	TANAH BERSERTIFIKAT		
		JUMLAH	LUAS (m2)	NILAI (Rp)
2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	4	51.161	2.282.832.000,00
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	140	3.358.854	73.896.164.397,00
4.	Bagian Tata Pemerintahan	5	96.598	11.522.171.700,00
5.	Bagian Umum	5	24.195	8.606.700.000,00
6.	Dinas Kesehatan	4	8.336	379.857.000,00
7.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	2	17.479	4.359.741.000,00
8.	Dinas Pendidikan	463	1.878.994	101.256.293.460,00
9.	Dinas Perhubungan	8	34.763	3.032.109.000,00
10	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	39	179.239	39.191.516.432,00
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	6	7.879	2.820.378.000,00
12	Dinas Perikanan	3	40.026	2.325.281.640,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	5	7.396	1.777.558.658,00
14	Dinas Sosial	1	249	785 000 000,00
15	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	16	176.196	5.095.396.000,00
16	Dinas Tenaga Kerja	1	4.101	2.041.809.000,00
17	Kecamatan Arjasa	1	1.330	68 500 000,00
18	Kecamatan Balung	2	12.727	235 338 000,00
19	Kecamatan Bangsalsari	2	17.998	685 934 000,00
20	Kecamatan Jelbuk	3	13.471	56 326 700,00
21	Kecamatan Jenggawah	2	100.400	249 395 500,00
22	Kecamatan Jombang	1	2.000	120 000 000,00
23	Kecamatan Kalisat	1	3.725	931 250 000,00
24	Kecamatan Kaliwates	18	49.494	5 898 671 250,00
25	Kecamatan Mayang	1	2.061	192 650 000,00
26	Kecamatan Mumbulsari	2	8.382	30 506 000,00
27	Kecamatan Pakusari	3	6 822	1 286 316 000,00
28	Kecamatan Panti	3	16.240	144.147.800,00
29	Kecamatan Patrang	23	97.704	1 989 554 700,00
30	Kecamatan Rambipuji	4	11.453	2 810 318 500,00
31	Kecamatan Silo	1	2.253	22.288.000,00
32	Kecamatan Sukorambi	1	366	1 289.000,00
33	Kecamatan Sukowono	2	5.606	52.879.000,00
34	Kecamatan Sumberbaru	2	569	74.169.000,00
35	Kecamatan Sumberjambe	3	3.722	62.922.000,00
36	Kecamatan Sumbersari	23	86.943	5.649.908.270,00
37	Kecamatan Tanggul	4	16.500	2 387.009 000,00
38	Kecamatan Tempurejo	1	1 284	38 520 000,00
39	Kecamatan Wuluhan	1	2.027	500.000 000,00
40	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	2	9.981	3 994.492 000,00
41	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	3	35.134	17 169.619 000,00
42	Sekretariat Dewan Atau Dprd	1	4.774	4 938 850 000,00
43	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	2.580	1 290.000 000,00
44	Puskesmas Ajung	1	605	162 100 000,00
45	Puskesmas Arjasa	3	5.058	105 479.900,00
46	Puskesmas Balung	1	11.960	30.000.000
47	Puskesmas Bangsalsari	1	960	55 770.000
48	Puskesmas Banjarsengon	2	948	262 330.000
49	Puskesmas Gladakpakem	2	765	70 400.000
50	Puskesmas Gumukmas	1	2.108	138 000.000
51	Puskesmas Jelbuk	1	473	118 300.000
52	Puskesmas Jenggawah	2	2.197	421 525.000
53	Puskesmas Jombang	1	7.877	20 454.750

NO	OPD	TANAH BERSERTIFIKAT		
		JUMLAH	LUAS (m2)	NILAI (Rp)
54	Puskesmas Kalisat	1	562	50.000.000
55	Puskesmas Kaliwates	2	11.045	1.219.000.000
56	Puskesmas Klatakan	1	1.104	183.630.000
57	Puskesmas Ledokombo	1	3.186	75.000.000
58	Puskesmas Mangli	1	717	150.000.000
59	Puskesmas Mayang	2	2.169	316.800.000
60	Puskesmas Pakusari	1	942	182.013.240
61	Puskesmas Panti	1	1.713	156.200.000
62	Puskesmas Patrang	2	1.940	457.125.000
63	Puskesmas Rambipuji	1	6.770	92.397.000
64	Puskesmas Rowotengah	1	1	177.000.000
65	Puskesmas Sabrang	1	1.232	1.188.883.260
66	Puskesmas Silo 1	1	1	130 000.000
67	Puskesmas Sukorejo	2	2.954	47 077 000
68	Puskesmas Sukowono	1	2.524	1.309 870.000
69	Puskesmas Sumberbaru	1	1	177 000.000
70	Puskesmas Sumberjambe	2	1 366	73 116 000
71	Puskesmas Sumbersari	4	397	319 160 000
72	Puskesmas Tanggul	2	7.626	261 543 000
73	Puskesmas Umbulsari	1	507	7 000.000
TOTAL		858	6.482.653	321.110.338.157,00

Dari 858 bidang tanah yang telah bersertifikat, sebanyak 36 bidang tanah bukan atas nama Pemerintah Kabupaten Jember. Rincian Pemegang Hak atas tanah pada Sertifikat Hak Pakai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel Pemegang Hak Atas Tanah Pada Sertifikat Hak Pakai

NAMA PEMEGANG HAK ATAS TANAH PADA SERTIFIKAT HAK PAKAI	JUMLAH BIDANG TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER	
Pemerintah Kabupaten Jember	822
JUMLAH	822
BUKAN ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER	
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pusat Di Jakarta	1
Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur	16
Kemendikbud	12
Departemen Kesehatan Republik Indonesia	1
Departemen Transmigrasi Republik Indonesia	2
Departemen Perdagangan Republik Indonesia	1
Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia	1
BUKAN ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER	
Departemen Pertanian Republik Indonesia	2
JUMLAH	36

TOTAL	858

3. Sebanyak 5352 bidang tanah belum bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp1.176.521.816.381,32. Rincian Aset Tetap-Tanah yang belum bersertifikat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel Aset Tetap-Tanah Yang Belum Bersertifikat

NO	OPD	JUMLAH BIDANG	NILAI
1	Badan Pendapatan Daerah	1	5.400.000.000,00
2	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	1	910 000 000,00
3	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	1	100.000.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	300.000.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30	7.299.364 200,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	8	759.355.400,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2	787.602 500,00
8	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2	589.370 000,00
9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	643	41 787 690 865,29
10	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	66	9.375 515 636,11
11	Baglan Tata Pemerintahan	1	144 000 000,00
12	Bagian Umum	1	679 000 000,00
13	Dinas Kesehatan	1	100 000,00
14	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1	670 000 000,00
15	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	1	577 000 000,00
16	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Km	3	65 150 000,00
17	Dinas Pendidikan	586	88 474 004.189
18	Dinas Perhubungan	5	3 337 320 000,00
19	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	5	6.947.917.900,00
20	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	10	4.505 487 000,00
21	Dinas Perikanan	5	895.463 400,00
22	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	2.502	845.487.531 367,55
23	Dinas Sosial	2	6.919.500 000,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	2	719.000 000,00
25	Dinas Tenaga Kerja	-	0,00
26	Kecamatan Ajung	36	1.521.135 000,00
27	Kecamatan Ambulu	47	951 981 800,00
28	Kecamatan Arjasa	24	518.409 000,00
29	Kecamatan Balung	33	439.140 000,00
30	Kecamatan Bangsalsari	57	937 456 850,00
31	Kecamatan Gumukmas	29	710 228 000,00
32	Kecamatan Jelbuk	32	795 278 500,00
33	Kecamatan Jenggawah	36	813.466 700,00
34	Kecamatan Jombang	39	783 488 000,00
35	Kecamatan Kalisat	36	1 586 572 300,00
36	Kecamatan Kaliwates	159	39 750.677 000,00
37	Kecamatan Kencong	18	301.474 000,00
38	Kecamatan Ledokombo	24	554 640 000,00

NO	OPD	JUMLAH BIDANG	NILAI
39	Kecamatan Mayang	32	660.245.500,00
40	Kecamatan Mumbulsari	36	524.233.000,00
41	Kecamatan Pakusari	45	6.297.974.000,00
42	Kecamatan Panti	33	229.625.000,00
43	Kecamatan Patrang	177	19.233.711.700,00
44	Kecamatan Puger	39	710.030 000,00
45	Kecamatan Rambipuji	47	3.322.122 751,68
46	Kecamatan Semboro	45	1.158.612 120,00
47	Kecamatan Silo	37	2.053.800.000,00
48	Kecamatan Sukorambi	32	2.739.179.500,00
49	Kecamatan Sukowono	17	921.978.000,00
50	Kecamatan Sumberbaru	37	553.750 000,00
51	Kecamatan Sumberjambe	13	231.930 000,00
52	Kecamatan Sumbersari	33	10.966.260 800,00
53	Kecamatan Tanggul	29	3 251.915 000,00
54	Kecamatan Tempurejo	35	324 509 500,00
55	Kecamatan Umbulsari	40	1.106.407 200,00
56	Kecamatan Wuluhan	39	605 641 952,69
57	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	1	4.786 507 000,00
58	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	1	53 665 000,00
59	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	3	1 371 957 000,00
60	Sekretariat Dewan Atau Dprd	-	0,00
61	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	0,00
62	Puskesmas Ajung	-	0,00
63	Puskesmas Ambulu	1	500.000 000,00
64	Puskesmas Andongsari	2	135.600 000,00
65	Puskesmas Arjasa	4	31.720 000,00
66	Puskesmas Balung	1	10.000 000,00
67	Puskesmas Bangsalsari	4	35.569 140,00
68	Puskesmas Banjarsengon	-	0,00
69	Puskesmas Cakru	1	30 320 100 000,00
70	Puskesmas Curahnongko	2	36 000 000,00
71	Puskesmas Gladakpakem	1	167.440.000,00
72	Puskesmas Gumukmas	3	40.000 000,00
73	Puskesmas Jelbuk	-	0,00
74	Puskesmas Jenggawah	2	108 000 000,00
75	Puskesmas Jombang	8	112 454 750,00
76	Puskesmas Kalisat	10	57 152 600,00
77	Puskesmas Kaliwates	2	220 000 000,00
78	Puskesmas Karangduren	5	190 900 000,00
79	Puskesmas Kasiyan	2	35.000.000,00
80	Puskesmas Kencong	4	120 225 000,00
81	Puskesmas Kemuningsari	3	4 443 412 420,00
82	Puskesmas Jember Kidul	4	198 500 000,00

NO	OPD	JUMLAH BIDANG	NILAI
83	Puskesmas Klatakan	1	20.000.000,00
84	Puskesmas Ledokombo	5	104.000.000,00
85	Puskesmas Mangli	1	20.000.000,00
86	Puskesmas Mayang	5	62.270.000,00
87	Puskesmas Mumbulsari	7	90.000.000,00
88	Puskesmas Nogosari	2	266 900.000,00
89	Puskesmas Pakusari	4	69.200.000,00
90	Puskesmas Paleran	4	61.999.840,00
91	Puskesmas Panti	4	66.600 000,00
92	Puskesmas Patrang	1	110.000.000,00
93	Puskesmas Puger	7	257.965.000,00
94	Puskesmas Rambipuji	6	61 000 000,00
95	Puskesmas Rowotengah	3	180 000 000,00
96	Puskesmas Sabrang	-	0,00
97	Puskesmas Semboro	1	35.120.000,00
98	Puskesmas Silo 1	2	90.000.000,00
99	Puskesmas Silo 2	1	150.560.000,00
100	Puskesmas Sukorejo	5	30.900.000,00
101	Puskesmas Sukowono	1	250.000.000,00
102	Puskesmas Sumberbaru	2	193.600.000,00
103	Puskesmas Sumberjambe	3	23.000.000,00
104	Puskesmas Sumbersari	-	0,00
105	Puskesmas Tanggul	1	60.000.000,00
106	Puskesmas Tembokrejo	3	18.735.500,00
107	Puskesmas Tempurejo	1	15.000.000,00
108	Puskesmas Umbulsari	2	22.000.000,00
Total		5.352	1.176.521.307.881,32

Dari 5.352 bidang tanah yang belum bersertifikat, sebanyak 124 bidang tanah masih dalam proses sertifikasi di Kantor Pertanahan Jember. Dalam proses sertifikasi tanah terdapat 3 tahapan yakni tahap pendaftaran ukur, tahap pemberian hak, dan tahap penertbitan SK Hak. Pada tahap pendaftaran ukur dilakukan pendaftaran berkas di Kantor Pertanahan Jember kemudian dilakukan pengukuran bidang tanah sesuai dengan berkas yang diajukan. Hasil dari tahapan ini adalah Peta Bidang Tanah (PBT).

Pada tahap pemberian Hak dilakukan verifikasi atas hasil pengukuran PBT oleh Panitia A yang beranggotakan unsur Kantor Pertanahan Jember. Hasil dari tahapan ini adalah SK Hak. Selanjutnya pada tahap Penerbitan SK Hak, dilakukan pendaftaran atas SK Hak yang sudah terbit untuk diterbitkan Sertifikat Hak Pakai. Saat ini dari 63 bidang tanah yang masih dalam proses sertifikasi di Kantor Pertanahan Jember seluruhnya berada dalam tahap pendaftaran ukur.

4. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan upaya pemanfaatan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas 38 bidang tanah dengan pendapatan sebesar Rp742.710.478,00 dan telah disetorkan keseluruhan ke rekening Kas Daerah . Pemanfaatan aset tanah dilakukan melalui mekanisme sewa, sesuai dengan Surat Persetujuan Bupati Jember Nomor 028/2975/35.09.412/2023 perihal Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah. Rincian Aset Tetap Tanah yang telah digunakan atau dimanfaatkan dalam rangka Optimalisasi PAD disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel Aset Tetap Tanah dengan Optimalisasi PAD

NO	LOKASI BIDANG	NAMA PENYEWA	JANGKA WAKTU	LUAS	NILAI SEWA
1	Desa Kalimrawan	AW	2 tahun	48.750	131 430.000
2	Kelurahan Tegal Besar	AB	2 tahun	16.658	44 976.600
3	Kelurahan Antirogo	AIT	1 tahun	10.709	18.290.972
4	Kelurahan Antirogo	AIT	1 tahun	3.250	4.598.750
5	Kelurahan Kaliwates	BS	1 tahun	5.129	5.498.288
6	Kelurahan Bintoro	IH	4 tahun	2.785	15 039 000
7	Kelurahan Tegal Besar	IBS	2 tahun	10.000	27 000.000
8	Kelurahan Kaliwates	Ks	1 tahun	2 538	3 847 608
9	Desa Wirowongso	MW	1 tahun	44 682	34 895 800
10	Kelurahan Tegal Besar	MY	1 tahun	6 300	8 379 000
11	Desa Ajung	NHY	1 tahun	1.322	1 758.260
12	Desa Ajung	NHY	1 tahun	3.318	4 412.940
13	Kelurahan Bintoro	PA	4 bulan	3 500	1 750.000
14	Kelurahan Sempusari	PA	4 bulan	4.795	2 397.500
15	Kelurahan Sempusari	PA	4 bulan	2.928	1.464.000
16	Desa Kemuning Lor	RBK	2 tahun	53.715	150 402.000
17	Desa Karangpring	RBK	2 tahun	20.313	55.251.360
18	Kelurahan Antirogo	RPN	1 tahun	3.600	4 798.800
19	Desa Arjasa	Tf	2 tahun	10.490	36.190.500
20	Desa Karangpring	TK	2 tahun	11.970	32 558.400
21	Desa Ajung	TG	1 tahun	3.036	6 223.800
22	Desa Ajung	TG	1 tahun	117	239.850
23	Desa Ajung	TG	1 tahun	4.792	9 823.600
24	Desa Ajung	TG	1 tahun	996	2 041.800
25	Desa Ajung	TG	1 tahun	7.347	15 061 350
26	Desa Ajung	TG	1 tahun	181	371.050
27	Desa Ajung	TG	1 tahun	2 607	5 344 350
28	Desa Ajung	TG	1 tahun	1.474	3 021.700
29	Desa Ajung	TG	1 tahun	969	1 986 450
30	Desa Ajung	TG	1 tahun	649	1 330.450
31	Desa Ajung	TG	1 tahun	2.317	4 749.850
32	Desa Ajung	TG	1 tahun	925	1 896 250

NO	LOKASI BIDANG	NAMA PENYEWA	JANGKA WAKTU	LUAS	NILAI SEWA
33	Desa Ajung	TG	1 tahun	3.512	7 199.600
34	Desa Ajung	TG	1 tahun	3.228	6.617.400
35	Desa Ajung	TG	1 tahun	4.303	8.821.150
36	Desa Ajung	TG	1 tahun	7.056	14.464.800
37	Desa Ajung	TG	1 tahun	1.745	3.577.250
38	Desa Kemuning Lor	AMC	1 tahun	15.000.	15.000.000

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
1.700.939.457.597,54	1.562.606.902.989,04	138.332.554.608,50	8,85%

Nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.700.939.457.597,54 dan Rp1.562.606.902.989,04. Terjadi kenaikan nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin dibandingkan tahun lalu sebesar Rp138.332.554.608,50 atau sebesar 8,85%.

Perhitungan nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.700.939.457.597,54 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.562.606.902.989,04
Penambahan Tahun 2023	Rp	147.749.147.330,65
Jumlah	**Rp**	**1.710.356.050.319,69**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	9.416.592.722,15
Nilai AT-Peralatan dan Mesin Tahun 2023	**Rp**	**1.700.939.457.597,54**

Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 secara terinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

NO	JENIS AT-PERALATAN DAN MESIN	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
1	Alat Besar	32.638.616.477,00	1.827.043.110,00	2.005.377.500,00	32.460 282 087,00
2	Alat Angkutan	271.574.760.875,21	19.066.902.000,00	1.451.095.388,00	289 190 567.487,21
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	13.628.147.296,00	596.714.568,00	34.810.000,00	14 190 051 864,00
4	Alat Pertanian	12.051.814.976,00	355.813.510,00	0,00	12 407 628 486,00

NO	JENIS AT-PERALATAN DAN MESIN	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	350.758.611.235,37	48.350.168.110,65	2.210.353.435,14	396.898.425.910,89
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	51.068.941.787,58	1.593.201.099,00	146.648.044,00	52.515.494.842,58
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	427.881.190.344,65	37.519.153.855,00	168.712.107,00	465.231.632.092,65
8	Alat Laboratorium	83.895.533.848,07	1.050.235.157,00	72.602.540,00	84.873.166.465,07
9	Alat Persenjataan	1.980.749.360,00	24.620.000,00	187.389.000,00	1.817.980.360,00
10	Komputer	278.272.834.832,65	29.205.873.546,00	1.642.223.708,01	305.836.484.670,64
11	Alat Eksplorasi	78.703.250,00	0,00	0,00	78.703.250,00
12	Alat Pengeboran	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
13	Alat Keselamatan Kerja	1.959.066.342,00	1.002.277.875,00	33.900.000,00	2.927.444.217,00
14	Alat Peraga	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15	Peralatan Proses/Produksi	10.820.189,00	910.000.000,00	0,00	920.820.189,00
16	Rambu – Rambu	36.300.595.776,50	5.896.254.200,00	1.293.216.000,00	40.903.633.976,50
17	Peralatan Olah Raga	494.816.399,00	350.890.300,00	170.265.000,00	675.441.699,00
	JUMLAH	**1.562.606.902.989,04**	**147.749.147.330,65**	**9.416.692.722,15**	**1.700.939.457.697,54**

Penjelasan Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin selama tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penambahan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp147.749.147.330,65 terdiri dari :

1) Belanja modal Aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp79.716.522.691,50 terdiri dari belanja peralatan dan mesin berupa Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Komputer, Peralatan Proses/Produksi, Rambu-rambu, dan Peralatan Olahraga. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023.

2) Penambahan dari Hibah sebesar Rp24.984.468.850,00 terdiri dari penambahan hibah tahun 2023 di Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Komputer dan Alat Keselamatan Kerja senilai Rp24.581.471.026,00 dan sebelum tahun 2023 di Dinas Kesehatan dan Dinas PU Bina Marga pada Alat Angkutan dan Alat Kedokteran dan Kesehatan senilai Rp402.997.824,00. Alat Angkutan berupa 1 (satu) unit mobil pick-up dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah No. 020/4834/203.5/2023 tanggal 22 Mei 2023 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah No. 020/4833/203.5/2023 tanggal 22 Mei 2023. Alat Kedokteran

dan Kesehatan serta Alat Laboratorium merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan RI, Komputer merupakan hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, sedangkan Alat Keselamatan kerja merupakan hibah dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Tabel Penambahan Hibah - Peralatan dan Mesin Tahun 2023

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Penambahan Hibah dari Komonterian Kesehatan RI			
1	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Dinas kesehatan	23.871.700.000,00
2	Alat Laboratorium	Dinas kesehatan	101.972.026,00
SUB TOTAL			**23.973.672.026,00**
Penambahan Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur			
1	Komputer	Dinas kesehatan	173.049.000,00
SUB TOTAL			**173.049.000,00**
Penambahan Hibah dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk			
1	Alat Keselamatan Kerja	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	434.750.000,00
SUB TOTAL			**434.750.000,00**
TOTAL			24.581.471.026,00

Tabel Penambahan Hibah - Peralatan dan Mesin Sebelum Tahun 2023

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Penambahan Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur			
1	Alat Angkutan	Dinas PU Bina Marga dan SDA	156.048.000,00
SUB TOTAL			**156.048.000,00**
Penambahan Hibah dari Komonterian Kesehatan RI			
1	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Dinas kesehatan	246.949.824,00
SUB TOTAL			**246.949.824,00**
TOTAL			402.997.824,00

3) Penambahan Hutang sebesar Rp1.505.682,00 merupakan penambahan Aset Tetap-Peralatan Mesin yang berasal dari pengakuan hutang atas barang yang belum terbayar pada BLUD-Puskesmas Cakru.
4) Penambahan Koreksi Tahun 2023 - Koreksi dari Belanja Barang Jasa sebesar Rp839.105.932,00 terdiri dari Koreksi dari Persediaan sebesar Rp412.693.000,00, Koreksi dari BOP PAUD sebesar Rp52.565.480,00, dan Koreksi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp426.412.932,00. Koreksi tersebut merupakan belanja barang yang memenuhi kriteria Aset Tetap.
5) Penambahan Koreksi Atas Belanja Barang Tahun Sebelumnya sebesar Rp11.839.368.364,15 terdiri dari Koreksi dari Jasa Pelayanan sebesar Rp28.970.000,00, Koreksi dari Persediaan sebesar Rp253.199.000,00, Koreksi dari

Penyesuaian Angka Dibelakang Koma sebesar Rp8,15, dan Pembayaran Hutang BTT sebesar Rp11.557.199.356,00. Koreksi tersebut merupakan belanja barang yang memenuhi kriteria Aset Tetap pada tahun sebelumnya, sedangkan pembayaran Hutang BTT merupakan pelaksanaan putusan pengadilan atas belanja wastafel tahun 2020.

6) Penambahan dari Reklasifikasi Antar Akun senilai Rp30.368.175.811,00 terdiri dari Penambahan Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp2.265.437.414,00 yang terdiri dari Penambahan Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan Tahun 2023 senilai Rp2.255.637.414,00 dan Penambahan Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan Sebelum Tahun 2023 senilai Rp9.800.000,00, Penambahan Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp27.848.966.205,00 yang terdiri dari Penambahan Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2023 senilai Rp27.327.217.928,00 dan Penambahan Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya Sebelum Tahun 2023 senilai Rp521.748.277,00, Penambahan Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud tahun 2023 sebesar Rp152.145.692,00, Penambahan Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain tahun 2023 sebesar Rp73.000.000,00 dan Penambahan Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023 sebesar Rp28.626.500,00.

Tabel Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Reklas Dari Gedung Dan Bangunan Tahun 2023			
1	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas Pendidikan	1.695.461.000,00
2	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	560.176.414,00
	SUB TOTAL		2.255.637.414,00
Reklas Dari Gedung Dan Bangunan Sebelum Tahun 2023			
1	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Kecamatan Semboro	9.800.000,00
	SUB TOTAL		9.800.000,00
Reklas Dari Aset Tetap Lainnya Tahun 2023			
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	46.210.000,00
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Dinas Pendidikan	15.794.041.731,00
3	Alat Angkutan	Dinas Pendidikan	15.255.000,00
4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Dinas Pendidikan	8.625.000,00
5	Alat Besar	Dinas Pendidikan	123.964.510,00
6	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Dinas Pendidikan	121.564.800,00
7	Alat Keselamatan Kerja	Dinas Pendidikan	327.599.875,00
8	Alat Laboratorium	Dinas Pendidikan	289.005 100,00
9	Alat Persenjataan	Dinas Pendidikan	24.620 000,00
10	Alat Pertanian	Dinas Pendidikan	136.350.710,00
11	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Dinas Pendidikan	294.081.544,00
12	Komputer	Dinas Pendidikan	10.011.209.358,00
13	Peralatan Olah Raga	Dinas Pendidikan	134.690.300,00

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
	SUB TOTAL		27.327.217.928,00
Reklas Dari Aset Tetap Lainnya Sebelum Tahun 2023			
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Kecamatan Balung	297.033.419,00
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Kecamatan Tanggul	224.714.858,00
	SUB TOTAL		521.748.277,00
Reklas Dari Aset Tidak Berwujud Sebelum Tahun 2023			
1	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Ambulu	50.060.500,00
2	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Ambulu	95.854.470,00
3	Alat Laboratorium		6.230.722,00
	SUB TOTAL		152.145.692,00
Reklas Dari Aset Lain-Lain Sebelum Tahun 2023			
1	Alat Angkutan	Kecamatan Panti	73.000.000,00
	SUB TOTAL		73.000.000,00
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi Sebelum Tahun 2023			
1	Komputer	Dinas Pendidikan	25.876.500,00
2	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Dinas Pendidikan	2.750.000,00
	SUB TOTAL		28.626.500,00
	TOTAL		30.368.176.811,00

b. Pengurangan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp9.416.592.722,14 terdiri dari:

1) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp5.284.262.338,00 merupakan pengurangan atas pelaksanaan penghapusan sesuai SK Bupati Jember No. 188.45/260/1.12/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/422/1.12/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember dari Daftar Barang Milik Daerah tanggal 3 Mei 2023, SK Sekretaris Daerah Kabupaten Jember No. 188.45/20/SEKDA/1.12/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Milik Daerah tanggal 16 Januari 2024 pada RSD dr Soebandi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, SK Sekretaris Daerah Kabupaten Jember No. 188.45/170/SEKDA/1.12/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tanggal 5 Desember 2023.

Tabel Koreksi atas Belanja Modal Aset Tetap - Peralatan dan Mesin ke Persediaan

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Alat Besar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.310.000,00

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
2	Alat Besar	Dinas Lingkungan Hidup	1.953.990.000,00
		Sub Total	**2.004.300.000,00**
1	Alat Angkutan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	4.500.000,00
2	Alat Angkutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	142.340.000,00
3	Alat Angkutan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	1.186.755.388,00
4	Alat Angkutan	Dinas Lingkungan Hidup	117.500.000,00
		Sub.Total	**1.451.095.388,00**
1	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.200.000,00
2	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Badan Pendapatan Daerah	7.360.000,00
		Sub Total	**33.560.000,00**
1	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	317.887.500,00
2	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	84.418.500,00
3	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Badan Pendapatan Daerah	186.390.550,00
		Sub Total	**588.696.550,00**
4	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	72.300.000,00
5	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.993.300,00
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Badan Pendapatan Daerah	7.200.000,00
		Sub Total	**101.493.300,00**
1	Alat Persenjataan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	187.269.000,00
		Sub Total	**187.269.000,00**
1	Komputer	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	393.172.000,00
2	Komputer	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	133.561.100,00
3	Komputer	Badan Pendapatan Daerah	357.215.000,00
		Sub Total	**883.948.100,00**
1	Alat Keselamatan Kerja	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.900.000,00
		Sub Total	**33.900.000,00**
		TOTAL	**5.284.262.338,00**

2) Pengurangan Koreksi Tahun Berjalan atas belanja modal Aset Tetap-Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.307.208.610,00 terdiri dari Koreksi ke Jasa (Pengecatan Jalan) sebesar Rp688.142.000,00 dan Koreksi ke Persediaan sebesar Rp619.066.610,00

Tabel Koreksi Tahun berjalan - Peralatan dan Mesin ke Jasa

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Pengurangan Koreksi Tahun Berjalan - Koreksi ke Jasa (Pengecatan Jalan)			
1	Rambu-Rambu	Dinas Perhubungan	688.142.000,00
		Sub Total	**688.142.000,00**
Pengurangan Koreksi Tahun Berjalan - Koreksi Ke Persediaan			
1	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.980.000,00
2	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.500.000,00
3	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Ajung	27.000,00

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
4	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Curahnongko	72.000,00
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Ledokombo	3.698.520,00
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Panti	4.072.590,00
7	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Patrang	3.865.000,00
		Sub Total	**22.215.110,00**
2	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Tempurejo	377.500,00
		Sub Total	**377.500,00**
1	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Bagian Umum	900.000,00
		Sub Total	**900.000,00**
4	Rambu - Rambu	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	595.574.000,00
		SUB TOTAL	**595.574.000,00**
		TOTAL	**619.066.610,00**

3) Pengurangan Koreksi Ekstrakomtabel sebesar Rp2.027.751.766,00 yang terdiri dari Pengurangan Koreksi Ekstrakomtabel sebelum tahun 2023 sebesar Rp28.500.000,00, dan Pengurangan Ekstrakomtabel tahun 2023 sebesar Rp1.999.251.766,00. Aset Tetap-Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember harus dikeluarkan dari KIB/neraca dan dicatat secara terpisah sebagai ekstrakomtabel. Hal sehingga akan mengurangi nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin yang telah tercatat pada KIB/neraca. Rincian dari koreksi tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel Koreksi atas Belanja Modal Aset Tetap - Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomtabel Tahun 2023

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Alat Besar	Dinas Pendidikan	1.077.500,00
		Sub Total	**1.077.600,00**
1	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Dinas Pendidikan	1.250.000,00
		SUB TOTAL	**1.250.000,00**
1	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas Pendidikan	1.495.878.605,00
2	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	2.500.000,00
3	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Kecamatan Mumbulsari	165.000,00
4	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Ajung	275.000,00
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Curahnongko	9.970.000,00
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Ledokombo	6.973.000,00
7	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Mumbulsari	10.930.170,00
8	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Semboro	3.040.000,00
9	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Sumberbaru	660.000,00
		Sub Total	**1.530.391.775,00**

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Bagian Administrasi Pembangunan	4.800.000,00
2	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Dinas Pendidikan	29.629.744,00
3	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Dinas Komunikasi Dan Informatika	730.000,00
4	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Kecamatan Balung	3.120.000,00
5	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Kecamatan Sukorambi	2.475.000,00
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Kecamatan Tempurejo	3.500.000,00
		Sub Total	**44.254.744,00**
1	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Dinas Pendidikan	596.000,00
2	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Ajung	23.494.620,00
3	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Ambulu	12.198.958,00
4	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Andongsari	300.000,00
5	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Arjasa	300.000,00
6	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Balung	300.000,00
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Bangsalsari	300.000,00
8	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Banjarsengon	300.000,00
9	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Cakru	300.000,00
10	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Curahnongko	300.000,00
11	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Gladakpakem	1.180.000,00
12	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Gumukmas	13.300.000,00
13	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Jelbuk	300.000,00
14	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Jenggawah	300.000,00
15	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Jombang	2.350.284,00
16	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Kalisat	22.940.000,00
17	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Kaliwates	600.000,00
18	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Karangduren	300.000,00
19	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Kasiyan	300.000,00
20	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Kencong	300.000,00
21	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Kemuningsari	300.000,00
22	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Jember Kidul	300.000,00
23	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Klatakan	300.000,00
24	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Ledokombo	1.778.489,00
25	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Lojejer	5.782.516,00
26	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Mangli	300.000,00
27	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Mayang	300.000,00

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
28	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Mumbulsari	300.000,00
28	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Nogosari	300.000,00
30	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Pakusari	300.000,00
31	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Paleran	300.000,00
32	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Panti	7.230.000,00
33	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Patrang	11.997.000,00
34	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Puger	300.000,00
35	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Rambipuji	300.000,00
36	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Rowolengah	9.300.000,00
37	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sabrang	300.000,00
38	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Semboro	300.000,00
39	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Silo 1	4.923.740,00
40	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Silo 2	300.000,00
41	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sukorambi	300.000,00
42	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sukorejo	300.000,00
43	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sukowono	6.036.000,00
44	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sumberbaru	300.000,00
45	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sumberjambe	300.000,00
46	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sumbersari	300.000,00
47	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Tanggul	300.000,00
48	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Tembokrejo	300.000,00
49	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Tempurejo	5.627.000,00
50	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Umbulsari	300.000,00
51	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Wuluhan	300.000,00
		Sub Total	**139.834.607,00**
1	Alat Laboratorium	Dinas Kesehatan	2.783.320,00
2	Alat Laboratorium	Dinas Pendidikan	59.827.600,00
3	Alat Laboratorium	Puskesmas Ajung	139.166,00
4	Alat Laboratorium	Puskesmas Ambulu	139.166,00
5	Alat Laboratorium	Puskesmas Andongsari	278.332,00
6	Alat Laboratorium	Puskesmas Arjasa	278.332,00
7	Alat Laboratorium	Puskesmas Balung	139.166,00
8	Alat Laboratorium	Puskesmas Bangsalsari	278.332,00
9	Alat Laboratorium	Puskesmas Banjarsengon	278.332,00
10	Alat Laboratorium	Puskesmas Cakru	139.166,00
11	Alat Laboratorium	Puskesmas Curahnongko	139.166,00
12	Alat Laboratorium	Puskesmas Gladakpakem	139.166,00

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
13	Alat Laboratorium	Puskesmas Gumukmas	139.166,00
14	Alat Laboratorium	Puskesmas Jelbuk	278.332,00
15	Alat Laboratorium	Puskesmas Jenggawah	139.166,00
16	Alat Laboratorium	Puskesmas Jombang	139.166,00
17	Alat Laboratorium	Puskesmas Kalisat	139.166,00
18	Alat Laboratorium	Puskesmas Kaliwates	278.332,00
19	Alat Laboratorium	Puskesmas Karangduren	278.332,00
20	Alat Laboratorium	Puskesmas Kasiyan	139.166,00
21	Alat Laboratorium	Puskesmas Kencong	139.166,00
22	Alat Laboratorium	Puskesmas Kemuningsari	278.332,00
23	Alat Laboratorium	Puskesmas Jember Kidul	278.332,00
24	Alat Laboratorium	Puskesmas Klatakan	139.166,00
25	Alat Laboratorium	Puskesmas Ledokombo	139.166,00
26	Alat Laboratorium	Puskesmas Lojejer	278.332,00
27	Alat Laboratorium	Puskesmas Mangli	139.166,00
28	Alat Laboratorium	Puskesmas Mayang	278.332,00
28	Alat Laboratorium	Puskesmas Mumbulsari	139.166,00
30	Alat Laboratorium	Puskesmas Nogosari	139.166,00
31	Alat Laboratorium	Puskesmas Pakusari	278.332,00
32	Alat Laboratorium	Puskesmas Paleran	278.332,00
33	Alat Laboratorium	Puskesmas Panti	139.166,00
34	Alat Laboratorium	Puskesmas Patrang	278.332,00
35	Alat Laboratorium	Puskesmas Puger	139.166,00
36	Alat Laboratorium	Puskesmas Rambipuji	139.166,00
37	Alat Laboratorium	Puskesmas Rowotengah	139.166,00
38	Alat Laboratorium	Puskesmas Sabrang	139.166,00
39	Alat Laboratorium	Puskesmas Semboro	139.166,00
40	Alat Laboratorium	Puskesmas Silo 1	139.166,00
41	Alat Laboratorium	Puskesmas Silo 2	139.166,00
42	Alat Laboratorium	Puskesmas Sukorambi	389.166,00
43	Alat Laboratorium	Puskesmas Sukorejo	139.166,00
44	Alat Laboratorium	Puskesmas Sukowono	139.166,00
45	Alat Laboratorium	Puskesmas Sumberbaru	139.166,00
46	Alat Laboratorium	Puskesmas Sumberjambe	417.498,00
47	Alat Laboratorium	Puskesmas Sumbersari	278.332,00
48	Alat Laboratorium	Puskesmas Tanggul	278.332,00
49	Alat Laboratorium	Puskesmas Tembokrejo	278.332,00
50	Alat Laboratorium	Puskesmas Tempurejo	139.166,00
51	Alat Laboratorium	Puskesmas Umbulsari	139.166,00
52	Alat Laboratorium	Puskesmas Wuluhan	278.332,00
		Sub Total	**72.602.540,00**
1	Alat Persenjataan	Dinas Pendidikan	120.000,00
		Sub Total	**120.000,00**
1	Komputer	Dinas Pendidikan	29.955.600,00
		Sub Total	**29.955.600,00**

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Rambu - Rambu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.500.000,00
		Sub Total	9.500.000,00
1	Peralatan Olah Raga	Dinas Pendidikan	12.265.000,00
2	Peralatan Olah Raga	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	158.000.000,00
		SUB TOTAL	170.265.000,00
		TOTAL	1.999.251.766,00

Tabel Koreksi atas Belanja Modal Aset Tetap - Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomtabel Sebelum Tahun 2023

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Dinas Kesehatan	28.500.000,00
		SUB TOTAL	28.500.000,00

4) Pengurangan dari Reklasifikasi Antar Akun aset tetap-peralatan dan mesin sebesar Rp797.370.000,00 merupakan pengurangan aset tetap-peralatan dan mesin yang berasal dari reklasifikasi aset tetap antar akun/antar KIB. Pengurangan Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan Mesin ke Aset lain -lain pada Dinas Pendidikan atas sub akun Alat kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp69.050.000,00 dan Komputer sebesar Rp728.320.000,00.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
2.338.714.217.138,97	2.508.073.007.620,45	(169.358.790.481,48)	6,75%

Nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.338.714.217.138,97 dan Rp2.508.073.007.620,45. Terdapat penurunan nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp169.358.790.481,48 atau sebesar 6,75%

Perhitungan nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp2.327.614.785.939,54 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	2.508.073.007.620,45
Penambahan Tahun 2023	Rp	77.015.006.029,69
Jumlah	**Rp**	**2.585.088.013.650,14**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	246.373.796.511,17
Nilai AT-Gedung dan Bangunan	**Rp**	**2.338.714.217.138,97**

Jumlah tersebut merupakan mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari:

Tabel Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan

NO	JENIS	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
1	Bangunan Gedung	2.480.277.162.480,45	75.011.834.066,69	246.373.796.511,17	2.308.915.200.035,97
2	Monumen	1.194.214.000,00	0,00	0,00	1.194.214.000,00
3	Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	26.601.631.140,00	2.003.171.963,00	0,00	28.604.803.103,00
TOTAL		2.508.073.007.620,45	77.015.006.029,69	246.373.796.511,17	2.338.714.217.138,97

Penambahan Nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp77.015.006.029,69 tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1) Penambahan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal merupakan penambahan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan yang berasal dari realisasi belanja modal yang telah dianggarkan pada OPD yang bersangkutan. Rincian penambahan nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan dari belanja modal tahun 2023 sebesar Rp54.635.641.878,00 yang terdiri dari penambahan gedung baru dan rehabilitasi gedung dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel Belanja Modal Aset Tetap-Gedung dan Bangunan

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Bangunan Gedung	Bagian Umum	2.906.591.785,00	14 Bangunan Rehabilitasi
2	Bangunan Gedung	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	887.619.400,00	4 Bangunan Baru
3	Bangunan Gedung	Badan Pendapatan Daerah	1.904.160.600,00	10 Bangunan Baru
4	Bangunan Gedung	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	178.114.000,00	1 Bangunan Baru
5	Bangunan Gedung	Dinas Pendidikan	27.458.470.552,00	62 Bangunan Baru 67 Bangunan Rehabilitasi
6	Bangunan Gedung	Dinas Perhubungan	199.250.000,00	2 Bangunan Baru
7	Bangunan Gedung	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	495.927.000,00	4 Bangunan Rehabilitasi
8	Bangunan Gedung	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	7.402.349.470,00	2 Bangunan Baru
9	Bangunan Gedung	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	432.775.300,00	2 Bangunan Rehabilitasi 1 Bangunan Baru
10	Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	9.905.165.000,00	44 Bangunan Baru 20 Bangunan Rehabilitasi
11	Bangunan Gedung	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.240.941,00	1 Bangunan Rehabilitasi
12	Bangunan Gedung	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	439.204.713,00	3 Bangunan Rehabilitasi
13	Bangunan Gedung	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	280.702.968,00	7 Bangunan Rehabilitasi
14	Bangunan Gedung	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	576.714.000,00	2 Bangunan Rehabilitasi
15	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	1.528.356.149,00	1 Bangunan Baru
TOTAL			54.635.641.878,00	

2) Penambahan dari Hutang sebesar Rp2.355.250,00 merupakan penambahan atas pengakuan belanja konsultan pengawasan yang belum terbayar pada RSD Balung.

3) Penambahan koreksi dari belanja pemeliharaan sebesar Rp17.357.363.347,94 merupakan penambahan yang berasal dari koreksi kapitalisasi belanja pemeliharaan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Tahun 2023 senilai Rp16.524.437.307,60 dan koreksi kapitalisasi belanja pemeliharaan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Sebelum Tahun 2023 senilai Rp 832.926.040,34. Rincian disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel Koreksi dari belanja pemeliharaan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Tahun 2023

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
		Penambahan Koreksi Dari Belanja Pemeliharaan	
1	Bangunan Gedung	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	156.367.000,00
2	Bangunan Gedung	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	117.273.470,00
3	Bangunan Gedung	Badan Pendapatan Daerah	4 195.823.863,00
4	Bangunan Gedung	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	121.600.000,00
5	Bangunan Gedung	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	426.483.800,00
6	Bangunan Gedung	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	907.722.374,00
7	Bangunan Gedung	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	356.478.607,00
8	Bangunan Gedung	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	78.748.950,56
9	Bangunan Gedung	Kecamatan Bangsalsari	37.375.000,00
10	Bangunan Gedung	Kecamatan Gumukmas	121.411.949,60
11	Bangunan Gedung	Kecamatan Patrang	177.263.700,00
12	Bangunan Gedung	Kecamatan Rambipuji	19.047.000,00
13	Bangunan Gedung	Kecamatan Semboro	34.264.000,00
14	Bangunan Gedung	Kecamatan Tanggul	54.543.419,00
15	Bangunan Gedung	Puskesmas Jelbuk	55.985.962,00
16	Bangunan Gedung	Puskesmas Kaliwates	59.490.450,00
17	Bangunan Gedung	Puskesmas Ledokombo	20.500.000,00
18	Bangunan Gedung	Puskesmas Paleran	32.062.350,00
19	Bangunan Gedung	Puskesmas Sumbersari	99.151.971,00
20	Bangunan Gedung	Puskesmas Tempurejo	43.858.875,00
21	Bangunan Gedung	Puskesmas Wuluhan	64.170.969,00
22	Bangunan Gedung	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	147.260.548,00
23	Bangunan Gedung	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	34.299.700,00
	Bangunan Gedung	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	24.605.093,00
	Bangunan Gedung	Dinas Lingkungan Hidup	20.954.580,00
	Bangunan Gedung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	47.757.121,00
	Bangunan Gedung	Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	679.472.436,00
	Bangunan Gedung	Dinas Perhubungan	502.573.530,00
	Bangunan Gedung	Dinas Perikanan	52.631.000,00
	Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	1.574.307.005,00
	Bangunan Gedung	Dinas Sosial	860.117.000,00

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Penambahan Koreksi Dari Belanja Pemeliharaan			
	Bangunan Gedung	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan	49.900.000,00
	Bangunan Gedung	Inspektorat	105.107.500,00
	Bangunan Gedung	Kecamatan Jelbuk	29.199.719,44
	Bangunan Gedung	Kecamatan Jombang	81.614.150,00
	Bangunan Gedung	Kecamatan Ledokombo	67.968.000,00
	Bangunan Gedung	Kecamatan Pakusari	75.543.500,00
	Bangunan Gedung	Kecamatan Silo	33.246.000,00
	Bangunan Gedung	Kecamatan Sumberjambe	26.180.600,00
	Bangunan Gedung	Dinas Kesehatan	976.137.176,00
	Bangunan Gedung	Dinas Pendidikan	3.481.123.125,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Dinas Lingkungan Hidup	219.495.000,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	90.871.814,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan	164.449.000,00
TOTAL			**16.524.437.307,60**

Tabel Koreksi dari belanja pemeliharaan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Sebelum Tahun 2023

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Penambahan Koreksi Dari Belanja Pemeliharaan			
1	Bangunan Gedung	Dinas Kesehatan	825.866.165,34
2	Bangunan Gedung	Dinas Perhubungan	7.059.875,00
TOTAL			**832.926.040,34**

4) Penambahan Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp2.486.884.086,00 terdiri dari Penambahan Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023 senilai Rp2.089.912.086,00 pada OPD Badan Pendapatan Daerah, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta RSD dr. Soebandi dan Penambahan Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi sebelum tahun 2023 senilai Rp396.972.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA.

Tabel Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap-Gedung dan Bangunan

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Roklas Dari Jalan, Jaringan Dan Irigasi (KIB D) Tahun 2023			
1	Bangunan Gedung	Badan Pendapatan Daerah	199.256.000,00
2	Bangunan Gedung	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.663.189.114,00
3	Bangunan Gedung	Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi	227.466.972,00
TOTAL			***2.089.912.086,00***
Roklas Dari Jalan, Jaringan Dan Irigasi (KIB D) Sebelum Tahun 2023			
1	Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA	396.972.000,00
TOTAL			**396.972.000,00**

5) Penambahan Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebelum tahun 2023 sebesar Rp2.532.761.466,88 merupakan Aset renovasi atas Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari pelaksanaan pekerjaan fisik oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya pada Kecamatan Balung sebesar Rp1.451.101.644,71 dan Kecamatan Tanggul sebesar Rp1.081.659.822,17.

Pengurangan Nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp246.373.796.511,17 tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1) Pengurangan Aset karena penghapusan Gedung sebesar Rp41.530.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Portal sebesar Rp11.530.000,00 berdasarkan SK Sekretaris Daerah No. 188.4/20/SEKDA/1.12/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan Dan Mesin dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Jember dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp30.000.000,00 berdasarkan SK Sekretaris Daerah No. 188.4/137/SEKDA/1.12/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (Pembongkaran Pustu Patempuran Kalisat).
2) Pengurangan Hutang sebesar Rp215.359.363,00 merupakan koreksi atas pengakuan hutang pada tahun sebelumnya pada RSD Balung.
3) Koreksi Pengurangan ke Persediaan sebesar Rp148.950.000,00 merupakan koreksi atas Belanja Modal berupa barang persediaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.
4) Koreksi Pengurangan karena Kekurangan Volume sebesar Rp5.157.637,00 merupakan hasil pemeriksaan Inspektorat sehingga mengurangi nilai aset pada RSD Balung.
5) Koreksi Pengurangan (Sebelum Tahun 2023) - Koreksi ke Ekstracomtabel sebesar Rp8.906.320,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atas aset yang tidak memenuhi batas kapitalisasi.
6) Koreksi Pengurangan (Sebelum Tahun 2023) - Koreksi ke Jasa (Biaya Perkara Pengadilan) sebesar Rp865.000,00 atas pengakuan hutang tahun 2022 pada RSD Balung. Bahwa terdapat biaya pengadilan yang seharusnya menjadi tanggungan dari RSD Balung selaku pihak tergugat namun dibayarkan oleh pihak penyedia. Pihak penyedia menyatakan tidak akan menagihkan biaya perkara tersebut kepada RSD Balung.
7) Pengurangan aset ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp47.576.000,00 merupakan pengurangan nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan yang pengerjaannya hingga sampai akhir 31 Desember 2023 belum sampai 100% dan harus dipindahkan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

8) Pengurangan dari Reklasifikasi Antar Akun sebesar Rp245.905.452.190,30 merupakan pengurangan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan yang berasal dari reklasifikasi aset tetap antar akun/antar KIB. Penjelasan atas pengurangan dari reklasifikasi antar akun adalah sebagai berikut:

a) Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.265.437.414,00 yang terdiri Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin tahun 2023 senilai Rp2.255.637.414,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp 560.176.414,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp1.695.461.000,00 dan Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin tahun sebelum 2023 di Kecamatan Semboro sebesar Rp9.800.000,00.

b) Reklasifikasi ke Aset Jalan Jaringan dan Irigasi sebelum tahun 2023 sebesar Rp240.231.477.276,30 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp19.013.565.743,00 dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar Rp221.217.911.533,30.

c) Reklasifikasi ke aset tetap lainnya-aset tetap renovasi tahun 2023 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar Rp3.026.493.000,00 dikarenakan terdapat belanja pemeliharaan gedung atas aset yang bukan miliknya.

d) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain tahun 2023 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp382.044.500,00 dikarenakan berupa aset yang telah dihibahkan kepada sekolah swasta.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
5.181.979.525.235,39	4.901.659.726.280,67	280.319.798.955	5,72%

Nilai Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.181.979.525.235,39 dan Rp4.901.659.726.280,67. Terjadi kenaikan nilai Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp280.319.798.955 atau sebesar 5,72%.

Perhitungan nilai Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp5.181.032.966.866,72 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	4.901.659.726.280,67
Penambahan Tahun 2023	Rp	284.957.933.375,73
Jumlah	**Rp**	**5.186.617.659.656,40**

Pengurangan Tahun 2023	Rp	4.638.134.421,01
Nilai AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023	**Rp**	**5.181.979.525.235,39**

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari

Tabel Mutasi Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	JENIS	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	3.324.640.122.931,39	47.325.591.820,43	3.200.911.914,01	3.368.764.802.837,82
2	Bangunan air / Irigasi	1.376.796.942.431,27	15.599.126.050,00	0,00	1.392.396 068.481,27
3	Instalasi	173.963.995.090,00	620.103.972,00	641.531.022,00	173.942.568 040,00
4	Jaringan	26.258.665.828,00	221.413.111.533,30	795.691.485,00	246.876.085.876,30
	TOTAL	**4.901.659.726.280,67**	**284.957.933.375,73**	**4.638.134.421,01**	**5.181.979.525.235,39**

Penambahan Nilai Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp284.957.933.375,73 tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1) Penambahan aset dari belanja Modal merupakan realisasi pengadaan yang berasal dari APBD. Nilai Belanja modal Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.233.220.730,76 terdiri dari:

Tabel Belanja Modal Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Jalan Dan Jembatan	Badan Pendapatan Daerah	199.256.000,00
2	Jalan Dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	16.492.444.602,76
3	Jalan Dan Jembatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	1.663.189.114,00
4	Jalan Dan Jembatan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	9.132.976.792,00
5	Bangunan Air	Dinas Kesehatan	6.438.600.000,00
6	Bangunan Air	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	8.292.105 250,00
7	Bangunan Air	Dinas Perhubungan	199.345.000,00
8	Instalasi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	392.637.000,00
9	Instalasi	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	227 466.972,00
10	Jaringan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	195.200 000,00
		TOTAL	**43.233.220.730,76**

2) Penambahan Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebelum tahun 2023 sebesar Rp240.231.477.276,30 merupakan penambahan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari reklasifikasi aset tetap antar akun/antar KIB. Rincian penambahan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp19.013.565.743,00 dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar Rp221.217.911.533,30.

3) Penambahan Reklasifikasi dari KDP sebesar Rp546.677.000,00 merupakan penambahan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari konstruksi dalam pengerjaan yang telah selesai pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA sebesar Rp232.000.000,00 pada sub akun Jalan dan Jembatan sedangkan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp314.677.000,00 pada sub akun Bangunan Air.
4) Penambahan Koreksi dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dikarenakan salah penganggaran (Belanja Pemeliharaan, Perencanaan, dan Pengawasan) sebesar Rp946.558.368,66 terdiri dari :

Tabel Koreksi dari Jasa Pemeliharaan Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Jalan Dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	279.201.166,66
2	Jalan Dan Jembatan	Dinas Perhubungan	29.608.000,00
3	Jalan Dan Jembatan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	283.350.402,00
4	Bangunan Air	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	42.098.800,00
5	Bangunan Air	Dinas Kesehatan	312.300.000,00
TOTAL			946.558.368,66

Pengurangan Nilai Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp4.638.134.421,01 tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1) Pengurangan dari penghapusan sebesar Rp35.000.000,00 merupakan pengurangan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan karena penghapusan berdasarkan SK Sekretaris Daerah No. 188.45/129/SEKDA/1/12/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
2) Pengurangan karena Koreksi Doubel Pencairan sebesar Rp92.195.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA disebabkan karena kesalahan pengajuan pencairan sehingga dilakukan penyetoran kembali ke Kas Daerah.
3) Pengurangan karena Pembayaran Hutang pada PU Bina Marga untuk Jalan Jumerto - Klungkung Kecamatan Sukorambi yang asetnya sudah tercatat di tahun 2022 dan pembayarannya di realisasi pada Belanja Modal tahun 2023 senilai Rp87.556.800,00
4) Pengurangan Koreksi Ekstracom sebesar Rp744.612.035,00 terdiri dari Pengurangan Koreksi Ekstrakom Sebelum Tahun 2023 dikarenakan reklas dari Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan yang tidak memenuhi kapitalisasi senilai Rp728.764.985,00 dan dikarenakan terdapat penambahan daya listrik dan pemasangan jaringan telefon dibawah nilai kapitalisasi senilai Rp15.847.050,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Koreksi Ekstracom- Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Instalasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.343.800,00
2	Instalasi	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	8.203.250,00
3	Jaringan	Kecamatan Kencong	2.600.000,00
4	Jaringan	Dinas Pendidikan	700.000,00
5	Jaringan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	728.764.985,00
TOTAL			**744.612.035,00**

5) Pengurangan Reklasifikasi antar akun sebesar Rp3.678.770.586,00 merupakan pengurangan karena reklasifikasi sebagai berikut :

Tabel Reklasifikasi Antar Akun- Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Reklas ke Gedung dan Bangunan Tahun 2023			
1	Jalan Dan Jembatan	Badan Pendapatan Daerah	199.256.000,00
2	Jalan Dan Jembatan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	1 663 189 114,00
3	Instalasi	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	227.466 972,00
Total			**2.089.912.086,00**
Reklas Ke Gedung Dan Bangunan Sebelum Tahun 2023			
1	Jalan Dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	396 972.000,00
Total			**396.972.000,00**
Reklas Ke Peralatan Dan Mesin Sebelum Tahun 2023			
1	Jaringan	Dinas Pendidikan	28.626.500,00
Total			**28.626.500,00**
Reklas Ke Aset Tetap Lainnya Tahun 2023			
1	Instalasi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	392.637 000,00
Total			**392.637.000,00**
Reklas Ke Aset Lain-Lain Tahun 2023 Tahun 2023			
1	Jalan Dan Jembatan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	761.743 000,00
TOTAL			**761.743.000,00**
Reklas ke Aset Lain-Lain Tahun 2023 Sebelum Tahun 2023			
1	INSTALASI	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) DR SOEBANDI	8 880 000,00
TOTAL			8.880.000,00
JUMLAH			**3.678.770.586,00**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
253.570.816.528,51	226.968.749.377,39	26.602.067.151,12	11,72%

Nilai Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp253.570.816.528,51 dan Rp226.968.749.377,39. Terjadi kenaikan nilai Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya dibandingkan tahun lalu sebesar Rp26.602.067.151,12 atau sebesar 11,72%.

Perhitungan nilai Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp253.570.816.528,51. Adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	226.968.749.377,39
Penambahan Tahun 2023	Rp	58.149.824.628,01
Jumlah	**Rp**	**285.118.574.005,40**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	31.547.757.476,88
Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023	**Rp**	**253.570.816.528,51**

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari:

NO	JENIS	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	210.321.240.225,51	515.462.698,01	166.845.400,00	210 669 857 523,51
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5.979.211.333,00	2.562.694.000,00	75.845.000,00	8 466.060.333,00
3	Hewan	669.900.000,00	0,00	0,00	669.900.000,00
4	Biota Perairan	951.820.800,00	0,00	0,00	951.820.800,00
5	Tanaman	2.614.389.100,00	208.797.400,00	0,00	2.823.186.500,00
6	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	6.432.187.918,88	54.862.870.530,00	31.305.067.076,88	29.989.991 372,00
	JUMLAH	226.968.749.377,39	58,149.824.628,01	31.547.757.476,88	253.570.816.528,51

Mutasi Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya selama tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penambahan Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp58.149.824.628,01 dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut :

1) Belanja modal Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.351.340.328,00 terdiri dari belanja modal Aset Tetap berupa Bahan Perpustakaan, Barang bercorak kesenian, kebudayaan dan olahraga, Tanaman, dan Aset Tetap Dalam Renovasi. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut

Tabel Belanja Modal Aset Tetap-Aset tetap lainnya

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	346.748.198,00
2	Bahan Perpustakaan	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	166.845.400,00

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	25.215.000,00
4	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Bagian Umum	18.870.000,00
5	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	27.000.000,00
6	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	2.491.609.000,00
7	Tanaman	Dinas Pendidikan	12.020.000,00
8	Tanaman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	196.777.400,00
9	Aset Tetap Dalam Renovasi	Dinas Pendidikan	50.223.907.580,00
10	Aset Tetap Dalam Renovasi	Badan Pendapatan Daerah	243.783.750,00
11	Aset Tetap Dalam Renovasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika	598.564.000,00
TOTAL			**54.351.340.328,00**

2) Penambahan koreksi sebesar Rp379.354.300,00 merupakan penambahan Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya dari Koreksi BOP Tahun 2023 sebesar Rp1.869.100,00 atas belanja Barang dan Jasa BOP pada Dinas Pendidikan dari belanja persediaan ke Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya dikarenakan merupakan aset tetap sehingga menambah nilai Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya tahun 2023 dan Penambahan Koreksi dari Belanja Barang Jasa Tahun 2023 dikarenakan salah penganggaran (Belanja Pemeliharaan, Perencanaan, dan Pengawasan) sebesar Rp377.485.200,00.

3) Penambahan dari reklasifikasi antar akun Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.419.130.000,00 merupakan penambahan Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya yang berasal dari reklasifikasi antar akun/antar KIB. Adapun penambahan Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2023 berasal dari pos anggaran APBD. Penambahan reklasifikasi antar akun pada Aset Tetap Lainnya tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel Penambahan Reklasifikasi Antar Akun

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Roklas Dari Godung Dan Bangunan Ko Asot Totap Dalam Ronovasi			
1	Aset Tetap Dalam Renovasi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	3.026.493.000,00
Sub Total			**3.026.493.000,00**
Roklas Dari Jalan, Jaringan, Dan Irigasi Ko Asot Totap Dalam Ronovasi			
2	Aset Tetap Dalam Renovasi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	392.637.000,00
SUB TOTAL			**392.637.000,00**
TOTAL			**3.419.130.000,00**

b. Pengurangan Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp31.547.757.476,88 dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

1) Koreksi atas belanja modal Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya sebesar Rp138.241.655.00 merupakan pengurangan yang berasal dari koreksi atas belanja modal Aset Tetap- Aset Tetap Lainnya ke Persediaan dikarenakan belanja modal tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap sehingga mengurangi nilai belanja modal Aset Tetap- Aset Tetap Lainnya tahun 2023. Rincian dari koreksi atas belanja modal Aset Tetap- Aset Tetap Lainnya tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel Koreksi Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
PENGURANGAN KOREKSI KE PERSEDIAAN			
1	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	25.215.000,00
2	ASET TETAP DALAM RENOVASI	DINAS PENDIDIKAN	113.026.655,00
Total			138.241.655,00

2) Pengurangan dari Reklasifikasi Antar Akun sebesar Rp31.405.095.821,88 merupakan pengurangan Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset tetap antar akun/antar KIB tahun 2023 sebesar Rp28.350.586.078,00 dan pengurangan Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset tetap antar akun/antar KIB sebelum tahun 2023 sebesar Rp3.054.509.743,88. Rincian pengurangan Aset Tetap- Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi antar Akun disajikan dalam tabel berikut :

Tabel Pengurangan Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
REKLAS KE PERALATAN DAN MESIN			
1	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	46.210.000,00
2	Aset Tetap Dalam Renovasi	Dinas Pendidikan	27.281.007.928,00
SUB TOTAL			27.327.217.928,00
REKLASIFIKASI KE ASET TIDAK BERWUJUD			
1	Bahan Perpustakaan	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	166.845.400,00
2	Aset Tetap Dalam Renovasi	Dinas Pendidikan	14.175.000,00
3	Aset Tetap Dalam Renovasi	Badan Pendapatan Daerah	243.783.750,00
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika	598.564.000,00
SUB TOTAL			1.023.368.150,00
TOTAL			28.350.586.078,00

Tabel Pengurangan Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya Sebelum Tahun 2023

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
REKLAS KE PERALATAN DAN MESIN			

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Aset Tetap Dalam Renovasi	Kecamatan Balung	297.033.419,00
2	Aset Tetap Dalam Renovasi	Kecamatan Tanggul	224.714.858,00
SUB TOTAL			521.748.277,00
REKLASIFIKASI KE GEDUNG DAN BANGUNAN			
1	Aset Tetap Dalam Renovasi	Kecamatan Balung	1.451.101.644,71
2	Aset Tetap Dalam Renovasi	Kecamatan Tanggul	1.081.659.822,17
SUB TOTAL			2.532.761.466,88
TOTAL			3.054.509.743,88

3) Pengurangan dari koreksi ekstracom sebesar Rp4.420.000,00 merupakan pengurangan Aset tetap-Aset tetap lainnya yang berasal dari ekstracom dikarenakan tidak memenuhi kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tabel Pengurangan Koreksi Ekstracom

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
PENGURANGAN KOREKSI EKSTRACOM SEBELUM TAHUN 2023			
1	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Dinas Pendidikan	2 380 000,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	2 040 000,00
SUB TOTAL			4.420.000,00
TOTAL			4.420.000,00

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
25.269.692.114,25	25.115.446.180,91	154.245.933,34	0,6%

Nilai KDP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp25.269.692.114,25 dan Rp25.115.446.180,91. Terjadi kenaikan nilai Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp154.245.933,34 atau sebesar 0,6%.

Perhitungan nilai KDP per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.269.692.114,25 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	25.115.446.180,91
Penambahan Tahun 2023	Rp	700.922.933,34
Jumlah	**Rp**	**25.816.369.114,25**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	546.677.000,00
Nilai KDP Tahun 2023	**Rp**	**25.269.692.114,25**

Jumlah tersebut merupakan rincian KDP milik Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari:

Tabel Kontruksi Dalam Pengerjaan

JENIS ASET TETAP	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.115.446.180,91	700.922.933,34	546.677.000,00	25.269.692.114,25
TOTAL	25.115.446.180,91	700.922.933,34	546,677.000,00	25.269.692.114,25

Mutasi penambahan dan pengurangan nilai KDP tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Saldo awal sebesar Rp25.115.446.180,91 merupakan nilai saldo akhir KDP tahun 2022 (*audited*).

b. Penambahan KDP tahun 2023 sebesar Rp700.922.933,35 tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1) Penambahan yang berasal dari reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp47.576.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Gedung dan Bangunan yang masih belum dapat dikelompokkan sebagai aset tetap dikarenakan pekerjaan konstruksi belum mencapai 100%.

2) Penambahan yang berasal dari koreksi jasa pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp653.346.933,34 terdiri dari :

Tabel Penambahan Koreksi dari Jasa Pemeliharaan

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	16.206.000,00
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Dinas Lingkungan Hidup	53.118.000,00
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	74.500.000,00
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	369.241.833,34
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Dinas Perhubungan	55.681.100,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	84.600.000,00
TOTAL			653.346.933,34

c. Pengurangan KDP Tahun 2023 sebesar Rp546.677.000,00 merupakan Pengurangan atas KDP tahun 2023 berupa:

1) Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap-Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp314.677.000,00 berupa pekerjaan Perencanaan Instalasi Air Kotor IPAL pada Dinas Kesehatan yang telah selesai 100% pada Tahun 2023; dan

2) Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap-Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp232.000.000,00 berupa pekerjaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA yang telah selesai 100% pada Tahun 2023. Adapun rincian pengurangan Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap-Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel Tabel Pengurangan Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi

JENIS SUB AKUN	O P D	PENGURANGAN REKLAS KE JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Dinas Kesehatan	314.677.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	232.000.000,00
SUB TOTAL		546.677.000,00
Pengurangan Reklas ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi		546.677.000,00

d. Saldo akhir sebesar Rp25.269.692.114,25 merupakan saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2023. Adapun rincian saldo akhir KDP 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO	OPD	NAMA ASET	KETERANGAN (RINCIAN) TAMBAHAN BARANG	TAHUN	HARGA PEROLEHAN
1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Gedung Samping Dispenduk	1970	49.100.000,00
2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Konsultan Perencanaan	1970	717.340.800,00
3	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Termyn Uang Muka	1970	1.254.729.800,00
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Gedung	1970	44.448.000,00
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Konsult. Pengawas	1970	49.000.000,00
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Konsult. Perencanaan	2023	47.576.000,00
7	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Rawat Jalan Poli 4 Rsd Soebandi (Perencanaan Di Rs Subandi)	2019	5.361.733.448,65
8	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Kontruksi Poli 4 Lantai Rsd	2020	6.251.039.609,44
9	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Konsultan Pengawasan Gedung Rawat Jalan Lantai 4	2020	215.000.000,00
10	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Belanja Pengadaan Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan 4 (Empat) Lantai	2018	346.000.000,00

NO	OPD	NAMA ASET	KETERANGAN (RINCIAN) TAMBAHAN BARANG	TAHUN	HARGA PEROLEHAN
11	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Belanja Pengadaan Konsultan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Gedung Lt 4	2018	44.946.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Jembatan Bintoro (Pengakuan Hutang)	2020	19.590.200,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Jembatan Gladak-Pakem Mumbulsari Km Ii+023 Dan Km 283 (Pengakuan Hutang)	2020	19.496.400,00
14	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Jembatan Gladak-Pakem Mumbulsari Km Iii+031 (Pengakuan Hutang)	2020	19.606.400,00
15	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Jembatan Lori (Pengakuan Hutang)	2020	19.561.800,00
16	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Peningkatan Jalan Mastrip (5 2 2 21 02) (Koreksi)	2020	39.190.800,00
17	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Peningkatan Jalan Mastrip (5 2 2 21 02) (Pengakuan Hutang)	2020	19.595.400,00
18	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Jarwo (5 2 2 21 02) (Koreksi)	2020	39.388.800,00
19	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Jarwo (5 2 2 21 02) (Pengakuan Hutang)	2020	19.694.400,00
20	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Rehabilitasi Dam Sangkah (Pengakuan Hutang)	2020	19.789.000,00
21	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Rehabilitasi Daerah Irigasi P Lantur	2021	2.043.959.789,90
22	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Daerah Irigasi Candi	2021	370.860.926,62
23	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Dinding Penahan Jalan Patemon - Kramatsukoharjo Kec. Tanggul	2021	312.374.000,00
24	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Bnpb (Ji-Polo)	2023	39.556.800,00

NO	OPD	NAMA ASET	KETERANGAN (RINCIAN) TAMBAHAN BARANG	TAHUN	HARGA PEROLEHAN
25	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Dak (Bendung Tugusari, Bendung Kedinding, Saluran Ii Kaena)	2023	79.494.400,00
26	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Ded (Jalan Akses Masuk Kantor Pusat Pemerintahan - Bintoro)	2023	99.167.000,00
27	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Jembatan Karang Bayat Dan Jembatan Kemuningsari Lor Badean)	2023	71.139.200,00
28	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Jembatan Cakru Paseban 1 Dan Cakru Paseban 2	2023	4.393.333,34
29	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Jembatan Sadengan Dan Jembatan Keting Kecik	2023	12.113.500,00
30	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Jembatan Jarwo (Review)	2023	63.377.600,00
31	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sdn Karangduren 1, Apbd 2019	2019	4.465.567,00
32	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sdn Sumberbulus 2, Apbd 2019	2019	15.225.000,00
33	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sdn Sumberjambe 1, Apbd 2019	2019	17.000.000,00
34	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sdn Sumberjambe 2, Apbd 2019	2019	13.365.000,00
35	Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sdn Sumbersalak 1, Apbd 2019	2019	15.225.000,00

NO	OPD	NAMA ASET	KETERANGAN (RINCIAN) TAMBAHAN BARANG	TAHUN	HARGA PEROLEHAN
36	Dinas Perhubungan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Eks Monumen Pesawat	2023	19.856.000,00
37	Dinas Perhubungan	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Pembangunan Palang Pintu Perlintasan Jalan Tawes	2023	4.759.875,00
38	Dinas Perhubungan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Pos Jaga Jpl Sumberlesung	2023	13.828.530,00
39	Dinas Perhubungan	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Pembangunan Palang Pintu Perlintasan Sumberlesung	2023	4.759.875,00
40	Dinas Perhubungan	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Rehab Pos Jaga Jpl Jalan Mangga	2023	4.158.940,00
41	Dinas Perhubungan	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Rehab Pos Jaga Jpl Jalan Langsep	2023	4.158.940,00
42	Dinas Perhubungan	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Rehab Pos Jaga Jpl Jalan Rasamala	2023	4.158.940,00
43	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembayaran Laporan Pendahuluan 20% Dan Pengembangan 10% Perencanaan Pembangunan Pasar Tanjung Dalam Rangka Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar T A 2019, Sebagaimana Permohonan Terlampir.	2019	698.005.770,00
44	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembayaran Jasa Konsultan Perencanaan Pasar Tanjung Tahun 2019 (Tahap Pengembangan Rancangan Dan Tahap Rancangan Detail)	2020	1.163.342.950,00
45	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Konsultan Perencanaan Pasar Kepatihan	2019	97.625.000,00
46	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembayaran Angsuran 80% Jasa Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Pasar Mangli Dalam Rangka Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar T A 2019, Sebagaimana Permohonan Terlampir.	2019	35.200.000,00
47	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Konsulton Perencanaan/Detail Engineering Design Pasar Manggisan	2018	98.700.000,00
48	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	- Uang Muka Konstruksi Pembangunan Pasar Manggisan	2018	1.567.855.368,67
49	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	- Angsuran 55,462% Konstruksi Pembangunan Pasar Manggisan	2018	2.562.573.368,03

NO	OPD	NAMA ASET	KETERANGAN (RINCIAN) TAMBAHAN BARANG	TAHUN	HARGA PEROLEHAN
50	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pasar Manggisan	2018	97.250.000,00
51	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Konstruksi Pembangunan Pasar Manggisan (Sisa Nilai Kontrak Yang Belum Terbayar)	2018	217.234.200,60
52	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan - Pasar Puger	2023	7.050.000,00
53	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan - Pasar Sempolan	2023	7.050.000,00
54	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan - Pasar Balung Lama	2023	7.050.000,00
55	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan - Pasar Ambulu	2023	7.050.000,00
56	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan - Pasar Jenggawah	2023	7.050.000,00
57	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan - Pasar Menampu	2023	7.050.000,00
58	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan - Pasar Pelung	2023	7.050.000,00
59	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan - Pasar Sukorejo	2023	7.050.000,00
60	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan - Pasar Umbulsari	2023	7.050.000,00
61	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan - Pasar Hewan Mayang	2023	7.050.000,00
62	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan - Pasar Hewan Kalisat	2023	7.050.000,00
63	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan - Pasar Hewan Jenggawah	2023	7.050.000,00
64	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Rehabilitasi Bangunan Gedung Dan Interior Kantor Kecamatan Jenggawah	2019	635.445.382,00
65	Dinas Lingkungan Hidup	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Konsultan Perencanaan Gedung Kantor Dlh	2023	17.706.000,00
66	Dinas Lingkungan Hidup	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Konsultan Perencanaan Gedung Screen House	2023	17.706.000,00
67	Dinas Lingkungan Hidup	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Konsultan Perencanaan Gedung Tpa Pakusari	2023	17.706.000,00

NO	OPD	NAMA ASET	KETERANGAN (RINCIAN) TAMBAHAN BARANG	TAHUN	HARGA PEROLEHAN
68	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Museum Daerah	2023	74.500.000,00
69	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Exterior + Interior Rajal (Perencanaan)	2022	26.919.000,00
70	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Masjid (Perencanaan)	2022	26.892.000,00
71	Bagian Umum	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencaan Rehab Gedung Ex Bpka	2023	16.206.000,00
Jumlah					**25.269.692.114,25**

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
5.276.461.300.308,57	4.855.490.868.148,21	420.970.432.160,36	8,66

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.276.461.300.308,57 dan Rp4.855.490.868.148,21. Terjadi kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp420.970.432.160,36 atau sebesar 8,66%.

Perhitungan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.276.461.300.308,57 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	4.855.490.868.148,21
Penambahan Tahun 2023	Rp	460.661.982.416,38
Jumlah	**Rp**	**5.316.152.850.564,59**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	39.691.550.256,02
Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	**Rp**	**5.276.461.300.308,57**

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai aset tetap yang menggunakan metode harga perolehan. Penghitungan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Jember dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) pada jenis aset tetap non tanah, tanaman dan hewan. Adapun Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

NO	JENIS ASET	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	1.214.034.148.887,94	163.600.678.797,95	5.288.288.588,72	1.372.346.539.097,17
2	Gedung dan Bangunan	900.782.169.698,02	36.931.211.477,81	34.031.450.539,42	903.681.930.636,41
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.739.414.754.677,25	259.885.579.074,37	371.811.127,88	2.998.928.522.623,74
4	Aset Tetap Lainnya	1.259.794.885,00	244.513.066,25	0,00	1.504.307.951,25
NILAI AKUMULASI PENYUSUTAN		**4.855.490.868.148,21**	**460.661.982.416,38**	**39.691.550.256,02**	**5.276.461.300.308,57**

Pemerintah Kabupaten Jember telah menerapkan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Buletin Teknis SAP No. 18 dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember serta Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.276.461.300.308,57 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Per 31 Desember 2022	**Rp**	**4.855.490.868.148,21**
Penambahan Tahun 2023 :		
Beban Penyusutan 2023	Rp	400.950.679.658,00
Mutasi Masuk Antar OPD Dari Kementrian ke Dinkes	Rp	197.559.859,12
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	Rp	9.800.000,00
Reklasifikasi dari Jalan, Irigrasi dan Jaringan	Rp	28.626.500,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	Rp	73.000.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	Rp	313.048.966,20
Koreksi Tambah dari Jasa Pelayanan	Rp	14.485.000,00
Koreksi Tambah dari Persediaan	Rp	65.256.750,00
Mutasi Masuk BTT 2020	Rp	6.934.319.613,60
Koreksi Tambah Pembulatan Koma KIB B	Rp	4,77
Reklasifikasi Masuk dari Rehab JIJ ke KIB C	Rp	79.584.695,54
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap Lainnya	Rp	151.129.119,47
Koreksi Kurang Catat KIB C	Rp	590.695.559,71
Reklasifikasi KIB C ke KIB D	Rp	51.253.796.689,97
Jumlah Penambahan Tahun 2023	**Rp**	**460.661.982.416,38**

Pengurangan Tahun 2023 :		
Penghapusan KIB Peralatan dan Mesin	Rp	5.274.176.338,00
Koreksi Lebih Catat KIB B	Rp	2.712.250,72
Koreksi Ekskom KIB B	Rp	11.400.000,00
Penghapusan KIB C	Rp	11.330.000,00
Reklasifikasi Peralatan dan Mesin dari KIB C	Rp	1.568.000,00
Reklasifikasi ke JIJ dari KIB C	Rp	33.671.996.634,60
Koreksi Salah Catat KIB C	Rp	201.928.024,12
Koreksi Ekskom Gedung dan Bangunan	Rp	82.052.540,72
Koreksi Kurang Pembulatan Koma KIB C	Rp	3,36
Koreksi Perubahan Kode Barang dan Induk KIB C	Rp	62.575.336,62
Penghapusan KIB Jalan, Irigrasi dan Jaringan	Rp	8.750.000,00
Reklasifikasi ke KIB B dari KIB D	Rp	7.050.300,00
Reklasifikasi ke KIB C dari KIB D	Rp	345.365.640,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain dari KIB D	Rp	6.660.000,00
Koreksi Ekskom KIB D	Rp	3.985.187,50
Koreksi Pembulatan Koma KIB D	Rp	0,38
Jumlah Pengurangan Tahun 2023	**Rp**	**39.691.550.256,03**
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	**Rp**	**5.276.461.300.308,57**

5.3.1.3.8 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
1.372.346.539.097,17	1.214.034.148.887,94	158.312.390.209,23	13,04

Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.372.346.539.097,17 dan Rp1.214.034.148.887,94. Terjadi kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp158.312.390.209,23 atau sebesar 13,04%.

Perhitungan nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.372.346.539.097,17 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.214.034.148.887,94
Penambahan Tahun 2023	Rp	163.600.678.797,95
Jumlah	**Rp**	**1.377.634.827.685,89**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	5.288.288.588,72

Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 **Rp 1.372.346.539.097,17**

Penambahan Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp163.600.678.797,95 merupakan dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1) Beban Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp155.964.582.104,26 merupakan nilai penyusutan pada tahun pelaporan.
2) Penambahan Mutasi Masuk Antar OPD dari Kementerian ke Dinas Kesehatan langsung diteruskan ke Puskesmas sebesar Rp197.559.859,12 terinci sebagai berikut :

Tabel Mutasi Masuk Antar OPD Peralatan dan Mesin

NO	OPD	JUMLAH
1	Puskesmas Ajung	3.292.664,32
2	Puskesmas Ambulu	3.292.664,32
3	Puskesmas Andongsari	3.292.664,32
4	Puskesmas Arjasa	3.292.664,32
5	Puskesmas Balung	3.292.664,32
6	Puskesmas Bangsalsari	3.292.664,32
7	Puskesmas Banjarsongon	3.292 664,32
8	Puskesmas Cakru	3 292 664,32
9	Puskesmas Curahnongko	3.292 664,32
10	Puskesmas Gladakpakem	3 292 664,32
11	Puskesmas Gumukmas	6 585 328,63
12	Puskesmas Jelbuk	6 585 328,63
13	Puskesmas Jenggawah	3 292 664,32
14	Puskesmas Jombang	3 292 664,32
15	Puskesmas Kalisat	3.292 664,32
16	Puskesmas Kaliwates	6 585 328,63
17	Puskesmas Karangduren	3.292.664,32
18	Puskesmas Kasiyan	3.292 664,32
19	Puskesmas Kencong	3.292.664,32
20	Puskesmas Kemuningsari	3.292.664,32
21	Puskesmas Jember Kidul	3.292.664,32
22	Puskesmas Klatakan	3 292 664,32
23	Puskesmas Ledokombo	3 292 664,32
24	Puskesmas Lojejer	3 292 664,32
25	Puskesmas Mangli	3 292 664,32
26	Puskesmas Mayang	6.585.328,63
27	Puskesmas Mumbulsari	3 292 664,32
28	Puskesmas Nogosari	3 292 664,32
29	Puskesmas Pakusari	3 292 664,32
30	Puskesmas Paleran	3 292 664,32
31	Puskesmas Panti	3 292 664,32
32	Puskesmas Patrang	6 585 328,63
33	Puskesmas Puger	6 585 328,63
34	Puskesmas Rambipuji	3.292 664,32
35	Puskesmas Rowotengah	3 292 664,32

NO	OPD	JUMLAH
36	Puskesmas Sabrang	3.292.664,32
37	Puskesmas Semboro	3.292.664,32
38	Puskesmas Silo I	6.585.328,63
39	Puskesmas Silo II	3.292.664,32
40	Puskesmas Sukorambi	3.292.664,32
41	Puskesmas Sukorejo	3.292.664,32
42	Puskesmas Sukowono	3.292.664,32
43	Puskesmas Sumberbaru	3.292.664,32
44	Puskesmas Sumberjambe	6.585.328,63
45	Puskesmas Sumbersari	6.585.328,64
46	Puskesmas Tanggul	6.585.328,64
47	Puskesmas Tembokrejo	3.292.664,32
48	Puskesmas Tempurejo	3.292.664,32
49	Puskesmas Umbulsari	3.292.664,32
50	Puskesmas Wuluhan	3.292.664,32
JUMLAH		**197.559.859,12**

3) Penambahan Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebelum tahun 2023 sebesar Rp9.800.000,00 pada Kecamatan Semboro dikarenakan penyusutan sesuai umur ekonomis pada Peralatan dan Mesin dengan akumulasi penyusutan sama dengan nilai perolehan (nilai buku habis).
4) Penambahan Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum tahun 2023 sebesar Rp28.626.500,00 pada Dinas Pendidikan dikarenakan LHP tahun 2022 diklasifikasi menjadi barang ekstracom setelah dilakukan pengecekan ternyata barang tersebut berupa barang peralatan dan mesin dengan penyusutan sesuai umur ekonomis pada Peralatan dan Mesin dengan akumulasi penyusutan sama dengan nilai perolehan (nilai buku habis).
5) Penambahan Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain sebesar Rp73.000.000,00 pada Kecamatan Panti dikarenakan Kendaraan Pick Up yang sebelumnya tercatat dalam kondisi rusak namun masih dipergunakan dalam kondisi baik) dengan penyusutan sesuai umur ekonomis pada Peralatan dan Mesin dengan akumulasi penyusutan sama dengan nilai perolehan (nilai buku habis).
6) Penambahan Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebelum tahun 2023 sebesar Rp313.048.966,20 terinci sebagai berikut :

Tabel Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin

NO	OPD	JUMLAH
1	Kecamatan Balung	178.220.051,40
2	Kecamatan Tanggul	134.828.914,80
JUMLAH		**313.048.966,20**

7) Penambahan Koreksi dari Jasa Pelayanan pada RSD Balung sebesar Rp14.485.000,00.

8) Penambahan Koreksi dari Persediaan dikarenakan persediaan barang diserahkan masyarakat digunakan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Jember, menjadi Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp65.256.750,00 terinci sebagai berikut :

Tabel Koreksi dari Persediaan

NO	OPD	JUMLAH
1	Bagian Tata Pemerintahan	2.114.750,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.153.500,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.307.000,00
4	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	7.005.000,00
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	19.225.000,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.307.000,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	576.750,00
8	Kecamatan Ajung	769.000,00
9	Kecamatan Ambulu	769.000,00
10	Kecamatan Arjasa	769.000,00
11	Kecamatan Balung	769 000,00
12	Kecamatan Bangsalsari	769 000,00
13	Kecamatan Gumukmas	769 000,00
14	Kecamatan Jelbuk	769 000,00
15	Kecamatan Kaliwates	1 538 000,00
16	Kecamatan Kencong	1 538 000,00
17	Kecamatan Ledokombo	769 000,00
18	Kecamatan Mayang	1 538 000,00
19	Kecamatan Mumbulsari	769 000,00
20	Kecamatan Pakusari	769 000,00
21	Kecamatan Panti	769 000,00
22	Kecamatan Patrang	1 153.500,00
23	Kecamatan Puger	1 538 000,00
24	Kecamatan Rambipuji	1.538.000,00
25	Kecamatan Semboro	1.538.000,00
26	Kecamatan Silo	769.000,00
27	Kecamatan Sukorambi	769.000,00
28	Kecamatan Sukowono	769.000,00
29	Kecamatan Sumberbaru	1.538.000,00
30	Kecamatan Sumberjambe	1.538.000,00
31	Kecamatan Sumbersari	1.538.000,00
32	Kecamatan Tanggul	1 538.000,00
33	Kecamatan Tempurejo	769.000,00
34	Kecamatan Umbulsari	769.000,00
35	Kecamatan Wuluhan	769 000,00
36	Puskesmas Mangli	961 250,00
JUMLAH		**65.256.750,00**

9) Penambahan Mutasi Masuk dari BTT 2020 sebesar Rp6.934.319.613,60 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

10) Penambahan Koreksi Pembulatan Koma sebesar Rp4,77.

Pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp5.288.288.588,72 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1) Penghapusan Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.274.176.338,00 terinci sebagai berikut :

Tabel Mutasi Keluar Antar OPD Peralatan Mesin

NO	OPD	JUMLAH
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	670.641.900,00
2	Badan Pendapatan Daerah	557.429.550,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	787.859.500,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	1.186.755.388,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	2.071.490.000,00
	JUMLAH	**5.274.176.338,00**

2) Pengurangan Koreksi Lebih Catat dikarenakan kesalahan kode barang dan umur ekonomis sebesar Rp2.712.250,72 pada Dinas Perhubungan.

3) Pengurangan Koreksi Ekskom sebesar Rp11.400.000,00 pada Dinas Kesehatan.

5.3.1.3.9 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
903.681.930.636,41	900.782.169.698,02	2.899.760.938,39	0,32

Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp903.681.930.636,41 dan Rp900.782.169.698,02. Terjadi kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp2.899.760.938,39 atau sebesar 0,32%.

Perhitungan nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp903.681.930.636,41 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	900.782.169.698,02
Penambahan Tahun 2023	Rp	36.931.211.477,81
Jumlah	**Rp**	**937.713.381.175,83**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	34.031.450.539,42
Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	**Rp**	**903.681.930.636,41**

Penambahan Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp36.931.211.477,81 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp36.109.802.103,09.
2) Penambahan Reklasifikasi dari Rehab Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp79.584.695,54 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dikarenakan penyusutan sesuai tahun perolehan dan umur ekonomis pada Gedung dan Bangunan.
3) Penambahan Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp151.129.119,47 dikarenakan penyusutan sesuai tahun perolehan dan umur ekonomis pada Gedung dan Bangunan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya

NO	OPD	JUMLAH
1	Kecamatan Balung	86.700.320,69
2	Kecamatan Tanggul	64.428.798,78
JUMLAH		151.129.119,47

4) Penambahan Koreksi Kurang Catat KIB Gedung dan Bangunan sebesar Rp590.695.559,71 dikarenakan Kesalahan Pencatatan induk anak Gedung dan Bangunan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel Koreksi Kurang Catat KIB Gedung dan Bangunan

NO	OPD	JUMLAH
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	156.008.377,39
2	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	252.226.356,80
3	Dinas Pendidikan	182.460.825,52
JUMLAH		590.695.559,71

Pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp34.031.450.539,42 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

1) Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.330.000,00 terinci sebagai berikut :

Tabel Penghapusan KIB Gedung dan Bangunan

NO	OPD	JUMLAH
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.306.000,00
2	Dinas Kesehatan	9.024.000,00
JUMLAH		11.330.000,00

2) Pengurangan Reklasifikasi Gedung dan Bangunan sebelum tahun 2023 ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.568.000,00 pada Kecamatan Semboro.
3) Pengurangan Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp33.671.996.634,60 dikarenakan pada Dinas Perhubungan salah penganggaran sebelum tahun 2023 sebesar Rp3.605.445.946,73 dan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya terdapat PJU sebesar Rp30.066.550.687,87 setelah di

Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan dibawah nilai kapitalisasi dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

Tabel Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	OPD	JUMLAH
1	Dinas Perhubungan	3.605.445.946,73
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	30.066.550.687,87
	JUMLAH	33.671.996.634,60

4) Pengurangan Koreksi Salah Catat Gedung dan Bangunan sebesar Rp201.928.024,12 dikarenakan perubahan induk menjadi rehab pada RSD Balung sebesar Rp17.039.433,57 dan Koreksi Salah Catat Tahun pada Kecamatan Sumbersari sebesar Rp184.888.590,55 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel Koreksi Salah Catat Gedung dan Bangunan

NO	OPD	JUMLAH
1	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	17.039.433,57
2	Kecamatan Sumbersari	184.888.590,55
	JUMLAH	201.928.024,12

5) Pengurangan Koreksi dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp82.052.540,72 dijelasan sebagai berikut :

Tabel Koreksi Dibawah Nilai Kapitalisasi

NO	OPD	JUMLAH
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.621.352,26
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	77.431.188,46
	JUMLAH	82.052.540,72

6) Pengurangan Koreksi dikarenakan perubahan Kode Barang dan Induk sebesar Rp62.575.336,62 pada Dinas Pendidikan.

7) Pengurangan Koreksi Pembulatan Koma sebesar Rp3,36

5.3.1.3.10 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
2.998.928.522.623,74	2.739.414.754.677,25	259.513.767.946,49	9,47

Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigrasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.998.928.522.623,74 dan Rp2.739.414.754.677,25. Terjadi kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp259.513.767.946,49 atau sebesar 9,47%.

Perhitungan nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigrasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.998.928.522.623,74 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	2.739.414.754.677,25
Penambahan Tahun 2023	Rp	259.885.579.074,37
Jumlah	**Rp**	**2.999.300.333.751,62**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	371.811.127,88
Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	**Rp**	**2.998.928.522.623,74**

Penambahan Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigrasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp259.885.579.074,37 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1) Beban Penyusutan Jalan, Irigrasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp208.631.782.384,40
2) Penambahan Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp51.253.796.689,97 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	OPD	JUMLAH
1	Dinas Perhubungan	13.810.394.841,25
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	37.443.401.848,72
	JUMLAH	**51.253.796.689,97**

Pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp371.811.127,88 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1) Penghapusan Jaringan ICT sebesar Rp8.750.000,00 pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
2) Pengurangan Reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.050.300,00 pada LHP tahun 2022 diklasifikasi menjadi barang ekstracom setelah dilakukan pengecekan ternyata barang tersebut berupa barang peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan.
3) Pengurangan Reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Gedung dan Bangunan sebelum tahun 2023 sebesar Rp345.365.640,00 dikarenakan pengaspalan jalan dilingkungan kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air.
4) Pengurangan Reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lain-Lain sebelum tahun 2023 sebesar Rp6.660.000,00 pada Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Soebandi.
5) Koreksi KIB Jalan, Irigrasi dan Jaringan Tidak Memenuhi Nilai Kapitalisasi sebesar Rp3.985.187,50 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel Koreksi KIB D Tidak Memenuhi Nilai Kapitalisasi

NO	OPD	JUMLAH
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.085.950,00
2	Dinas Pendidikan	308.750,00
3	Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi	1.230.487,50
4	Kecamatan Kencong	1.360.000,00
JUMLAH		**3.985.187,50**

6) Pengurangan Koreksi Pembulatan Koma sebesar Rp0,38.

5.3.1.3.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
1.504.307.951,25	1.259.794.885,00	244.513.066,25	19,40

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.504.307.951,25 dan Rp1.259.794.885,00. Terjadi kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp244.513.066,25 atau sebesar 19,40%.

Perhitungan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.504.307.951,25 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.259.794.885,00
Penambahan Tahun 2023	Rp	244.513.066,25
Jumlah	**Rp**	**1.504.307.951,25**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	0,00
Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	**Rp**	**1.504.307.951,25**

Penambahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp1.504.307.951,25 merupakan penambahan yang berasal dari beban penyusutan tahun 2023.

5.3.1.5 Aset Lainnya

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
323.090.567.039,14	345.979.816.325,60	(3.427.259.628,81)	0,01

Nilai buku Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp323.090.567.039,14 dan Rp345.979.816.325,60. Terjadi penurunan nilai buku Aset Lainnya dibandingkan tahun lalu sebesar Rp3.427.259.628,81 atau sebesar 0,01%.

Perhitungan nilai buku Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp323.090.567.039,14 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	345.979.816.325,60
Penambahan Tahun 2023	Rp	3.427.259.628,81
Jumlah	**Rp**	**349.407.075.954,41**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	26.316.508.915,27
Nilai Buku Aset Lainnya Tahun 2023	**Rp**	**323.090.567.039,14**

Mutasi Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Rincian Aset Lainnya

NO	JENIS ASET LAINNYA	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	104.750.000,00	0,00	0,00	104.750.000,00
2	Kemitraan Dengan Pihak Keliga	5.428.624.651,00	0,00	0,00	5.428.624.651,00
Akumulasi Penyusutan		1.337.277.034,00	190.722.966,00	0,00	1.528.000.000,00
3	Aset Tidak Berwujud	12.302.534.379,00	1.309.990.898,00	152.647.748,00	13.459.877.529,00
Akumulasi Amortisasi		9.862.441.119,40	979.855.303,20	0,00	10.842.296.422,60
4	Aset Lain-Lain	340.057.960.895,00	3.294.507.000,01	26.163.861.167,27	317.188.606.727,74
Akumulasi Penyusutan		714.335.446,00	6.660.000,00	0,00	720.995.446,00
Nilai Perolehan Aset Lainnya		**357.893.869.925,00**	**4.604.497.898,01**	**26.316.508.915,27**	**336.181.858.907,74**
Nilai Buku Aset Lainnya		**345.979.816.325,60**	**3.427.259.628,81**	**26.316.508.915,27**	**323.090.567.039,14**

Penjelasan rinci atas penambahan Nilai Aset Lainnya sebesar Rp4.604.497.898,01 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai Penambahan dari Belanja Modal sebesar Rp227.022.748,00 merupakan penambahan Aset Tetap-Aset Lainnya yang berasal dari Belanja Modal tahun 2023. Adapun rincian penambahan Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut :

Tabel Penambahan Belanja Modal Aset Tetap-Aset Lainnya

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Penambahan Dari Belanja Modal			
1	Aset Tidak Berwujud	Dinas Perhubungan	74.375.000,00
2	Aset Tidak Berwujud	Puskesmas Ambulu	152.647.748,00
SUB TOTAL			**227.022.748,00**

2. Penambahan Koreksi Tahun 2023 sebesar Rp59.600.000,00 merupakan penambahan Aset Tetap-Aset Lainnya yang berasal dari Koreksi dari Jasa Pemeliharaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penambahan Koreksi sebelum tahun 2023 sebesar Rp1.344.469.500,00 merupakan penambahan Aset Tetap-Aset Lainnya yang berasal dari Koreksi dari Persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
4. Penambahan Koreksi sebelum tahun 2023 sebesar Rp0,0077000 merupakan Penambahan Aset Tetap-Aset Lainnya dikarenakan Koreksi Penyesuaian Angka Dibelakang Koma dijelaskan sebagai berikut :

Tabel Penambahan Koreksi Penyesuaian Angka Dibelakang Koma

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Aset Lain-Lain Lainnya	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	0,0040000
2	Aset Lain-Lain Lainnya	Dinas Pendidikan	0,0037000
SUB TOTAL			**0,0077000**

5. Nilai Penambahan dari Reklasifikasi antar akun sebesar Rp2.973.405.650,00 merupakan penambahan Aset Tetap-Aset Lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset tetap antar akun/antar KIB. Adapun rincian penambahan Reklasifikasi antar Akun pada Aset Lainnya tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel Reklasifikasi Antar Akun Aset Lainnya

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
PENAMBAHAN REKLASIFIKASI DARI PERALATAN DAN MESIN			
1	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihibahkan	Dinas Pendidikan	797.370.000,00
SUB TOTAL			**797.370.000,00**
PENAMBAHAN REKLASIFIKASI DARI GEDUNG DAN BANGUNAN			
1	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihibahkan	Dinas Pendidikan	382.044.500,00
SUB TOTAL			**382.044.500,00**
PENAMBAHAN REKLASIFIKASI DARI JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI			
1	Aset Rusak Berat/Usang	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	8.880.000,00
2	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihibahkan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	761.743.000,00
SUB TOTAL			**770.623.000,00**
PENAMBAHAN REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP LAINNYA			
1	Aset Tidak Berwujud	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	166.845.400,00
2	Aset Tidak Berwujud	Badan Pendapatan Daerah	243.783.750,00
3	Aset Tidak Berwujud	Dinas Komunikasi Dan Informatika	598.564.000,00
4	Aset Tidak Berwujud	Dinas Pendidikan	14.175.000,00
SUB TOTAL			**1.023.368.150,00**
TOTAL			**2.973.405.650,00**

6. Terdapat Penambahan Koreksi Akumulasi Penyusutan atas aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp190.722.966,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan SDM dikarenakan kurang catat pada neraca.
7. Terdapat Penambahan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp979.855.303,20 merupakan penambahan yang berasal dari beban penyusutan tahun 2023.
8. Terdapat Penambahan Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya-Aset Lain-Lain sebesar Rp6.660.000,00 merupakan Akumulasi atas Aset Jalan, Irigrasi dan Jaringan (berupa antena) pada Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi yang di reklasifikas ke Aset Rusak Berat/Usang.

Sedangkan Penjelasan rinci atas Pengurangan Nilai Aset Lainnya tahun 2023 sebesar Rp26.316.508.915,27 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai Penghapusan Barang tahun 2023 merupakan Penghapusan dari Aset Rusak Berat/Usang dan Aset Lain-Lain Lainnya sebesar Rp3.968.390.214,27 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel Pengurangan Aset Lainnya

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	244 816 650 00
2	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	320 400 000 00
3	Aset Rusak Berat/Usang	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	2 487 006 400,00
TOTAL			3.052.223.050,00

- Penghapusan Aset Lain-Lain Lainnya sebesar Rp693.377.015,37 berdasarkan SK Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Nomor : 188.45/21/SEKDA/1.12/2024 Tanggal 16 Januari 2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Jember.
- Penghapusan Aset Lain-Lain Lainnya Rp222.790.148,90 berdasarkan SK Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Nomor : 188.4/134/SEKDA/1.12/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah pada Rumah Sakit Daerah Soebandi Kabupaten Jember.

2. Nilai Pengurangan Aset Lain-Lain Lainnya sebesar Rp671.834.081,00 merupakan pengurangan Aset Lain-Lain Lainnya yang berasal dari Penghapusan Hibah ke Kantor Kejaksaan Negeri Jember berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/483/1.12/2023 tanggal 13 Oktober 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Nilai Pengurangan Koreksi ke Persediaan sebesar Rp502.056,00 merupakan pengurangan Aset Tidak Berwujud pada Puskesmas Ambulu dikarenakan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap sehingga dimutasi ke Persediaan.

4. Nilai Pengurangan Koreksi karena Doubel Catat sebesar Rp15.000.000,00 merupakan pengurangan koreksi sebelum tahun 2023 Aset Rusak Berat/Usang pada Dinas Sosial.
5. Pengurangan dari Reklasifikasi Antar Akun sebesar Rp225.145.692,00 merupakan pengurangan Aset Tetap-Aset Lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset tetap antar akun/antar KIB. Rincian pengurangan Aset Tetap-Aset Lainnya dari Reklasifikasi antar Akun disajikan dalam tabel berikut :

Tabel Pengurangan Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap-Aset Lainnya

NO	JENIS SUB AKUN	OPD	NILAI (Rp)
REKLAS KE PERALATAN DAN MESIN			
1	Aset Tidak Berwujud	Puskesmas Ambulu	152.145.692,00
2	Aset Rusak Berat/Usang	Kecamatan Panti	73.000.000,00
SUB TOTAL			**225.145.692,00**

9. Pengurangan Nilai TDF sebesar Rp21.435.636.872,00 karena telah disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Jember pada Rekening RKUD pada tanggal 11 April 2023 sebesar Rp9.607.349.988,00 pada tanggal 14 April 2023 sebesar Rp5.914.144.000,00 dan pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp5.914.142.884,00.

5.3.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
104.750.000,00	104.750.000,00	0,00	0,00

Nilai buku Aset Lainnya-Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp104.750.000,00 dan Rp104.750.000,00. Tidak terdapat perubahan nilai Aset Lainnya- Tagihan Penjualan Angsuran pada tahun 2023.

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	104.750.000,00
Penambahan Tahun 2023	Rp	0,00
Jumlah	**Rp**	**104.750.000,00**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	0,00
Nilai buku AL-Tagihan Penjulaan Angsuran	**Rp**	**104.750.000,00**

5.3.1.5.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
5.428.624.651,00	5.428.624.651,00	0,00	0,00

Nilai buku Aset Lainnya-Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.428.624.651,00 dan Rp5.428.624.651,00. Tidak terdapat perubahan nilai Aset Lainnya- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada tahun 2023.

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	5.428.624.651,00
Penambahan Tahun 2023	Rp	0,00
Jumlah	**Rp**	**5.428.624.651,00**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	0,00
Nilai buku Al-Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	**Rp**	**5.428.624.651,00**

5.3.1.5.3 Aset Tak Berwujud

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
13.459.877.529,00	12.302.534.379,00	1.157.343.150,00	9,40%

Nilai buku Aset Lainnya- Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.459.877.529,00 dan Rp12.302.534.379,00. Terjadi peningkatan nilai buku Aset Lainnya dibandingkan tahun lalu sebesar Rp1.157.343.150,00 atau sebesar 9,40%. Mutasi nilai Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.459.877.529,00 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

Tabel Rincian Aset Tak Berwujud

NO	OPD	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR (Rp)
1	Bagian Hukum	37.600.000,00	0,00	0,00	37.600.000,00
2	Bagian Organisasi	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00
3	Bagian Pembangunan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5	Sekretariat Dewan	58.025.000,00	0,00	0,00	58.025.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	465.667.600,00	0,00	0,00	465.667.600,00

NO	OPD	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR (Rp)
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	640.431.000,00	0,00	0,00	640.431.000,00
8	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	128.650.000,00	59.600.000,00	0,00	188.250.000,00
9	Badan Pendapatan Daerah	1.537.545.000,00	243.783.750,00	0,00	1.781.328.750,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	508.000.000,00	0,00	0,00	508.000.000,00
11	Dinas Kesehatan	664.232.500,00	0,00	0,00	664.232.500,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
13	Dinas Pendidikan	30.399.000,00	14.175.000,00	0,00	44.574.000,00
14	Dinas Perhubungan	433.004.000,00	74.375.000,00	0,00	507.379.000,00
15	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	94.600.000,00	0,00	0,00	94.600.000,00
16	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	26.500.000,00	0,00	0,00	26.500.000,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.586.080.000,00	598.564.000,00	0,00	2.184.644.000,00
18	Dinas Perikanan	24.950.000,00	0,00	0,00	24.950.000,00
19	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	545.200.000,00	0,00	0,00	545.200.000,00
20	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	4.128.235.279,00	166.845.400,00	0,00	4.295.080.679,00
21	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	1.245.415.000,00	0,00	0,00	1.245.415.000,00
22	Puskesmas Ambulu	0,00	152.647.748,00	152.647.748,00	
TOTAL		12.302.534.379,00	1.309.990.898,00	152.647.748,00	13.459.877.529,00

5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
10.842.296.422,60	9.862.441.119,40	(979.855.303,20)	9,93

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.842.296.422,60 dan Rp9.862.441.119,40. Terjadi kenaikan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dibandingkan tahun lalu sebesar Rp979.855.303,20 atau sebesar 9,93%.

Perhitungan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.842.296.422,60 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	9.862.441.119,40
Penambahan Tahun 2023	Rp	979.855.303,20
Jumlah	**Rp**	**10.842.296.422,60**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	0,00
Nilai Ak. Amotisasi ATB	**Rp**	**10.842.296.422,60**

Adapun rincian nilai akumulasi amortisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.842.296.422,60 dirinci sebagai berikut :

Tabel Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

NO	OPD	SALDO AWAL (Rp)	AMORTISASI 2023 (Rp)	PENAMBAHAN 2023 (Rp)	KOREKSI/REKLAS 2023 (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
1	Bagian Hukum	37.600.000,00	0,00	0,00	0,00	37 600.000,00
2	Bagian Organisasi	59.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	69 000 000,00
3	Bagian Pembangunan	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
4	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5	Sekretariat Dewan	58.025.000,00	0,00	0,00	0,00	58 025 000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	423.667.600,00	21.000.000,00	0,00	0,00	444 667 600,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	378.932.400,00	87.166.200,00	0,00	0,00	466.098.600,00
8	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	128.650.000,00	0,00	0,00	0,00	128 650 000,00
9	Badan Pendapatan Daerah	1.517.945.000,00	68.356.750,00	0,00	0,00	1 586.301 750,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	447.700.000,00	60.300.000,00	0,00	0,00	508 000 000,00
11	Dinas Kesehatan	662.412 500,00	1.820 000,00	0,00	0,00	664 232 500,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	17 600 000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	26 400 000,00
13	Dinas Pendidikan	27 624 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	31 359 000,00
14	Dinas Perhubungan	410 759 000,00	22.245 000,00	0,00	0,00	433 004 000,00

NO	OPD	SALDO AWAL (Rp)	AMORTISASI 2023 (Rp)	PENAMBAHAN 2023 (Rp)	KOREKSI/REKLAS 2023 (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
15	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	94.600.000,00	0,00	0,00	0,00	94.600.000,00
16	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	395.636.000,00	0,00	0,00	0,00	395.636.000,00
18	Dinas Perikanan	24.950.000,00	417.928.800,00	0,00	0,00	442.878.800,00
19	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	254.630.000,00	85.170.000,00	0,00	0,00	339.800.000,00
20	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	3.645.794.619,40	193.333.553,20	0,00	0,00	3.839.128.172,60
21	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	1.245.415.000,00	0,00	0,00	0,00	1.245.415.000,00
	TOTAL	**9.862.441.119,40**	**979.855.303,20**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**10.842.296.422,60**

5.3.1.5.5 Aset Lain-lain

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
316.467.611.281,74	339.343.625.449,00	(22.876.014.167,26)	6,74

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp316.467.611.281,74 dan Rp339.343.625.449,00. Terjadi penurunan nilai buku Aset Lain-lain dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 22.876.014.167,26 atau sebesar 6,74%. Perhitungan nilai buku Aset Lainnya-Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp316.467.611.281,74 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	339.343.625.449,00
Penambahan Tahun 2023	Rp	3.294.507.000,01
Jumlah	Rp	342.638.132.449,01
Pengurangan Tahun 2023	Rp	26.170.521.167,27
Nilai Buku AL-Aset Lain-lain Tahun 2023	**Rp**	**316.467.611.281,74**

Adapun rincian nilai Aset Lainnya-Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp316.467.611.281,74 dirinci sebagai berikut :

Tabel Rincian Aset Lainnya-Aset Lain-lain

NO	JENIS	SALDO	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Asot Lain-Lain :				
	a. Aset Rusak Berat/Usang	28.096.143.505,00	8.880.000,00	3.140.223.050,00	24.964.800.455,00
	Ak. Penyusutan	505.738.946,00	6.660.000,00	0,00	512.398.946,00
	Nilai Buku	27.590.404.559,00	2.220.000,00	3.140.223.050,00	24.452.401.509,00
	Fasilitas TDF	21.435.636.872,00	0,00	21.435.636.872,00	0,00
	b. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihibahkan	152.600.115.338,60	1.941.157.500,00	0,00	154.541.272.838,60
	c. Aset Lain-Lain Lainnya	137.926.065.179,40	1.344.469.500,01	1.588.001.245,27	137.682.533.434,14
	Ak. Penyusutan	208.596.500,00	0,00	0,00	208.596.500,00
	Nilai Buku	137.717.468.679,40	1.344.469.500,01	1.588.001.245,27	137.473.936.934,14
Nilai Perolehan Aset Lain-lain		**340.057.960.895,00**	**3.294.507.000,01**	**26.163.861.167,27**	**317.188.606.727,74**
Nilai Buku Aset Lain-lain		**339.343.625.449,00**	**3.287.847.000,01**	**26.163.861.167,27**	**316.467.611.281,74**

Bahwa Akumulasi Penyusutan yang disajikan pada Aset Lain-lain merupakan Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap yang direklasifikasi ke Aset Lainnya dengan membawa Akumulasi Penyusutannya sedangkan untuk Aset Tetap yang direklasifikasi ke Aset Lainnya sebelum berlakunya Sistem Akuntansi berbasis akrual tidak disusutkan.

Penjelasan rinci atas penambahan Nilai Aset Lain-lain sebesar Rp3.294.507.000,01 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Penambahan Reklasifikasi dari Jalan, Irigrasi, dan Jaringan sebesar Rp8.880.000,00 merupakan penambahan Aset Lain-lain yang berasal Reklasifikasi dari Jalan, Irigrasi, dan Jaringan tahun 2023 pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi.
2. Nilai Penambahan Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp382.044.500,00 merupakan penambahan Aset Lain-lain yang berasal reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan tahun 2023 pada Dinas Pendidikan.
3. Nilai Penambahan Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp761.743.000,00 merupakan penambahan Aset Lain-lain yang berasal Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.
4. Nilai Penambahan Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp797.370.000,00 merupakan penambahan Aset Lain-lain yang berasal Rekalsifikasi dari Peralatan dan Mesin tahun 2023 pada Dinas Pendidikan.

5. Penambahan Koreksi sebelum tahun 2023 sebesar Rp0,0077000 merupakan Penambahan Aset Tetap-Aset Lainnya dikarenakan Koreksi Penyesuaian Angka Dibelakang Koma dijelaskan sebagai berikut :

Tabel Penambahan Koreksi Penyesuaian Angka Dibelakang Koma

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Aset Lain-Lain Lainnya	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	0,0040000
2	Aset Lain-Lain Lainnya	Dinas Pendidikan	0,0037000
SUB TOTAL			0,0077000

6. Penambahan Koreksi sebelum tahun 2023 sebesar Rp1.344.469.500,00 merupakan Penambahan Aset Tetap-Aset Lainnya dikarenakan Koreksi dari Persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sedangkan Penjelasan rinci atas Pengurangan Nilai Aset Lain-lain tahun 2023 sebesar Rp26.163.861.167,27 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai Penghapusan Barang tahun 2023 merupakan Penghapusan dari Aset Lain-Lain- Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp3.052.223.050,00 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel Penghapusan Barang Aset Rusak

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	PENGHAPUSAN BARANG
1	Aset Rusak Berat/Usang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	244.816.650,00
2	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	320.400.000,00
3	Aset Rusak Berat/Usang	Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr Soebandi	2.487.006.400,00
SUB TOTAL			3.052.223.050,00

2. Nilai Pengurangan Koreksi ke dikarenakan doubel catat tahun 2023 sebesar Rp15.000.000,00 merupakan Pengurangan Aset Lain-lain- Aset Rusak Berat/usang yang berasal dari Koreksi dikarenakan doubel catat tahun 2023 pada Dinas Sosial.
3. Nilai Pengurangan Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp73.000.000,00 merupakan Pengurangan Aset Lain-lain-Aset Rusak Berat/Usang yang berasal dari Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin tahun 2023 pada Kecamatan Panti.
4. Nilai Penghapusan Barang tahun 2023 merupakan Penghapusan dari Aset Lain-Lainnya sebesar Rp916.167.164,27 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel Penghapusan Barang Aset Lain-Lainnya

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	PENGHAPUSAN BARANG
1	Aset Lain-Lainnya	Bagian Hukum	22.654.000,00
2	Aset Lain-Lainnya	Bagian Kesejahteraan Rakyat	176.776.900,00
3	Aset Lain-Lainnya	Bagian Administrasi Pembangunan	202.509.615,37

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	PENGHAPUSAN BARANG
4	Aset Lain-Lainnya	Bagian Tata Pemerintahan	19.484.000,00
5	Aset Lain-Lainnya	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15.205.000,00
6	Aset Lain-Lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38.600.500,00
7	Aset Lain-Lainnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	27.430.000,00
8	Aset Lain-Lainnya	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	74.605.000,00
9	Aset Lain-Lainnya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	97.024.000,00
10	Aset Lain-Lainnya	Dinas Tenaga Kerja	19.088.000,00
11	Aset Lain-Lainnya	Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr Soebandi	222.790.148,90
		SUB TOTAL	916.167.164,27

5. Nilai Pengurangan Hibah ke Kejaksaan Negeri Jember sebesar Rp671.834.081,00 merupakan Pengurangan Aset Lain-lain-Aset Lain-Lain Lainnya yang berasal dari Hibah ke Kejaksaan Negeri Jember pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.
6. Pengurangan Nilai TDF sebesar Rp21.435.636.872,00 karena telah disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Jember pada Rekening RKUD pada tanggal 11 April 2023 sebesar Rp9.607.349.988,00 pada tanggal 14 April 2023 sebesar Rp5.914.144.000,00 dan pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp5.914.142.884,00.

5.3.2 KEWAJIBAN

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
73.215.584.795,52	78.314.390.427,42	(5.098.805.631,90)	(6,51)

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp73.215.584.795,52 dan Rp78.314.390.427,42. Terjadi penurunan nilai Kewajiban Jangka Pendek dibandingkan tahun lalu sebesar Rp5.098.805.631,90 atau 6,51%.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp73.215.584.795,52 sedangkan per 31 Desember 2022 Rp78.314.390.427,42. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2023

No	Keterangan	2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka	6.907.909.096,31	0,00	7.233.059.381,97	6.788.884.096,31	7.352.084.381,97
2	Utang Belanja	67.896.674.565,86	(5.890.707,99)	97.515.129.671,35	100.995.975.228,79	64.409.938.300,43

No	Keterangan	2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.509.806.765,25	0,00	1.453.562.112,98	3.509.806.765,11	1.453.562.113,12
Jumlah		78.314.390.427,42	(5.890.707,99)	106.201.751.166,30	111.294.666.090,21	73.215.584.795,52

5.3.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
7.352.084.381,97	6.907.909.096,31	444.175.285,66	6,43

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp7.352.084.381,97 dan Rp6.907.909.096,31, yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp444.175.285,66 atau 6,43% dibandingkan Tahun Anggaran 2022.

Saldo pendapatan diterima dimuka pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.352.084.381,97, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka – Sewa Tanah Per 31 Desember 2023

No	Keterangan	2022 (Rp)	Reklas	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	**Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame**					
	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron - Bapenda	0,00	1.601.095.263,00	1.770.653.914,00	1.601.095.263,00	1.770.653.914,00
2	**Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi**					
	- Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Tanah - Tanah Bangunan- Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum - Dinas Perhubungan	5.108.263.833,31	0,00	5.100.416.749,97	5.108.263.833,31	5.100 416.749,97
3	**Pendapatan Diterima Dimuka - Lain-lain PAD**					
	- Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Tanah - Tanah Bangunan Sewa Lahan Gedung/Bangunan - RS.dr. Soebandi	115.500.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	73 500 000 00
	- Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Tanah - Tanah Bangunan Gedung Perdaganagn - Pajak Reklame - Bapenda	1.601.095.263,00	(1.601.095.263,00)	0,00	0,00	0 00
	- Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Tanah - Tanah untuk	63.050.000,00	0,00	0,00	31.525.000,00	31 525 000,00

No	Keterangan	2022 (Rp)	Reklas	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
	Bangunan Industri - Kantor Kasda dan Lahan ATM - BPKAD					
	- Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Tanah - Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja - RS. Kalisat	20.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	14.000.000,00
	- Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Tanah - Tanah untuk Bangunan Industri - BPKAD	0,00	0,00	361.988.718,00	0,00	361.988.718,00
Jumlah		6.907.909.096,31	0,00	7.233.059.381,97	6.788.884.096,31	7.352.084.381,97

1) **Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya - Pajak Reklame - Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron - Bapenda**

Pajak Reklame - Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, merupakan pendapatan yang diterima dari reklame dengan masa sewa mulai dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 terdapat pengurangan pajak reklame di 2023 sebesar Rp1.601.095.263,00 dan penambahan Rp1.770.653.914,00 sehingga yang diakui sebagai pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp1.770.653.914,00

2) **Pendapatan Diterima Dimuka – Sewa Tanah - Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum – Dinas Perhubungan**

Pendapatan diterima dimuka retribusi Parkir tepi jalan umum - Dinas Perhubungan terdiri dari 2 yaitu parkir berlanggan yang dipungut oleh SAMSAT dan parkir berlangganan (Nomor Luar Propinsi) yang dipungut harian oleh juru parkir berupa karcis. Pada tahun 2023 terdapat tambahan retribusi parkir tepi jalan umum (sudah dibayarkan pada saat jatuh tempo pajak kendaraan bermotor) sebesar Rp5.100.416.749,97 dan terdapat pengurangan sebesar Rp5.100.416.749,97 dimana retribusi tersebut sudah dijalankan masa retribusinya. Saldo pendapatan diterima dimuka retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp5.100.416.749,97 merupakan pendapatan diterima dimuka untuk Parkir tepi jalan umum pada tahun 2023.

3) **Pendapatan Diterima Dimuka – Sewa Tanah - Sewa Gedung/Lahan Untuk ATM – RS dr. Soebandi**

Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa Gedung untuk Kantor Kas Bank Pembangunan Daerah Jawa timur Tbk. Berdasarkan Akta Notaris Siti Lestariningsih. SH Nomor 42 tanggal 22 Desember 2020 antara Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi Jember dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kantor

Cabang Jember tentang Perjanjian Sewa Menyewa sebagian dari bangunan lengkap dengan bagian-bagiannya berukuran 7,26 m x 5,83 m yang terletak di Rumah Sakit Daerah dr Soebandi dan dibangun untuk Kantor Kas RS. dr Soebandi. Jangka waktu sewa 5 tahun terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan 10 Oktober 2025 dengan besar sewa selama 5 tahun senilai Rp210.000.000,00 atau sebesar 3.500.000,00 per bulan. Pada tahun 2023 pengurangan pendapatan diterima dimuka lainnya atas sewa lahan ATM di RS dr. Soebandi sebesar Rp42.000.000,00 sudah diakui sebagai pendapatan. Sehingga saldo pendapatan diterima dimuka untuk Sewa Lahan ATM RS dr. Soebandi sebesar Rp73.500.000,00.

4) **Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya - Retribusi atas Sewa Lahan ATM – BPKAD**

Penyewaan atas aset pemerintah yang disewakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember merupakan sewa gedung aset pemerintah Kabupaten Jember, sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Jember dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Jember Nomor : 028/578/35.09.412/2020 dan Nomor : 059/599/JBR/UM&AKT/Srt tanggal 3 Februari 2020, merupakan perjanjian sewa atas gedung Kantor Kas dan Rumah ATM yang berada didalam komplek Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Jember Jalan Sudarman No. 1 Jember (Kantor Kas berada disebelah barat gedung eks. BPKAD Jember dan lahan untuk rumah ATM berada di sebelah selatan pos pintu keluar Kantor Pemerintah Kabupaten Jember). Jangka waktu sewa selama 5 Tahun dimulai dari 3 Februari 2020 sampai dengan 3 Februari 2025, Besarnya sewa selama 5 Tahun sebesar Rp143.075.000,00 yang diakui sebagai pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp31.525.000,00. Pengurangan pendapatan diterima dimuka atas sewa Gedung Aset Pemkab Jember sebesar Rp31.525.000,00 sudah diakui sebagai pendapatan. Sehingga saldo pendapatan diterima dimuka untuk Sewa gedung aset Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023 sebesar Rp31.525.000,00.

5) **Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya - Sewa atas Gedung/Lahan Untuk ATM – RS Kalisat**

Penyewaan atas aset pemerintah yang disewakan RSD Kalisat Jember merupakan sewa Lahan ATM aset pemerintah Kabupaten Jember, sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Aset Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan Akta Notaris Is Hariyanto Imam Salwawi Nomor: 18 tanggal 6 April 2021 perjanjian sewa antara RSD Kalisat - Jember dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Kalisat - Jember, merupakan sewa lahan untuk Rumah ATM yang berada didalam komplek

RSD Kalisat Jalan PB. Sudirman No.31 Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Jangka waktu sewa selama 5 Tahun dimulai dari 01 April 2021 sampai dengan 01 April 2026, besarnya sewa selama 5 tahun sebesar Rp33.500.000,00 sudah termasuk biaya pajak penghasilan sebesar 10% yang diakui sebagai pendapatan diterima dimuka tahun 2023. Pengurangan pendapatan diterima dimuka atas sewa lahan ATM di RS Kalisat Jember sebesar Rp6.000.000,00 sudah diakui sebagai pendapatan. Sehingga saldo pendapatan diterima dimuka untuk Sewa Lahan ATM RS Kalisat Jember tahun 2023 sebesar Rp14.000.000,00.

6) **Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya - Sewa Tanah - Tanah untuk Bangunan Industri – BPKAD**

Penyewaan atas aset pemerintah yang disewakan BPKAD Kabupaten Jember merupakan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Jember, sesuai Surat Perjanjian Sewa Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Jember. Berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016, paragraf keenam pasal 130 tentang pembayaran sewa, penandatangan perjanjian sewa Barang Milik Daerah dilakukan setelah dilakukan pembayaran. Saat ini Dokumen terkait Sewa Barang Milik Daerah atas Sewa Tanah masih dalam proses penandatangan Bupati Jember. Tabel pendapatan diterima dimuka Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2023 sebesar Rp 361.988.718,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2023

No	Penyewa	Nilai Kontrak	Tanggal Sewa Kontrak	Nilai Pendapatan di Terima dimuka	Keterangan
1	Ahmad Maulana Cholily	15.000.000,00	31 Mei 2022 - 31 Mei 2024	6.250.000,00	Sewa Tanah 1 Tahun Tahun 2023
2	Alex Wirjanto	131.430.000,00	27 Des 2023 - 26 Des 2025	131.430.000,00	Sewa Tanah 2 Tahun Tahun 2023
3	Anton Basuki	44.976.600,00	27 Des 2023 - 26 Des 2025	44.976.600,00	Sewa Tanah 2 Tahun Tahun 2023
4	Asmadi Imam Turyono	18.290.972,00	27 Des 2023 - 26 Des 2024	18.290.972,00	Sewa Tanah 1 Tahun Tahun 2023
		4.598.750,00	27 Des 2023 - 26 Des 2024	4.598.750,00	Sewa Tanah 1 Tahun Tahun 2023
5	Bambang Sutikno	5.498.288,00	27 Des 2023 - 26 Des 2024	5.498.288,00	Sewa Tanah 1 Tahun Tahun 2023
6	CV Berkah Bumi Blambangan	1.464.000,00	27 Des 2023 - 25 April 2024	1.464.000,00	Sewa Tanah 1 Tahun Tahun 2023
		1.750.000,00	27 Des 2023 - 25 April 2024	1.750.000,00	Sewa Tanah 1 Tahun Tahun 2023

No	Penyewa	Nilai Kontrak	Tanggal Sewa Kontrak	Nilai Pendapatan di Terima dimuka	Keterangan
		2.397.500,00	27 Des 2023 - 25 April 2024	2.397.500,00	Sewa Tanah 1 Tahun Tahun 2023
7	Imam Hanafi	15.039.000,00	27 Des 2023 - 26 Des 2027	15.039.000,00	Sewa Tanah 4 Tahun Tahun 2023
8	Ivantara Bintang	27.000.000,00	27 Des 2023 - 26 Des 2025	27.000.000,00	Sewa Tanah 2Tahun Tahun 2023
9	Kusaeri	3.847.608,00	27 Des 2023 - 26 Des 2024	3.847.608,00	Sewa Tanah 1 Tahun Tahun 2023
10	Mohammad Yasin	8.379.000,00	27 Des 2023 - 26 Des 2024	8.379.000,00	Sewa Tanah 1 Tahun Tahun 2023
11	Nurul Hafid Yasin	1.758.260,00	27 Des 2023 - 26 Des 2024	1.758.260,00	Sewa Tanah 1 Tahun Tahun 2023
		4.412.940,00	27 Des 2023 - 26 Des 2024	4.412.940,00	Sewa Tanah 1 Tahun Tahun 2023
12	PT Gading Mas Indonesia Teguh	84.895.800,00	27 Des 2023 - 26 Des 2024	84.895.800,00	Sewa Tanah 1 Tahun Tahun 2023
Jumlah		**370.738.718,00**		**361.988.718,00**	

5.3.2.2 Utang Belanja

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
64.409.938.300,43	67.896.674.565,86	(3.486.736.265,43)	(5,14)

Utang belanja per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp64.409.938.300,43 dan Rp67.896.674.565,86 yaitu mengalami penurunan sebesar Rp3.486.736.265,43 dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Nilai Utang belanja mengalami penurunan sebesar Rp3.486.736.265,43 atau 5,14%.

Utang belanja Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2023 sebesar Rp64.409.938.300,43 yang terdiri atas:

Tabel Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2023

No	Keterangan	2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	5.312.521.254,00		13.827.403.421,06	13.341.309.015,06	5.798.615.660,00

No	Keterangan	2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	28.113.235.793,95	131.929,01	83.683.865.318,29	58.217.680.190,73	53.579.552 850,52
3	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.099.876 140,00		1.505.682,00	29.134.069.860,00	967.311 962,00
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.680.685.983,78	(6.022.637,00)	2.355.250,00	215.359.363,00	3.461.659.233,78
5	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	688.583.539,65		-	87.556.800,00	601.026 739,65
6	Utang Belanja Bagi Hasil	1.771.854,48		-	-	1.771.854,48
JUMLAH		67.896.674.565,86	(5.890.707,99)	97.515.129.671,35	100.996.975.228,79	64.409.938.300,43

1) Utang Belanja Pegawai

Utang belanja pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.798.615.660,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2023

NO	Keterangan	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
A	***Utang Belanja Gaji dan Tunjangan***				
1	**Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**				
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS - RS Balung	26.680.556,00	320.953.971,00	238.578.806,00	109.055.721,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN - RS Kalisat	9.596.550,00	18.970.655,00	9.596.550,00	18.970.655,00
B	***Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN***				
1	**Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN**				
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Karangduren	0,00	38.939.424,00	0,00	38.939.424,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Rambipuji	0,00	140.929.920,00	0,00	140.929 920,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Ajung	0,00	158.497.700,00	0,00	158 497 700,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Mangli	0,00	83.027.874,00	0,00	83 027 874,00

NO	Keterangan	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN- Dinas Kesehatan	834.791.001,00	0,00	377.535.352,00	457.255.649,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN- RS. Soebandi	3.382.899.601,00	3.397.798.933,00	3.382.899.601,00	3.397.798.933,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN- RS. Balung	746.806.090,00	9.127.822.961,06	9.066.093.025,06	808.536.026,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - RS. Kalisat	266.605.681,00	534.271.983,00	266.605.681,00	534.271.983,00
	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan (Clinical Instructor) - RS Kalisat	45.141.775,00	0,00	0,00	45 141 775,00
2	**Utang Belanja Honorarium - Honorarium Penanggungjawab Pengololaa Keuangan**				
	Utang Belanja Honorarium - Honorarium Penanggungjawab Pengololaa Keuangan - Puskesmas Ajung	0,00	6.190.000,00		6.190 000,00
Jumlah		**5.312.521.254,00**	**13.827.403.421,06**	**13.341.309.015,06**	**5.798.615.660,00**

2) Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.579.552.850,52 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023

No	Keterangan	2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	pengurangan	2023 (Rp)
A	Utang Belanja Barang	10.913.034.304,58	0,01	56.968.314.685,35	31.547.734.987,79	36 333 614 002,15
B	Utang Belanja Jasa	16.841.085.729,33	131.929,00	24.520.102.508,94	25.178.336.858,94	16 182.983 308,33
C	Utang Belanja Pemeliharaan	4.539.900,00	0,00	1.248.620.474,00	1.177.965.544,00	75.194.830,00
D	Utang Belanja Perjalanan Dinas	3.785.000,00	0,00	0,00	3.785.000,00	0,00
E	**Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	350.790.860,04	0,00	946.827.650,00	309.857.800,00	987 760 710,04
JUMLAH		**28.113.236.793,95**	**131.929,01**	**83.683.865.318,29**	**58.217.680.190,73**	**53.579.552.860,52**

A. Utang Belanja Barang Per 31 Desember 2023 sebesar Rp36.333.614.002,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Utang Belanja Barang Per 31 Desember 2023

NO	Keterangan	2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia					
	Utang Belanja Bahan - Bahan Kimia Dr. Subandi	643 775.528,20	0,00	5.210.598.124,00	643.775.528,20	5.210.598.124,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas-Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utang Belanja Barang pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Dinas Kesehatan	4 903.200,00	0,00	0,00	4.903.200,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Disperindag	18 248.769,00	0,00	0,00	18.248 769,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - RS. Balung	0,00	0,00	141.288.074,00	136.682.399,00	4 605 675,00
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya					
	Utang Belanja Bahan-Bahan Lainnya - RS Kalisat	530.710.545,22		91.836.085,00	530.710 545,22	91.836 085,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan - RS Subandi	0,00		3.100.540,00		3.100 540,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Lainnya - RS Subandi	3.139.602.248,74		12.886.616.683,95	3.139.602.248,74	12.886.616 683,95
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Dr. Subandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					

NO	Keterangan	2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - BTT	15.920.970,00	0,00	0,00	0,00	15.920.970,00
6	**Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					-
7	**Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan**					-
	Utang Belanja Obat-Obatan - Obat - RS. Subandi	2.468.213.438,14	0,00	9.217.088.983,25	2.468.213.438,14	9.217.088.983,25
	Utang Belanja Obat-Obatan - Obat - RS Kalisat	282.751.716,12	0,01	0,00	282.751.716,12	0,01
	Utang Belanja Obat-Obatan - Obat - RS Balung	1.417.996.285,67		11.967.921.316,40	9.509.597.166,12	3.876.320.435,95
	Utang Belanja Obat-Obatan - Obat - Puskesmas Cakru	0,00	0,00	486.455,00	0,00	486.455,00
8	**Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya**					-
	Utang Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya - RS Balung	1.727.534.920,49	0,00	13.577.981.583,65	11.610.354.735,40	3.695.161.768,74
9	**Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura**					-
	Utang Belanja Natura dan Pakan Natura - RS Balung	12.403.105,00	0,00	1.240.001.540,10	1.209.591.613,85	42.813.031,25
10	**Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat**					-
	Utang Belanja Makanan Minuman Rapat - RS Subandi	7.975.078,00	0,00	0,00	7.975.078,00	0,00
	Utang Belanja Makanan Minuman Rapat - RS Balung	0,00	0,00	386.314.150,00	384.563.650,00	1.750.500,00
11	**Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesohatan**					-
	Utang Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan - RS. Subandi	201.569.500,00	0,00	674.145.550,00	201.569.500,00	674.145.550,00

NO	Keterangan	2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan - Dinas Kesehatan	338.748.000,00	0,00	0,00	224.868.000,00	113.880.000,00
	Utang Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan - RS Balung	6.500.000,00	0,00	1.116.518.600,00	1.115.006.400,00	8.012.200,00
	Utang Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Puskesmas BLUD :					
	- Puskesmas Gumukmas	0,00	0,00	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00
	- Puskesmas Wuluhan	0,00	0,00	10.575.000,00	0,00	10.575.000,00
	- Puskesmas Ambulu	0,00	0,00	23.580.000,00	0,00	23.580.000,00
	- Puskesmas Sabrang	0,00	0,00	3.285.000,00	0,00	3.285.000,00
	- Puskesmas Andongsari	0,00	0,00	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00
	- Puskesmas Tempurejo	0,00	0,00	18.085.000,00	0,00	18.085.000,00
	- Puskesmas Curahnongko	0,00	0,00	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00
	- Puskesmas Silo II	0,00	0,00	6.660.000,00	0,00	6.660.000,00
	- Puskesmas Mayang	0,00	0,00	14.130.000,00	0,00	14.130.000,00
	- Puskesmas Mumbulsari	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
	- Puskesmas Jenggawah	0,00	0,00	16.065.000,00	0,00	16.065.000,00
	- Puskesmas Ajung	0,00	0,00	12.285.000,00	0,00	12.285.000,00
	- Puskesmas Rambipuji	0,00	0,00	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00
	- Puskesmas Nogosari	0,00	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00
	- Puskesmas Karangduren	0,00	0,00	34.695.000,00	0,00	34.695.000,00
	- Puskesmas Umbulsari	0,00	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00
	- Puskesmas Paleran	0,00	0,00	49.263.000,00	0,00	49.263.000,00
	- Puskesmas Semboro	0,00	0,00	14.175.000,00	0,00	14.175.000,00
	- Puskesmas Jombang	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
	- Puskesmas Rowolengah	0,00	0,00	8.280.000,00	0,00	8.280.000,00
	- Puskesmas Tanggul	0,00	0,00	14.490.000,00	0,00	14.490.000,00
	- Puskesmas Klatakan	0,00	0,00	10.665.000,00	0,00	10.665.000,00
	- Puskesmas Bangsalsari	0,00	0,00	2.112.000,00	0,00	2.112.000,00
	- Puskesmas Panti	0,00	0,00	13.995.000,00	0,00	13.995.000,00
	- Puskesmas Arjasa	0,00	0,00	54.765.000,00	0,00	54.765.000,00
	- Puskesmas Ledokombo	0,00	0,00	15.750.000,00	0,00	15.750.000,00

NO	Keterangan	2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
	- Puskesmas Sumberjambe	0,00	0,00	12.915.000,00	0,00	12.915.000,00
	- Puskesmas Sukowono	0,00	0,00	19.890.000,00	0,00	19.890.000,00
	- Puskesmas Jelbuk	0,00	0,00	16.785.000,00	0,00	16.785.000,00
	- Puskesmas Kaliwates	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
	- Puskesmas Sumbersari	0,00	0,00	8.460.000,00	0,00	8.460.000,00
	- Puskesmas Gladakpakem	0,00	0,00	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00
12	**Utang Bolanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - BTT	36.860.000,00	0,00	0,00	0,00	36.860.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Dinas Kesehatan	59.321.000,00	0,00	0,00	59.321.000,00	0,00
	Utang Bolanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskosmas BLUD					
	Puskesmas Tempurejo	0,00	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
	Puskesmas Curahnongko	0,00	0,00	442.000,00	0,00	442.000,00
	Puskesmas Silo II	0,00	0,00	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00
	Puskesmas Karangduren	0,00	0,00	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00
	Puskesmas Semboro	0,00	0,00	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00
	Puskesmas Sumbersari	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
Jumlah		**10.913.034.304,68**	**0,01**	**56.968.314.685,35**	**31.647.734.987,79**	**36.333.614.002,15**

B. Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.182.983.308,33 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Utang Belanja Jasa Per 31 Desember 2023

NO	Keterangan	2022 (Rp)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara - Dinas Kesehatan	2.387.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387.000.000,00

NO	Keterangan	2022 (Rp)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
2	Utang Belanja Jasa Kantor - Honorarium Penyuluhan / Pendampingan - Dinas Kesehatan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
3	**Utang Belanja Jasa Kantor - Jasa Tenaga Kesehatan**						
	Utang Belanja Jasa Kantor - Jasa Tenaga Kesehatan - Dinas Kesehatan	861.809.430,00	0,00	0,00	0,00	159.723.189,00	702.086 241,00
	Utang Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Kesehatan - BTT	996.884.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 884 500,00
	Utang Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Kesehatan - Puskesmas Jemberkidul	0,00	0,00	0,00	9.869.600,00	0,00	9 869 600,00
	Utang Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Sumbersari	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1 000 000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Sumbersari	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1 000 000,00
4	**Utang Belanja Jasa Kantor - Jasa Tenaga Pelayanan Umum**						
	Utang Belanja Jasa Kantor - Jasa Tenaga Pelayanan Umum - Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum - RS Balung	495.000,00	0,00	0,00	47.245.000,00	46.312.500,00	1 427 500,00
6	**Utang Belanja Jasa Kantor - Jasa Pengolahan Sampah**						
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - RS Kalisat	26.531.220,00	0,00	0,00	40.400.670,00	26.531.220,00	40 400 670,00

NO	Keterangan	2022 (Rp)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - RS Balung	19.209.993,00	0,00	0,00	515.249.964,00	489.678.958,00	44.780.999,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - RS Subandi	0,00	0,00	0,00	114.762.900,00	0,00	114.762.900,00
7	Utang Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan - RS Balung	7.500.000,00	0,00	0,00	50.280.000,00	57.780.000,00	0,00
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	46.062.651,00	0,00	(126.540,00)	44.014.163,00	45.936.111,00	44.014.163,00
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	57.973.159,00	0,00	(68.784,00)	69.939.156,00	57.904.375,00	69.939.156,00
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	5.932.735.535,00	0,00	327.253,00	4.585.288.642,00	5.933.062.788,00	4.585.288.642,00
11	Utang Belanja Jasa Kantor-Langganan Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Utang Belanja Jasa Kantor-Internet	71.813.045,00	0,00	0,00	119.711.716,00	71.813.045,00	119.711.716,00
13	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman - BTT	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640.000,00
14	Utang Belanja Iuran Jaminan /Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP- Dinas Kesehatan	792.979.600,00	0,00	0,00	980.974.100,00	792.979.600,00	980.974.100,00
15	**Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**						
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN- RS Balung	29.992.012,00	0,00	0,00	720.547.930,00	613.692.436,00	136.847.506,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - RS Kalisat	9.035.064,00	0,00	0,00	19.875.017,00	9.035.064,00	19.875.017,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN-Klaim SPM RS Soetomo	16.170.544,00	(16.170.544,00)	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	Keterangan	2022 (Rp)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
	Surabaya - Dinas Kesehatan						
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN-Klaim J-Pasti Kueren - Dinas Kesehatan	404.471.050,00	(404.471.050,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Utang Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - RS Balung	0,00	0,00	0,00	33.527.000,00	32.750.000,00	777.000,00
17	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi						
	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya - BTT	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00
	Utang Belanja sewa alat kantor lainnya - RS Balung	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00
	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya - Sewa Alat Kedokteran Mata - RS. Kalisat	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	0,00	28.800.000,00
18	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Umum - RS. Balung	0,00	0,00	0,00	81.984.000,00	76.767.000,00	5.217.000,00
19	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar - BPKAD	1.833.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.333,33
20	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk	0,00	0,00	0,00	37.192.000,00	0,00	37.192.000,00

NO	Keterangan	2022 (Rp)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
	Pekerjaan Teknik Sipil Air - Bina Marga						
21	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi - Bina Marga	519.975.600,00	0,00	0,00	0,00	30.817.000,00	489.158.600,00
22	Utang Belanja Jasa konsultansi Konstruksi - Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur - RS Subandi	858.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 924 000,00
23	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi - Bina Marga	80.257.750,00	0,00	0,00	0,00	26 378 000,00	53 879 750,00
24	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air - Bina Marga	84.616.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.616.922,00
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Lainnya -Jasa Konsultansi Lainnya - RS Balung	0,00	0,00	0,00	132.456.569,00	124.464.569,00	7 992 000 00
25	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah						
	Utang Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-	1.075.619.910,00	0,00	0,00	13.876.801.412,94	13.707.237.223,94	1.245 184 099,00

NO	Keterangan	2022 (Rp)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
	Pelayanan Kesehatan - RS. Balung						
	Utang Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum - Puskesmas Mangli	0,00	0,00	0,00	23.572.126,00	0,00	23.572.126,00
26	**Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS - Dinas Kesehatan**						
	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS - Klaim SPM RS dr Soetomo Surabaya - Dinas Kesehatan	0,00	16.170.544,00	0,00	0,00	16.170.544,00	0,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS - Klaim J Pasti Kueren Puskesmas - Dinas Kesehatan	0,00	404.471.050,00	0,00	0,00	404.471.050,00	0,00
27	**Utang Belanja Jasa Kantor - Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN**						
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN - RS Subandi	2.157.585.923,00	0,00	0,00	2.359.153.620,00	2.157.585.923,00	2.359.153.620,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN - RS Kalisat	285.246.263,00	0,00	0,00	626.456.923,00	285.246.263,00	626.456.923,00
	Utang Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan	3.223.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223.225,00

NO	Keterangan	2022 (Rp)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
	Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan - RS Kalisat						
Jumlah		16.841.085.729,33	0,00	131.929,00	24.520.102.508,94	25.178.336.858,94	16.182.983.308,33

C. Utang Belanja Pemeliharaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp75.194.830,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga -Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin Per 31 Desember 2023

No	Kotorangan	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga -Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin - RS Balung	4.539.900,00	107.605.320,00	87.265.220,00	24.880.000,00
2	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - RS Balung	0,00	150.171.522,00	118.507.692,00	31.663.830,00
3	Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kesehatan - RS Balung	0,00	990.843.632,00	972.192.632,00	18.651.000,00
JUMLAH		4.539.900,00	1.248.620.474,00	1.177.965.544,00	75.194.830,00

D. Utang Belanja Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri – Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Per 31 Desember 2023

NO	Kotorangan	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri– Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa - RS Soebandi	3.785.000,00	0,00	3.785.000,00	0,00
JUMLAH		3.785.000,00	0,00	3.785.000,00	0,00

E. Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per 31 Desember 2023 sebesar Rp987.760.710,04 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per 31 Desember 2023

NO	Keterangan	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Utang Belanja Jasa yang diberikan kpd pihak ke 3 - bagi hasil Retribusi Parkir - Dinas Perhubungan	114.748.200,00	69.701.400,00	114.748.200,00	69.701.400,00
2	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - RS Soebandi	187.926.600,00	870.554.250,00	187.926.600,00	870.554.250,00
3	Utang Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - RS Kalisat	7.183.000,00	6.572.000,00	7.183.000,00	6.572.000,00
4	Utang Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - BPKAD	40.933.060,04	0,00	0,00	40.933.060,04
JUMLAH		350.790.860,04	946.827.650,00	309.857.800,00	987.760.710,04

3) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp967.311.962,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023

No	Keterangan	2022 (Rp)	Penambahan	pengurangan	2023 (Rp)
1	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih - BTT	30.099.876.140,00	0,00	29.134.069.860,00	965.806.280,00
2	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer – Puskesmas Cakru	0,00	1.505.682,00	0,00	1.505.682,00
JUMLAH		30.099.876.140,00	1.505.682,00	29.134.069.860,00	967.311.962,00

4) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.461.659.233,78 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023

NO	Keterangan	2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	pengurangan	2023 (Rp)
1	Utang Belanja Modal Bangunan - Pertokoan, koprasi Pasar - Disperindag	3.459.303.983,78	0,00	0,00	0,00	3.459.303.983,78
2	Utang Belanja Modal Bangunan Kesehatan - RS Balung	221.382.000,00	(6.022.637,00)	0,00	215.359.363,00	0,00
	Utang Belanja Modal Bangunan Kesehatan - RS. Balung	0,00	0,00	2.355.250,00	0,00	2.355.250,00
JUMLAH		**3.680.685.983,78**	**(6.022.637,00)**	**2.355.250,00**	**215.359.363,00**	**3.461.659.233,78**

Tabel Rincian Utang Belanja Modal Bangunan - Pertokoan, Koperasi Pasar - Disperindag
Per 31 Desember 2023

No	Keterangan	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Konstruksi Pembangunan Pasar Manggisan Tahun 2018	217.234.200,60	0,00	0,00	217.234.200,60
2	Konstruksi Pembangunan Pasar Tegalbesar Tahun 2018	225.926.688,89	0,00	0,00	225.926.688,89
3	Pengakuan Nilai Fisik 100 % Konstruksi Pembangunan Pasar Bungur Tahun 2018 (Sisa Nilai Kontrak Yang Belum Dibayarkan pada tahun 2019)	358.897.685,54	0,00	0,00	358.897.685,54
4	Pengakuan Nilai Fisik 100 % Konstruksi Pembangunan Pasar Tegalbesar Tahun 2018 (Sisa Nilai Kontrak Yang Belum Dibayarkan pada tahun 2019)	78.611.178,75	0,00	0,00	78.611.178,75
5	Konsultan Pengawasan Pasar Balung Lama Tahun 2019 (Sisa Nilai Kontrak Yang Belum di Bayar)	9.847.200,00	0,00	0,00	9.847.200,00
6	Pengakuan KDP Konstruksi Fisik Pasar Balung Kulon (Selisih Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan)	211.874.180,00	0,00	0,00	211.874.180,00
7	Pengakuan Nilai Fisik 100 % Konstruksi Fisik Pasar Balung Kulon(Sisa Nilai Kontrak Yang Belum Dibayarkan pada tahun 2020)	1.332.367.400,00	0,00	0,00	1.332.367.400,00
8	Konsultan Pengawasan Pasar Balung Kulon Tahun 2019 (Sisa Nilai Kontrak Yang Belum di Bayar tahun 2020)	24.640.000,00	0,00	0,00	24.640.000,00
9	Pengakuan Nilai Fisik 100 % Konstruksi Fisik Pasar Mayang(Retensi Masa Pemeliharaan)	221.150.850,00	0,00	0,00	221.150.850,00

No	Keterangan	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
10	Konsultan Pengawasan Pasar Mayang(Retensi Konstruksi Fisik Masa Pemeliharaan)	9.881.800,00	0,00	0,00	9.881.800,00
11	Pengakuan Nilai Fisik 100 % Konstruksi Fisik Pasar Puger(Retensi Masa Pemeliharaan)	299.999.150,00	0,00	0,00	299.999.150,00
12	Konsultan Pengawasan Pasar Puger(Retensi Konstruksi Fisik Masa Pemeliharaan)	9.867.600,00	0,00	0,00	9.867.600,00
13	Pengakuan Nilai Fisik 100 % Konstruksi Fisik Pasar Sempolan(Retensi Masa Pemeliharaan)	223.006.850,00	0,00	0,00	223.006.850,00
14	Konsultan Pengawasan Pasar Sempolan(Retensi Konstruksi Fisik Masa Pemeliharaan)	7.386.900,00	0,00	0,00	7.386.900,00
15	Pengakuan Nilai Fisik 100 % Konstruksi Fisik Pasar Bungur(Retensi Masa Pemeliharaan)	221.247.300,00	0,00	0,00	221.247.300,00
16	Konsultan Pengawasan Pasar Bungur(Retensi Konstruksi Fisik Masa Pemeliharaan)	7.365.000,00	0,00	0,00	7.365.000,00
Jumlah		**3.459.303.983,78**	-	0,00	**3.459.303.983,78**

5) Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp601.026.739,65 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2023

No	Keterangan	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten - Bina Marga	139.778.842,40	0,00	87.556.800,00	52.222.042,40
2	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi - Bina Marga	548.804.697,25	0,00	0,00	548.804.697,25
Jumlah		**688.583.539,65**	**0,00**	**87.556.800,00**	**601.026.739,65**

6) Utang Belanja Bagi Hasil

Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.771.854,48 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Utang Belanja Bagi Hasil Per 31 Desember 2023

NO	Keterangan	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.771.854,48	0,00	0,00	1.771.854,48
Jumlah		1.771.854,48	0,00	0,00	1.771.854,48

5.3.2.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
1.453.562.113,12	3.509.806.765,25	(3.486.736.265,43)	(5,14)

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.453.562.113,12 dan Rp3.509.806.765,25, yaitu mengalami penurunan sebesar Rp3.486.736.265,43 atau (5,14) % dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.453.562.113,12 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2023

NO	Keterangan	2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2023 (Rp)
1	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian menara Telekomunikasi pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi	0,00	4.401.716,00	0,00	4.401.716,00
2	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD yang SAH - Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD - Uang Titipan Pasien - RS. dr. Soebandi	789.561.478,11	701.233.114,90	789.561.478,11	701.233.114,90
3	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Antar Daerah - Utang Kelebihan Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - BPKAD	2.720.245.287,14	747.063.221,00	2.720.245.287,00	747.063.221,14
4	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan-Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	864.061,08	0,00	864.061,08
Jumlah		3.509.806.765,25	1.453.562.112,98	3.509.806.765,11	1.453.562.113,12

- Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum - Pengawasan dan Pengendalian menara Telekomunikasi pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.401.716,00. Terdapat Kelebihan pembayaran atas Piutang Retribusi Menara

Telekomunikasi oleh PT. Daya Mitra Telekomunikasi dengan SSRD tanggal 29 Agustus2023 sebesar Rp14.353.422,00.

- Utang Kelebihan Pembayaran Lain - Lain PAD yang SAH - Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD - Uang Titipan Pasien - RS. dr. Soebandi dengan nomer rekening 0031019508 an RS. Dr. Soebandi sebesar Rp701.233.114,90.
- Utang Kelebihan Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Utang Kelebihan Pembayaran BKK dari PemProv - BPKAD per 31 Desember 2023 sebesar Rp747.063.221,14. Terdapat Pengembalian Utang BKK Provinsi yang disetor tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp2.720.245.287,00 dan Penambahan Utang BKK Provinsi yang belum disetor sebesar Rp747.063.221,00.
- Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan - Pendapatan Hibah Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp864.061,08. Terdapat pengembalian sisa uang Kas Dana BOS tahun 2023 yang disetor ke Kas Daerah tanggal 15 Desember 2023 namun belum dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp864.061,08.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas		31 Desember 2023 (Rp)
		6.566.521.869.621,01
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	6.599.768.110.679,52
Surplus/Defisit-LO	Rp	(30.215.863.158,62)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	(3.030.377.899,89)
Jumlah	Rp	**6.566.521.869.621,01**
Pengurangan Tahun 2022	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**6.566.521.869.621,01**

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
(30.215.863.158,62)	1.024.955.310,93	(31.240.818.469,55)	(3.048,02)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit LO.

Defisit LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp30.215.863.158,62. Nilai Defisit LO mengalami

penurunan sebesar Rp31.240.818.469,55 atau 3.048,02%. Defisit LO Tahun 2023 terdiri dari Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp20.202.208.346,11 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp10.013.654.812,51 serta Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa sebesar Rp0.

Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp20.202.208.346,11 diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar Rp3.696.524.159.662,47 dan Beban Operasional sebesar Rp3.716.726.368.008,58.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp10.013.654.812,51, diperoleh dari Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp10.013.654.812,51.

5.4.1 Kegiatan Operasional

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
(20.202.208.346,11)	2.691.851.258,78	(22.894.059.604,89)	(850,49)

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Jember tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Jember adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Jember dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pendapatan Pajak-LO, Retribusi-LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Lain-lain PAD yang Sah; Pendapatan Transfer-LO dan Lain-Lain Pendapatan- LO.

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer dan Beban Penyisihan Piutang.

Defisit Tahun 2023 dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp20.202.208.346,11. Nilai Defisit tersebut berkurang signifikan sebesar minus 22.894.059.604,89 atau 850,49% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp2.691.851.258,78.

5.4.1.1 Pendapatan – LO

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
3.696.524.159.662,47	3.394.263.561.044,89	302.260.598.617,58	8,91

Pendapatan – LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Jember yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan-LO diakui

pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi yakni adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Berdasarkan asal dan jenisnya, pendapatan-LO diklasifikasikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan-LO pada tahun 2023 sebesar Rp3.696.525.023.723,55 atau mengalami kenaikan sebesar 8,91% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pendapatan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp3.696.525.023.723,55 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO sebesar Rp804.422.910.827,10, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp2.829.210.767.574,18, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO sebesar 62.890.481.261,19. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2023 lebih tinggi sebesar Rp302.260.598.617,58 atau 8,91% dibanding Tahun 2022 sebesar Rp3.394.263.561.044,89. Besaran Pendapatan Operasional dapat dilihat dalam tabel berikut: :

Tabel Rincian Pendapatan-LO

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	804.422.910.827,10	653.094.431.357,89	23,17
2	Pendapatan Transfer-LO	2.829.210.767.574,18	2.699.204.438.834,00	4,82
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	62.890.481.261,19	41.964.690.853,00	49,87
	Jumlah	**3.696.524.159.662,47**	**3.394.263.561.044,89**	**8,91**

5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
804.422.910.827,10	653.094.431.357,89	151.328.479.469,21	23,17

Pendapatan Asli Daerah – LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Jember yang berasal dari pendapatan Pajak Daerah – LO, Retribusi Daerah – LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO serta Lain-lain PAD yang Sah – LO yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pada Tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah – LO adalah sebesar Rp804.422.910.827,10. Nilai pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp151.328.479.469,21 atau 23,17 % dibanding tahun 2022 sebesar Rp653.094.431.357,89. Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pajak Daerah-LO	322.681.587.375,00	325.958.429.541,00	(1,01)
2	Retribusi Daerah-LO	28.735.437.509,34	39.667.625.055,00	(27,56)

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	9.902.099.552,70	10.109.033.014,24	(2,05)
4.	Lain-lain PAD yang Sah-LO	443.103.786.390,06	277.359.343.747,65	59,76
	Jumlah	**804.422.910.827,10**	**653.094.431.357,89**	**23,17**

5.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah –LO

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
322.681.587.375,00	325.958.429.541,00	(3.276.842.166,00)	(1,01)

Pendapatan pajak daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.276.842.166,00 dari tahun 2022 sebesar Rp325.958.429.541,00 menjadi Rp322.681.587.375,00 di tahun 2023 atau turun 1,01% dari tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Pajak Hotel-LO	7.373.270.993,00	6.118.833.069,00	20,50
2)	Pajak Restoran-LO	29.732.987.436,00	22.636.612.595,00	31,35
3)	Pajak Hiburan-LO	3.329.412.260,00	2.667.918.846,00	24,79
4)	Pajak Reklame-LO	5.818.949.623,00	4.720.700.125,00	23,26
5)	Pajak Penerangan Jalan-LO	97.719.447.053,00	90.952.305.596,00	7,44
6)	Pajak Parkir-LO	2.137.821.831,00	1.484.093.102,00	44,05
7)	Pajak Air Tanah-LO	816.127.027,00	663.903.880,00	22,93
8)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	9.038.905.199,00	5.013.510.575,00	80,29
9)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	91.552.300.937,00	89.977.510.044,00	1,75
10)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) - LO	75.162.365.016,00	101.723.041.709,00	(26,11)
	Jumlah	**322.681.587.375,00**	**325.958.429.541,00**	**(1,01)**

Pendapatan Pajak daerah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai pendapatan pajak daerah-LO tahun 2022 adalah sebesar ketetapan pajak daerah yang diterbitkan pada tahun 2023. Secara umum, Pendapatan Pajak-LO yang mengalami kenaikan signifikan pada pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO sebesar 80,29%, sedangkan BPHTP-LO mengalami penurunan sebesar 26,11%. Berikut rincian masing-masing pendapatan pajak daerah-LO tahun 2023:

a. **Pajak Hotel – LO**

Pendapatan Pajak Hotel – LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp7.373.270.993,00. Pendapatan Pajak Hotel – LO mengalami kenaikan sebesar 20,50% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Hotel – LO tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a)	Pajak Hotel-LO	7.309.185.353,00	6.077.357.759,00	20,27
b)	Pajak Pesanggrahan-LO	64.085.640,00	41.475.310,00	54,52
	Jumlah	**7.373.270.993,00**	**6.118.833.069,00**	**20,60**

b. Pajak Restoran – LO

Pendapatan Pajak Restoran – LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 31,35% dibandingkan dengan Pajak Restoran – LO tahun 2022 sebesar Rp22.636.612.595,00 menjadi Rp29.732.987.436,00 pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a)	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	14.912.917.001,00	10.708.108.158,00	39,27
b)	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	5.705.747.605,00	5.405.341.203,00	5,56
c)	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	3.173.051.533,00	1.872.611.473,00	69,45
d)	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	5.941.271.297,00	4.650.551.761,00	27,75
	Jumlah	**29.732.987.436,00**	**22.636.612.595,00**	**31,35**

c. Pajak Hiburan – LO

Pajak Hiburan-LO pada tahun 2023 sebesar Rp3.329.412.260,00, terjadi peningkatan sebesar 24,79% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal tersebut sebagai dampak kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka mendorong peningkatan UMKM masyarakat Jember, terinci sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a)	Pajak Tontonan Film - LO	1.882.793.364,00	1.671.350.634,00	12,65
b)	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO	55.815.000,00	47.500.000,00	17,51
c)	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	214.077.801,00	128.354.403,00	66,79
d)	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	1.006.836.039,00	708.686.839,00	42,07
e)	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	72.809.520,00	62.219.170,00	17,02
f)	Pajak Pertandingan Olahraga-LO	97.080.536,00	49.807.800,00	94,91
	Jumlah	**3.329.412.260,00**	**2.667.918.846,00**	**24,79**

d. Pajak Reklame – LO

Pendalapatan Pajak Reklame – LO pada tahun 2023 sebesar Rp5.818.949.623,00, terjadi peningkatan sebesar 23,26% dari realisasi Pajak Reklame – LO tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a)	Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron-LO	4.669.224.087,00	3.412.495.494,00	36,83
b)	Pajak Reklame Kain-LO	977.853.036,00	1.148.131.595,00	(14,83)

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
c)	Pajak Reklame Selebaran-LO	129.060.000,00	117.187.500,00	10,13
d)	Pajak Reklame Berjalan-LO	42.812.500,00	42.885.536,00	(0,17)
	Jumlah	**5.818.949.623,00**	**4.720.700.125,00**	**23,26**

e. **Pajak Penerangan – LO**

Pajak Penerangan – LO tahun 2023 sebesar Rp97.719.447.053,00 atau meningkat sebesar 7,44% dari realisasi Pajak Penerangan–LO tahun 2022 sebesar Rp90.952.305.596,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a)	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	0,00	17.866.185,00	0,00
b)	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	97.719.447.053,00	90.934.439.411,00	7,46
	Jumlah	**97.719.447.053,00**	**90.952.305.596,00**	**7,44**

f. **Pajak Parkir – LO**

Pajak Parkir-LO pada tahun 2023 sebesar Rp2.137.821.831,00 atau meningkat sebesar 44,05% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.484.093.102,00

g. **Pajak Air Tanah–LO**

Pajak Air Tanah-LO pada tahun 2023 sebesar Rp816.127.027,00 atau meningkat sebesar 22,93% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp663.903.880,00.

h. **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO**

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO tahun 2023 sebesar Rp9.038.905.199,00 meningkat sebesar 80,29 % dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan–LO tahun 2022 sebesar Rp5.013.510.575,00

i. **Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan–LO**

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO tahun 2023 sebesar Rp91.552.300.937,00 meningkat sebesar 1,75% dari tahun 2022 sebesar Rp89.977.510.044,00

j. **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) – LO**

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) – LO tahun 2023 sebesar Rp75.162.365.016,00 turun sebesar 26,11% dari tahun 2022 sebesar Rp101.723.041.709,00

5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
28.735.437.509,34	39.667.625.055,00	(10.932.187.545,66)	(27,56)

Pendapatan retribusi daerah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Retribusi jasa daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp28.735.437.509,34 mengalami penurunan sebesar Rp10.932.187.545,66atau 27,56% dari pendapatan retribusi daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp39.667.625.055,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Retribusi-LO

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a)	Retribusi Jasa Umum - LO	23.055.694.648,34	34.554.478.016,00	(33,28)
b)	Retribusi Jasa Usaha - LO	3.828.856.048,00	3.063.520.925,00	24,98
c)	Retribusi Perizinan tertentu - LO	1.850.886.813,00	2.049.626.114,00	(9,70)
	Jumlah	**28.735.437.509,34**	**39.667.625.055,00**	**(27,56)**

a. **Retribusi Jasa Umum – LO**

Retribusi jasa umum-LO tahun 2023 sebesar Rp23.055.694.648,34, mengalami penurunan sebesar 33,28% dari tahun sebelumnya sebesar Rp34.554.478.016,00. Retribusi Jasa Umum-LO terdiri dari:

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	344.493.500,00	12.438.570.375,00	(97,23)
2)	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	407.953.000,00	340.773.000,00	19,71
3)	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO	7.460.000,00	8.430.000,00	(11,51)
4)	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	10.619.752.093,34	10.558.022.500,00	0,58
5)	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	6.934.927.190,00	6.763.307.826,00	2,54
6)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	1.952.703.295,00	1.711.485.000,00	14,09
7)	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	3.045.000,00	2.360.000,00	29,03
8)	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	349.474.000,00	322.166.000,00	8,48
9)	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	10.650.000,00	5.010.000,00	112,57
10)	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	2.425.236.570,00	2.404.353.315,00	0,87
	Jumlah	**23.055.694.648,34**	**34.554.478.016,00**	**(33,28)**

b. **Retribusi Jasa Usaha – LO**

Retribusi Jasa Usaha-LO tahun 2023 sebesar Rp3.828.856.048,00 meningkat sebesar 24,98% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.063.520.925,00. Retribusi Jasa Usaha-LO dimaksud terdiri dari:

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	112.621.045,00	512.364.925,00	(78,02)
2)	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	2.600.000,00	8.500.000,00	(69,41)
3)	Retribusi Terminal-LO	40.252.000,00	39.930.000,00	0,81
4)	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	515.484.501,00	465.568.000,00	10,72
5)	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	653.668.001,00	498.341.000,00	31,17
6)	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	168.690.000,00	168.350.000,00	0,20
7)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	2.065.540.501,00	1.104.747.000,00	86,97

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
8)	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	270.000.000,00	265.720.000,00	1,61
	Jumlah	3.828.856.048,00	3.063.520.925,00	24,98

c. Retribusi Perizinan Tertentu – LO

Retribusi perizinan tertentu-LO sebesar Rp1.850.886.813,00, jika dibandingkan dengan tahun 2022 menurun sebesar 9,70% dari Retribusi perizinan tertentu-LO tahun 2022 sebesar Rp2.049.626.114,00. Rincian retribusi perizinan tertentu-LO sebagai berikut:

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	1.139.051.683,00	1.687.314.314,00	(32,49)
2)	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	1.900.000,00	4.135.000,00	(54,05)
3)	Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	36.060.000,00	39.855.000,00	(9,52)
4)	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO	673.875.130,00	318.321.800,00	111,70
	Jumlah	1.850.886.813,00	2.049.626.114,00	(9,70)

5.4.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
9.902.099.552,70	10.109.033.014,24	(206.933.461,54)	(2,05)

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LO tahun 2023 sebesar Rp9.902.099.552,70 merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan Pemerintah Kabupaten Jember pada perusahaan daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO naik sebesar Rp206.933.461,54 atau 2,05% dari tahun 2022 sebesar Rp10.109.033.014,24 dengan rincian :

Tabel Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	5.939.012.393,75	5.829.382.856,24	1,88
2)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	3.963.087.158,95	4.279.650.158,00	(7,40)
	Jumlah	9.902.099.552,70	10.109.033.014,24	(2,05)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO dalam hal ini Bank Jatim sebesar Rp5.939.012.393,75 merupakan realisasi pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jember di tahun 2023

dan dicatat menggunakan metode biaya.

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO sebesar Rp3.963.087.158,95 merupakan pengakuan laba yang diperoleh oleh Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember. Penyertaan modal pada PDP Kahyangan Kabupaten Jember dan PDAM (Perumdam Tirta Pandalungan) Kabupaten Jember dicatat menggunakan metode ekuitas.

5.4.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah –LO

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
443.103.786.390,06	277.359.343.747,65	165.744.442.642,41	59,76

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO meningkat sebesar Rp165.744.442.642,41 atau 59,76% dari tahun 2022 sebesar Rp277.359.343.747,65 menjadi 443.103.786.390,06 di tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah –LO

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	154.140.227,00	8.032.000,00	1.819,08
2)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	13.876.495.360,00	1.298.718.425,00	968,48
3)	Jasa Giro-LO	2.800.604.538,69	3.285.089.796,84	(14,75)
4)	Pendapatan Bunga-LO	1.638.520.547,87	6.887.742.475,06	(76,21)
5)	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	421.376.932,00	702.678,00	59.867,29
6)	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.309.590.256,73	3.654.664.579,00	(64,17)
7)	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	(143.902.247,00)	(171.705.025,00)	(16,19)
8)	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	0,00	360.844.300,00	(100,00)
9)	Pendapatan dari Pengembalian-LO	2.372.604.285,78	3.977.556.608,00	(40,35)
10)	Pendapatan dari BLUD-LO	420.674.356.488,99	258.057.697.910,75	63,02
	JUMLAH	**443.103.786.390,06**	**277.359.343.747,65**	**59,76**

5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer-LO

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
2.829.210.767.574,18	2.699.204.438.834,00	130.006.328.740,18	4,82

Pendapatan transfer-LO yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.829.210.767.574,18 mengalami kenaikan sebesar Rp130.006.328.740,18 atau 4,82 % dibanding tahun 2022 sebesar Rp2.699.204.438.834,00 yang terdiri dari:

Tabel Rincian Pendapatan Transfer-LO

Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	2.501.420.374.553,18	2.412.422.148.279,00	3,69
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	327.790.393.021,00	286.782.290.555,00	14,30
Jumlah	**2.829.210.767.574,18**	**2.699.204.438.834,00**	**4,82**

5.4.1.1.1.5 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – LO

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
2.501.420.374.553,18	2.412.422.148.279,00	88.998.226.274,18	3,69

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO mengalami kenaikan sebesar Rp88.998.226.274,18 atau sebesar 3,69% di tahun 2023 sebesar Rp88.998.226.274,18 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2.412.422.148.279,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	189.483.152.986,18	238.872.246.802,00	(20,68)
2)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.704.938.164.985,00	1.597.514.133.650,00	6,72
3)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	45.036.717.101,00	60.010.011.721,00	(24,95)
4)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	561.962.339.481,00	505.661.139.106,00	11,13
5)	Dana Insentif Daerah (DID) - LO	0,00	10.364.617.000,00	0,00
	Jumlah	**2.501.420.374.553,18**	**2.412.422.148.279,00**	**3,69**

Dana Bagi Hasil (DBH) – LO

Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) – LO mengalami penurunan sebesar 20,68% dari tahun 2022 sebesar Rp238.872.246.802,00 menjadi Rp189.483.152.986,188 di tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	DBH PBB-LO	13.044.290.000,00	23.654.084.471,00	(44,85)
2)	DBH PPh Pasal 21-LO	24.664.264.986,18	28.481.622.883,00	(13,40)
3)	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	3.043.988.000,00	4.792.523.868,00	(36,48)
4)	DBH CHT-LO	109.261.811.000,00	92.444.994.113,00	18,19
5)	DBH SDA Minyak Bumi-LO	27.812.985.000,00	77.063.519.712,00	(63,91)
6)	DBH SDA Gas Bumi-LO	2.083.438.000,00	4.486.402.212,00	(53,56)
7)	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	57.008.000,00	49.481.992,00	15,21
8)	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	5.102.000,00	2.006.529.831,00	(99,75)

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
9)	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royally-LO	5.914.870.000,00	1.694.411.836,00	249,08
10)	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	1.559.521.000,00	2.028.611.673,00	(23,12)
11)	DBH SDA Perikanan-LO	2.035.875.000,00	2.170.064.211,00	(6,18)
Jumlah		**189.483.152.986,18**	**238.872.246.802,00**	**(20,68)**

Dana Alokasi Umum (DAU) – LO

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) – LO meningkat sebesar 6,72% dari tahun 2022 sebesar Rp1.597.514.133.650,00 menjadi Rp1.704.938.164.985,00 di tahun 2023. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, Dana Alokasi Umum (DAU) – LO terinci sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	DAU-LO	1.639.549.754.985,00	1.597.514.133.650,00	2,63
2)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	4.400.000.000,00	0,00	0,00
3)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	60.988.410.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**1.704.938.164.985,00**	**1.597.514.133.650,00**	6,72

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO mengalami penurunan sebesar 24,95% dari tahun 2022 sebesar Rp60.010.011.721,00 menjadi Rp45.036.717.101,00 di tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	303.164.500,00	4.494.389.000,00	(93,25)
2)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	14.366.655.100,00	15.784.912.850,00	(8,98)
3)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	19.007.481.151,00	7.996.854.290,00	137,69
4)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	0,00	3.863.728.228,00	
5)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	317.686.500,00	
6)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	815.159.750,00	1.026.800.000,00	(20,61)
7)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	0,00	87.000.000,00	
8)	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	4.772.633.200,00	
9)	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	0,00	1.477.760.250,00	
10)	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	2.152.472.000,00	4.178.419.092,00	(48,49)
11)	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	3.877.836.000,00	3.299.081.550,00	17,54
12)	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	0,00	2.699.248.950,00	
13)	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0,00	4.912.568.225,00	
14)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan -LO	0,00	148.537.173,00	

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
15)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO	474.823.600,00	-	-
16)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB-LO	3.647.625.000,00	-	-
17)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	391.500.000,00	973.171.664,00	(59,77)
18)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	0,00	3.977.220.749,00	-
Jumlah		**45.036.717.101,00**	**60.010.011.721,00**	**(24,95)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO meningkat sebesar 11,13% dari tahun 2022 sebesar Rp505.661.139.106,00 menjadi Rp561.962.339.481,00 di tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	240.115.204.579,00	187.256.163.542,00	28,23
2)	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	8.765.000.000,00	4.440.000.000,00	97,41
3)	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	225.305.159.651,00	222.338.400.290,00	1,33
4)	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	5.387.805.048,00	5.871.067.790,00	(8,23)
5)	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	42.646.992.000,00	43.297.226.000,00	(1,50)
6)	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	2.389.190.650,00	1.886.600.000,00	26,64
7)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	20.050.335.000,00	26.759.747.911,00	(25,07)
8)	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	0,00	668.241.000,00	-
9)	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan-LO	0,00	705.723.000,00	-
10)	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	275.624.569,00	197.683.000,00	39,43
11)	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	15.410.142.924,00	11.930.536.573,00	29,17
12)	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	266.551.000,00	0,00	-
13)	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.026.781.100,00	309.750.000,00	231,49
14)	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	323.552.960,00	0,00	-
Jumlah		**561.962.339.481,00**	**505.661.139.106,00**	**11,13**

Dana Insentif Daerah (DID) – LO pada tahun 2022 sebesar Rp10.364.617.000,00 dan tidak terdapat Dana Insentif Daerah (DID) – LO pada tahun 2023.

5.4.1.1.1.6 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
327.790.393.021,00	286.782.290.555,00	41.008.102.466,00	14,30

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO mengalami kenaikan sebesar Rp41.008.102.466,00 atau 14,30% dari tahun 2022 sebesar Rp286.782.290.555,00 menjadi Rp327.790.393.021,00 di tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Pendapatan Bagi Hasil-LO	316.163.950.200,00	276.157.090.985,00	14,49
2)	Bantuan Keuangan	11.626.442.821,00	10.625.199.570,00	9,42
	Jumlah	**327.790.393.021,00**	**286.782.290.555,00**	**14,30**

Pendapatan Bagi Hasil – LO

Pendapatan Bagi Hasil – LO meningkat sebesar 14,49% dari tahun 2022 sebesar Rp276.157.090.985,00 menjadi Rp316.163.950.200,00 di tahun 2023 terinci sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	72.760.694.500,00	66.730.807.620,00	9,04
2)	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	41.806.470.900,00	36.793.912.620,00	13,62
3)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	103.393.126.800,00	71.389.683.780,00	44,83
4)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	665.371.600,00	435.201.840,00	52,89
5)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	97.538.286.400,00	100.807.485.125,00	(3,24)
	Jumlah	**316.163.950.200,00**	**276.157.090.985,00**	**14,49**

Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Khusus dari Pemerintah Provinsi yang meningkat sebesar 9,42% dari tahun 2022 sebesar Rp10.625.199.570,00 menjadi Rp11.626.442.821,00 di tahun 2023.

5.4.1.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
62.890.481.261,19	41.964.690.853,00	20.925.790.408,19	49,87

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah-LO merupakan Pendapatan Hibah berupa uang maupun barang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi ataupun pihak lainnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO mengalami peningkatan sebesar Rp20.925.790.408,19 atau sebesar 49,87% dari tahun 2022 sebesar Rp41.964.613.853,00 menjadi Rp62.890.481.261,19 di tahun 2023, terinci sebagai berikut :

Tabel Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah-LO	62.890.481.261,19	24.260.456.516,00	159,23
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	17.704.234.337,00	(100,00)
	Jumlah	**62.890.481.261,19**	**41.964.690.853,00**	**49,87**

5.4.1.1.2.1 Pendapatan Hibah-LO

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
62.890.481.261,19	24.260.456.516,00	38.630.024.745,19	159,23

Pendapatan Hibah – LO merupakan pendapatan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dari kelompok masyarakat maupun dari kelompok masyarakat/ lembaga yang diterima Pemerintah Kabupaten Jember. Pendapatan Hibah – LO meningkat sebesar Rp34.681.399.508,19 atau sebesar 159,23% dari tahun 2022 sebesar Rp24.260.456.516,00 menjadi Rp62.890.481.261,19 di tahun 2023, terinci sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	62.455.731.261,19	24.094.985.016,00	159,23
2)	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	153.316.000,00	(100,00)
3)	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	434.750.000,00	12.155.500,00	183,56
Jumlah		**62.890.481.261,19**	**24.260.456.516,00**	**159,23**

5.4.1.1.2.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO pada tahun 2022 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD – LO sebesar Rp17.704.234.337,00 dan tidak terdapat Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO pada tahun 2023.

5.4.1.2 Beban

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
3.716.726.368.008,58	3.391.571.709.786,11	325.154.658.222,47	9,59

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam tahun yang bersangkutan yang menurunkan ekuitas. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban Operasional pada tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.716.726.368.008,58 dan Rp3.391.571.709.786,11. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, beban Pemerintah Kabupaten Jember mengalami peningkatan sebesar Rp325.154.658.222,47 atau 9,59%. Rincian beban tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban

NO	URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	1.361.606.427.997,47	1.385.142.831.285,00	(1,70)
	Beban Barang dan Jasa	**1.400.953.008.156,81**	**1.232.160.205.664,26**	**13,70**
2	Beban Persediaan	329.927.698.045,78	260.263.384.022,77	26,77
3	Beban Barang Pakai Habis Non Persediaan	49.830.165.278,00	36.296.491.322,00	37,29
4	Beban Jasa	929.101.977.141,30	833.307.887.073,87	11,50
5	Beban Pemeliharaan	25.526.175.853,73	36.827.923.075,62	(30,69)
6	Beban Perjalanan Dinas	66.566.991.838,00	65.464.520.170,00	1,68
7	Beban Hibah	289.926.844.563,22	94.230.684.592,00	207,68
8	Beban Bantuan Sosial	29.185.958.000,00	44.178.244.900,00	(33,94)
9	Beban Penyisihan Piutang	32.728.135.970,80	38.317.401.531,38	(14,59)
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	401.930.534.961,20	400.688.568.086,47	0,31
11	Beban Transfer	200.394.594.298,00	196.853.773.727,00	1,80
12	Beban Tidak Terduga	864.061,08	0,00	
	Jumlah	**3.716.726.368.008,58**	**3.391.571.709.786,11**	**9,59**

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan beberapa nilai beban yakni pegawai, pemeliharaan, bantuan sosial, transfer dan beban penyisihan piutang. Di sisi lain, terdapat nilai beban yang meningkat seperti beban persediaan, beban jasa, perjalanandinas, hibah, beban penyusutan dan beban transfer. Adapun penjelasan rinci untuk masing-masing jenis beban di atas adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1 Beban Pegawai

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
1.361.606.427.997,47	1.385.142.831.285,00	(23.536.403.287,53)	(1,70)

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud.

Beban pegawai sebesar Rp1.361.606.427.997,47 turun sebesar atau 1,70% dari tahun 2022 sebesar Rp1.385.142.831.285,00 terinci sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	840.769.908.231,00	858.299.023.533,00	(2,04)
b.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	140.048.099.565,00	139.648.328.402,00	0,29

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
c.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	348.396.985.021,47	353.996.988.279,00	(1,58)
d.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	29.929.200.178,00	30.823.930.542,00	(2,90)
e.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.129.766.202,00	1.100.423.029,00	2,67
f.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.332.468.800,00	1.274.137.500,00	4,58
	Jumlah	**1.361.606.427.997,47**	**1.385.142.831.285,00**	**(1,70)**

Penjelasan masing-masing beban pegawai adalah sebagai berikut :

a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Beban gaji dan tunjangan ASN Pemerintaha Kabupaten Jember pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp17.529.115.302,00 atau 2,04% dari tahun 2022 sebesar Rp858.299.023.533,00 menjadi Rp840.769.908.231,00di tahun 2023 terinci sebagai berikut:

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Gaji Pokok ASN	639.765.067.357,00	652.905.506.995,00	(2,01)
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	59.545.717.321,00	60.046.533.375,00	(0,83)
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	8.200.040.746,00	8.065.018.250,00	1,67
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	34.016.584.605,00	35.989.943.600,00	(5,48)
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.963.415.153,00	14.855.486.487,00	7,46
6	Beban Tunjangan Beras ASN	37.308.437.512,00	36.979.842.979,00	0,89
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.482.705.611,00	856.748.722,00	189,78
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	8.774.262,00	9.132.944,00	(3,93)
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	38.036.452.671,00	42.927.571.102,00	(11,39)
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.497.279.082,00	1.661.843.879,00	(9,90)
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	3.945.433.911,00	4.001.395.200,00	(1,40)
	Jumlah	**840.769.908.231,00**	**858.299.023.533,00**	**(2,04)**

b. Beban Tambahan Penghasilan ASN

Beban tambahan penghasilan ASN tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp140.048.099.565,00 dan Rp139.648.328.402,00, atau meningkat sebesar Rp399.771.163,00 atau 10,08% yang terdiri dari:

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	140.048.099.565,00	139.624.388.402,00	0,30
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0,00	23.940.000,00	(100,00)
	Jumlah	**140.048.099.565,00**	**139.648.328.403,00**	**0,29**

c. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Beban tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.600.003.257,53 atau sebesar 1,58% dari tahun 2022 sebesar Rp353.996.988.279,00 menjadi Rp348.396.985.021,47 di tahun 2023 terinci sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	10.416.601.006,00	10.357.621.477,00	0,57
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0.00	35.792.340.200,00	(100,00)
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	196.774.677.215,00	227.518.612.351,00	(13,51)
4	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.109.500.000,00	1.530.000.000,00	(27,48)
5	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	98.515.453.800,47	55.346.753.051,00	78,00
6	Beban Honorarium	16.265.452.000,00	14.592.915.100,00	11,46
7	Beban J asa Pengelolaan BMD	34.800.000,00	30.350.000,00	14,66
8	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	18.374.501.000,00	6.878.396.100,00	167,13
9	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	6.906.000.000,00	1.950.000.000,00	254,15
Jumlah		**348.396.985.021,47**	**353.996.988.279,00**	**(1,58)**

d. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Beban gaji dan tunjangan DPRD tahun 2023 sebesar turun sebesar Rp29.929.200.178,00 Rp894.730.364,00 atau 2,90% dari tahun 2022 sebesar Rp30.823.930.542,00, dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Uang Representasi DPRD	1.106.385.000,00	1.111.110.000,00	(0,43)
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	131.680.500,00	134.452.500,00	(2,06)
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	143.970.960,00	146.071.140,00	(1,44)
4	Beban Uang Paket DPRD	94.720.500,00	95.193.000,00	(0,50)
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.604.258.250,00	1.611.109.500,00	(0,43)
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	135.898.350,00	149.996.700,00	(9,40)
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.768.250,00	25.669.350,00	(42,47)
8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.746.500.000,00	8.790.600.000,00	(0,50)
9	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.457.505.000,00	2.190.300.000,00	(33,46)
10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	787.090,00	270.384,00	191,10
11	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.736.626.278,00	10.789.432.968,00	(0,49)
12	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.743.500.000,00	5.775.000.000,00	(0,55)
13	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	12.600.000,00	4.725.000,00	166,67
Jumlah		**29.929.200.178,00**	**30.823.930.542,00**	**(2,90)**

e. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH tahun 2023 sebesar Rp1.129.766.202,00 mengalami peningkatan sebesar Rp29.343.173,00 atau 2,67% dibanding tahun 2022 sebesar Rp1.100.423.029,00 dengan uraian sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.056.000,00	7.644.000,00	(7,69)

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	-
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160,00	6.952.320,00	2,08
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	644.522,00	869.481,00	(25,87)
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	420,00	960,00	(56,25)
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.486.880,00	5.503.680,00	(0,31)
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	-
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	-
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	956.151.940,00	918.583.408,00	4,09
11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	7.539.900,00	(100,00)
Jumlah		**1.129.766.202,00**	**1.100.423.029,00**	**2,67**

f. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Beban penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.332.468.800,00 dan Rp1.274.137.500,00 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp58.331.300,00 atau 4,58% dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	314.496.000,00	314.496.000,00	-
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	1.017.972.800,00	959.641.500,00	6,08
Jumlah		**1.332.468.800,00**	**1.274.137.500,00**	**4,58**

Beban Barang dan Jasa

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
1.400.953.008.156,81	1.232.160.205.664,26	168.792.802.492,55	13,70

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban barang dan jasa terdiri atas beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas dan beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat senilai Rp1.400.953.008.156,81 naik sebesar Rp168.792.802.492,55 atau 13,70 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.232.160.205.664,26 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Realisasi Beban Barang dan Jasa

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Barang (2+3)	379.757.863.323,78	296.559.875.344,77	28,05
2	- Beban Persediaan	329.927.698.045,78	260.263.384.022,77	26,77
3	- Beban Barang Pakai Habis Non Persediaan	49.830.165.278,00	36.296.491.322,00	37,29
4	Beban Jasa	929.101.977.141,30	833.307.887.073,87	11,50

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
5	Beban Pemeliharaan	25.526.175.853,73	36.827.923.075,62	(30,69)
6	Beban Perjalanan Dinas	66.566.991.838,00	65.464.520.170,00	1,68
	Jumlah	1.400.953.008.156,81	1.232.160.205.664,26	13,70

5.4.1.2.2 Beban Barang (Beban Persediaan dan Beban Barang Pakai Habis Non Persediaan)

Beban Barang pada tahun 2023 terinci atas Beban Persediaan dan Beban Barang Habis Pakai Non Persediaan, sebesar Rp379.757.863.323,78 meningkat sebesar 28,05% dari tahun 2022 sebesar Rp296.559.875.344,77 dengan rincian sebagai berikut :

1. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak, Beban Persediaan tahun 2023 sebesar Rp329.927.698.045,78 meningkat 26,77% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp260.263.384.022,77 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2023 (audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	12.825.909.532,00	5.863.411.349,06	118,74
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	27.211.896.865,37	19.031.000 181,74	42,99
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18.969.436.171,00	18.634.939 634,00	1,79
4	Beban Bahan-Bahan Baku	1.324.755.600,00	420.510.200,00	215,04
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	317.692.825,00	153.999.240,00	106,30
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	105.000.760,00	97.252 375,00	7,97
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	649.483.766,00	808.562.500,00	(19,67)
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	46.615.632.435,02	44.342.758.225,08	5,13
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.593.643.948,00	2.895.523.369,00	24,11
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	141.449.000,00	223.240.000,00	(36,64)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.358.275.992,33	2.096.050.828,57	(35,20)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	9.608.700,00	436.360,00	2 102,01
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	8.068.165,00	0,00	-
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	678.154.700,00	172.050.000,00	294,16
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	57.023.500,00	-	-
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	376.394.747,00	352 894 577,00	6,66
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.541.748.552,63	7.274.967.701,31	(10,08)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.403.350.055,50	2.963.015.529,93	14,86
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.478.678 236,88	13.032.552.357,77	26,44
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	768.551.004,90	565.470 962,00	35,91
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	12.907.500,00	62 851.450,00	(79,46)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.807.004.313,27	3.838.585.573,14	25,23
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3 568.346 150,40	966.563.692,08	269,18
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.130.945.155,42	2.325.717.797,52	77,62
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.348.080.823,00	2.132.512.852,00	150,79

NO	URAIAN	2023 (audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	661.256.626,00	1.282.287.728,00	(48,43)
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.862.476.602,00	1.930.550.404,92	48,27
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.637.052.829,44	3.876.265.143,50	19,63
29	Beban Obat-Obatan-Obat	85.597.027.494,91	53.580.979.160,69	59,75
30	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	15.609.611.527,74	11.412.337.490,86	36,78
31	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	40.310.878.554,53	38.036.297.137,63	5,98
32	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	47.813.125,00	212.685.149,00	(77,52)
33	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.695.574.273,44	4.188.884.777,47	(11,78)
34	Beban Natura dan Pakan-Pakan	353.350.000,00	457.085.500,00	(22,69)
35	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	408.895.754,00	1.100.000,00	37.072,34
36	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.374.796.178,00	6.675.778.341,00	25,45
37	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	13.255.000,00	2.890.000,00	358,65
38	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	133.773.000,00	0,00	
39	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	245.245.000,00	194.025.500,00	26,40
40	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	40.950.000,00	26.020.000,00	57,38
41	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	856.194.227,00	523.205.025,00	63,64
42	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.390.152.268,00	1.398.372.586,00	70,92
43	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	12.295.000,00	161.470.000,00	(92,39)
44	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	30.660.000,00	10.800.000,00	183,89
45	Beban Pakaian Siaga	33.600.000,00	0,00	
46	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	148.900.001,00	(100,00)
47	Beban Pakaian Adat Daerah	375.352.358,00	178.570.000,00	110,20
48	Beban Pakaian Batik Tradisional	674.919.660,00	560.856.173,00	20,34
49	Beban Pakaian Olahraga	3.110.680.069,00	2.211.102.958,00	40,68
50	Beban Pakaian Paskibraka	137.450.000,00	0,00	
51	Beban Pakaian Jas/Safari	12.400.000,00	72.700.000,00	(82,94)
52	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	0,00	74.500.001,00	(100,00)
53	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	4.790.854.192,50	(100,00)
Jumlah		**329.927.698.045,78**	**260.263.384.022,77**	**26,77**

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

2. Beban Barang Pakai Habis Non Persediaan

Beban barang tak habis pakai pada tahun 2023 sebesar Rp49.830.165.278,00 mengalami kenaikan dari beban barang habis pakai non persediaan tahun 2022 sebesar Rp36.296.491.322,00 atau mengalami kenaikan sebesar 37,29% terinci sebagai berikut:

NO	URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Makanan dan Minuman Rapat	30.729.054.151,00	20.959.561.747,00	46,61
2	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.576.567.363,00	2.774.455.113,00	28,91
3	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	12.600.865.013,00	11.532.189.462,00	9,27
4	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	1.030.285.000,00	(100,00)
5	Beban Komponen-Komponen Lainnya	191.242.000,00	0,00	-
6	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	2.732.436.751,00	0,00	-
Jumlah		49.830.165.278,00	36.296.491.322,00	37,29

5.4.1.2.3 Beban Jasa

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
929.101.977.141,30	833.307.887.073,87	95.794.090.067,43	11,50

Beban Jasa tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp95.794.090.067,43 atau 11,50% dari tahun 2022 sebesar Rp833.307.887.073,87 menjadi Rp929.101.977.141,30di tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.700.000,00	27.000.000,00	(90,00)
2	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	54.804.000,00	(100,00)
3	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.474.701.078,00	6.748.022.590,00	158,96
4	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.211.345.300,00	6.687.962.750,00	(51,98)
5	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	27.791.095.199,00	12.000.000,00	231.492,46
6	Beban Honorarium Rohaniwan	125.290.000,00	126.200.000,00	(0,72)
7	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	44.200.000,00	75.842.500,00	(41,72)
8	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	467.300.000,00	18.000.000,00	2.496,11
9	Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	0,00	96.500.000,00	(100,00)
10	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	9.632.700.000,00	49.850.000,00	19.223,37
11	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	568.300.000,00	540.800.000,00	5,09
12	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	36.010.845.565,00	82.064.000.000,00	(56,12)
13	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	74.176.823.709,47	63.963.812.578,00	15,97
14	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	41.902.000,00	774.521.195,00	(94,59)
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.987.320.143,00	142.846.000,00	1.291,23
16	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	11.539.675.000,00	10.941.696.800,00	5,47
17	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	56.468.000,00	0,00	
18	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	20.000.000,00	(100,00)
19	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	9.255.250.000,00	9.128.735.000,00	1,39
20	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	252.072.449,00	245.899.510,00	2,51
21	Beban Jasa Tenaga Administrasi	81.242.360.619,00	29.139.758.983,00	178,80

NO	URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
22	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	1.202.650.000,00	1.146.600.000,00	4,89
23	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	41.742.797.664,00	49.632.225.000,00	(15,90)
24	Beban Jasa Tenaga Ahli	6.042.875.019,00	6.603.540.090,00	(8,49)
25	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	15.263.740.444,00	13.896.195.942,00	9,84
26	Beban Jasa Tenaga Keamanan	4.275.684.192,00	2.897.057.970,00	47,59
27	Beban Jasa Tenaga Caraka	442.600.000,00	411.500.000,00	7,56
28	Beban Jasa Tenaga Supir	443.548.586,00	6.643.383.416,00	(93,32)
29	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	0,00	269.250.000,00	(100,00)
30	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	210.818.795,00	84.850.416,00	148,46
31	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	108.556.250,00	49.968.750,00	117,25
32	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	21.460.528,00	60.300.000,00	(64,41)
33	Beban Jasa Tata Rias	24.750.000,00	0,00	-
34	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.549.372.648,00	1.587.808.228,00	(2,42)
35	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	137.005.467,00	0,00	-
36	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	765.000,00	211.578.780,00	(99,64)
37	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0,00	15.000.000,00	(100,00)
38	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	182.881.630,00	98.651.250,00	85,38
39	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2.083.444.280,00	1.719.714.500,00	21,15
40	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	42.859.701.325,00	29.069.922.966,00	47,44
41	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	13.202.900,00	16.205.800,00	(18,53)
42	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	75.226.496,00	51.190.450,00	46,95
43	Beban Jasa Kalibrasi	534.255.326,00	333.729.109,00	60,09
44	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.868.029.039,00	1.112.648.840,00	67,89
45	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	27.000.000,00	0,00	-
46	Beban Jasa Pengukuran Tanah	667.836.780,00	349.859.660,00	90,89
47	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.232.777.670,00	1.835.624.305,00	(32,84)
48	Beban Tagihan Telepon	5.828.583.899,00	5.673.525.494,00	2,73
49	Beban Tagihan Air	751.190.244,00	424.551.728,00	76,94
50	Beban Tagihan Listrik	55.903.861.180,89	58.498.046.009,00	(4,43)
51	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	90.325.000,00	139.117.800,00	(35,07)
52	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.624.616.603,00	6.179.036.357,00	23,39
53	Beban Paket/Pengiriman	183.279.356,00	81.029.405,00	126,19
54	Beban Penambahan Daya	107.019.380,00	279.113.871,00	(61,66)
55	Beban Registrasi/Keanggotaan	14.022.300,00	12.268.700,00	14,29
56	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.096.267.540,00	801.633.608,00	36,75
57	Beban Pengolahan Air Limbah	0,00	77.505.750,00	(100,00)
58	Beban Lembur	9.990.974.910,00	14.185.464.404,00	(29,57)
59	Beban Medical Check Up	157.359.000,00	96.175.000,00	63,62
60	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	38.505.217.560,23	8.149.169.540,00	372,50
61	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.488.530.450,00	647.935.339,00	438,41
62	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	57.825.110.000,00	57.544.163.600,00	0,49
63	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	7.775.154.500,00	7.455.249.200,00	4,29
64	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.177.159.308,00	57.142.709.502,00	(78,69)
65	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.957.441.591,00	7.931.022.868,00	(12,28)
66	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.127.177.764,00	190.756.415,00	490,90
67	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	56.352.251.926,00	0,00	-
68	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	342.851.305,00	(100,00)

NO	URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
69	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	12.705.000,00	25.410.000,00	(50,00)
70	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	69.801.100,00	302.400.000,00	(76,92)
71	Beban Sewa Tanah Lapangan Olahraga	1.500.000,00		
72	Beban Sewa Tanah untuk Jalan	0,00	78.000.000,00	(100,00)
73	Beban Sewa Electric Generating Set	2.000.000,00	0,00	-
74	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	1.130.436.800,00	0,00	-
75	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	-
76	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.406.554.666,00	0,00	-
77	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	46.405.000,00	0,00	-
78	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	49.027.500,00	0,00	-
79	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	104.141.324,00	0,00	-
80	Beban Sewa Perkakas Khusus (Special Tools)	156.783.000,00	0,00	-
81	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	5.155.866.403,00	0,00	-
82	Beban Sewa Mebel	54.189.510,00	0,00	-
83	Beban Sewa Alat Pendingin	11.657.000,00	0,00	-
84	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	117.619 000,00	(100,00)
85	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	2.834.151.367,00	(100,00)
86	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	119 100 000,00	(100,00)
87	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	9.800.000,00	(100,00)
88	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	31.720.000,00	(100,00)
89	Beban Sewa Perkakas Khusus (Special Tools)	0,00	19.125.000,00	(100,00)
90	Beban Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	20.400.000,00	(100,00)
91	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	2.778.836.797,00	(100,00)
92	Beban Sewa Alat Pendingin	0,00	24.240.000,00	(100,00)
93	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	468.834.066,00	157.337.690,00	197,98
94	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	107.950.000,00	0,00	-
95	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	304.250.000,00	305 848 000,00	(0,52)
96	Beban Sewa Alat Komunikasi Telephone	0,00	119.966.000,00	(100,00)
97	Beban Sewa Alat Kedokteran Mata	262.800.000,00	0,00	-
98	Beban Sewa Peralatan Umum	81.984.000,00	61.431.000,00	33,46
99	Beban Sewa Komputer Jaringan	200.200.000,00	594.000.000,00	(66,30)
100	Beban Sewa Alat Pengeboran Mesin Lainnya	0,00	8.500.000,00	(100,00)
101	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	50.000.000,00	(100,00)
102	Beban Sewa Bangunan Gudang	45.600.000,00	6.000.000,00	660,00
103	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	270.797.375,00	326.236.069,00	(16,99)
104	Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.023.560.560,00	0,00	-
105	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.165.000,00	0,00	
106	Beban Sewa Hotel	1.838.730.643,00	2.322.212.379,00	(20,82)
107	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	5.692.871,33	7.000.000,00	(18,67)
108	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	86.010.000,00	80.000.000,00	7,51
109	Beban Sewa Instalasi Lain	0,00	73.450.000,00	(100,00)
110	Beban Sewa Jaringan Telepon Lainnya	4.990.000,00	0,00	
111	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	11.345.076,00	0,00	
112	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	295 082.000,00	0,00	
113	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	266.014.922,15	495 000 000,00	(46,26)
114	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	18.050.000,00	173 339 315,00	(89,59)
115	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	49.988 000,00	(100,00)

NO	URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
116	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	3.839.722.170,00	5.363.285.122,00	(28,41)
117	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	493.489.965,00	0,00	-
118	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	246.246.400,00	267.924.800,00	(8,09)
119	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	267.148.000,00	3.221.457.700,00	(91,71)
120	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	0,00	8.359.000,00	(100,00)
121	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	298.166.202,00	0,00	-
122	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	223.079.350,00	68.223.590,00	226,98
123	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.052.269.247,41	2.937.594.178,00	(30,14)
124	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	8.020.403.201,00	(100,00)
125	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	177.711.900,00	453.280.200,00	(60,79)
126	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	334.687.200,00	256.500.000,00	30,48
127	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	174.223.500,00	64.635.300,00	169,55
128	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	417.260.469,00	113.655.300,00	267,13
129	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0,00	99.774.015,00	(100,00)
130	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	75.000.000,00	(100,00)
131	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	289.923.788,00	757.624.400,00	(61,73)
132	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	0,00	99.789.000,00	(100,00)
133	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	98.530.800,00	197.500.000,00	(50,11)
134	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	0,00	747.205.000,00	(100,00)
135	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	73.700.000,00	321.993.505,00	(77,11)
136	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	495.986.400,00	930.620.404,00	(46,70)
137	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.256.717.000,00	1.417.117.250,00	129,81
138	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.774.013.387,00	2.226.454.350,00	(20,32)
139	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	570.838.500,00	1.215.325.650,00	(53,03)
140	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	7.433.000,00	0,00	-
141	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	45.498.750,00	108.148.000,00	(57,93)
142	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.814.985.848,00	5.288.131.052,00	(65,68)
143	Beban Sosialisasi	499.105.800,00	235.488.057,00	111,95
144	Beban Bimbingan Teknis	3.532.694.419,00	2.345.335.022,00	50,63
145	Beban Diklat Kepemimpinan	392.002.000,00	0,00	-
146	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	18.637.500,00	6.412.590,00	190,64
147	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	70.512.500,00	24.047.950,00	193,22
148	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	7.550.000,00	2.100.000,00	259,52

NO	URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
149	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	13.650.679,00	6.452.175,00	111,57
150	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	262.012.500,00	107.550.000,00	143,62
151	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	3.845.000,00	1.737.500,00	121,29
152	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.038.125,00	630.000,00	223,51
153	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	16.250.000,00	0,00	-
154	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	123.500.000,00	51.870.000,00	138,10
155	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	161.150.000,00	102.787.500,00	56,78
156	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	13.876.801.412,94	33.599.016.258,00	(58,70)
157	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	1.988.400,00	(100,00)
158	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	463.971.848,00	309.314.566,00	50,00
159	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0,00	100.873.200,00	(100,00)
160	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	75.800.880,00	56.850.660,00	33,33
161	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	7.040.400,00	(100,00)
162	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	240.000,00	(100,00)
163	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	722.980,00	361.490,00	100,00
164	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0,00	5.532.000,00	(100,00)
165	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	74.156.843.399,88	69.646.958.069,00	6,48
166	Beban Barang Jasa BOS	142.129.260.791,00	126.437.806.329,87	12,41
Jumlah		**929.101.977.141,30**	**833.307.887.073,87**	**11,50**

5.4.1.2.4 Beban Pemeliharaan

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
25.526.175.853,73	36.827.923.075,62	(11.301.747.221,89)	(30,69)

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan pada tahun 2023 sebesar Rp25.526.175.853,73turun sebesar 30,69% dari tahun 2022 sebesar Rp36.827.923.075,62

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
A	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	1.306.994.470,00	(100,00)
B	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.221.897.436,99	19.209.819.383,82	(5,14)
C	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.733.752.352,74	15.385.452.653,80	(62,73)
d	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.171.901.962,00	905.473.948,00	29,42
e	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	398.624.102,00	20.182.620,00	1.875,09
Jumlah		25.526.176.863,73	36.827.923.075,62	(30,69)

5.4.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
66.566.991.838,00	65.464.520.171,00	1.102.471.668,00	1,68

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 adalah sebesar Rp66.566.991.838,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.102.471.668,00 atau 1,68% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp65.464.520.171,00. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a	Beban Perjalanan Dinas Biasa	38.285.606.758,00	32.385.581.687,00	18,22
b	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	1.424.342.000,00	(100,00)
c	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.595.550.487,00	28.899.708.231,00	(11,43)
d	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.652.720.000,00	378.519.459,00	336,63
e	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.033.114.593,00	2.376.368.793,00	(56,53)
Jumlah		66.566.991.838,00	65.464.520.170,00	1,68

5.4.1.2.6 Beban Hibah

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
289.926.844.563,22	94.230.684.592,00	195.696.159.971,22	207,68

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/ daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Beban hibah tahun 2023 sebesar Rp289.926.844.563,22 meningkat sebesar Rp195.696.159.971,22atau 2067,68% dari tahun 2022 sebesar Rp94.230.684.592,00 terinci sebagai berikut:

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	39.184.255.000,00	84.200.227.000,00	(53,46)
b	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	58.563.225.329,22	4.360.719.092,00	1 211,90
c	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	44.800.662.650,00	0,00	-
d	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.728.600.000,00	655.000.000,00	163,91
e	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	58.797.416.547,00	1.645.000.000,00	3 474,31
f	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.835.950.504,00	307.346.000,00	7 330,05
g	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.075.000.000,00	0,00	-
h	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	21.289.906.387,00	0,00	-
i	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	35.527.043.146,00	0,00	-
j	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	6.124.785.000,00	3.062.392.500,00	100,00
Jumlah		**289.926.844.563,22**	**94.230.684.592,00**	**207,68**

5.4.1.2.9 Beban Bantuan sosial

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
29.185.958.000,00	44.178.244.900,00	(14.992.286.900,00)	(33,94)

Beban Bantuan Sosial merupakan merupakan pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial maupun bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif baik dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat. Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp29.185.958.000,00 turun sebesar Rp14.992.286.900,00 atau 33,94% dari tahun 2022 sebesar Rp44.178.244.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	12.037.900.000,00	35.479.914.400,00	(66,07)
b	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	14.460.308.000,00	8.698.330.500,00	66,24
c	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.687.750.000,00	0,00	
Jumlah		**29.185.958.000,00**	**44.178.244.900,00**	**(33,94)**

5.4.1.2.10 Beban Penyisihan Piutang

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
32.728.135.970,80	38.317.401.531,38	(5.589.265.560,58)	(14,59)

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada Tahun 2023. Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp32.728.135.970,80 turun sebesar Rp5.589.265.560,58atau 14,59% dari tahun 2022 sebesar Rp38.317.401.531,38 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	30.952.007.189,77	36.875.773.527,35	(16,06)
b	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	572.652.545,78	932.826.902,87	(38,61)
c	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan	896.471.607,27	668.160.861,26	34,17
d	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	299.049.261,98	(159.359.760,10)	(287,66)
e	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	7.955.366,00	0,00	-
Jumlah		32.728.135.970,80	38.317.401.531,38	(14,59)

a. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah ahun 2023 sebesar Rp30.952.007.189,77dan Rp36.875.773.527,35di tahun 2022 atau terjadi penurunan sebesar 16,06%, dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(172.157.182,74)	162.627.189,55	(205,86)
2	Beban Penyisihan Pajak Restoran	94.117.009,90	149.374.369,15	(36,99)
3	Beban Penyisihan Pajak Hiburan	734.599,10	1.122.118,60	(34,53)
4	Beban Penyisihan Pajak Reklame	249.428.984,59	297.351.572,14	(16,12)
5	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	(2.370.025,85)	3.415.969,40	(169,38)
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	422.937,52	(62.175,50)	(780,23)
7	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	315.098,36	27.294,43	1.054,44
8	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(3.360.656,50)	3.717.301,82	(190,41)
9	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	30.785.708.728,26	36.257.367.584,89	(15,09)
10	Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	(832.302,87)	832.302,87	(200,00)
Jumlah		30.952.007.189,77	36.875.773.527,35	(16,06)

b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Rp572.652.545,78 pada tahun 2023 dan Rp932.826.902,87 pada tahun 2022, sehingga terjadi penurunan sebesar 38,61% dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	567.880.817,13	901.748.443,37	(37,02)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	4.602.228,65	1.033.459,50	345,32
3	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan	169.500,00	435.000,00	(61,03)
4	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	0,00	29.610.000,00	(100,00)
Jumlah		572.652.545,78	932.826.902,87	(38,61)

c. **Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan**

Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan merupakan Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Pandalungan pada tahun 2023 sebesar Rp896.471.607,27 dan pada tahun 2022 sebesar Rp668.160.861,26 sehingga terjadi peningkatan sebesar 34,17%

d. **Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**

Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2022 sebesar minus Rp159.359.760,10, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp299.049.261,98 sehingga terjadi penurunan signifikan sebesar 287,66%, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	5.771.684,50	(100,00)
2	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	(143.902.247,00)	(171.705.025,00)	(16,19)
3	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	(2.010.453,00)	2.471.428,00	(181,35)
4	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	444.961.961,98	4.102.152,40	10.747,04
Jumlah		299.049.261,98	(159.359.760,10)	(287,66)

Terjadi peningkatan signifikan pada Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD yang disebabkan karena pemberlakuan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) pada 50 Puskesmas di Kabupaten Jember.

e. **Beban Penyisihan Piutang Lainnya** merupakan Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian pada tahun 2023 sebesar Rp 7.955.366,00

5.4.1.2.11 Beban Penyusutan dan Amortisasi

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
401.930.534.961,20	400.688.568.086,47	1.241.966.874,73	0,31

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset

tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Beban Penyusutan dan amortisasi mengalami kenaikan sebesar Rp1.241.966.874,73 atau 0;31% dari tahun 2022 sebesar Rp400.688.568.086,47 menjadi sebesar Rp401.930.534.961,20di tahun 2023 terdiri dari:

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	155.964.582.104,12	151.008.999 278,13	3,28
b	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	36.109.802.101,23	39.245.971 136,36	(7,99)
c	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	208.631.782.386,40	208.752.269 902,53	(0,06)
d	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	244.513.066,25	220.206 016,25	11,04
e	Beban Amortisasi Asot Lainnya-Aset Tidak Berwujud	979.855.303,20	1.461.121.753,20	(32,94)
Jumlah		**401.930.534.961,20**	**400.688.568.086,47**	**0,31**

a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 sebesar Rp156.182.345.575,16 naik sebesar 3,28 % dari tahun 2022 sebesar Rp151.008.999.278,13 terinci sebagai berikut:

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Penyusutan Alat Besar	2.486.618.855,37	2.388.165.460,55	4,12
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	19.378.901.642,40	19.064.558.536,31	1,65
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	959.708 277,70	875.525 624,10	9,62
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	367.550.026,14	667.545.632,62	(44,94)
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	36.160.654.707,20	32.995.828.341,26	9,59
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.081.724.641,15	4.759.440.586,75	(14,24)
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	48.320.695.990,00	48.138.449.751,13	0,38
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	4.384.114.417,72	4.310.017 225,93	1,72
9	Beban Penyusutan Persenjataan	98.429.337,50	103.967.412,50	(5,33)
10	Beban Penyusutan Komputer	37.375.044.160,10	36.780.118 134,88	1,62
11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	1.745.216,67	1.745 216,67	
12	Beban Penyusutan Alat Pengeboran	1.100.000,00	2 514 285,71	(56,25)
13	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	542.970.436,00	306.330.467,25	77,25
14	Beban Penyusutan Alat Peraga	140.000,00	140.000,00	
15	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	281.264.857,67	43 109 857,80	552,44
16	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	1 406.554.077,50	495 082 277,50	184,11
17	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	117.365.461,00	76.460.467,75	53,50
Jumlah		**155.964.582.104,12**	**151.008.999.278,13**	**3,28**

b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada tahun 2023 sebesar Rp35.952.830.035,16 dan pada tahun 2022 sebesar Rp39.245.971.136,36 sehingga terjadi penurunan sebesar 7,99% dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	35.515.196.691,85	38.684.628.993,53	(8,19)
2	Beban Penyusutan Monumen	23.878.680,00	23.878.680,00	-
3	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	570.726.729,38	537.463.462,83	6,19
Jumlah		**36.109.802.101,23**	**39.245.971.136,36**	**(7,99)**

c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan mengalami penurunan sebesar 0,06% dari tahun 2022 sebesar Rp208.752.269.902,53 menjadi Rp208.631.782.386,40 di tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	167.983.583.137,08	184.241.504.438,25	(8,82)
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	30.673.332.466,59	19.268.960.458,55	59,19
3	Beban Penyusutan Instalasi	4.570.357.614,62	4.570.620.340,86	(0,01)
4	Beban Penyusutan Jaringan	5.404.509.168,11	671.184.664,87	705,22
Jumlah		**208.631.782.386,40**	**208.752.269.902,53**	**(0,06)**

d. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp244.513.066,25 pada tahun 2023 dan Rp220.206.016,25 pada tahun 2022 merupakan Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik.

e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar 979.855.303,20 pada tahun 2022 dan Rp1.461.121.753,20 pada tahun 2022 merupakan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software.

5.4.1.2.12 Beban Transfer

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
200.394.594.298,00	196.853.773.727,00	3.540.820.571,00	1,80

Beban Transfer meningkat sebesar Rp3.540.820.571,00 atau 1,80% dari tahun 2022 sebesar Rp196.853.773.727,00 menjadi Rp200.394.594.298,00 di tahun 2023, terinci sebagai berikut :

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bagi Hasil	22.500.000.000,00	22.065.196.658,00	1,97
2	Beban Bantuan Keuangan	177.894.594.298,00	174.788.577.069,00	1,78
Jumlah		**200.394.594.298,00**	**196.853.773.727,00**	**1,80**

a. **Beban Bagi Hasil**

Beban Bagi Hasil mengalami peningkatan sebesar 1,97% dari tahun 2022 sebesar Rp22.065.196.658,00 menjadi Rp22.500.000.000,00 di tahun 2023 terinci sebagai berikut

NO	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	18.703.050.930,00	18.268.247.588,00	2,38
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.796.949.070,00	3.796.949.070,00	-
Jumlah		**22.500.000.000,00**	**22.065.196.658,00**	**1,97**

b. **Beban Bantuan Keuangan**

Beban bantuan keuangan tahun 2023 meningkat 1,78% dari tahun sebelumnya Rp174.788.577.069,00 menjadi Rp177.894.594.298,00 dengan rincian :

NO	URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	177.147.531.077,00	174.788.577.069,00	1,35
1	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	747.063.221,00	-	-
Jumlah		**177.894.594.298,00**	**174.788.577.069,00**	**1,78**

5.4.1.2.13 Beban Tidak Terduga

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
864.061,08	0	864.061,08	-

Beban Tidak Terduga sebesar Rp864.061,08 merupakan beban pengembalian Dana BOS SDN Kramat Sukoharjo 4 Kecamatan Silo pada tahun 2022 karena Lembaga tersebut tutup.

5.4.2 Kegiatan Non Operasional

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
(10.013.654.812,51)	(1.666.895.947,85)	(8.346.758.864,66)	500,74

Jumlah surplus/ defisit Kegiatan Non Operasinal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar minus Rp10.013.654.812,51dan minus Rp1.666.895.947,85 Kegiatan Non Operasional selama periode Tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp8.346.758.864,66atau sebesar 500,74% dari tahun 2022. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

5.4.2.1 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional – LO

Jumlah surplus/ defisit dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp10.013.654.812,51dan minus Rp1.666.895.947,85 berasal dari Defisit Kegiatan Non Operasinal Lainnya – LO.

5.4.2.1.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO

Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.013.654.812,51. Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya - LO terinci sebagai berikut :

NO	URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	(4.036.750.214,27)	(1.666.895.947,85)	142,17
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	(5.976.904.598,24)	-	-
Jumlah		**(10.013.654.812,51)**	**(1.666.895.947,85)**	**500,74**

5.4.3 Pos Luar Biasa

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Tidak terdapat nilai pada pos luar biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022.

5.5 LAPORAN ARUS KAS

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	3.957.351.787.540,85	3.715.160.123.903,32
Arus Kas Keluar	(3.570.058.313.301,66)	(3.334.052.127.419,46)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**387.293.474.239,19**	**381.107.996.483,86**

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Arus Kas dari Aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas

untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2023. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp387.293.474.239,19 dan Rp381.107.996.483,86, dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Arus Masuk Kas	3.957.351.787.540,85	3.715.160.123.903,32	242.191.663.637,53	6,52
Arus Keluar Kas	(3.570 058 313.301,66)	(3.334 052.127.419,46)	236.006 185.882,20	7,08
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	387 293.474.239,19	381.107.996 483,86	6.185.477 755,33	1,62

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp6.185.477.755,33 atau 1,62 persen dari TA 2022.

Tabel Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas:		
Penerimaan Pajak Daerah	288.151.785.388,00	293.578.032.475,00
Penerimaan Retribusi Daerah	27.374.994.636,00	38.871.533.956,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.189.012.393,75	6.829.382.856,25
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	**441 705 646 749,10**	300.964 881 074,07
Penerimaan Dana Bagi Hasil	210 923 988 652,00	217 436 609 930,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.704 938 164.985,00	1 597.514 133 650,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	45.036.717.101,00	60.010 011 721,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	561.962.339.481,00	560 612 553.129,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	10 364 617 000,00
Penerimaan Dana Desa	322 996.582 400,00	315 343.690 000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	334.510.008.600,00	273.618.771.679,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	**11 626.442 821,00**	11 381 077 000,00
Penerimaan Pendapatan Hibah	936.104.334,00	10.930 595 096,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	17.704 234 337,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**3.957.351.787.540,85**	**3.715.160.123.903,32**
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	**1.361.120.333.591,47**	1 384.497 512 083,00
Pembayaran Barang	**1.354.258.354.206,19**	1.297.772 326 967,46
Pembayaran Bunga	**0,00**	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00

URAIAN	2023	2022
Pembayaran Hibah	270.995.238.880,00	93.923.338.592,00
Pembayaran Bantuan Sosial	29.185.958.000,00	44.178.244.900,00
Pembayaran Tak Terduga	31.854.315.147,00	1.483.241.150,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	18.703.050.930,00	18.268.247.588,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	3.796.949.070,00	3.796.949.070,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	500.144.113.477,00	490.132.267.069,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**3.570.058.313.301,66**	**3.334.052.127.419,46**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**387.293.474.239,19**	**381.107.996.483,86**

5.5.1.1 Arus Masuk Kas

5.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp288.151.785.388,00 dan Rp293.578.032.475,00

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Pajak Daerah	288.151.785.388,00	293.578.032.475,00	(5.426.247.087,00)	(1,85)

Dengan demikian, terdapat penurunan penerimaan pajak daerah sebesar minus Rp5.561.847.609,00 atau minus 1,85 persen dari TA 2022.

5.5.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp27.374.994.636,00 dan Rp38.871.533.956,00

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Retribusi Daerah	27.374.994.636,00	38.871.533.956,00	(11.496.539.320,00)	(29,58)

Dengan demikian, terdapat penurunan retribusi daerah sebesar minus Rp11.496.539.320,00 atau minus 29,58 persen dari TA 2022.

5.5.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp7.189.012.393,75 dan Rp6.829.382.856,25.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.189.012.393,75	6.829.382.856,25	359.629.537,50	5,27

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp359.629.537,50 atau 5,27 persen dari TA 2022.

5.5.1.1.4 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp441.705.646.749,10 dan Rp300.964.881.074,07

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	441.705.646.749,10	300.964.881.074,07	140.740.765.675,03	46,76

Dengan demikian terdapat kenaikan penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp140.740.765.675,03 atau 46,76 persen dari TA 2022.

5.5.1.1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp210.923.988.652,00 dan Rp217.436.609.930,00

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (*Audited*)	Selisih	Persentase
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	210.923.988.652,00	217.436.609.930,00	(6.512.621.278,00)	(3,00)

Dengan demikian, terdapat penurunan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar minus Rp6.512.621.278,00 atau minus 3,00 persen dari TA 2022.

5.5.1.1.6 Penerimaan Dana Alokasi Umum

Penerimaan Dana Alokasi Umum TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp1.704.938.164.985,00 dan Rp1.597.514.133.650,00

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.704.938.164.985,00	1.597.514.133.650,00	107.424.031.335,00	6,72

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp107.424.031.335,00 atau 6,72 persen dari TA 2022.

5.5.1.1.7 Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp45.036.717.101,00 dan Rp60.010.011.721,00.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	45.036.717.101,00	60.010.011.721,00	(14.973.294.620,00)	(24,95)

Dengan demikian, terdapat penurunan penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik sebesar minus Rp14.973.294.620,00 atau minus 24,95 persen dari TA 2022.

5.5.1.1.8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp561.962.339.481,00 dan Rp560.612.553.129,00.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	561.962.339.481,00	560.612.553.129,00	1.349.786.352,0	0,24

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik sebesar Rp1.349.786.352,00 atau 0,24 persen dari TA 2022.

5.5.1.1.9 Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)

Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) TA 2023 sebesar Rp0,00 dan TA 2022 adalah sebesar Rp10.364.617.000,00 .

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	10.364.617.000,00	(10.364.617.000,00)	(100)

Dengan demikian, terdapat penurunan penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp10.364.617.000,00 dari TA 2022.

5.5.1.1.10 Penerimaan Dana Desa

Penerimaan Dana Desa TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp322.996.582.400,00 dan Rp315.343.690.000,00.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Dana Desa	322.996.582.400,00	315.343.690.000,00	7.652.892.400,00	2,43

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan Dana Desa sebesar Rp7.652.892.400,00 atau 2,43 persen dari TA 2022.

5.5.1.1.11 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah

Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp334.510.008.600,00 dan Rp273.618.771.679,00.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah	334.510.008.600,00	273.618.771.679,00	60.891.236.921,00	22,25

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp60.891.236.921,00 atau 22,25 persen dari TA 2022.

5.5.1.1.12 Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya

Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp11.626.442.821,00 dan Rp11.381.077.000,00.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	11.626.442.821,00	11.381.077.000,00	245.365.821,00	2,16

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp245.365.821,00 atau 2,16 persen dari TA 2022.

5.5.1.1.13 Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp936.104.334,00 dan Rp10.930.595.096,00.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Hibah	936.104.334,00	10.930.595.096,00	(9.994.490.762,00)	(91,44)

Dengan demikian, terdapat penurunan penerimaan Hibah sebesar minus Rp9.994.490.762,00 atau minus 91,44 persen dari TA 2022.

5.5.1.1.14 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2023 Rp0,00 dan TA 2022 adalah sebesar Rp17.704.234.337,00.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	17.704.234.337,00	(17.704.234.337,00)	(100)

Dengan demikian terdapat penurunan penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di TA 2023 sebesar Rp17.704.234.337,00 dari TA 2022.

Arus masuk kas dari kegiatan operasional merupakan penerimaan yang diakui sebagai pendapatan LRA ditambah dengan penerimaan pendapatan non APBD sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Perbedaan Arus Masuk Kas LAK dan LRA pada Aktivitas Operasi

URAIAN	LAK	LRA	SELISIH
Arus Masuk Kas:			
Penerimaan Pajak Daerah	288.151.785.388,00	288.151.785.388,00	0,00
Penerimaan Retribusi Daerah	27.374.994.636,00	27.374.994.636,00	0,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.189.012.393,75	7.189.012.393,75	0,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	441.705.646.749,10	441.780.510.476,10	(74.863.727,00)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	210.923.988.652,00	210.923.988.652,00	0,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.704.938.164.985,00	1.704.938.164.985,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	45.036.717.101,00	45.036.717.101,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	561.962.339.481,00	561.962.339.481,00	0,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)			0,00

URAIAN	LAK	LRA	SELISIH
Penerimaan Dana Desa	322.996.582.400,00	322.996.582.400,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah	334.510.008.600,00	334.510.008.600,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	11.626.442.821,00	11.626.442.821,00	0,00
Penerimaan Hibah	936.104.334,00	936.104.334,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ARUS KAS MASUK	**3.957.351.787.640,85**	**3.957.426.651.267,85**	**(74.863.727,00)**

Terdapat selisih antara arus masuk kas dari aktivitas operasi di LAK dengan total pendapatan daerah LRA sebesar Rp74.863.727,00 merupakan penjualan atas aset peralatan dan mesin.

5.5.1.2 Arus Keluar Kas

5.5.1.2.1 Pembayaran Pegawai

Pembayaran Pegawai TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp1.361.120.333.591,47 dan Rp1.384.497.512.083,00.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Hibah	1.361.120.333.591,47	1.384.497.512.083,00	(23.377.178.491,53)	(1,69)

Dengan demikian, terdapat penurunan Pembayaran Pegawai sebesar minus Rp23.377.178.491,53 atau minus 1,69 persen dari TA 2022.

5.5.1.2.2 Pembayaran Barang dan Jasa

Pembayaran Barang dan Jasa TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp1.354.258.354.206,19 dan Rp1.297.772.326.967,46.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Pembayaran Barang dan Jasa	1.354.258.354.206,19	1.297.772.326.967,46	56.486.027.238,73	4,35

Dengan demikian, terdapat kenaikan pembayaran Barang dan Jasa sebesar Rp56.486.027.238,73 atau 4,35 persen dari TA 2022.

5.5.1.2.3 Pembayaran Hibah

Pembayaran Hibah TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp270.995.238.880,00 dan Rp93.923.338.592,00.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Pembayaran Hibah	270.995.238.880,00	93.923.338.592,00	177.071.900.288,00	188,53

Dengan demikian, terdapat kenaikan pembayaran Hibah sebesar Rp177.071.900.288,00 atau 188,53 persen dari TA 2022.

5.5.1.2.4 Pembayaran Bantuan Sosial

Pembayaran Bantuan Sosial TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp29.185.958.000,00 dan Rp44.178.244.900,00.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Pembayaran Bantuan Sosial	29.185.958.000,00	44.178.244.900,00	(14.992.286.900,00)	(33,94)

Dengan demikian, terdapat penurunan pembayaran Bantuan Sosial sebesar minus Rp14.992.286.900,00 atau minus 33,94 persen dari TA 2022.

5.5.1.2.5 Pembayaran Tak Terduga

Pembayaran Tak Terduga TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp31.854.315.147,00 dan Rp1.483.241.150,00.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Pembayaran Tak Terduga	31.854.315.147,00	1.483.241.150,00	30.371.073.997,00	2047,62

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pembayaran Tak Terduga sebesar Rp30.371.073.997,00 atau 2047,62 persen dari TA 2022.

5.5.1.2.6 Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah

Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp18.703.050.930,00 dan Rp18.268.247.588,00

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	18.703.050.930,00	18.268.247.588,00	434.803.342,00	2,38

Dengan demikian terdapat kenaikan pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar minus Rp434.803.342,00 atau 2,38 persen dari TA 2022.

5.5.1.2.7 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp3.796.949.070,00 dan Rp3.796.949.070,00.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah	3.796.949.070,00	3.796.949.070,00	0,00	0,00

Dengan demikian, Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah tidak terdapat selisih di TA 2023 dan di TA.2022.

5.5.1.2.8 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp500.144.113.477,00 dan Rp490.132.267.069,00

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	500.144.113.477,00	490.132.267.069,00	10.011.846.408,00	2,04

Dengan demikian, terdapat kenaikan pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp10.011.846.408,00 atau 2,04 persen dari TA 2022.

Tidak terdapat selisih antara arus masuk kas di LAK dan total pendapatan daerah LRA. Arus keluar kas dari kegiatan operasional merupakan realisasi belanja pegawai serta realisasi belanja barang dan jasa LRA tahun berjalan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Perbedaan Arus Keluar Kas LAK dan LRA pada Aktivitas Operasi

URAIAN	LAK	LRA	SELISIH
Arus Keluar Kas:			
Pembayaran Pegawai	1.361.120.333.591,47	1.361.120.333.591,47	0,00
Pembayaran Barang	1.354.258.354.206,19	1.354.258.354.206,19	0,00

URAIAN	LAK	LRA	SELISIH
Pembayaran Bunga	0,00		0,00
Pembayaran Subsidi	0,00		0,00
Pembayaran Hibah	270.995.238.880,00	270.995.238.880,00	0,00
Pembayaran Bantuan Sosial	29.185.958.000,00	29.185.958.000,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	31.854.315.147,00	31.854.315.147,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	18.703.050.930,00	18.703.050.930,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	3.796.949.070,00	3.796.949.070,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	500.144.113.477,00	500.144.113.477,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00		0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	3.570.058.313.301,66	3.570.058.313.301,66	0,00

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas	74.863.727,00	0,00
Arus Keluar Kas	232.163.748.376,26	(829.309.474.596,91)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(232.088.884.649,26)**	**(829.309.474.596,91)**

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Aktivitas Investasi pada TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar minus Rp232.088.884.649,26 dan minus Rp829.309.474.596,91dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Arus Masuk Kas	74.863.727,00	0,00	74.863.727,00	-
Arus Keluar Kas	232.163.748.376,26	829.309.474.596,91	(597.145.726.220,65)	(72,01)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(232.088.884.649,26)	(829.309.474.596,91)	597.220.589.947,65	(72,01)

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp597.220.589.947,65 atau minus 72,01 persen dari TA 2022

5.5.1.3 Arus Masuk Kas

Jumlah Arus Masuk Kas dari aktivitas investasi TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Total arus masuk kas	74.863.727,00	0,00	74.863.727,00	-

Dengan demikian, tidak terdapat selisih arus masuk kas dari aktivitas investasi.

Tabel Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas:		
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	74.863.727,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**74.863.727,00**	**0,00**
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	79.716.522.691,50	110.179.303.905,68
Perolehan Gedung dan Bangunan	54.635.641.878,00	116.408.013.296,63
Perolehan Jalan, Irigasi, dan jaringan	43.233.220.730,76	571.264.002.627,99
Perolehan Aset Tetap Lainnya	54.351.340.328,00	31.458.154.766,61
Perolehan Aset Lainnya	227.022.748,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**232.163.748.376,26**	**829.309.474.596,91**
Arus Kas Bersih dari Akrtivitas Investasi	**(232.088.884.649,26)**	**(829.309.474.596,91)**

5.5.1.4 Arus Keluar Kas

5.5.1.4.1 Perolehan Tanah

Perolehan Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp0,00.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Perolehan Tanah	0,00	0,00	0,00	-

Dengan demikian, tidak terdapat Perolehan Tanah dari TA 2022.

5.5.1.4.2 Perolehan Peralatan dan Mesin

Perolehan Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp79.716.522.691,00 dan Rp110.179.303.905,68.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Perolehan Peralatan dan Mesin	79.716.522.691,00	110.179.303.905,68	(30.462.781.214,18)	(27,65)

Dengan demikian, terdapat penurunan Perolehan Peralatan dan Mesin sebesar minus Rp30.462.781.214,18 atau minus 27,65 persen dari TA.2022.

5.5.1.4.3 Perolehan Gedung dan Bangunan

Perolehan Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp54.635.641.878,00 dan Rp116.408.013.296,63.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Perolehan Gedung dan Bangunan	54.635.641.878,00	116.408.013.296,63	(61.772.371.418,63)	(53,07)

Dengan demikian, terdapat penurunan Perolehan Gedung dan Bangunan sebesar minus Rp61.772.371.418,63 atau minus 53,07 persen dari TA.2022

5.5.1.4.4 Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp43.233.220.730.76 dan Rp571.264.002.627,99.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	43.233.220.730.76	571.264.002.627,99	(528.030.781.897,23)	(92,43)

Dengan demikian, terdapat penurunan Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar minus Rp528.030.781.897,2 atau minus 92,43 persen dari TA.2022

5.5.1.4.5 Perolehan Aset Tetap Lainnya

Perolehan Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp54.351.340.328,00 dan Rp31.458.154.766,61.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Perolehan Aset Tetap Lainnya	54.351.340.328,00	31.458.154.766,61	22.893.185.561,39	72,77

Dengan demikian, terdapat kenaikan Perolehan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp22.893.185.561,39 atau 72,77 persen dari TA.2022.

5.5.1.4.6Perolehan Aset Lainnya

Perolehan Aset Lainnya TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp227.022.748,00 dan Rp227.022.748,00.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Perolehan Aset Lainnya	227.022.748,00	Rp00,0	227.022.748,00	0,00

Dengan demikian, terdapat kenaikan Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp227.022.748,00 dari TA 2022.

Apabila dibandingkan dengan realisasi di LRA, tidak terdapat perbedaan pengakuan pada arus masuk kas pada aktivitas investasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Perbedaan Arus Masuk Kas dan Keluar LAK dan LRA pada Aktivitas Investasi

URAIAN	LAK	LRA	SELISIH
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Arus Masuk Kas:			
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	74.863.727,00	0,00	74.863.727,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00

URAIAN	LAK	LRA	SELISIH
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**74.863.727,00**	**0,00**	**74.863.727,00**
Arus Keluar Kas			
Perolehan Tanah	0,00	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	79.716.522.691,50	79.716.522.691,50	0,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	54.635.641.878,00	54.635.641.878,00	0,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan jaringan	43.233.220.730,76	43.233.220.730,76	0,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	54.351.340.328,00	54.351.340.328,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya	227.022.748,00	227.022.748,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	232.088.884.649,26	232.163.748.376,26	74.863.727,00

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	53.942.500,00	19.600.000,00
Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**53.942.500,00**	**19.600.000,00**

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan

utang jangka panjang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2023 dan TA 2020 adalah sebesar Rp53.942.500,00 dan Rp19.600.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Arus Masuk Kas	53.942.500,00	19.600.000,00	34.342.500,00	175,22
Arus Keluar Kas	0,00	0,00	0,00	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	53.942.500,00	19.600.000,00	34.342.500,00	175,22

Dengan demikian, terdapat kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp34.342.500,00 atau 175,22 persen dari TA 2022

5.5.2.1 Arus Masuk Kas

5.5.2.1.1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp53.942.500,00 dan Rp19.600.000,00.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	53.942.500,00	19.600.000,00	34.342.500,00	175,22

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp34.342.500,00 atau 175,22 persen dari TA.2022.

5.5.2.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas TA 2023 dan TA 2022 adalah Rp0,00.

Tabel Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan

URAIAN	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas:		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00

URAIAN	2023	2022
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman	53.942.500,00	19.600.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**53.942.500,00**	**19.600.000,00**
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dalam Negeri	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dalam Negeri-Lainnya	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**53.942.500,00**	**19.600.000,00**

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas	178.149.422.897,02	247.592.110.007,00
Arus Keluar Kas	178.149.422.894,00	247.592.110.007,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**3,02**	**0,00**

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, Beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi akibat potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya.Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah tersebut bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp3,02 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Arus Masuk Kas	178.149.422.897,02	247.592.110.007,00	(69.442.687.113,00)	28,05
Arus Keluar Kas	178.149.422.894,00	247.592.110.007,00	(69.442.687.113,00)	28,05
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	3,02	0,00	0,00	-

Dengan demikian, tidak terdapat selisih Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris.

5.5.3.1 Arus Masuk Kas

5.5.3.1.1 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp178.149.422.897,02 dan Rp247.592.110.007,00.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	178.149.422.894,00	247.592.110.007,00	(69.442.687.109,98)	(28,05)

Dengan demikian, terdapat penurunan pada Penerimaan Perhitungan Figak Ketiga (PFK) sebesar minus Rp69.442.687.113 atau minus 28,05 persen dari TA 2022.

5.5.3.1.2 Penerimaan Lain – Lain

Penerimaan Lain - lain TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp3,02 dan 0,00

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Lain - lain	3,02	0,00	3,02	

5.5.3.2 Arus Keluar Kas

5.5.3.2.1 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp178.149.422.894,00 dan Rp247.592.110.007,00.

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	178.149.422.894,00	247.592.110.007,00	(69.442.687.113)	(28,05)

Dengan demikian,terdapat penurunan pada Penerimaan Perhitungan Figak Ketiga (PFK) sebesar minus Rp69.442.687.113 atau minus 28,05 persen dari TA 2022.

Tabel Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas:		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	**178.149.422.894,00**	247.592.110.007,00
Penerimaan Lain - Lain	**3,02**	
Jumlah Arus Masuk Kas	**178.149.422.897,02**	**247.592.110.007,00**
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	178.149.422.894,00	247.592.110.007,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**178.149.422.894,00**	**247.592.110.007,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**3,02**	**0,00**

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa potongan gaji pegawai, dana yang harus disetorkan kepada pihak ketiga serta perhitungan pajak yang harus disetorkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Perhitungan Pihak Ketiga

NO	Jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
1	Askes	1.251.069	1.251.069
2	BPJS Kesehatan	1.488.239	1.488.239
3	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.314.424.207	1.314.424.207
4	Iuran Jaminan Kematian	3.938.509.489	3.938.509.489
5	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	26.098.548.362	26.098.548.362
6	Iuran Wajib Pegawai 1%	10.052.152.831	10.052.152.831
7	Iuran Wajib Pegawai 8%	41.563.634.636	41.563.634.636
8	Jaminan Hari Tua	191.875	191.875
9	Lainnya	4.992.846	4.992.846
10	Pajak Penghasilan Ps 22	2.450.547.499	2.450.547.499

NO	Jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
11	Pajak Penghasilan Ps 23	2.509.349.530	2.509.349.530
12	Pajak Penghasilan Ps 25	2.102.344	2.102.344
13	Pajak Penghasilan Ps 26	36.053.986	36.053.986
14	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	3.086.358.021	3.086.358.021
15	Pajak Pertambahan Nilai	42.981.844.787	42.981.844.787
16	PPH 21	44.107.973.173	44.107.973.173
	JUMLAH	178.149.422.894	178.149.422.894

5.5.4 Kenaikan/Penurunan Kas

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Kas	155.258.532.092,95	(448.181.878.113,05)

Kenaikan kas bersih sebesar Rp155.258.532.092,95 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel Perhitungan Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2023 (Rp)	31 DESEMBER 2022 (Rp)
1	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	387.293.474.239,19	381.107.996.483,86
2	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(232.088.884.649,26)	(829.309.474.596,91)
3	Arus kas bersih dar aktivitas pendanaan	53.942.500,00	19.600.000,00
4	Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris	3,02	0,00
	TOTAL	155.258.532.092,95	(448.181.878.113,05))

5.5.5 Saldo Awal Kas di Kasda & Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di BLUD & Kas Dana BOS & Kas Dana Kapitasi pada FKTP

URAIAN	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Selisih	Persentase
Saldo Awal Kas di Kasda & Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di BLUD & Kas Dana BOS & Kas Dana Kapitasi pada FKTP	121.337.947.707,91	569.519.825.820,96	(448.181.878.113,05)	(78,69)

Dengan demikian, terdapat penurunan Saldo Awal Kas di Kasda & Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di BLUD & Kas Dana BOS & Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar minus Rp448.181.878.113,05 atau minus 78,69 persen dari TA.2022.

Saldo Awal kas sebesar Rp569.519.825.820,96 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Perhitungan Saldo Awal Kas

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Saldo awal Kas di Kas Daerah	62.782.444.703,37	Saldo Kas di Rekening Giro BUD
2	Saldo awal Kas awal di Bendahara Penerimaan	1.478.913.719,40	Kas di penampungan Bapenda dan Disperindag
3	Saldo awal Kas awal di BLUD	36.136.229.028,60	Saldo awal Kas BLUD di 3 RSD
5	Saldo awal Kas dana BOS	165.143.044,54	Saldo Awal Kas BOS di sekolah
6	Saldo awal Kas FKTP	20.775.217.212,00	Saldo awal Kas FKTP di 50 Puskesmas
SALDO AWAL KAS		121.337.947.707,91	

5.5.5.1 Saldo Awal Kas di Kas Daerah

1 Jan 2023	1 Jan 2022
Rp	Rp
62.782.444.703,37	435.021.517.165,66

Saldo tersebut merupakan saldo awal kas pada tanggal 1 Januari 2023 yang berasal dari saldo akhir kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp62.782.444.703,37.

Catatan: Saldo awal kas di Kasda sebesar Rp62.782.444.703,37 per tanggal 1 Januari 2023., bukan per tanggal 1 Januari 2022

5.5.5.2 Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan

1 Jan 2023	1 Jan 2022
Rp	Rp
1.478.913.719,40	1.142.538.951,00

Saldo awal kas di Bendahara Penerimaan adalah Rp1.478.913.719,40.

5.5.5.3 Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran

1 Jan 2023	1 Jan 2022
Rp	Rp
0,00	0,00

Saldo awal kas di Bendahara Pengeluaran adalah Rp0,00.

5.5.5.4 Saldo Awal Kas di BLUD

1 Jan 2023	1 Jan 2022
Rp	Rp
36.136.229.028,60	66.914.592.295,78

Saldo awal kas di BLUD sebesar Rp36.136.229.028,60.

5.5.5.5 Saldo Awal Kas Bendahara BOS

1 Jan 2023	1 Jan 2022
Rp	Rp
165.143.044,54	670.237.436,52

Saldo awal kas di Bendahara BOS sebesar Rp165.143.044,54.

5.5.5.6 Saldo Awal Kas Bendahara FKTP

1 Jan 2023	1 Jan 2022
Rp	Rp
20.775.217.212,0	65.770.939.927,00

Saldo awal kas di Bendahara BOK sebesar Rp20.775.217.212,00

5.5.6 Saldo Akhir Kas di Kasda & Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di BLUD & Kas Dana BOS & Kas Dana Kapitasi pada BOK, Setelah Reklasifikasi

31 Des 2023	31 Des 2022
Rp	Rp
276.596.479.800,86	121.337.947.707,92

Saldo Akhir Kas di Kasda & Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di BLUD & Kas Dana BOS & Kas Dana Kapitasi pada BOK dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	JENIS KAS (Rp)
Kas di Kas Daerah	234.552.670.324,51
Utang Kasda pada Bank Jatim (Pemotongan Qris Dinas Perhubungan)	(105.000,00)
Utang Kasda pada Bank Jatim (Pengembalian Belanja Bakesbangpol yang diinputkan lebih)	(270.000,00)
Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah	873.061.070,00
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.383.500,00
Kas di Bendahara Penerimaan - RSD dr. Soebandi	25.909.450,17

URAIAN	JENIS KAS (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan - RSD Balung	19.305.479,00
Kas di Bendahara Penerimaan - RSD Kalisat	14.435.900,00
Kas di BLUD - RSD dr. Soebandi	20.000.178.174,25
Kas di BLUD - RSD Balung	5.595.141.517,49
Kas di BLUD - RSD Kalisat	1.977.920.543,51
Kas di BLUD - Puskesmas	9.307.583.532,45
Kas Dana BOS	55.451.081,48
Kas Lainnya - Dana BOK PUSKESMAS	4.151.814.228,00
SILPA	276.596.479.800,86

5.5.7 Saldo Akhir Kas Lainnya (Termasuk Nilai Reklasifikasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran)

31 Des 2023	31 Des 2022
Rp	Rp
701.233.114,90	1.515.454.580,00

Saldo Akhir Kas Lainnya sebesar Rp701.233.114,90 merupakan rekening titipan pasien

5.5.8 Saldo Akhir Kas

31 Des 2023	31 Des 2022
Rp	Rp
277.297.712.915,76	122.853.402.288,02

Saldo akhir kas sebesar Rp277.297.712.915,76 merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember per tanggal 31 Desember 2023. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:

Tabel Perhitungan Saldo Akhir Kas

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo awal kas	155.258.532.092,95	(448.181.878.113,05)
2	Saldo awal kas	121.337.947.707,91	569.519.825.820,96
3	Saldo Akhir Kas Lainnya	701.233.114,90	1.515.454.580,11
Saldo Akhir Kas		**277.297.712.915,76**	**122.853.402.288,02**

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
6.599.768.110.679,52	5.323.918.668.199,61	1.275.849.442.479,91	23,96

Jumlah ekuitas awal Tahun 2023 sebesar Rp6.599.768.110.679,52 yang berasal dari ekuitas akhir Tahun 2022, sedangkan ekuitas awal Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.323.918.668.199,61.

5.6.2 Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
(30.214.135.036,46)	1.024.955.310,93	(31.239.090.347,39)	(3.047,85)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada tahun 2023 adalah senilai Rp(30.214.135.036,46) dengan perhitungan sebagai berikut :

1.	Pendapatan-LO	Rp	3.696.525.023.723,55
2.	Beban	Rp	(3.716.725.503.947,50)
	Surplus/Defisit Operasi	**Rp**	**(20.200.480.223,95)**
3.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(10.013.654.812,51)
4.	Pos LuarBiasa	Rp	(0,00)
	Surplus/Defisit-LO	**Rp**	**(30.214.135.036,46)**

Penjelasan mengenai Pendapatan LO dan Beban sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
(3.031.241.964,08)	1.274.824.487.168,98	(1.277.855.729.133,06)	(100,24)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada tahun 2023 adalah sebesar (3.031.241.964,08) sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.274.824.487.168,98.

Perubahan yang signifikan tersebut dipengaruhi oleh koreksi saldo awal yang terdiri dari :

1. Koreksi Saldo Awal Kas
2. Koreksi Saldo Awal Piutang
3. Koreksi Saldo Awal Persediaan
4. Koreksi Saldo Awal Investasi Non Permanen
5. Koreksi Saldo Awal Penyertaan Modal
6. Koreksi Saldo Awal Nilai Perolehan Aset Tetap
7. Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
8. Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dan Amortisasi
9. Koreksi Saldo Awal Utang Jangka Pendek
10. Koreksi Ekuitas Lainnya

Adapun penjelasan serta rincian dari masin-masing koreksi saldo awal diatas adalah sebagai berikut :

5.6.3.1 Koreksi Saldo Awal Kas

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
0,00	0,00	0,00	0,00

Koreksi Saldo Awal Kas pada tahun 2023 senilai Rp0,00.

5.6.3.2 Koreksi Saldo Awal Piutang

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
(2.928.196.255,00)	(767.928.756,10)	(2.160.267.498,90)	281,31

Koreksi Saldo Awal Piutang pada tahun 2023 senilai (Rp2.928.196.255,00) mengalami penurunan senilai Rp2.160.267.498,90 atau sebesar 281,31% dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan senilai Rp 60.978.075,00 dan pengurangan senilai Rp2.989.174.330,00. Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut :

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	**Koreksi atas Kurang Catat Saldo Awal Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2022 atas Temuan KAP terhadap Laporan Keuangan BLUD RSD Kalisat Tahun 2022**	4.000.000,00
2	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	penyesuaian piutang BPJS, Jasa Raharja, dll atas Piutang tahun 2022	44,00
3	Dinas Perhubungan	Penyesuaian Penambahan koreksi Piutang	12.473.016,00

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
		Konsersi 2022 (LHP BPK tahun 2019)	
4	Badan Pendapatan Daerah	Koreksi Piutang Pajak Hotel - Bapenda	670.250,00
5	Badan Pendapatan Daerah	Koreksi Piutang Pajak Restoran	43.834.765,00
		TOTAL	60.978.075,00

Sedangkan rincian pengurangan adalah sebagai berikut :

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi - Blud	Koreksi Saldo Awal Piutang-Piutang kepada PT. Telkom Rp4.935.145,00, Piutang MDR Dinkes Jember Rp105.028.000,00, Piutang kepada RSUD dr Koesnadi Bondowoso Rp4.690.000,00 dikarenakan kesalahan pencatatan atas pengakuan piutang kepada Pihak Asuransi Lainnya pada tahun 2022. Selain itu juga terdapat koreksi atas piutang kepada Kemenkes RI (Covid-19). Koreksi tersebut merupakan hasil temuan Tim Audit Inspektorat Jenderal pada Kemenkes RI berupa kelebihan klaim penggantian biaya pelayanan pasien Corona Virus Disease (Covid-19) sebesar Rp2.265.906.200,00.	2.380.559.345,00
2	Badan Pendapatan Daerah	Koreksi Piutang Pajak Hotel - Baponda	280.828.601,00
3	Badan Pendapatan Daerah	Koreksi Piutang Pajak Restoran	320.820.568,00
4	Badan Pendapatan Daerah	Koreksi Piutang Pajak Hiburan	5.000,00
5	Badan Pendapatan Daerah	Koreksi Piutang Pajak Parkir	291.600,00
6	Badan Pendapatan Daerah	Koreksi Piutang Pajak PPJ Non PLN	6.669.216,00
		TOTAL	2.989.174.330,00

5.6.3.3 Koreksi Saldo Awal Persediaan

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
(4.768.118.201,37)	405.791.432,87	(5.173.909.634,24)	(1.275,02)

Koreksi saldo awal persediaan pada tahun 2023 adalah senilai Rp4.768.118.201,37 menurun sebesar Rp5.173.909.634,24 atau sebesar (1.275,02)% dari tahun 2022 sebesar Rp405.791.432,87. Adapun rincian pengurangan adalah sebagai berikut:

NO	OPD	KETERANGAN	NOMINAL
1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Koreksi Kurang Nilai Persediaan atas barang diserahkan masyarakat karena barang tersebut sudah diserahkan ke masyarakat pada tahun 2016 sesuai dengan BAST yang ada (disperindag)	4.768.118.201,00
2	Dinas Kesehatan	Koreksi kurang catat Saldo dari Persediaan Dinkes yang keluar ke 50 PKM	0,37
		TOTAL	4.768.118.201,37

5.6.3.4 Koreksi Saldo Awal Investasi Non Permanen

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
53.942.500,00	19.600.000,00	34.342.500,00	175,22

Koreksi Saldo Awal Investasi Non Permanen pada tahun 2023 senilai Rp53.942.500,00 mengalami kenaikan sebesar 175,22% dari tahun 2022. Hal tersebut disebakan karena terdapat transaksi yang terjadi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mengalami koreksi saldo awal atas penerimaan kembali Dana bergulir kepada masyarakat sebesar Rp53.942.500,00

5.6.3.5 Koreksi Saldo Awal Penyertaan Modal

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
0,00	(575.984,39)	575.984,39	(100,00)

Koreksi Saldo Awal Penyertaan Modal pada tahun 2023 sebesar Rp0.

5.6.3.6 Koreksi Saldo Awal Nilai Perolehan Aset Tetap

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
846.031.040,34	1.657.763.942.313,55	(1.656.917.911.273,21)	(99,95)

Koreksi Saldo Awal Nilai Perolehan Aset Tetap tahun 2023 sebesar Rp846.031.040,34 mengalami penurunan sebesar Rp1.656.917.911.273,21 atau 99,95% dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan senilai Rp28.970.000,00 dan pengurangan senilai Rp15.865.000,01 Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut :

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	Koreksi masuk pengakuan aset tetap berupa 2 laptop atas LHP BPK tahun 2021	28.970.000,00
2	Dinas Kesehatan	Koreksi penambahan Aset tetap dari Belanja Jasa tahun 2021	825 866.165,34
3	Dinas Perhubungan	koreksi Penambahan aset tetap dari beban jasa tahun sebelumnya (2022)	7.059.875,00
4	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi - Blud	Koreksi pembulatan koma pada aset lain lain	0,01
TOTAL			1.861.896.040,36

Sedangkan rincian pengurangan adalah sebagai berikut :

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Dinas Sosial	Koreksi Pengurangan sebelum Tahun 2023 Aset Berat Rusak Berat Ringan/Usang TA. 2023	15.000.000,00
2	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung - Blud	Koreksi nilai aset Gedung karena nilai tersebut termasuk kedalam biaya perkara (pengadilan)	865.000,00
3		Koreksi Pembulatan Koma	0,01
		TOTAL	15.865.000,01

5.6.3.7 Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
(25.156.303.860,51)	(293.411.341.484,83)	268.255.037.624,32	(91,43)

Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023 sebesar (Rp25.156.303.860,51) mengalami penurunan sebesar Rp 268.255.037.624,32 atau sebesar (91,43%) dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan senilai Rp 34.413.145.380,70 dan pengurangan senilai Rp 59.569.449.241,21. Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut:

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Dinas Pendidikan	Koreksi Perselisihan Akumulasi Penyusutan Akibat Reklas Dari KIB D Ke KIB B	7.050.300,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Koreksi Akumulasi Penyusutan Karena Reklas Dari KIB D Ke KIB C	345.365.640,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	Koreksi Akumulasi Karena Reklas dari KIB C (Gedung) ke KIB D (Jalan Irigasi dan Jaringan)	30.066.550.687,87
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	Koreksi Akumulasi Karena Reklas Antar Kib Dan Koresi Ekskom	77.431.188,46
5	Kecamatan Sumbersari	Koreksi Akumulasi Penyusutan Karena Perubahan Tahun Perolehan Rehab Gedung	184.888.590,55
6	Dinas Kesehatan	Koreksi Akumulasi Akibat Perubahan Komposisi Rehab Yang Dimutasi Dari Dinkes Ke Puskesmas Kalisat	1.824.000,00
7	Dinas Perhubungan	Koreksi Akumulasi Karena Salah Perhitungan Umur Ekonomis (Salah Kode Akumulasi)	2.712.250,71
8	Dinas Perhubungan	Koreksi Akumulasi Karena Reklas Antar KIB Dari KIB Gedung Ke KIB JIJ	3.605.445.946,73
9	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung - Blud	Koreksi Akumulasi Karena Perubahan Induk Gedung Menjadi Nilai Rehab	16.918.980,83
10	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung - Blud	Koreksi Akumulasi Karena Perubahan Nilai Perolehan Gedung Kesehatan	120.452,74
11	Badan Pengelolaan Keuangan Dan	Pengurangan Akm Penyusutan karena Perubahan tahun perolehan	104.837.338,38

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
	Aset Daerah - Skpd		
12		Koreksi pembulatan Koma	4,43
TOTAL			34.413.145.380,70

Sedangkan rincian pengurangan adalah sebagai berikut :

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Kecamatan Tanggul	Koreksi akumulasi karena reklas dari aset tetap renovasi menjadi aset berupa Gedung dan peralatan mesin.	199.257.713,58
2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan karena perubahan komposisi rehab TA. 2023	156.008.377,39
3	Dinas Pendidikan	Koreksi akumulasi penyusutan karena reklas dari KIB D ke KIB B TA 2023	28.626.500,00
4	Dinas Pendidikan	Koreksi akumulasi penyusutan karena ada perbaikan komposisi rehab pada gedung sekolah	182.460.825,52
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	koreksi akumulasi penyusutan karena reklas dari KIB D ke KIB C	79.584.695,53
6	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	koreksi akumulasi penyusutan karena kurang catat rehab Bangunan Gedung Kantor	252.226.356,80
7	Dinas Perhubungan	Koreksi Reklas Aset Gedung dan Bangunan (KIB C) Masuk Aset Jalan,Irigasi dan Jaringan (KIB D) TA 2023	13.810.394.841,25
8	Kecamatan Balung	koreksi akumulasi karena mutasi masuk aset renovasi dari cipta karya yg kemudian di reklas ke KIB B	178.220.051,40
9	Kecamatan Balung	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa aset renovasi ygdi reklas ke rehab gedung dari cipta karya	86.700.320,68
10	Kecamatan Panti	koreksi akumulasi karena reklas dari aset rusak ke aset tetap (kendaraan th 2006)	73.000.000,00
11	Kecamatan Semboro	koreksi akumulasi karena reklas dari KIB C ke KIB B	8.232.000,00
12	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	Koreksi Akumulasi Karena Reklas Antar Kib	37.443.401.848,72
13	Badan Pendapatan Daerah	Koreksi Akumulasi Penyusutan Karena Koreksi dari Persediaan ke KIB B TA 2023	43.800.000,00
14	Sekretariat Daerah	Koreksi Akumulasi Karena Nilai Perolehan Tanah Terkoreksi Menjadi Biaya Administrasi (Temuan BPK)	15.012.340,00
15	Puskesmas Mangli	koreksi akumulasi karena mutasi berupa tenda dari diperindag	961.250,00

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
16	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd	Koreksi Mutasi Masuk Perselisihan KIB B (Kode Penambahan Koreksi Bukan Belanja Modal) dari SMP TA 2023	6.934.319.614,00
17	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung - Blud	koreksi akumulasi karena koresi belanja jada ke belanja modal	14.485.000,00
18	Kecamatan Tanggul	Jurnal Koreksi Masuk Akumulasi Tenda dari Disperindag TA. 2023	1.538.000,00
19	Kecamatan Ledokombo	Jurnal Koreksi Masuk Akumulasi Tenda dari Disperindag TA. 2023	769.000,00
20	Kecamatan Gumukmas	Jurnal Koreksi Masuk Akumulasi Tenda dari Disperindag TA. 2023	769.000,00
21	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jurnal Koreksi Masuk Akumulasi Tenda dari Disperindag TA. 2023	2.307.000,00
22	Kecamatan Tempurejo	Koreksi Akumulasi Masuk Karena Tenda Dari Disperindag	769.000,00
23	Kecamatan Pakusari	jurnal koreksi akumulasi karena mutasi masuk berupa tenda dari disperindag	769.000,00
24	Kecamatan Wuluhan	jurnal koreksi akumulasi karena mutasi masuk berupa tenda dari disperindag	769.000,00
25	Kecamatan Sumberjambe	Jurnal koreksi akumulasi karena mutasi masuk berupa tenda dari disperindag	1.538.000,00
26	Kecamatan Puger	jurnal koreksi akumulasi karena mutasi masuk berupa tenda dari disperindag	1.538.000,00
27	Kecamatan Mumbulsari	jurnal koreksi akumulasi karena mutasi masuk berupa tenda dari disperindag	769.000,00
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Jurnal koreksi akumulasi karena mutasi masuk berupa tenda dari disperindag	2.307.000,00
29	Kecamatan Sukowono	Jurnal koreksi akumulasi karena mutasi masuk berupa tenda dari disperindag	769.000,00
30	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Jurnal koreksi akumulasi karena mutasi masuk berupa tenda dari disperindag	576.750,00
31	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	jurnal koreksi akumulasi karena mutasi masuk berupa tenda dari disperindag	19.225.000,00
32	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	koreksi akumulasi karena mutasi masuk berupa tenda dari disperindag	1.153.500,00
33	Kecamatan Ajung	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa tenda dari disperindag	769.000,00
34	Kecamatan Arjasa	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa tenda dari disperindag	769.000,00
35	Kecamatan Balung	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa tenda dari disperindag	769.000,00
36	Kecamatan Bangsalsari	koreksi akumulasi karena mutasi berupa tenda dari disperindag	769.000,00
37	Kecamatan Jelbuk	koreksi akumulasi karena mutasi berupa tenda dari disperindag	769.000,00

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
38	Kecamatan Kaliwates	koreksi akumulasi karena mutasi berupa tenda dari disperindag	1.538.000,00
39	Kecamatan Kencong	koreksi akumulasi karena mutasi berupa tenda dari disperindag	1.538.000,00
40	Kecamatan Panti	koreksi akumulasi karena mutasi berupa tenda dari disperindag	769.000,00
41	Kecamatan Patrang	koreksi akumulasi karena mutasi berupa tenda dari disperindag	1.153.500,00
42	Kecamatan Semboro	koreksi akumulasi karena mutasi berupa tenda dari disperindag	1.538.000,00
43	Kecamatan Sukorambi	koreksi akumulasi karena mutasi berupa tenda dari disperindag	769.000,00
44	Kecamatan Sumberbaru	koreksi akumulasi karena mutasi berupa tenda dari disprindag	1.538.000,00
45	Kecamatan Sumbersari	koreksi akumulasi karena mutasi berupa tenda dari disperindag	1.538.000,00
46	Kecamatan Umbulsari	koreksi akumulasi karena mutasi berupa tenda dari disporindag	769.000,00
47	Sekretariat Daerah	koreksi akumulasi karena mutasi berupa tenda dari diperindag	2.114.750,00
48	Kecamatan Silo	koreksi akumulasi karena mutasi berupa tenda dari diperindag	769.000,00
49	Kecamatan Ambulu	koreksi akumulasi karena mutasi berupa tenda dari diperindag	769.000,00
50	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	koreksi akumulasi karena mutasi berupa tenda dari diperindag	7.005.000,00
51	Kecamatan Mayang	koreksi akumulasi karena mutasi berupa tenda dari diperindag	1.538.000,00
52		Koreksi Pembulatan Koma	6,34
TOTAL			59.569.449.241,21

5.6.3.8 Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dan Amortisasi

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
(190.722.966,00)	2.819.981.441,00	(3.010.704.407,00)	(106,76)

Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dan Amortisasi tahun 2023 adalah koreksi akumulasi aset kemitraan pada OPD Dinas Pendidikan senilai Rp190.722.966,00.

5.6.3.9 Koreksi Saldo Awal Utang Jangka Pendek

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
29.134.802.931,00	(5.972.757.833,77)	35.107.560.764,77	(587,79)

Koreksi Saldo Awal Utang Jangka Pendek tahun 2023 sebesar Rp29.134.802.931,00 mengalami kenaikan sebesar Rp35.107.560.764,77 atau 587,79% dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan senilai Rp 29.135.130.184,00 dan pengurangan senilai Rp327.253,00. Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut:

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Koreksi Saldo Awal Hutang Telisa (air) Ta 2023	26.784,00
2	Dinas Kesehatan	Koreksi Hutang Telisa Ta 2022	42.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	koreksi saldo awal hutang Telisa TA 2023	63.391,00
4	Sekretariat Daerah	koreksi saldo awal hutang telepon Bag hukum, karena sudah terbayar di tahun 2022	63 149,00
5	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	Koreksi Utang RS. Balung	865.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Koreksi Pembayaran Utang BTT 2020 berupak Westafel	29.134.069.860,00
		TOTAL	29.135.130.184,00

Sedangkan rincian pengurangan adalah sebagai berikut :

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Kecamatan Umbulsari	Koreksi Saldo Awal Utang Telisa TA 2023	327.253,00
		TOTAL	327.253,00

5.6.3.10 Koreksi Ekuitas Lainnya

2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
(21.813.088,35)	(86.032.223.959,35)	86.010.410.871,00	(99,97)

Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2023 sebesar Rp(21.813.088,35) mengalami penurunan sebesar Rp86.010.410.871,00 dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan senilai Rp176.610.832,29 dan pengurangan senilai Rp198.423.920,64. Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut:

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd	Koreksi Saldo Awal Laporan Ekuitas PDP karena Audited KAP (Laba Rugi Tahun Berjalan)	175.746.766,83
2	Dinas Pendidikan	Jurnal Koreksi Silpa Dana BOS karena	3,02

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
		Pembulatan transfer dari Pemerintah Pusat	
3	Kecamatan Ambulu	Koreksi pembulatan koma	0,01
4	Kecamatan Puger	Koreksi pembulatan koma	0,02
5	Kecamatan Sumbersari	Koreksi pembulatan koma	0,01
6	Kecamatan Umbulsari	Koreksi pembulatan koma	0,01
7	Kecamatan Wuluhan	Koreksi pembulatan koma	0,01
8	Puskesmas Kasiyan	Koreksi pembulatan koma	0,07
9	Puskesmas Umbulsari	Koreksi pembulatan koma	1,06
10		Koreksi pembulatan koma	0,17
TOTAL			175.746.771,21

Sedangkan rincian pengurangan adalah sebagai berikut :

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Puskesmas Kencong	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
2	Puskesmas Cakru	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
3	Puskesmas Gumukmas	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	6 585 328,64
4	Puskesmas Tembokrejo	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
5	Puskesmas Puger	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	6.585.328,64
6	Puskesmas Kasiyan	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
7	Puskesmas Wuluhan	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
8	Puskesmas Lojejor	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3 292 664,32
9	Puskesmas Ambulu	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
10	Puskesmas Sabrang	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
11	Puskesmas Andongsari	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3 292.664,32
12	Puskesmas Tempurejo	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3 292.664,32
13	Puskesmas Curahnongko	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
14	Puskesmas Silo I	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	6.585.328,64
15	Puskesmas Silo Ii	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3 292 664,32
16	Puskesmas Mayang	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	6.585.328,64
17	Puskesmas Mumbulsari	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3 292 664,32
18	Puskesmas Jenggawah	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3 292 664,32
19	Puskesmas Kemuningsari	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3 292 664,32
20	Puskesmas Ajung	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
21	Puskesmas Rambipuji	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa	3.292 664,32

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
		alkes dari KEMENKES	
22	Puskesmas Nogosari	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
23	Puskesmas Balung	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
24	Puskesmas Karangduren	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
25	Puskesmas Umbulsari	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
26	Puskesmas Paleran	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
27	Puskesmas Semboro	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
28	Puskesmas Jombang	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
29	Puskesmas Sumberbaru	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
30	Puskesmas Rowotengah	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
31	Puskesmas Tanggul	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	6.585.328,64
32	Puskesmas Klatakan	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
33	Puskesmas Bangsalsari	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
34	Puskesmas Sukorejo	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
35	Puskesmas Panti	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
36	Puskesmas Sukorambi	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
37	Puskesmas Arjasa	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
38	Puskesmas Pakusari	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
39	Puskesmas Kalisat	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
40	Puskesmas Sumberjambe	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	6.585.328,64
41	Puskesmas Sukowono	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
42	Puskesmas Jelbuk	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	6.585.328,64
43	Puskesmas Kaliwates	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	6.585.328,64
44	Puskesmas Mangli	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
45	Puskesmas Jomberkidul	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
46	Puskesmas Sumbersari	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	6.585.328,64
47	Puskesmas Gladakpakem	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
48	Puskesmas Patrang	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	6.585.328,64
49	Puskesmas Banjarsengon	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32
50	Puskesmas Ledokombo	koreksi akumulasi karena mutasi tambah berupa alkes dari KEMENKES	3.292.664,32

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
51	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd	Koreksi pembulatan koma	0,01
52	Dinas Pendidikan	Koreksi pembulatan koma	0,01
53	Kecamatan Arjasa	Koreksi pembulatan koma	0,01
54	Kecamatan Kalisat	Koreksi pembulatan koma	0,01
55	Kecamatan Patrang	Koreksi pembulatan koma	0,01
56	Puskesmas Rowotengah	Koreksi pembulatan koma	0,29
57	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi - Blud	Koreksi pembulatan koma	0,01
58	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat - Blud	Koreksi pembulatan koma	0,01
		TOTAL	197.559.859,66

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili Dan Operasional Entitas

6.1.1 Domisili

Kabupaten Jember secara geografis terletak pada posisi 6027'29" s/d 7014'35" Bujur Timur dan 7059'6" s/d 8033'56" Lintang Selatan berbentuk dataran ngarai yang subur pada bagian Tengah dan Selatan, dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas Utara dan Timur serta Samudra Indonesia sepanjang batas Selatan dengan Pulau Nusabarong yang merupakan satu-satunya pulau yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Letaknya yang strategis karena berada dipersimpangan antara Surabaya dan Bali, sehingga perkembangannya cukup pesat dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Jawa Timur. Kabupaten Jember terletak di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur. Lokasinya sangat strategis, karena dilalui jalan arteri primer Surabaya –Banyuwangi.

Karakter topografi sebagian Kabupaten Jember di wilayah bagian selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur untuk pengembangan tanaman pangan, sedangkan di bagian utara merupakan daerah perbukitan dan bergunung-gunung yang relatif baik bagi pengembangan tanaman keras dan tanaman perkebunan. Wilayah Kabupaten Jember berada pada ketinggiaan antara 0 – 3.300 m dpl. Daerah yang memiliki kawasan terluas adalah daerah dengan ketinggian antara 100 – 500 m dpl, yaitu 1.240,77 km2 (37,68%) dan yang tersempit adalah daerah dengan ketinggian lebih dari 2.000 m dpl yaitu 31,34 km2 (0,95%).

Sebagai Daerah Otonom, Kabupaten Jember memiliki batas-batas teritorial, luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik dan sosial budaya serta sumber daya manusia. Kondisi obyektif yang demikian dapat mengungkapkan berbagai karakteristik sumberdaya alam, komoditas yang dihasilkan, mata pencaharian penduduk, keadaan serta ekonomi dan sosial budayanya yang mencerminkan kekuatan sebagai suatu kompetensi daerah, sekaligus beragam permasalahan yang dihadapinya.

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km2 atau 329.333,94 Ha dengan batas wilayah administarsi Kabupaten Jember adalah :

- Utara : Kabupaten Bondowoso dan sedikit Kabupaten Probolinggo
- Timur : Kabupaten Banyuwangi
- Selatan : Samudra Indonesia

- Barat : Kabupaten Lumajang

Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 225 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 524,46 Km2 atau 15,9% dari total luas wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan yang terkecil adalah Kaliwates, seluas 24,94 Km2 atau 0,76%.

6.1.2 Operasional Entitas

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Jember menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangannya. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari 24 (dua puluh empat). Urusan Pemerintahan Wajib dan 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan serta 7 (tujuh) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

1. Pendidikan;
2. Pesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketentraman ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olah raga;

14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan;
18. Kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi :

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan sumber daya mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian;
8. Transmigrasi

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang meliputi :

1. Administrasi pemerintahan
2. Pengawasan
3. Perencanaan
4. Keuangan
5. Kepegawaian
6. Pendidikan dan pelatihan
7. Penelitian dan pengembangan

6.2 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 24 November 2016 yang berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2018. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Pada Tahun 2021 telah diterbitkan Peraturan Bupati tentang KSOTK Nomer 112 tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2021.

6.3 Penerimaan Dana Dak Fisik, Non Fisik Dan Bkk

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan prioritas nasional, Kabupaten Jember

menerima Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Pemerintah Pusat dengan besaran realisasi pendapatan dan belanja selama TA 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel Realisasi Pendapatan DAK Fisik TA. 2023

NO	DAK REGULER	OPD	SALUR	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2023	SISA NILAI SALUR	KETERANGAN
1	2	3	7	8	9	12
1	Paud	Dispendik	303.164.500,00	303.164.500,00	0,00	
2	SD	Dispendik	14.366.673.100,00	14.217.960.779,00	148.694.321,00	
3	SMP	Dispendik	19.007.481.151,00	18.943.876.396,00	63.604.755,00	
4	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu,Bayi, dan Investasi Stunting	Dinkes	3.647.625.000,00	3.647.625.000,00	0,00	
5	Pengendalian Penyakit	Dinkes	391.500.000,00	391.500.000,00	0,00	
6	Keluarga Berencana	DP3AKB	1.289.983.350,00	1.289.983.350,00	0,00	
7	Air Minum	Cipta Karya	2.152.472.000,00	2.152.472.000,00	0,00	
8	Sanitasi	Cipta Karya	3.877.836.000,00	3.877.836.000,00	0,00	
	JUMLAH		45.036.717.101,00	44.824.418.025,00	212.299.076,00	

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2023 sebesar Rp45.036.717.101,00 sedangkan realisasi belanja sebesar Rp44.824.418.025,00, sehingga sisa Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2021 di RKUD sebesar Rp212.299.076,00

Tabel Realisasi Pendapatan dan Belanja DAK Non Fisik TA. 2023

NO	BIDANG	SISA TAHUN LALU (2022)	PENYALURAN	DANA DI RKUD	TOTAL REALISASI	PENGEMBALIAN	SISA DANA
1	Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	14.820.576.400,00	2.262.026.600,00	17.082.603.000,00	13.804.963.996,00	0,00	3.277.639.004,00
2	Dana Bantuan Operasional KB	4.124.921.076,00	15.410.142.924,00	19.535.064.000,00	18.506.307.647,00	0,00	1.028.756.353,00
3	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi &UKM (PK2UMK)	96.817.040,00	323.552.960,00	420.370.000,00	249.213.950,00		171.156.050,00
5	Dana Tunjangan Profesi	1.070.011.749,00	225.305.159.651,00	225.305.159.651,00	215.253.772.920,00		11.121.448.480,00

NO	BIDANG	SISA TAHUN LALU (2022)	PENYALURAN	DANA DI RKUD	TOTAL REALISASI	PENGEMBALIAN	SISA DANA
	Guru PNSD (TPG)						
6	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Tamsil)	2.823.750,00	5.387.805.048,00	5.387.805.048,00	8.015.500.000,00		196.055.048,00
7	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP)	142.243.900,00	1.026.781.100,00	1.169.025.000,00	911.846.900,00		114.934.200,00
8	Dana Fasilitasi Penanaman Modal (FPM)	47.775.431,00	275.624.596,00	323.400.000,00	259.523.669,00		4.124.921.076
14	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA)	172.249.000,00	266.551.000,00	438.800.000,00	211.272.326,00		55.278.674,00
	JUMLAH	23.298.344.596,00	250.257.643.852,00	269.662.226.699,00	257.212.351.408,00		15.981.368.709,00

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023 di RKUD sebesar Rp15.981.368.709,00 yang terdiri dari realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp250.257.643.852,00 dan sisa Dana tahun lalu sebesar Rp23.298.344.596,00 Sedangkan Realisasi belanja sebesar Rp257.212.351.408,00 sehingga sisa dana Alokasi Khusus Non Fisik TA. 2023 di RKUD sebesar Rp15.981.368.709,00.

Selain anggaran dari Pusat Kabupaten Jember di Tahun 2023 juga mendapatkan anggaran dari Propinsi yang berupa Bantuan Keuangan Khusus yang diberikan untuk Bidang Pendidikan,Kesehatan dan Hari Jadi Propinsi dengan rincian sebagai berikut :

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	URAIAN		REALISASI PENERIMAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS		REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS	SISA DANA BKK		KETERANGAN
			TGL PENERIMAAN	NILAI (Rp)		NILAI (Rp)	TGL PENYETORAN	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	PENDIDIKAN :			8.176.400.000	7.555.800.000	620.600.000		
	a.	BPPDGS	10 April 2023	7.402.800.000	7.402.800.000	0,00	Masih di RKUD	
	b	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD	10 April 2023 dan 23 Desember 2023	597.600.000	0,00	597.600.000	Masih di RKUD	Tidak dicairkan karena sudah mendapat insentif GTT PAUD dan tidak boleh double Accounting sesuai juknis
	c.	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS	10 april 2023 dan 23 Desember 2023	176.000.000	153.000.000	23.000.000	Masih di RKUD	Ada sisa karena menyesuaikan dengan kebuluhan pada kegiatan
2	KESEHATAN			1.740.442.821	1.733.420.100	7.022.721		
	a.	Pemenuhan Honorarium Perawat Ponkesdes	31 Maret 2023 dan 23 desember 2023	1.320.600.000	1.320.600.000	0,00	Masih di RKUD	
	b	Pemenuhan Honorarium Dokter Puskesmas	31 Maret 2023	180 000.000	180.000.000	0,00	Masih di RKUD	
	c	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi oleh kader (Bunda Anak Impian/BUAIAN)	31 Maret 2023	119.564.500	117.347.900	2.216.600	Masih di RKUD	Efisiensi penawaran cetak buku saku, makanan dan minuman rapat serta fotocopy materi
	d	Bantuan Transport Kunjungan Konseling Kesehatan	31 Maret 2023	71.000.000	71.000.000	0,00	Masih di RKUD	
	e	Pendampingan Kegiatan Kunjungan	31 Maret 2023	13.894.700	12.689.000	1.205.700	Masih di RKUD	Ada harga negosiasi di e-catalog

NO.	URAIAN		REALISASI PENERIMAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS		REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS	SISA DANA BKK		KETERANGAN
			TGL PENERIMAAN	NILAI (Rp)		NILAI (Rp)	TGL PENYETORAN	
		Konseling Kesehatan						
	f.	Pendampingan Penyelenggaraan Pesantren Sehat	31 Maret 2023	35.383 621	31.783.200	3.600.421	Masih di RKUD	Tidak terserap maksimal pada belanja honorarium narasumber, dikarenakan pada saat evaluasi pendampingan hanya diisi oleh pemateri dari Dinkes sebagai penyelenggaraan bukan dari luar Dinkes
3	BANTUAN KEUANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR PERANGKAT DESA			1.645.600.000	1.542.900.000	102.700.000		
	a.	Honorarium Aparatur Pemerintah Desa/Bapemas	26 Juli 2023	1.645 600.000	1.542.900 000	102.700.000	Di RKUD	Ada sisa karena menyesuaikan dengan kebutuhan pada kegiatan
	b.	Belanja Bantuan Keuangan khusus bagi Aparat Pemerintah Desa		0,00	0,00	0,00		
4	INFRASTRUKTUR			64.000.000				
	a.	Jatim Puspa/ Bapemas					Masih di RKUD	Ada sisa karena menyesuaikan dengan kebutuhan pada kegiatan
			26 Mei 2023	64.000.000	47.259 500	16.740 500		
		JUMLAH		11.626.442.821,00	10.879.379.600,00	747.063.221,00		

6.4 Penyelesaian Kerugian Daerah

Guna optimalisasi pemulihan terhadap kerugian daerah, maka dibuatlah Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/172/1.12/2021 tentang Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, Dalam Keputusan Bupati dapat kita sampaikan bahwa dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap keuangan dan barang daerah serta penyelesaian kerugian daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang lebih tertib,obyektif dan akuntabel. Berdasarkan hasil monitor kerugian daerah tahun 2023, berikut mutasi atas saldo kerugian daerah pada Pemerintah Kabupaten Jember :

Daftar Mutasi Pemulihan Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023

NO	JENIS KERUGIAN	SALDO KERUGIAN DAERAH 2021	PENAMBAHAN 2022	PENGURANGAN 2023	SALDO KERUGIAN DAERAH 2022	KETERANGAN
		NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	
1	Kekurangan Volume	2.490.945.545,38	109.772.348,00	0,00	2.605.933.917,77	
2	Kelebihan Bayar Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kelebihan Bayar Jasa Konsultan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Kelebihan Bayar Bansos	2.463.200.000,00	65.000.000,00	1.638.000.000,00	890.200.000,00	
5	Denda Keterlambatan	455.014.224,44	0,00	0,00	4.945.932.117,82	
JUMLAH TOTAL		5.409.159.769,82	174.772.348,00	1.638.000.000,00	3.945.932.117,82	

Penjelasan atas tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Di tahun 2022 berdasarkan temuan BPK terdapat Saldo Kerugian Daerah dengan total kerugian senilai Rp5.409.159.769,82 yang terdiri dari Kekurangan Volume senilai Rp2.490.945.545,38, Kelebihan bayar Honorarium sudah lunas, Kelebihan Bayar Jasa Konsultan sudah lunas, Kelebihan Bayar Bansos senilai Rp2.463.200.000,00 dan Denda Keterlambatan senilai Rp455.014.224,44.Sampai dengan tahun 2022 saldo kerugian daerah senilai Rp5.409.159.769,82. Adapun Kerugian Daerah ditahun 2022 belum ada yang ditindaklanjuti dan terdapat penambahan nilai kerugian ditahun 2022 terdiri dari kekurangan volume dan kelebihan pembayaran bansos yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

DAFTAR PEMULIHAN KEUANGAN DAERAH ATAS KEKURANGAN VOLUME PEKERJAAN
TAHUN 2023

NO	OPD	NAMA PENYEDIA	NILAI KERUGIAN 2021	NILAI KERUGIAN 2022	SETOR KASDA	TANGGAL SETOR	SALDO
	Tahun 2022						
1	RSD BALUNG	CV. WJT	251,94	0,00	0,00		0,00
2	RSD BALUNG	CV. RRP	36,34	0,00	0,00		0,00
3	RSD DR SOEBANDI	CV. JC	44,11	0,00	0,00		0,00
		CV.ICS	304.430.146,09	0,00	0,00		0,00
4	DPU BINA MARGA	CV. SCP		11.257.334,00	0,00		0,00
		CV.AKJ	152.535.536,35	16.142.544,00	0,00		152.535.536,35
		CV. ARK	110.906.227,29	3.112.758,00	0,00		110.906.227,29
		CV. DBJ	119.329.750,41	8.086.894,00	0,00		119.329.750,41
		CV. IDP	199.746.353,45	6.131.664,00	0,00		0,00
		CV. AWR	260.117.004,30	14.484.492,00	0,00		0,00
		CV. TBA	232.249.879,31	14.202.936,00	0,00		232.249.879,31
		CV. EPT	196.699.600,00	4.747.530,00	0,00		196.699.600,00
		CV. EPM	95.933.963,65	12.055.890,00	0,00		95.933.963,65
		CV. ASL	144.528.700,00	7.093.328,00	0,00		144.528.700,00
		CV. RDJ	60 516 213,27	7.706.688,00	0,00		60.516.213,27
		CV. EPM	146.984.965,27	4.750.290,00	0,00		146.984.965,27
		CV. RJM	38.323.097,71	0,00	0,00		38.323.097,71
		CV. SWJ	14.579 673,80	0,00	0,00		14.579 673,80
		CV. RDJ	18.253.286,57	0,00	0,00		18 253 286,57
		CV. MTP	21.248.579,40	0,00	0,00		21.248 579,40
		CV. MKT	2.249.827,14	0,00	0,00		2 249 827,14
		CV. RDM	10.575.050,07	0,00	0,00		10 575 050,07
		CV. CTK	33.587.742,99	0,00	0,00		33 587.742,99
5	BAGIAN UMUM						
		CV. RJA	33.357.334,17	0,00	0,00		33.357 334,17
		CV. DP	2.750.980,00	0,00	0,00		2.750.980,00
		CV. PPP	7.212.950,87	0,00	0,00		7.212 950,87

NO	OPD	NAMA PENYEDIA	NILAI KERUGIAN 2021	NILAI KERUGIAN 2022	SETOR KASDA	TANGGAL SETOR	SALDO
		CV. AC	20.416.654,42	0,00	0,00		20.416.654,42
		CV. BC	19.165.317,43	0,00	0,00		19.165.317,43
		CV. HS	14.766.706,81	0,00	0,00		14.766.706,81
		CV. RPP	42.824.457,90	0,00	0,00		42.824.457,90
		CV. PGT	5.767.733,25	0,00	0,00		5.767.733,25
		CV. ELT	12.239.452,91	0,00	0,00		12.239.452,91
		CV. ACS	26.552.188,29	0,00	0,00		26.552.188,29
		CV. SA	8.710.038,76	0,00	0,00		8.710.038,76
		CV. AB	29.046.774,15	0,00	0,00		29.046.774,15
		CV. KM	15.339.505,64	0,00	0,00		15.339.505,64
		CV. AW	13.561.710,79	0,00	0,00		13.561.710,79
		CV. HK	15.876.066,35	0,00	0,00		15.876.066,35
		CV. BP	7.399.556,06	0,00	0,00		7.399.556,06
		CV. PS	1.687.852,90	0,00	0,00		1.687.852,90
		CV. PEC	21.625.000,00	0,00	0,00		21.625.000,00
JUMLAH TOTAL			2.490.945.545,38	109.772.348,00	0,00		2.600.717.893,38

Dari tabel diatas dapat kami jelaskan bahwa Daftar perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah dari hasil hasil pemeriksaan BPK RI berupa Kekurangan Volume di tahun 2021 dan ditahun 2022 terdapat penambahan nilai kerugian sebesar Rp109.772.348,00,sehingga total nilai kerugian tersebut sebesar Rp2.600.717.893,38 dari kasus tersebut ditahun 2023 belum ada penyetoran ke kasda.

DAFTAR MUTASI PENGEMBALIAN BANSOS
TAHUN 2023

NO	OPD	NILAI KERUGIAN 2021	NILAI KERUGIAN 2022	SETOR KASDA	TANGGAL SETOR	SALDO
	Tahun 2022					
1	DINAS PENDIDIKAN	890.200.000,00	0,00	0,00		890.200.000,00
JUMLAH TOTAL		890.200.000,00	0,00	0,00		890.000.000,00

Dari tabel tersebut dapat kami jelaskan bahwa Daftar perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah dari hasil pemeriksaan BPK RI berupa Pengembalian Bansos di tahun 2021 dan 2022, dengan nilai kerugian sebesar Rp890.200.000,00 dari kasus tersebut sampai tahun 2023

belum ada yang ditindaklanjuti Jadi sisa kerugian daerah yang belum disetorkan di Tahun 2023 sebesar Rp890.000.000,00

DAFTAR MUTASI PEMBAYARAN DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN TAHUN 2023

NO	OPD	NAMA PENYEDIA	NILAI DENDA	SETOR KASDA	TANGGAL SETOR	SALDO
	Tahun 2021					
1	DPU BINA MARGA	CV. BJT	10.052.786,89	0,00		10.052.786,89
		CV. KSD	27.966.018,43	0,00		27.966.018,43
		CV. EPT	83.751.241,98	0,00		83.751.241,98
		CV. CTK	205.271.658,85	0,00		205.271.658,85
		CV. RDM	26.701.986,72	0,00		26.701.986,72
		CV. UDT	3.739.838,75	0,00		3.739.838,75
		CV. MTP	7.172.273,26	0,00		7.172.273,26
		CV. RDJ	46.529.974,35	0,00		46.529.974,35
		CV. AGS	22.174.609,09	0,00		22.174.609,09
		CV. UDT	7.455.012,48	0,00		7.455.012,48
		CV. SWJ	14.198.823,64	0,00		14.198.823,64
JUMLAH TOTAL			455.014.224,44	0,00		455.014.224,44

Dari tabel diatas dapat kami jelaskan bahwa Daftar perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah dari hasil pemeriksaan BPK RI berupa Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan di tahun 2021, dengan nilai kerugian sebesar Rp455.014.224,44 dari kasus tersebut sampai tahun 2023 belum ada yang ditindaklanjuti Jadi sisa kerugian daerah yang belum disetorkan di Tahun 2023 sebesar Rp455.014.224,44.

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajemen, transparansi, kesesimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja.

Salah satu upaya konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip keterbukaan, profesional dan bertanggung jawab. Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang bersifat umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diperkuat untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Pemerintah Kabupaten Jember telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan melaksanakan berbagai pentahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan serta memperhatikan situasi, kondisi dan sumberdaya yang dimiliki.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah disajikan dengan berpedoman pada Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Peemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya, laporan keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023, masih terdapat banyak sekali tantangan seiring dengan kompleksitas transaksi keuangan yang semakin beragam serta perubahan regulasi dalam perencanaan dan penganggaran termasuk kebijakan penggunaan

aplikasi sistem informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Penerapan perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan aplikasi SIPD dari Kementerian Dalam Negeri membuat pelaksaaan input data anggaran masih banyak kesalahan pemilihan kode rekening belanja sehingga harus dilakukan koreksi untuk mereklasifikasi ke rekening yang benar untuk dapat menyajikannya pada laporan keuangan sesuai dengan klasifikasinya., hal ini merupakan tantangan tersendiri karena masih banyak terdapat kekurangan menu pelaporan dan kesalahan transaksi yang harus dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri sehingga respon cukup memakan waktu namun dengan berbekal semangat dan komitmen dari seluruh tingkatan manajemen pemerintahan, maka laporan keuangan ini dapat diselesaikan secara paripurna dengan tetap memperhatikan kualitas penyajiannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyampaian maksud dan penjelasan isi laporan keuangan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh- jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa secara umum pengelolaan keuangan tahun 2023 telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan, serta pengungkapan yang disajikan dapat memberikan gambaran utuh pengelolaan guna pengambilan keputusan. Pemerintah Kabupaten Jember telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyajian LKPD pada tahun 2023 dengan melaksanakan rekomitmen atas upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh pada tahun 2022.

Kami berharap dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023 berbasis akrual, pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran kami harapkan demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Jember di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan khususnya untuk Pemerintah Kabupaten Jember yang lebih baik.

BUPATI JEMBER

Ir. HENDY SISWANTO, ST., IPU., ASEAN Eng